



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kinerja
**Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2021**



BerAKHLAK  # bangga melayani bangsa



Halaman Kosong

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP. Laporan Kinerja menguraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih sepanjang tahun 2021.

Laporan disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2021 ini, meskipun sektor kelautan dan perikanan mengalami tantangan yang luar biasa di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi akibat pandemi Covid-19, namun demikian KKP tetap optimis dan berupaya untuk meraih target kinerja yang lebih baik melalui pelaksanaan program dan



SAKTI WAHYU TRENGGONO
Menteri Kelautan dan Perikanan

Nilai Kinerja Organisasi :
102,75

Kinerja Anggaran:
98,89%

kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi.

KKP juga terus berbenah diri dan melakukan berbagai terobosan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Ekonomi biru merupakan pendekatan holistik dan seimbang dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara serta menjaga kelestarian

ekologi dan keanekaragaman hayati.

Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan (Kementerian/Lembaga/Instansi/*Stakeholders* terkait hingga seluruh lapisan masyarakat) terhadap capaian kinerja KKP. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya KKP meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih maju, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tak lupa ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu menjaga integritas dan terus berkarya yang terbaik dalam membangun kelautan dan perikanan. Mari kita kawal pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa mendatang. Kita harus bisa rebound, saling bersinergi, dan Insya Allah dengan semangat *#KKP Accelerate#*, kita optimis dapat menorehkan prestasi yang lebih gemilang di tahun 2022.

Kami menyadari penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja ke depan. Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan peran strategis seluruh jajaran KKP semakin meningkat sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

*Kapal pinisi berlayar di lautan,
Dihadang badai sudahlah biasa.
Manfaatkan potensi kelautan dan perikanan,
Bangkitkan ekonomi kuatkan ketahanan bangsa.*

Jakarta, 16 Februari 2022
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	vi
Ringkasan.....	ix
Kilas Capaian Kinerja Utama KKP Tahun 2021	xxii

BAB 1 Pendahuluan.....	1
BAB 2 Perencanaan Kinerja	25
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi....	44
3.2 Kinerja Anggaran.....	221
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	247
3.4 Penghargaan dan Kinerja Lainnya.....	260
BAB 4 Rencana Tahun 2022.....	275
BAB v Penutup	279

Lampiran.....	289
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Pengesahan 22 Januari 2021)	290
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Pengesahan 20 April 2021).....	293
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Pengesahan 31 Agustus 2021)	296
Matrik Target Kinerja 2020-2024 Berdasarkan Renstra KKP 2020-2024	299

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2022

Inspektur Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dr. Muhammad Yusuf
NIP. 19620518 198803 1 001

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 2 Keragaan SDM KKP.....	10
Gambar 3 Keragaan Berdasarkan Pendidikan.....	11
Gambar 4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) berdasarkan Permen PanRB Nomor 53 Tahun 2014.....	22
Gambar 5. Peta Strategi.....	29
Gambar 6. Rakornas KKP Tahun 2021.....	33
Gambar 7. Tampilan Dashboard Aplikasi Kinerjaku Tahun 2021.....	45
Gambar 8. Tampilan Dashboard Aplikasi Kinerjaku Tahun 2020.....	45
Gambar 9. Perkembangan IKMKP Tahun 2015-2021.....	51
Gambar 10. Capaian IKMKP.....	51
Gambar 11. Sebaran IKMKP Tahun 2021 Menurut Propinsi.....	53
Gambar 12. Perkembangan IKMKP Tahun 2015-2021.....	55
Gambar 13. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2015-2021.....	56
Gambar 14. Grafik Perbandingan NTN Terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2021.....	58
Gambar 15. Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Nelayan Tahun 2021.....	58
Gambar 16. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Januari s.d Desember 2021.....	62
Gambar 17. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP Tahun 2021.....	66
Gambar 18. Target Dan Capaian NTPHP Tahun 2016-2021.....	67
Gambar 19. Capaian NTPG Tahun 2015-2021.....	70
Gambar 20. Nilai Pdb Perikanan Berdasarkan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2021 (Rp.miliar).....	73
Gambar 21. Volume Dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Jan s.d Desember 2021.....	77
Gambar 22. Logo dan Tagline <i>Brand</i> Udang Indonesia.....	85
Gambar 23. Audiensi Asosiasi/Ekspertir Komoditas Udang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	86
Gambar 24. Peta Sebaran Konsumsi Ikan Tahun 2021.....	90
Gambar 25. Realisasi Kegiatan Prioritas KKP dalam Mendukung Peningkatan Konsumsi Ikan Konsumsi Ikan Tahun 2021.....	93
Gambar 26. Penyaluran Kendaraan Pemasaran Roda Dua dan Roda Tiga Tahun 2021.....	93
Gambar 27. Grafik Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2019-2021 Terhadap Potensi Sumber Daya Ikan Per WPP.....	97
Gambar 28. Grafik Sebaran Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan Per WPP NRI Dan Laut Lepas Tahun 2021.....	98
Gambar 29. Grafik Sebaran Penempatan Observer Per WPP NRI	

dan Laut Lepas.....	99
Gambar 30. Sebaran Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021	107
Gambar 31. Sebaran Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	111
Gambar 32. Contoh Tema Pelatihan Bagi Pelaku Utama/Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	113
Gambar 33. Desa Mitra/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek KP ..	116
Gambar 34. Contoh Desa Inovasi Perikanan di Tulungagung	117
Gambar 35. Peta Wilayah Pengelolaan Wilayah Perikanan Negara WPP-NRI	118
Gambar 36. Struktur Organisasi LPP Di WPP NRI	120
Gambar 37. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Tahun 2021	131
Gambar 38. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Tahun 2021	131
Gambar 39. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Tahun 2021	132
Gambar 40. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2021.....	135
Gambar 41. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Triwulan Tahun 2021	136
Gambar 42. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Ikan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.....	138
Gambar 43. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021	139
Gambar 44. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Tahun 2021	141
Gambar 45. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Tahun Triwulanan 2021	141
Gambar 46. Produksi Perikanan Tahun 2015-2021	146
Gambar 47. Volume Produksi Perikanan Tahun 2021 Per Triwulan....	146
Gambar 48. Komposisi Volume Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2021	163
Gambar 49. Grafik Perkembangan Produksi Udang 2017-2021.....	166
Gambar 50. Grafik Perkembangan Produksi Kerapu 2017-2021.....	166
Gambar 51. Grafik Perkembangan Produksi Kakap 2017-2021	167
Gambar 52. Grafik Perkembangan Produksi Bandeng 2017-2021	169
Gambar 53. Grafik Perkembangan Produksi Patin 2017-2021	169
Gambar 54. Grafik Perkembangan Produksi Nila 2017-2021	171
Gambar 55. Grafik Perkembangan Produksi Lele 2017-2021	172
Gambar 56. Grafik Perkembangan Produksi Gurame 2017-2021	173
Gambar 57. Grafik Perkembangan Produksi Rumput Laut 2017-2021	174
Gambar 58. Sebaran Lokasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR).....	182

Gambar 59. Capaian Padat Karya Integrasi Pergaraman Tahun 2021	183
Gambar 60. Peresmian Washing Plant Di Rembang	185
Gambar 61. Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan.....	185
Gambar 62. Capaian Persentase Cakupan WPP NRI yang Dipantau dari Kegiatan Illegal Fishing (Cakupan Laut dan Udara)	188
Gambar 63. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2021	188
Gambar 64. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2021	189
Gambar 65. Frekuensi Pemantauan Pesawat Patroli per WPP	189
Gambar 66. Capaian Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	192
Gambar 67. Sebaran Kasus Tindak Pidana Perikanan dan Tindak Pidana Kelautan Tahun 2021	193
Gambar 68. Model Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Permen PAN 25/2020)	197
Gambar 69. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2016-2020.....	199
Gambar 70. Pembobotan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021	216
Gambar 71. Nilai IKPA KKP dan Unit Kerja Eselon I Tahun 2021	
Gambar 72 Penjelasan IKPA oleh Kementerian Keuangan	218
Gambar 73 Komposisi Anggaran KKP Menurut Belanja	227
Gambar 74 Komposisi Anggaran KKP Menurut Kewenangan	228
Gambar 75 Tren Persentase Realisasi APBN KKP 2015-2021.....	239
Gambar 76 Pemanfaatan Teknologi Dalam Aplikasi Persuratan dan Disposisi (E-Layar)	253
Gambar 77 Tampilan Dashboard Aplikasi Neraca Komoditas.....	255
Gambar 78 Tampilan Aplikasi Chat Pimpinan	256
Gambar 79 Tampilan Dashboard Aplikasi OSS.....	256
Gambar 80 . Website Pelatihan <i>Online</i> Bagi Aparatur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Http://Elearning.kkp.go.id/Course/Index.php).....	256
Gambar 81 . Ragam Pelatihan Bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan Secara Daring	259
Gambar 82 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dengan Predikat Nilai Sangat Baik (Nilai Indeks 4,33)	261
Gambar 83 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	262
Gambar 84 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2021 dengan Predikat Nilai A	264
Gambar 85 Penghargaan dalam Ajang Top Digital Award 2021	265
Gambar 86. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya	266
Gambar 78 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan.....	267
Gambar 88 Penghargaan Gatra Award Atas Kinerja.....	268
Gambar 89 Penghargaan Atas Kinerja Anggaran	269
Gambar 90 Tampilan Dashboard Jdih KKP.....	270
Gambar 91. Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non-Pangan Menerima Nominee HTCA Tahun 2021	272

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021.....	xii
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021	28
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Semula Menjadi Pasca Refocusing)	37
Tabel 4. Alokasi Anggaran KKP Tahun 2021 Berdasarkan DIPA Awal Per Program dan per Unit Kerja.....	39
Tabel 5. Capaian IKU KKP Tahun 2021.....	46
Tabel 6. Capaian IKMKP Tahun 2021.....	50
Tabel 7. Kategori Provinsi berdasarkan Nilai IKMKP Tahun 2021	52
Tabel 8. Capaian NTN Tahun 2021	56
Tabel 9. Capaian NTN Tahun 2021 di 34 Provinsi.....	59
Tabel 8. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2021	61
Tabel 9. Capaian NTN Tahun 2021 di 34 Provinsi.....	62
Tabel 12. Perkembangan NTPHP Tahun 2021.....	66
Tabel 13. Capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP).....	66
Tabel 14. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021.....	69
Tabel 14. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021.....	71
Tabel 16. Pertumbuhan PDB Perikanan Triwulanan Tahun 2020-2021.....	72
Tabel 17. Perbandingan Pertumbuhan PDB Perikanan dengan Pertumbuhan PDB Nasional dan Lapangan Usaha Lainnya.....	74
Tabel 18. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021	76
Tabel 19. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2021	78
Tabel 20. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2021	78
Tabel 19. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Asal Provinsi Tahun 2021	79
Tabel 18. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021	89
Tabel 23. Capaian Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2021	96
Tabel 24. Capaian Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) Tahun 2021	105
Tabel 25. Rincian Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) Tahun 2021	106
Tabel 26. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi)	109

Tabel 25. Sebaran Serapan Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) (%)	110
Tabel 28. Sebaran Jumlah Lulusan Pelatihan Pelaku Utama/Usaha yang Menerapkan Hasil Pelatihan dan atau Bekerja di DuDi Tahun 2021	112
Tabel 29. Capaian Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi/Diterapkan	115
Tabel 30. IKU WPP yang Menjadi Model Percontohan Penguatan Tata Kelola	119
Tabel 31. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	125
Tabel 32. Target Lokasi Awal dan Pasca Refocusing	127
Tabel 33. Capaian Iku Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2021	128
Tabel 34. Capaian IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	132
Tabel 34. Capaian IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	146
Tabel 34. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021	146
Tabel 35. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2021	147
Tabel 36. Lokasi Kegiatan Identifikasi/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021	159
Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021	164
Tabel 38. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021	164
Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021	177
Tabel 42. Rincian Produksi Garam Nasional (Juta Ton) Tahun 2021	178
Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021	187
Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021	191
Tabel 46. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2021	198
Tabel 46. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2021	199
Tabel 48. Capaian Penilaian Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020 oleh Kemenpan dan RB dan Menjadi Capaian Di Tahun 2021	200
Tabel 49. Capaian Hasil Antara Komponen Pengungkit Tahun 2020	201
Tabel 50. Perbandingan Hasil Survey Eksternal Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Tahun 2019 dan Tahun 2020	203
Tabel 51. Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan Roadmap RB KKP Tahun 2021	205
Tabel 52. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP Tahun 2021	217
Tabel 53. Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Tahun 2021 Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 113	
Tahun 2021	221
Tabel 54. <i>Refocusing</i> Tahap I KKP Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021	222
Tabel 55. Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasca <i>Refocusing</i> Anggaran Tahap I Per Unit Eselon I.....	222
Tabel 56. Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 per Belanja Pasca Penambahan Anggaran Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2/2021.....	223
Tabel 57. <i>Refocusing</i> Anggaran Tahap II Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021	224
Tabel 58. <i>Refocusing</i> Anggaran Tahap III Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021	225
Tabel 59. <i>Refocusing</i> Anggaran Tahap IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021	226
Tabel 60. Jumlah Satker KKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	228
Tabel 60. Jumlah Satker KKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	229
Tabel 60. Penambahan dan Pengurangan Alokasi Anggaran Pasca <i>Refocusing</i> IV	230
Tabel 63. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I.....	231
Tabel 64. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I dan Per Jenis Belanja.....	232
Tabel 64. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I dan Per Jenis Belanja.....	233
Tabel 66. Pagu dan Realisasi APBN KKP 2015-2021	238
Tabel 67. Peringkat Realisasi Anggaran Belanja KL Tahun 2021	239
Tabel 68. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran KKP	247
Tabel 69. Kerjasama/Kesepakatan Bersama dengan KL/LSM Dan Lembaga Terkait Lainnya dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas KKP	250
Tabel 70. Aplikasi yang Telah Dibangun dan Dikembangkan oleh KKP dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KKP	254

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020 sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020. Hasil evaluasi kinerja tahun 2021 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya dan untuk mencapai target akhir Renstra KKP 2020-2024. Kinerja yang belum tercapai perlu didorong upaya percepatan dan yang telah tercapai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga seluruh target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 dapat tercapai di akhir tahun 2024.

KINERJA ORGANISASI

1. Perhitungan Kinerja Organisasi KKP tahun 2021 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 2021, dan terdiri dari 9 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja.
2. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 sebesar 102,75 atau mengalami penambahan sebesar 0,61 poin apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 yaitu sebesar 102,14. Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan nilai dari pencapaian Sasaran Strategis di tahun 2021 yang terdiri dari

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Nilai Kinerja
SS.01	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	97,94
SS.02	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	85,70
SS.03	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	118,92
SS.04	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	100,94
SS.05	Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	120,00
SS.06	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	103,03
SS.07	Industrialisasi KP berdaya saing	94,43
SS.08	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	105,36
SS.09	Tatakelola pemerintahan yang baik	105,97

3. Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya *refocusing* anggaran sebanyak tiga kali diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja utama pada 4 indikator kinerja utama yaitu :
- a IKU6. Luas kawasan konservasi perairan semula 24,6 juta ton menjadi 24,1 juta ton. Adanya *refocusing* anggaran menyebabkan kegiatan identifikasi kawasan baru tidak dapat dilaksanakan. Anggaran tahun 2021 difokuskan untuk meningkatkan status kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar dari pencadangan menjadi penetapan.
 - b IKU 10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir target semula 22 menjadi 12 rencana zonasi karena adanya pengurangan anggaran untuk penyelesaian rencana zonasi.
 - c IKU 13. Produksi garam, target semula 3,1 juta ton menjadi 1,09 juta ton dengan penjelasan produksi garam masih bergantung pada cuaca. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak awal tahun bahwa di tahun 2021 musim hujan terjadi hingga akhir Juni, sehingga akan

mempengaruhi produksi garam. Selain itu adanya *refocusing* anggaran untuk kegiatan pendukung diantaranya integrasi lahan garam, pembangunan/rehabilitasi gudang garam. Hasil kajian dari Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP, yang telah melakukan prediksi perhitungan target Garam Nasional (PUGaR, Non PUGaR dan PT. Garam) menyampaikan bahwa target produksi garam 1,09 juta ton. Perhitungan prediksi produksi garam tersebut dengan kondisi bahwa bahwa produksi garam di Indonesia pada umumnya dikerjakan oleh rakyat secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Indonesia yang berada di kawasan tropis sekitar ekuator hanya dapat melakukan produksi garam pada musim kemarau, yaitu ketika curah hujan di Indonesia relatif kecil.

d IKU 14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* target semula target 60 persen menjadi

54,5 persen dengan penjelasan adanya pengurangan jumlah hari operasi kapal pengawas semula 122 hari menjadi 103 hari dan hari operasi speedboat pengawas semula 40 hari menjadi 20 hari.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- **Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;**
 - **Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan**
 - **Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.**
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat beberapa

indikator masih belum optimal capaiannya, namun beberapa indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi capaian 17 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

a. 12 IKU bernotifikasi hijau (dengan capaian $\geq 100\%$) terdiri dari :

- IKU 5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman realisasi 59,69 atau tercapai 120 persen terhadap target sebesar ≤ 67 .
- IKU 6. Luas kawasan konservasi perairan realisasi 28,40 juta hektar atau tercapai 117,84 persen terhadap target sebesar 24,10 juta ha.
- IKU 7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI realisasi 62,58 persen atau tercapai 100,94 persen terhadap target sebesar 62 persen.
- IKU 8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan realisasi 12 hasil riset atau tercapai 120 persen terhadap target sebesar 8 hasil riset.
- IKU 9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola realisasi 5 WPP atau tercapai 100 persen terhadap target sebesar 5.
- IKU 10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir realisasi 13 rencana zonasi atau tercapai 108,33 persen terhadap target sebesar 12.
- IKU 11. Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan realisasi 95,72 persen atau tercapai 100,76 persen terhadap target 95 persen.
- IKU 13. Produksi garam tercapai 1,09 juta ton atau tercapai 100 persen terhadap target 1,09 juta ton.
- IKU 14. Persentase cakupan WPPNRI

- yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* tercapai 57,37 persen atau tercapai 105,27 persen terhadap target 54,50 persen
- IKU 15. Persentase pelanggaran bidang kelautan dan perikanan realisasi 98,05 persen atau tercapai 105,43 persen terhadap target 93 persen.
 - IKU 16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP realisasi 78,27 kategori BB atau tercapai 108,71 persen terhadap nilai 72.
 - IKU 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP realisasi 91,87 (kategori baik) atau tercapai 103,22 persen terhadap nilai 89.
- b. 4 IKU bernotifikasi kuning (dengan capaian 70- <100%)
- IKU 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) realisasi sebesar 59,07 atau tercapai 97,94 % dari target 60,31.
 - IKU 3. Nilai ekspor hasil perikanan realisasi 5,72 USD miliar atau tercapai 94,55 persen dari target 6,05 USD Miliar.
 - IKU 4. Konsumsi ikan realisasi 55,37 kg/kapita/tahun atau tercapai 95,33 % dari target 58,08 kg/kap/thn dari target sebesar 58,08 kg/kapita/tahun.
 - IKU 12. Produksi perikanan realisasi 24,48 juta ton atau tercapai 88,86 persen dari target sebesar 27,55 juta ton.
- c. 1 IKU bernotifikasi merah (capaian <70%)
- IKU 2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto realisasi 5,45 persen dari target 8,11 persen atau tercapai 67,20 persen .

KINERJA ANGGARAN

1. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, KKP mengelola anggaran sebesar Rp4.773.318.827.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp4.720.494.242.700 atau mencapai 98,89 persen. Realisasi anggaran KKP tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,34 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.809.863.593.815 terhadap pagu anggaran sebesar Rp5.269.869.632.000 atau mencapai 91,27 persen.

- 2 Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 6 (enam) program pembangunan kelautan dan perikanan di 9 Unit Kerja Eselon I, 47 kegiatan dan tersebar di 392 satuan kerja (203 satker Dekonsentrasi, 150 satker Kantor Daerah/Unit Pelaksana Teknis, 11 satker Kantor Pusat, dan 34 satker Tugas Pembantuan).

EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA DAN UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN

1. Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 Akuntabilitas Kinerja terdapat 5 IKU yang belum optimal capaiannya di tahun 2021. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan kedepan untuk dapat

mencapai IKU dimaksud antara lain :

- a. IKU 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP antara lain melalui :

- Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk pengolah dan pemasar perikanan dan masyarakat pengawas serta pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah;
- Menumbuhkan lapangan usaha alternatif guna meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan;
- Melakukan upaya peningkatan dan stabilitas harga garam guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam;

- Meningkatkan angka konsumsi ikan guna mendorong permintaan produk perikanan dalam negeri;
- M e n d o r o n g pengendalian impor perikanan guna memenuhi kebutuhan industri perikanan, khususnya industri pengolahan, serta memperketat impor ikan konsumsi;
- Meningkatkan kinerja ekspor perikanan.

b. IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan

- meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya dan produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.
- penguatan rantai pasok hasil perikanan termasuk rantai dingin serta penguatan jaminan mutu keamanan

produk kelautan dan perikanan.

- pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, pelabuhan perikanan dan fasilitas pemasaran perikanan.
- p e n g u a t a n kelembagaan pelaku usaha termasuk p e m b e n t u k a n korporasi nelayan dan pembudidaya, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan dan pendampingan dan penyuluhan.
- m e n d o r o n g peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan kinerja ekspor produk perikanan indonesia

c. IKU 3. Nilai ekspor hasil perikanan antara lain melalui :

- koordinasi antar k e m e n t e r i a n (K e m e n t e r i a n P e r d a g a n g a n , Kementerian Luar Negeri), termasuk atase perdagangan dan Kedutaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan ekspor dan stakeholder serta asosiasi perikanan dalam rangka peningkatan kinerja ekspor produk perikanan.

- monitoring dan inspeksi pada unit pengolahan ikan Indonesia untuk memastikan implementasi protokol kesehatan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan di Unit Pengolahan Ikan telah sesuai guna menghindari adanya penolakan ekspor produk perikanan.
- pengaturan pergerakan kontainer untuk mengantisipasi permasalahan logistik dan kelangkaan container untuk ekspor produk perikanan.
- penyelesaian pembahasan protokol inspeksi produk perikanan dan mekanisme penambahan nomor registrasi untuk eksportir baru.
- melakukan upaya diplomasi untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika dan Rusia.
- pembinaan kepada unit pengolahan hasil perikanan dan melakukan promosi ke luar negeri untuk merebut pangsa pasar, melalui : 1) fasilitasi pembinaan mutu unit pengolahan ikan skala UMKM dan skala menengah besar, 2) diversifikasi produk bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk hasil KP skala mikro kecil, 3) pembangunan sentra pengolahan ikan, pemberian bantuan sarana pasca panen, peralatan pengolahan, chest freezer, pelaksanaan promosi luar negeri.

d. IKU 4. Konsumsi ikan antara lain melalui :

- mengkampanyekan pentingnya kandungan ikan bagi kesehatan kepada masyarakat

secara massif. Di tahun 2022, KKP telah merencanakan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) sebanyak 130 promosi termasuk kepada kelompok target percepatan penurunan *stunting*, yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif dan masyarakat rawan gizi lainnya.

- pengadaan peralatan sarana pengolahan, sarana pemasaran, perlengkapan pedagang serta pembangunan sentra kuliner;
- pembinaan diversifikasi produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- menyediakan produk olahan perikanan yang dijamin mutu dan keamanannya melalui Sertifikat Kelayakan Produk (SKP).
- menyediakan produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu

untuk dikonsumsi masyarakat.

e. IKU 12. Produksi perikanan antara lain melalui

- mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dari luar daerah yang masuk ke pelabuhan perikanan,
- peningkatan sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat,
- optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan
- fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan, dan pembudidaya ikan
- pengembangan sistem produksi budidaya melalui pengembangan input teknologi sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan;
- meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan

Yang Baik (CBIB);
p e n g e m b a n g a n
percontohan usaha
perikanan budidaya
sebagai upaya dalam
mensosialisasikan
model pengelolaan
b u d i d a y a
berkelanjutan;

- Pengawasan terhadap
pendataan produksi
pasca produksi
s e b a g a i m a n a
diamatkan PP 85/2021.

2. Untuk meningkatkan
kualitas perencanaan dan
penganggaran, KKP akan terus
melakukan perbaikan dalam
perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan kegiatan
melalui:

- a. Proses penyusunan
anggaran memperhatikan
urutan prioritas kebutuhan
anggaran operasional
yang sifatnya mendasar,
program dan kegiatan yang
mendukung pencapaian
prioritas pembangunan
nasional sebagaimana
tertuang dalam RPJMN
2020-2024 dan Renstra
KKP 2020-2024.
- b. Alokasi anggaran juga
difokuskan untuk tiga
prioritas arah kebijakan

pembangunan kelautan
dan perikanan tahun 2021-
2024 yaitu : Penerapan
kebijakan penangkapan
terukur berbasis kuota
di setiap Wilayah
Pengelolaan Perikanan
untuk keberlanjutan
ekologi, peningkatan
PNBP dan kesejahteraan
nelayan, Pengembangan
perikanan budidaya
yang berorientasi ekspor
dengan komoditas
unggulan antara lain
udang, lobster, kepiting,
dan rumput laut dan
Pembangunan kampung
perikanan budidaya
sesuai dengan kearifan
lokal untuk pengentasan
kemiskinan sekaligus
menjaga kepunahan
komoditas yang bernilai
ekonomis tinggi.

Selain itu KKP juga akan
memperkuat peningkatan
daya saing hasil kelautan dan
perikanan yang didukung dengan
penjaminan kualitas mutu untuk
peningkatan konsumsi dalam
negeri dan ekspor, pengelolaan
ruang laut, perairan umum,
pesisir dan pulau - pulau kecil
sebagai landasan pemanfaatan
dan pengusahaan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang

berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan, penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

3. Kedepan untuk meningkatkan kinerja anggaran, beberapa upaya perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan antara lain :

a. Mempercepat pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun.

b. Identifikasi dan inventarisasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan pelaksanaannya dan mudah dilaksanakan berdasarkan analisa manajemen resiko dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas anggaran serta memenuhi kaidah peraturan penggunaan anggaran yang akuntabel, efisien dan efektif yang telah ditetapkan.

c. membuat *timeline*

pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sehingga pelaksanaannya terjadwal dengan baik dan jika terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan jadwal dapat segera dilakukan percepatan dan penyesuaian serta upaya percepatan;

d. meningkatkan peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang berisiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya;

e. Melakukan monev berkala secara berjenjang dari level satker, Unit Eselon I dan level Kementerian terkait dengan pelaksanaan anggaran.

4. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sejak awal tahun 2020 menghadapi tantangan salah satunya dengan adanya pandemi COVID-19 dan berlanjut sampai dengan 2021. Dampak pandemi masih dirasakan terutama pada saat diberlakukannya pembatasan pergerakan. Dampak yang dirasakan

Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi pertumbuhan PDB Perikanan terkonsentrasi di periode awal tahun 2021.

Sementara adanya pembatasan ruang gerak juga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja seperti distribusi bantuan pemerintah (benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya). Namun demikian seluruh jajaran KKP terus

berupaya untuk mengejar pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga ketercapaian output masih dapat terlaksana dan dikejar sampai akhir tahun 2021.

Adanya keterbatasan ruang fiskal, yaitu *refocusing* anggaran secara nasional di tahun 2021 untuk menangani dampak pandemi covid, mengharuskan dilakukannya penyesuaian target output yang telah direncanakan di awal tahun 2021. Keterbatasan ruang fiskal tersebut tentu saja mempengaruhi dan belum sebanding dengan cakupan target masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia yang menjadi stakeholder KKP. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi seluruh jajaran KKP untuk tetap optimis mewujudkan visi dan misi KKP. Upaya terobosan terus dilakukan antara lain melalui integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/LSM serta stakeholder.

5. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja di tahun 2021 akan menjadi

fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh KKP serta dukungan dari stakeholder terkait.

6. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, KKP telah merancang kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang akan diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya. Pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas KKP tahun 2022 di daerah diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional.

Untuk itu, meskipun hampir dua tahun pandemi COVID-19 menerpa, namun tidak membuat jajaran KKP surut langkah, bah-

kan terus melakukan terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Pandemi justru menguji ketangguhan, bahkan mendorong seluruh jajaran KKP untuk melompat cepat melakukan transformasi. Dengan semangat *#KKP Accelerate#*, seluruh jajaran KKP optimis dapat menorehkan prestasi yang lebih di tahun 2022.

KILAS CAPAIAN KINERJA UTAMA KKP TAHUN 2021

Target
60,31



Realisasi
59,07

IKU 1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (Indeks)

Target
24,1



Realisasi
28,4

IKU 6 Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)

Target
8,11



Realisasi
5,45

IKU 2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)

Target
62



Realisasi
62,58

IKU 7 Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)

Target
6,05



Realisasi
5,72

IKU 3 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)

Target
8



Realisasi
12

IKU 8 Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (Hasil Riset)

Target
58,08



Realisasi
55,37

IKU 4 Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)

Target
5



Realisasi
5

IKU 9 WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)

Target
≤67



Realisasi
59,69

IKU 5 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)

Target
12



Realisasi
13

IKU 10 Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)



IKU 11 Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)



IKU 14 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* (%)



IKU 12 Produksi perikanan (Juta Ton)



IKU 15 Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)



IKU 13 Produksi garam (Juta Ton)



IKU 16 Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (Nilai)



IKU 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (Nilai)

Keterangan :

IKU 3. Nilai Ekspor (angka sementara)

IKU 4. Konsumsi ikan (angka sementara)

IKU 12. Produksi Perikanan (angka sementara)

“

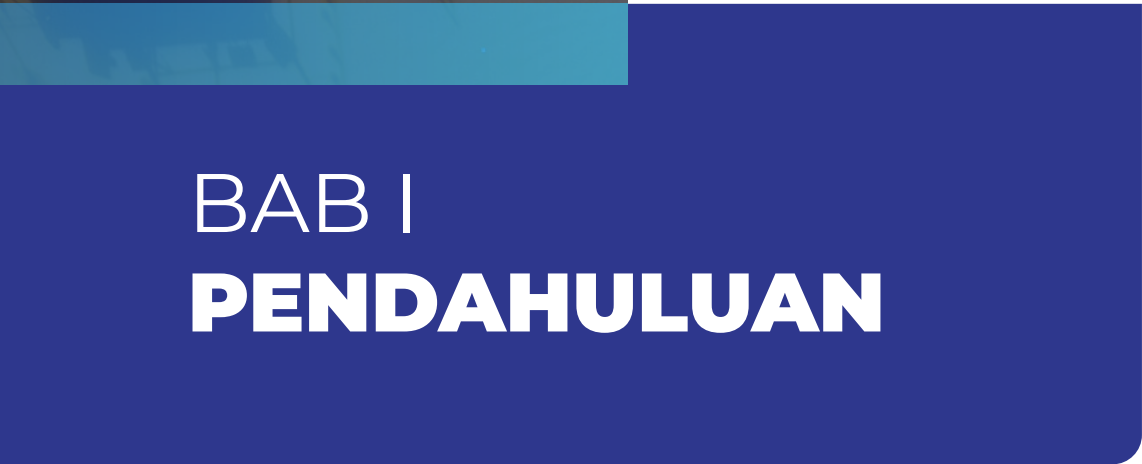
Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

”



BAB I

PENDAHULUAN



Pendahuluan

Latar Belakang

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia

2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan

- pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
 7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Pada tahun 2021, KKP telah menetapkan 17 indikator kinerja pembangunan yang terbagi dalam 9 Sasaran Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itu hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara

berkelanjutan dapat terwujud.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja KKP tahun 2021 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran KKP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja KKP tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

Tugas dan Fungsi KKP

Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
7. pelaksanaan dukungan yang

bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sumber Daya Manusia KKP

Sebagaimana tertuang dalam Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

7. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

10. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

11. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.

12. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut

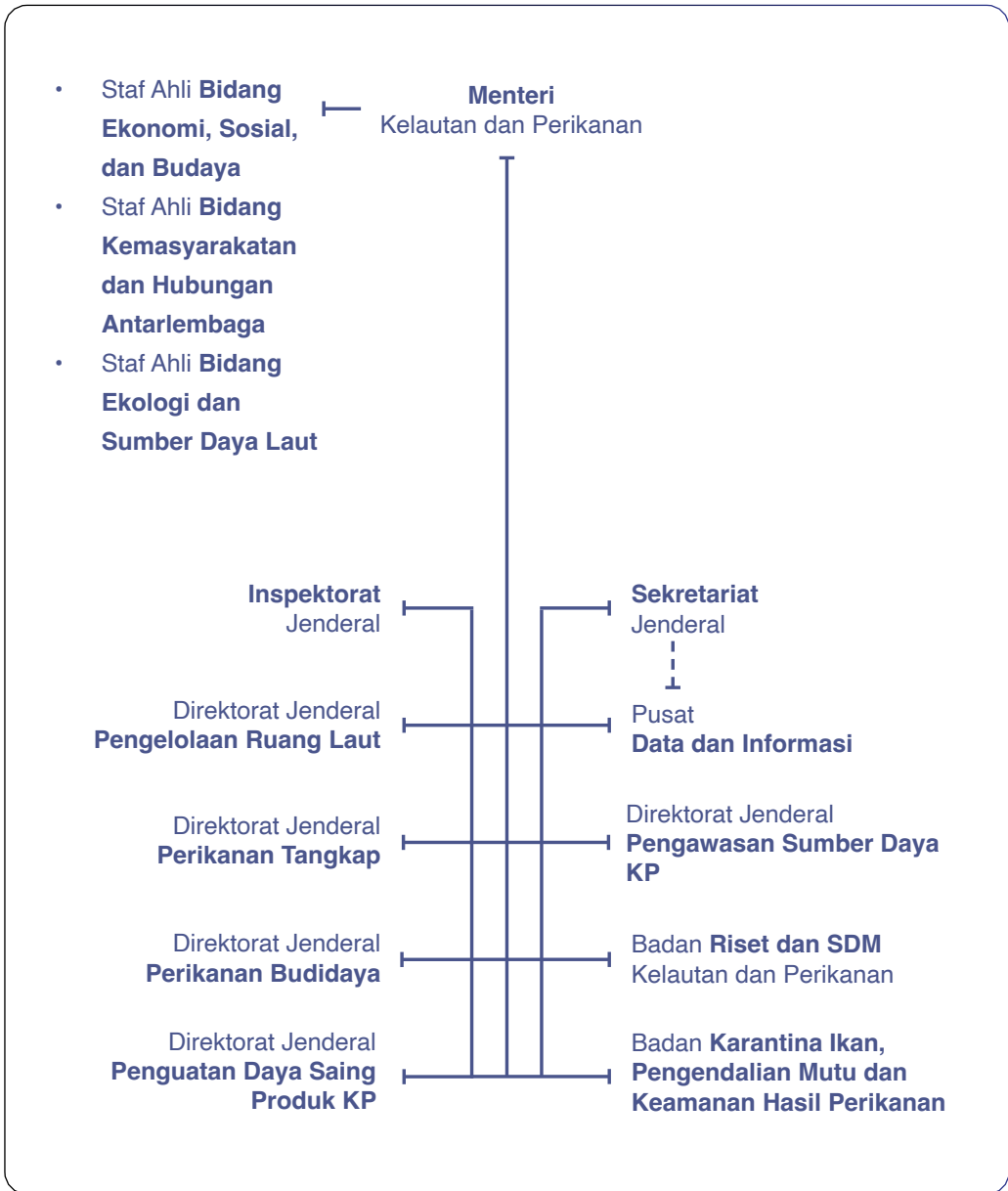
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

13. Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin), berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat, yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di Bidang Kelautan dan Perikanan.

14. Unit Pelaksana Teknis (UPT), melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan KKP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada tahun 2020, tepatnya 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di lingkup KKP menjadi jabatan fungsional, sehingga struktur organisasi menjadi sebagai berikut:

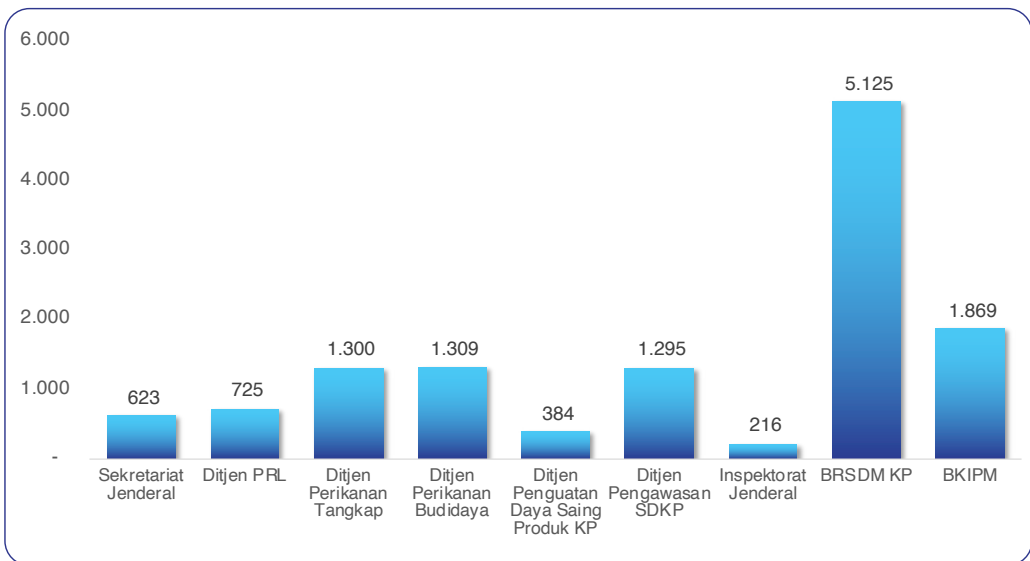


Gambar 1. Struktur Organisasi

Jumlah Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jumlah pegawai KKP (Pusat dan UPT) tahun 2021 adalah 12.846 orang, yang terdiri dari, yang terdiri dari laki-laki 8.513 orang atau 66,27 persen dan perempuan 4.333 orang atau 33,73 persen. Pegawai KKP tersebut tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Setjen 623 orang terdiri dari pria 413 orang dan perempuan 210 orang (4,85 persen), Itjen 214 orang (1,65 persen), Ditjen Perikanan Tangkap 1.300 orang terdiri dari pria 920 orang dan wanita 380 orang (10,12 persen), Ditjen Perikanan Budidaya 1.309 orang (10,19 persen) terdiri dari pria

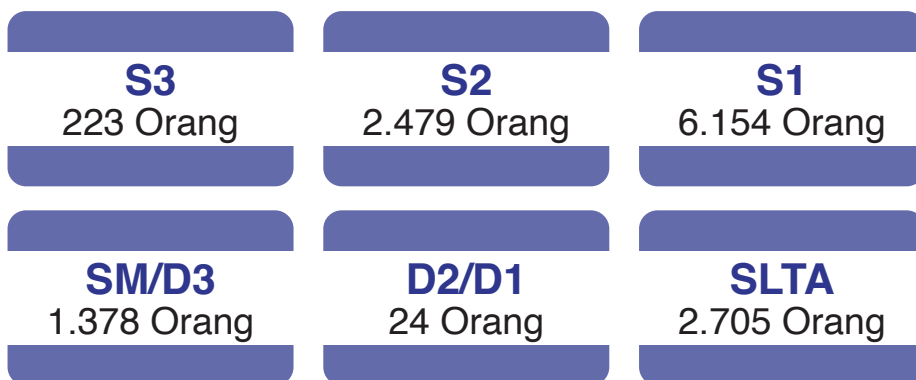
916 orang dan wanita 393 orang, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 725 orang terdiri dari pria 456 orang dan wanita 269 orang (5,64 persen), Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP 384 orang (2,99 persen) terdiri dari pria 207 orang dan wanita 177 orang, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1.295 orang (10,08 persen) terdiri dari 1.080 orang pria dan 215 orang wanita, BRSDM KP 5.125 orang (39,90 persen) terdiri dari pria sebanyak 3.252 orang dan wanita 1.873 orang, dan BKIPM 1.869 orang (14,55 persen) terdiri dari pria 1.136 orang dan wanita 733 orang. Keragaan SDM KKP tahun 2021 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut



Gambar 2. Keragaan SDM KKP

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM KKP adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 223 orang (1,72 persen); S2 sebanyak 2.479 orang (19,12 persen); S1/D4 sebanyak 6154 orang (47,47 persen); SM/D3 sebanyak 1.378 orang (10,63

persen); D2/D1 sebanyak 24 org (0,19 persen); di SLTA dan di bawah SLTA sebanyak 2.705 (20,87 persen) Keragaan SDM KKP menurut pendidikan dan unit kerja Eselon I seperti pada diagram berikut :



Gambar 3. Keragaan Berdasarkan Pendidikan

Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018). Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk

bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuffah). Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7%

yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri, 2019). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada tahun 2018 (BPS, 2019). Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung impor antara lain adalah tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing lumbricus. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan

baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding et al. 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke et al. 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik. Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 site (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 site (34,3%), kategori baik sebanyak 245 site (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 site (6,56%). Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan mangrove yang luas. Berdasarkan

penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan mangrove berdasarkan data One Map Mangrove (2018) seluas 3,5 juta ha. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum dikelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya

pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan kelautan dan perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah: a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional; b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan



dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi; c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan; d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha; e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan; f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya

ikan, dan lain lain; serta g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain: pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI; b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL); c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; d. masih terjadinya praktek *IUU fishing* dan *destructive fishing*; e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan f. sinergi *Stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain: a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi; b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan; c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan

serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum bankable, dan keterbatasan akses permodalan. Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan,

penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, supplier, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak

(*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP. Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Terkait dengan permasalahan



garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas

maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung. Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah



Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai,

siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta merusak sarana dan prasarana. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu: 1. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja; 2. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah

daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *Stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan; 4. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota; 5. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi; 6. kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran

strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan 7. sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, FAO Compliance 1993, Port State Measures Agreement 2009, Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan, dan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations*

(RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *International Coral Reef Initiative (ICRI)* dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*. Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya. Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain: 1. sumber daya ikan, habitat, dan produksi; 2. pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI; 3. komunikasi dengan *Stakeholders* kelautan dan perikanan; 4. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan; 5. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan; 6. permintaan hasil perikanan

dalam negeri; dan 7. pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan. Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain: 1. ekonomi nasional; 2. sosial budaya nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain: 1. permintaan hasil perikanan dunia; 2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia; 3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs); 4. kependudukan dunia. Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain: 1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; 2. praktik *IUU fishing*; 3. ketentuan World Trade Organisation (WTO); dan 4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

Dimulai sejak tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun 2021, pembangunan kelautan dan perikanan mengalami dinamika dengan adanya Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Terjadinya

pendemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19) berdampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Untuk itu, perencanaan pembangunan kedepan perlu diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi COVID-19 terus mendapatkan penekanan. Di

tahun 2021, beberapa kegiatan di KKP telah mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sub kluster ketahanan pangan dan padat karya.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

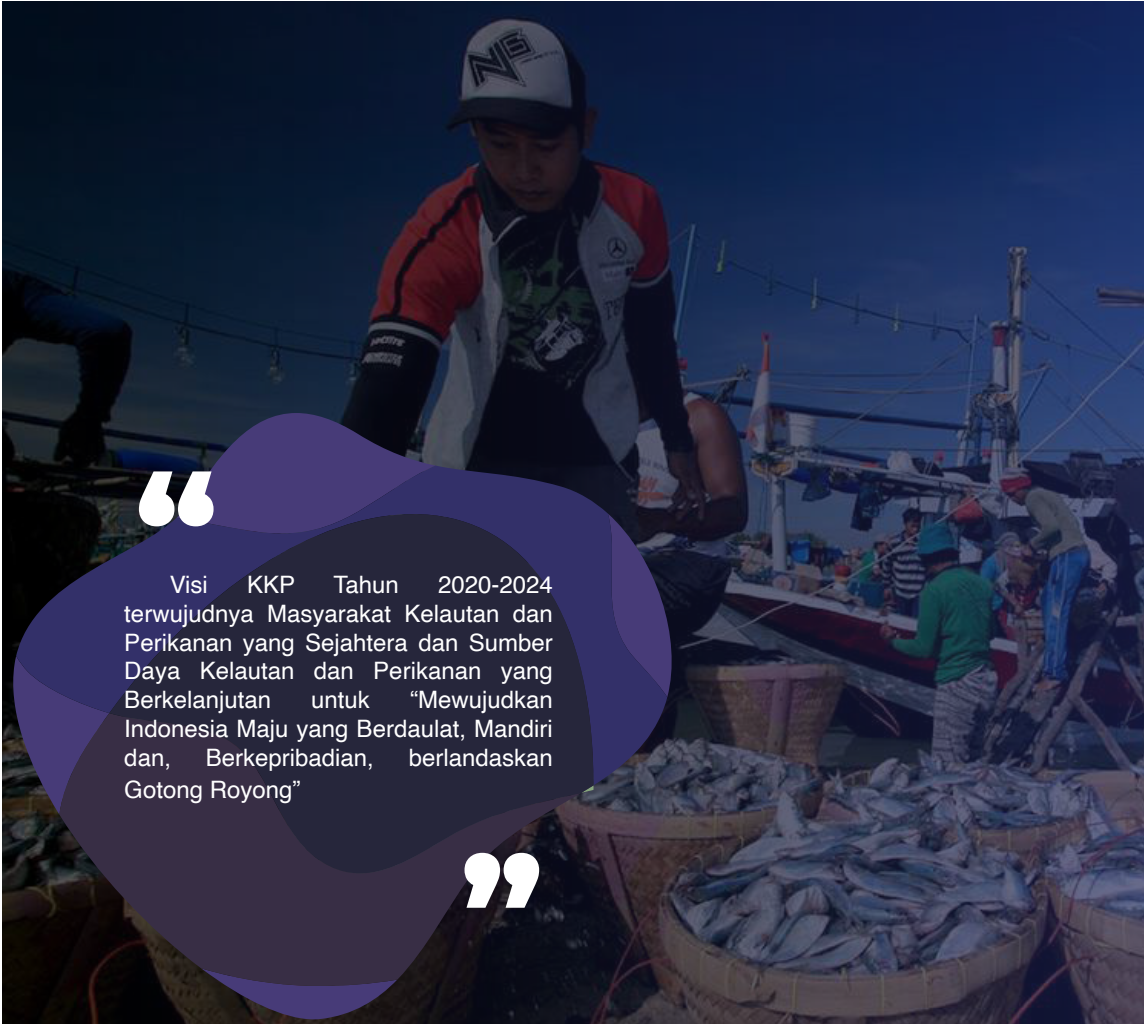
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja KKP Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:



Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LJK) berdasarkan Permen PanRB Nomor 53 Tahun 2014



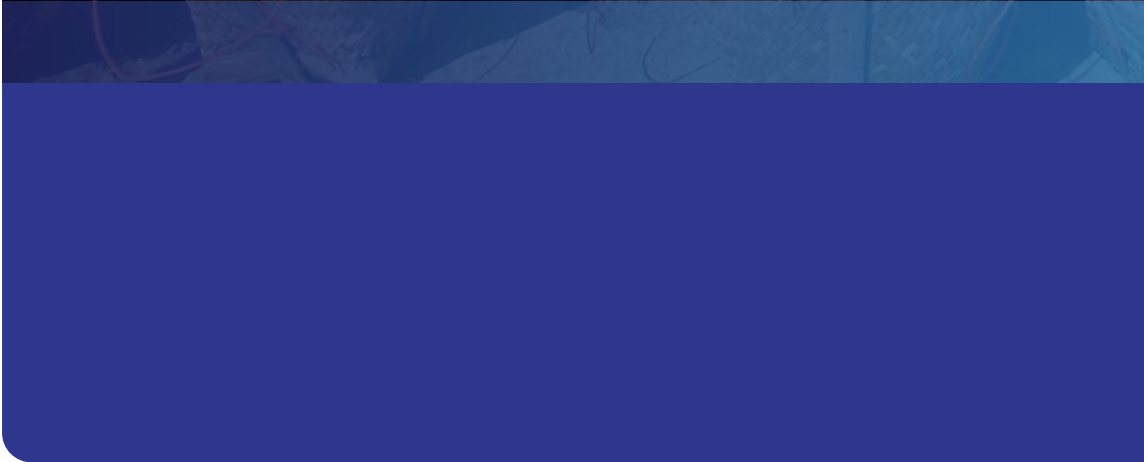
Halaman Kosong



“

Visi KKP Tahun 2020-2024 terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

”





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

RENCANA STRATEGIS KKP 2020-2024

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.



Tujuan

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM Kelautan dan Perikanan
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional , dengan tujuan :
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
 - c. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut

- dan pulau-pulau kecil/
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP. Untuk mencapai 9 tujuan tersebut, telah ditetapkan 9 sasaran strategis yang akan dituju dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2	Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3	Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4	Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM Kelautan dan Perikanan	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5	Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
6	Optimalnya pengelolaan ruang laut	Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
7	Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
9	meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP	Tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/*

impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan

perikanan meningkat
 SS-2 Ekonomi sektor KP meningkat
 SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
 SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
 SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
 SS-6 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
 SS-7 Industrialisasi KP berdaya saing

SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif
 SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam penyusunannya KKP menggunakan empat perspektif yaitu *Stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan Masyarakat KP meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor KP meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 2) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9 % pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024.
- 3) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024.
- 4) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/thn pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/thn pada tahun 2024

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan

perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 5) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024.
- 6) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 7) Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024
- 8) Kelompok pelaku utama/ usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

9) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola SDKP bertanggung jawab”, dengan Indikator Kinerja:

10) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;

11) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana zonasi tahun 2020-2024)

12) Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi KP berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

13) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun

2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024.

14) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.

15) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024

16) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 kawasan pada tahun 2024

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif”, dengan Indikator Kinerja:

17) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54 persen pada tahun 2020 menjadi 75 persen pada tahun 2024;

18) Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2024;

19) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah

Perbatasan dari 77 persen pada tahun 2020 menjadi 82 persen pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan *outcome* KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 20) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024;
- 21) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

RENCANA KERJA TAHUN 2021

Pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2021 masih dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian juga masih mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami



peningkatan. Hal itu tentu saja mempengaruhi juga laju pertumbuhan PDB Perikanan. KKP sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kebijakan, inovasi serta pemberian stimulus dalam bentuk bantuan pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi serta kemudahan perizinan dan investasi di bidang kelautan dan perikanan.

Besarnya skala dan cakupan pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan mutlak diperlukan ditengah keterbatasan



Gambar 6. Rakornas KKP Tahun 2021 Dengan Semangat #KKPRebound#

anggaran. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, antar KL serta antar unit kerja eselon I dilakukan melalui sinkronisasi dalam berbagai rapat koordinasi dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan diantaranya melalui Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 5-6 April 2021 untuk memantapkan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 yang dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan dan dihadiri oleh seluruh eselon I, II beserta jajarannya serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan KL terkait lainnya.

Selanjutnya RAKORNAS tersebut dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis di masing-masing unit kerja eselon I untuk memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon I agar mencapai target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan. Di samping itu, pada tahun 2021 juga dilakukan integrasi, sinkronisasi dan Kerjasama berbagai sumber daya pembangunan antara lain dengan KL terkait/Pemerintah Daerah/dan Non Lembaga lainnya (Asosiasi, Perguruan Tinggi, BUMN) yang dituangkan dalam bentuk Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Hal ini dimaksudkan

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 121 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Rencana Kerja Tahun 2021 tersebut disusun melalui serangkaian proses perencanaan bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan KKP melalui bilateral meeting, serta *trilateral meeting* yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen penganggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

PERJANJIAN DAN PELAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja KKP merupakan rangkaian pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pelaporan kinerja tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang dimuat dalam Renstra KKP Tahun 2020-2024 Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2021 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2021. Selama tahun 2021, KKP telah melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja sebagai dampak adanya *refocusing* anggaran yang terjadi di tahun 2021, penyesuaian Perjanjian Kinerja dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Awal disahkan pada 22 Januari 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.652.139.393.000 terdiri dari 9 SS dan 17 IKU.
2. Perjanjian Kinerja dengan adanya *refocusing* anggaran disahkan pada 20 April 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.537.811.697.000 terdiri dari 9 SS dan 17 IKU.
3. Perjanjian Kinerja dengan adanya *refocusing* anggaran disahkan pada 31 Agustus 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.747.462.170.000. Pada Perjanjian Kinerja ketiga ini terdapat penyesuaian target pada 4 indikator kinerja utama yaitu :
 - a. Luas kawasan konservasi perairan semula target 24,6 juta ton menjadi 24,1 juta ton dengan penjelasan adanya *refocusing* anggaran menyebabkan kegiatan identifikasi kawasan konservasi baru tidak dapat dilaksanakan. Anggaran tahun 2021 yang tersedia dimanfaatkan untuk meningkatkan status kawasan konservasi seluas 1,6 juta hektar dari pencadangan menjadi penetapan.
 - b. Produksi garam semula target 3,1 menjadi 1,09 juta ton dengan penjelasan adanya *refocusing* anggaran untuk kegiatan

pendukung diantaranya integrasi lahan garam, pembangunan/rehabilitasi Gudang garam serta hasil kajian dari Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP yang telah melakukan kajian untuk memprediksi produksi Garam Nasional (PUGaR, Non PUGaR dan PT. Garam) tahun 2021. Hasil kajian tersebut menghasilkan prediksi produksi garam di tahun 2021 adalah sebesar 1,09 juta ton, dengan asumsi bahwa produksi garam di Indonesia pada umumnya dikerjakan oleh rakyat secara tradisional dan sangat bergantung pada kondisi iklim-cuaca.

- c. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* semula target 60 persen menjadi 54,5 persen dengan penjelasan adanya pengurangan jumlah hari operasi kapal pengawas semula 122 hari menjadi 103 hari dan hari operasi speedboat pengawas semula 40 hari menjadi 20 hari sebagaimana Nota Dinas

Sesditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 27692/PSDKP.1/RC.710/VIII/2021.

- d. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir semula 22 rencana zonasi menjadi 12 rencana zonasi, dengan penjelasan anggaran kegiatan mengalami *refocusing* sehingga target dokumen final rencana zonasi perlu disesuaikan dengan rincian sebagai berikut :

- Dokumen final rencana zonasi Kawasan Antar Wilayah (KAW) semula 4 kawasan menjadi 2 rencana zonasi kawasan.
- Dokumen final rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) semula 5 kawasan menjadi 2 rencana zonasi kawasan.
- Dokumen final rencana zonasi Kawasan Stratgeis Nasional Tertentu (KSNT) semula 13 pulau menjadi 8 rencana

zonasi pulau.

Untuk pelaporan kinerja tahun 2021, pengukuran dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan penyesuaian

pasca *refocusing* anggaran dan telah disahkan pada 31 Agustus 2021 yang terdiri dari 9 SS dan 17 IKU dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Semula Menjadi Pasca *Refocusing*)

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	PK Awal (22 Jan 2021)	PK Revisi (20 April 2021)	PK Revisi (31 Agustus 2021)
SS.01 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	indeks	Maximize	60,31	60,31	60,31
SS.02 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat						
2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	%	Maximize	8,11	8,11	8,11
3.	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	Maximize	6,05	6,05	6,05
4.	Konsumsi ikan	Kg/kap/thn	Maximize	58,08	58,08	58,08
SS.03 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan						
5.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	Minimize	≤67	≤67	≤67
6.	Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	Maximize	24,6	24,6	24,1
SS.04 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat						
7.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	Maximize	62	62	62
SS.05 Hasil riset dan inovasi termanfaatkan						
8.	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	Hasil Riset	Maximize	8	8	8

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	PK Awal (22 Jan 2021)	PK Revisi (20 April 2021)	PK Revisi (31 Agustus 2021)
SS.06 Tatakelola SDKP bertanggung jawab						
9.	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	WPP	Maximize	5	5	5
10.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Rencana Zonasi	Maximize	22	22	12
11.	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	95	95	95
SS.07 Industrialisasi KP berdaya saing						
12.	Produksi perikanan	juta ton	Maximize	27,55	27,55	27,55
13.	Produksi garam	juta ton	Maximize	3,1	3,1	1,09
SS.08 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif						
14.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	%	Maximize	60	60	54,5
15.	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	93	93	93
SS.09 Tatakelola pemerintahan yang baik						
16.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	Maximize	72	72	72
17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	Maximize	89	89	89

Sumber. Perjanjian Kinerja Revisi

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja, alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Awal KKP Nomor SP DIPA-032/2021 yang disahkan tanggal 23 November 2020

sebesar Rp6.652.139.393.000 (Tabel 4) dan mencakup 6 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan

- Perikanan dan Kelautan
2. Program Dukungan Manajemen
 3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 4. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 6. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pelaksanaan 6 Program tersebut merupakan hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganaggaran (RSPP) yang mulai dilakukan di tahun 2021. Sebelumnya program pembangunan di KKP terdiri dari 9 Program Pembangunan

menyesuaikan dengan jumlah unit kerja eselon I. Namun dengan adanya RSPP, maka KKP telah melakukan pendekatan program secara lintas eselon I berdasarkan karakteristik yang telah diatur dalam RSPP.

Alokasi anggaran tersebut tersebar di 47 Kegiatan, 398 Satker (Pusat, Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan) diawal DIPA dan selanjutnya menjadi 392 satker (203 Dekosentrasi 150 Satker kantor Daerah/UPT dan 11 Kantor Pusat) pasca *refocusing* anggaran. Selanjutnya pasca *refocusing*, anggaran KKP mengalami perubahan yang dijelaskan secara rinci dalam Bab. Kinerja Anggaran.

Tabel 4. Alokasi Anggaran KKP Tahun 2021 Berdasarkan DIPA Awal Per Program dan per Unit Kerja

No	Unit Kerja	Program	Anggaran Per Program (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Sekretariat Jenderal			497.646.140.000
		Program Dukungan Manajemen	497.646.140.000	
2.	Inspektorat Jenderal			86.767.955.000
		Program Dukungan Manajemen	86.767.955.000	
3.	Ditjen Perikanan Tangkap			763.577.487.000
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	351.891.574.000	

No	Unit Kerja	Program	Anggaran Per Program (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		Program Dukungan Manajemen	411.685.913.000	
4.	Ditjen Perikanan Budidaya			1.212.740.404.000
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	867.539.558.000	
		Program Dukungan Manajemen	345.200.840.000	
5.	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			1.078.052.922.000
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	796.765.615.000	
		Program Dukungan Manajemen	281.287.307.000	
6.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			431.704.028.000
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	190.816.475.000	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	126.373.000.000	
		Program Dukungan Manajemen	114.514.553.000	
7.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut			455.357.175.000
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	84.104.450.000	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	188.747.217.000	
		Program Dukungan Manajemen	182.505.508.000	
8.	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.522.573.626.000
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	365.438.717.000	

No	Unit Kerja	Program	Anggaran Per Program (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	90.944.375.000	
		Program Dukungan Manajemen	1.066.190.534.000	
9.	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			603.719.656.000
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	53.310.000.000	
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	92.313.700.000	
		Program Dukungan Manajemen	458.095.956.000	
JUMLAH			6.652.139.393.000	6.652.139.393.000

Sumber. Aplikasi SatuDJA, Kementerian Keuangan

“

Skor kinerja tahun 2020 adalah sebesar 102,14, sedangkan skor kinerja di tahun 2021 sebesar 102,75 atau mengalami penambahan sebesar 0,61 poin. Hal ini menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

”



BAB III
**AKUNTABILITAS
KINERJA**

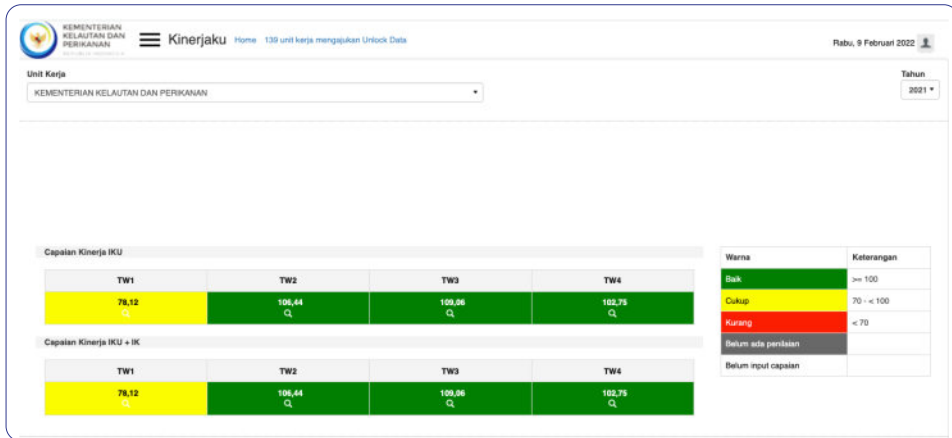
Akuntabilitas Kinerja

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

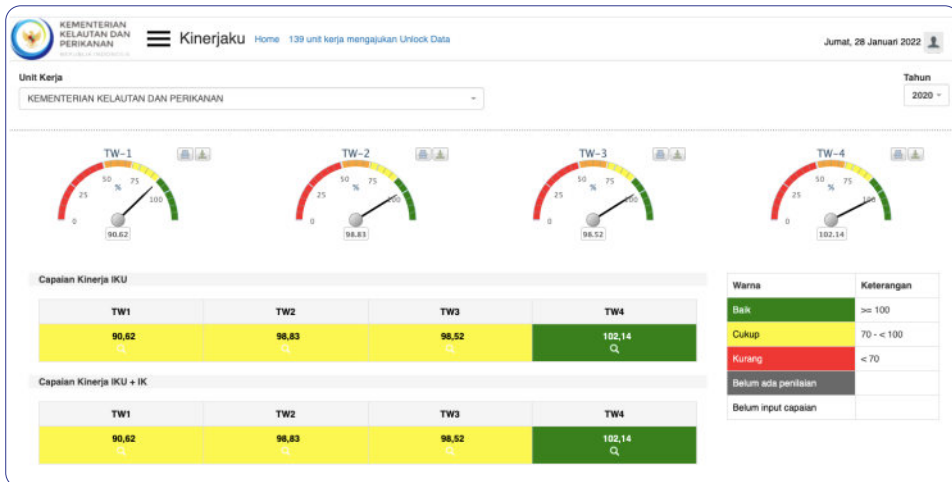
Dalam memantau capaian kinerja organisasi, KKP melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database *online* www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 108/KEPMEN-KP/SJ/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan KKP Tahun 2021 dan Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/SJ Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Perhitungan dilakukan terhadap capaian indikator kinerja

dari setiap sasaran strategis sehingga akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja dan Keputusan Menteri KP Nomor

15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2021, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, dengan tampilan dashboard capaian KKP Tahun 2021 seperti pada gambar berikut:



Gambar 7. Tampilan Dashboard Aplikasi Kinerjaku Tahun 2021



Gambar 8. Tampilan Dashboard Aplikasi Kinerjaku Tahun 2020

Skor kinerja tahun 2020 adalah sebesar 102,14, sedangkan skor kinerja di tahun 2021 sebesar 102,75 atau mengalami penambahan sebesar

0,61 poin. Hal ini menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5. Capaian IKU KKP Tahun 2021
Skor Kinerja Tahun 2021 : 102,75

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	PK Awal (22 Jan 2021)	PK Revisi (20 April 2021)	PK Revisi (31 Agustus 2021)	Realisasi	% Realisasi
SS.01	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat							97,94
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	indeks	Maximize	60,31	60,31	60,31	59,07	97,94
SS.02	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat							85,70
2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	%	Maximize	8,11	8,11	8,11	5,45	67,20
3.	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	Maximize	6,05	6,05	6,05	5,72	94,55
4.	Konsumsi ikan	Kg/kap/ thn	Maximize	58,08	58,08	58,08	55,37	95,33
SS.03	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan							118,92
5.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	Minimize	≤67	≤67	≤67	59,69	120,00
6.	Luas kawasan konservasi perairan	Juta Ha	Maximize	24,6	24,6	24,1	28,4	117,84
SS.04	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat							100,94
7.	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	%	Maximize	62	62	62	62,58	100,94

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	PK Awal (22 Jan 2021)	PK Revisi (20 April 2021)	PK Revisi (31 Agustus 2021)	Realisasi	% Realisasi
SS.05	Hasil riset dan inovasi termanfaatkan							120,00
8.	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	Hasil Riset	Maximize	8	8	8	12	120,00
SS.06	Tatakelola SDKP bertanggung jawab							103,03
9.	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	WPP	Maximize	5	5	5	5	100,00
10.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Rencana Zonasi	Maximize	22	22	12	13	108,33
11.	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	95	95	95	95,72	100,76
SS.07	Industrialisasi KP berdaya saing							94,43
12.	Produksi perikanan	Juta Ton	Maximize	27,55	27,55	27,55	24,48	88,86
13.	Produksi garam	Juta Ton	Maximize	3,1	3,1	1,09	1,09	100,00
SS.08	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif							105,36
14.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	%	Maximize	60	60	54,5	57,37	105,27
15.	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	93	93	93	98,05	105,43

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	PK Awal (22 Jan 2021)	PK Revisi (20 April 2021)	PK Revisi (31 Agustus 2021)	Realisasi	% Realisasi
SS.09	Tatakelola pemerintahan yang baik							105,97
16.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	Maximize	72	72	72	78,27	108,71
17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Nilai	Maximize	89	89	89	91,87	103,22

Sumber Aplikasi Kinerjaaku (25 Januari 2022)

Analisis capaian kinerja KKP setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspective dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan

yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut:



STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-1) Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Strategis 1 memiliki satu IKU yakni Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. KKP berkomitmen untuk senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap

stakeholder kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya melalui program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KKP.

IKU 1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)

Penghitungan IKMKP diperlukan untuk: a) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia; b) alat ukur keberhasilan program pembangunan yang inklusif di sektor kelautan dan perikanan; dan c) alat ukur untuk meninjau kesenjangan pembangunan KP antar wilayah. IKMKP memiliki peran yang sangat strategis dalam pengukuran capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKMKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian kesejahteraan masyarakat wilayah dalam hal ini provinsi, dan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah provinsi dibandingkan dengan provinsi lainnya. IKMKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program

sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

IKMKP 2021 dihitung berdasarkan 14 indikator yang merupakan turunan dari dua dimensi yaitu 1) dimensi sosial dan kelembagaan serta 2) dimensi ekonomi. Indikator dimensi sosial dan kelembagaan mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha budidaya perikanan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran perikanan, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas, jumlah pelaku utama yang meningkat kelasnya, jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sedangkan untuk indikator dimensi ekonomi mencakup nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan, nilai tukar pengolah dan pemasar hasil perikanan, nilai tukar petambak garam, ekspor produk perikanan,

impur produk perikanan, angka konsumsi ikan dan proporsi pengeluaran pangan. Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan

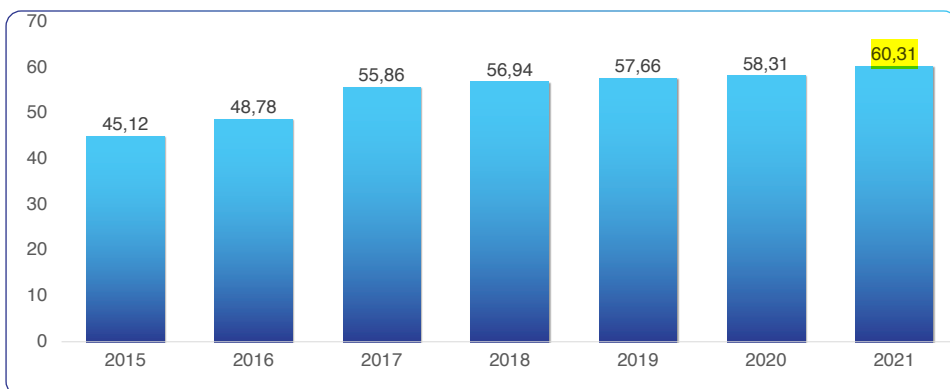
tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing dimensi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tabel 6. Capaian IKMKP Tahun 2021

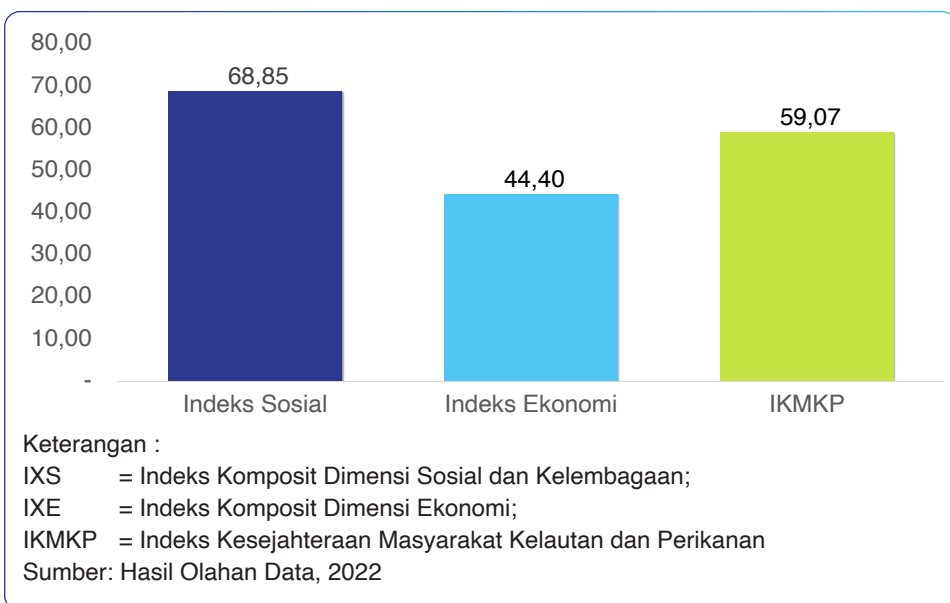
Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
45,12	48,78	55,86	56,94	57,66	58,31	60,31	59,07	97,94	1,30	60,31	97,94	63,87	92,48

Capaian IKMKP tahun 2021 sebesar 59,07 yang terdiri dari capaian dimensi sosial dan kelembagaan adalah sebesar 68,85 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 44,40. Capaian IKMKP tahun 2021 meningkat sebesar 0,76 poin yaitu sebesar 58,31 di tahun 2020. Realisasi IKMKP tahun 2021 sebesar 59,07 tersebut telah mencapai 97,94 persen dari target tahun 2021 sebesar 60,31 atau cenderung tumbuh positif sebesar 1,3 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 58,31. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu sebesar 63,87 capaian tersebut baru mencapai 92,48 persen.

IKMKP tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah dengan IKMKP sebesar 88,22, sedangkan terendah diduduki Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan IKMKP sebesar 13,78 (Gambar 11). Semakin tinggi nilai IKMKP suatu daerah, dalam arti semakin mendekati nilai 100, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di daerah tersebut.



Gambar 9. Perkembangan IKMKP Tahun 2015-2021



Gambar 10. Capaian IKMKP
(Indeks Sosial dan Kelembagaan dan Indeks Ekonomi) Tahun 2021

Belum tercapainya IKMKP di tahun 2021, berdasarkan analisa masing-masing dimensi dan indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. dimensi sosial dan

kelembagaan, terdapat indikator yang belum optimal kinerjanya yakni; (i) jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pengolah-pemasaran perikanan, dan masyarakat pengawas; dan (ii) jumlah kelompok yang

disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan;

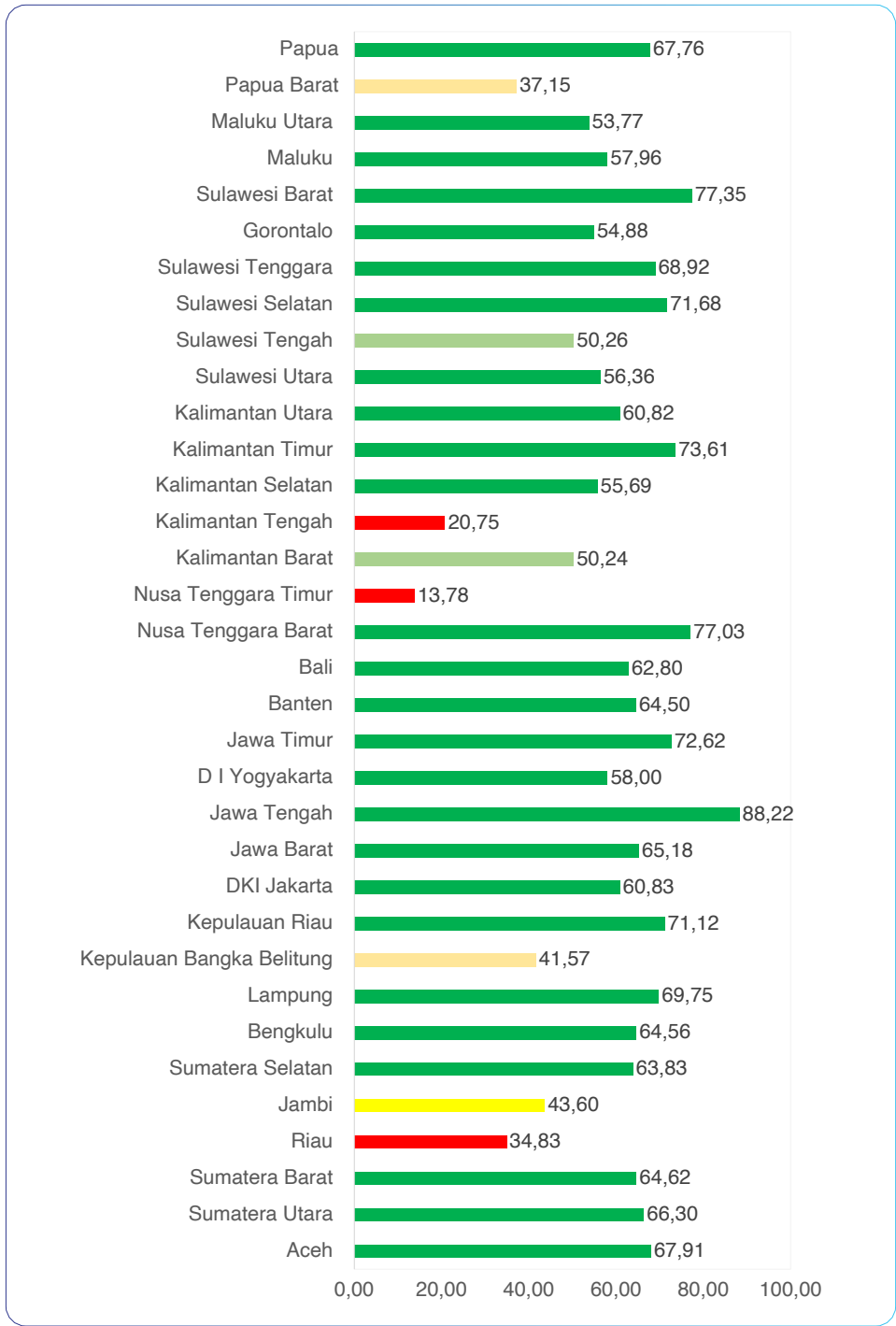
b. dimensi ekonomi terdapat indikator yang belum optimal kinerjanya antara lain (i) nilai tukar petambak garam; (ii) pengendalian impor perikanan, (iii). ekspor perikanan; dan (iii) proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan.

Berdasarkan hasil perhitungan serta mengacu pada selang kriteria Indeks Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra, 2015), terdapat 5 (lima) provinsi yang termasuk kelompok IKMKP pada selang indeks rendah, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Papua Barat dan Bangka Belitung, sedangkan yang selebihnya sudah dianggap kategori sedang dan tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Kategori Provinsi berdasarkan Nilai IKMKP Tahun 2021

No	Kategori	Provinsi	Jumlah Provinsi
1	$IKMKP \leq 37,00$	Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Riau	3
2	$37,01 < IKMKP \leq 42,00$	Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung	2
3	$42,01 < IKMKP \leq 47,00$	Jambi	1
4	$47,01 < IKMKP \leq 52,00$	Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah	2
5	$IKMKP > 52,00$	Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Selatan, Banten, Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Tengah	26

Sumber. Balai Riset Sosek KP



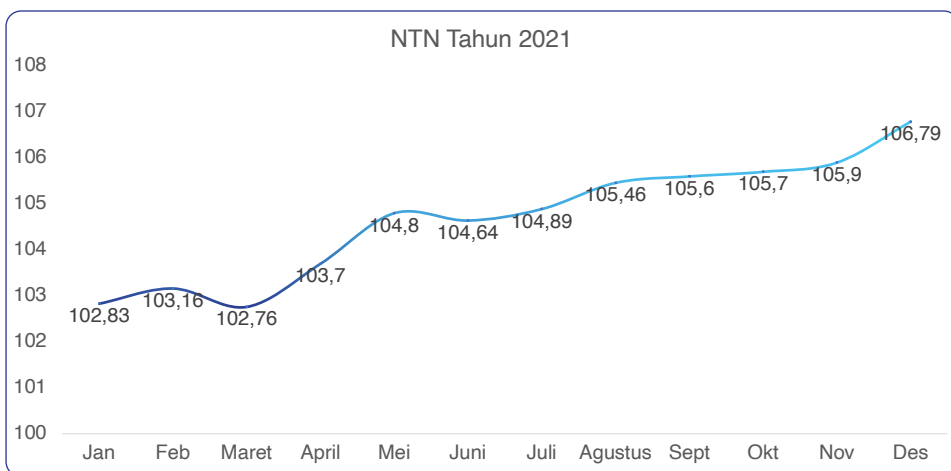
Gambar 11. Sebaran IKMKP Tahun 2021 Menurut Propinsi

Dalam rangka meningkatkan capaian IKMKP, beberapa opsi rekomendasi kebijakan antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk pengolah-pemasaran perikanan dan masyarakat pengawas serta pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah;
- b. Menumbuhkan lapangan usaha alternatif guna meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan
- c. Melakukan upaya peningkatan dan stabilitas harga garam guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam;
- d. Meningkatkan angka konsumsi ikan guna mendorong permintaan produk perikanan dalam negeri;
- e. Mendorong pengendalian impor perikanan guna memenuhi kebutuhan industri perikanan, khususnya pengolahan, serta memperketat impor ikan konsumsi;
- f. Meningkatkan kinerja ekspor perikanan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan sejahtera.



Gambar 12. Perkembangan IKMKP Tahun 2015-2021

Rata-rata NTN dari bulan Januari - Desember 2021 di 34 provinsi adalah sebesar 104,69 atau telah tercapai 101,64 persen dari target tahun 2021 yaitu sebesar 102. Selama tahun 2021, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2021 dengan nilai mencapai 106,79 dan terendah pada bulan Maret 2021 yaitu sebesar 102,76. Hal ini menunjukkan bahwa indeks yang diterima oleh nelayan (IT) dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan (IB) berada tidak jauh dari titik impas yaitu 100. Namun demikian, capaian ini tetap menunjukkan hal yang cukup baik dimana kenaikan indeks yang diterima masih lebih besar dibanding kenaikan indeks yang dikeluarkan.

Jika dibandingkan dengan NTN tahun 2020 yaitu sebesar 100,22, realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,46 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2024 sebesar 107 capaian tahun 2021 sudah mencapai 97,84 persen.

Realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2015 sebesar 106,14, tahun 2016 sebesar 108,24, tahun 2017 sebesar 109,86, tahun 2018 sebesar 113,28 dan tahun 2019 sebesar 113,74 serta tahun 2020 mencapai 100,22. Realisasi NTN tahun 2015-2019 masih menggunakan tahun dasar tahun 2012 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian NTN di tahun 2020-2021 yang telah menggunakan perhitungan tahun dasar 2018.

Tabel 8. Capaian NTN Tahun 2021

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
Indikator Kinerja Pembentuk. Nilai Tukar Nelayan (NTN)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020- 2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
106,14	108,24	109,86	113,28	113,74	100,22	103	104,69	101,64	4,46	103	101,64	107	97,84

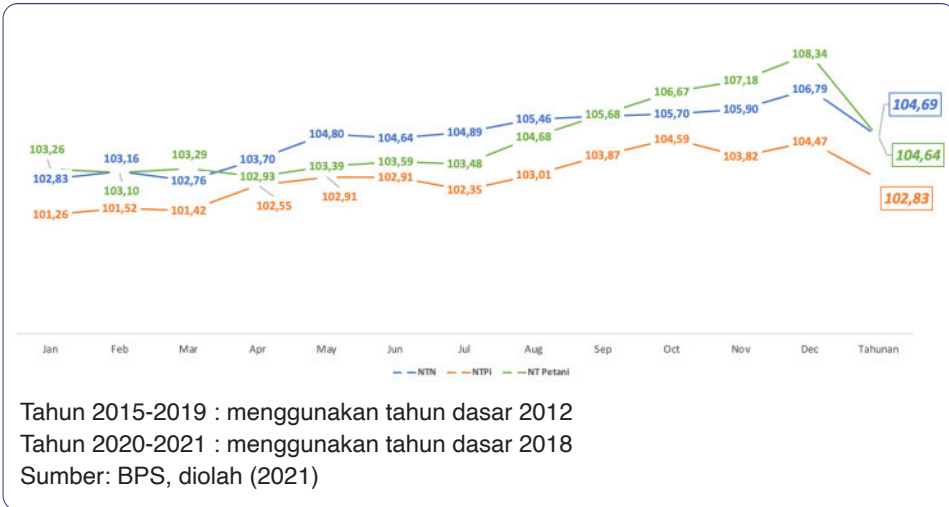
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)
Tahun 2015-2019 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2012
*Tahun 2020-2021 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2018



Gambar 13. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2015-2021

Penurunan NTN hanya terjadi pada bulan Maret dan meningkat kembali. Penyebab dari penurunan NTN dibulan Maret 2021 adalah terjadinya penurunan Indeks yang Diterima (It), yang dibarengi dengan penurunan pada Indeks yang Dibayarkan (Ib) sebesar. Kondisi ini menggambarkan bahwa sepanjang Maret 2021, terjadi peningkatan indeks harga yang diterima meliputi harga komoditas perikanan dan peningkatan indeks harga yang dibayar meliputi harga berbagai komoditas lain yang dikonsumsi oleh Nelayan dan biaya operasional. Pergerakan NTN tahun 2021 memberikan gambaran tentang dinamika tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Kecenderungan variasi NTN ini terjadi karena pengeluaran konsumsi yang tidak tetap, juga pendapatan usaha perikanan tangkap yang kurang menentu karena dipengaruhi oleh hasil tangkapan, jenis ikan, musim penangkapan, dan harga ikan hasil tangkapan. Hal ini diduga terjadi karena adanya perubahan

biaya usaha perikanan tangkap seperti BBM (bahan bakar minyak), pengurangan sumber daya ikan (SDI) karena adanya penambahan jumlah armada tangkap setiap tahunnya, serta adanya kenaikan harga barang-barang konsumsi kebutuhan dasar keluarga nelayan. Implikasinya, perlu dicermati untuk secepatnya melakukan investasi pada saat diperoleh pendapatan yang berlebih misalnya dengan pengadaan alat/sarana penangkapan ikan yang lebih modern guna mengantisipasi resiko penurunan pendapatan pada saat musim paceklik. Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat disarankan melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan upaya untuk mengefisienkan biaya dapat dilakukan melalui pembebasan biaya atau subsidi impor mesin dan alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi Pelabuhan Perikanan dengan harga subsidi.



Gambar 14. Grafik Perbandingan NTN Terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2021

Gambar di atas memperlihatkan capaian perbandingan Realisasi NTN terhadap Nilai Tukar pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) selama tahun 2021, terlihat bahwa capaian NTN lebih besar dibandingkan dengan NTPi

dan NT Petani yakni sebesar 1,86 terhadap NTPi dan 0,05 terhadap NT Petani. Hal ini menunjukkan harga yang diterima nelayan lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh pembudidaya ikan dan petani.



Gambar 15. Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Nelayan Tahun 2021

Keberhasilan dalam mencapai target NTN tahun 2021 merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh nelayan dengan didukung beberapa program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh KKP pada tahun sebelumnya antara lain : (1) Bakti Nelayan sebagai wujud program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), (2) Fasilitasi Permodalan, (3) SeHAT Nelayan dan (4) Diversifikasi usaha bagi keluarga nelayan. Adapun capaian

kegiatan prioritas yang disalurkan kepada nelayan di tahun 2021 mencakup : Bakti Nelayan untuk perbekalan melaut dan fasilitasi nelayan sebesar 12.800 orang di 32 lokasi, Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di 19 provinsi dan 98 kab/kota sebesar 12.896 bidang, Fasilitasi pengembangan usaha nelayan di 5 provinsi dengan cakupan 700 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan di 14 provinsi sebesar 1.588 nelayan.

Tabel 9. Capaian NTN Tahun 2021 di 34 Provinsi

No	Provinsi	2020					2021				
		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata
1	Aceh	96,55	95,19	97,92	100,27	97,48	102,75	103,74	105,05	109,53	105,27
2	Sumatera Utara	99,35	97,03	100,59	101,09	99,52	103,98	105,78	106,80	108,15	106,18
3	Sumatera Barat	97,12	96,10	98,57	100,59	98,10	101,07	99,65	102,09	100,79	100,90
4	Riau	98,73	99,25	99,67	100,31	99,49	101,23	103,48	104,86	106,07	103,91
5	Jambi	106,91	105,67	107,26	109,40	107,31	111,80	114,20	114,58	114,00	113,65
6	Sumatera Selatan	101,08	99,16	100,38	100,81	100,36	104,37	104,84	103,85	105,62	104,67
7	Bengkulu	91,25	93,10	94,61	98,21	94,29	100,90	99,42	99,91	103,33	100,89
8	Lampung	101,45	99,79	101,50	102,63	101,34	103,57	104,95	106,22	108,14	105,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	106,82	103,41	106,54	105,49	105,57	109,04	110,36	112,20	113,35	111,24
10	Kepulauan Riau	103,06	99,97	103,76	107,45	103,56	109,29	107,88	109,84	111,03	109,51
11	DKI Jakarta	96,90	94,68	94,02	95,14	95,19	96,05	97,01	99,06	99,21	97,83
12	Jawa Barat	98,47	96,52	99,23	103,32	99,39	105,55	107,82	109,38	112,68	108,86
13	Jawa Tengah	102,79	99,86	102,68	105,51	102,71	108,26	106,33	108,53	110,67	108,45
14	DI Yogyakarta	103,65	104,48	106,83	111,64	106,65	115,73	115,95	116,41	115,25	115,83

No	Provinsi	2020					2021				
		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata
15	Jawa Timur	97,50	94,53	95,23	95,82	95,77	97,31	100,36	103,06	103,71	101,11
16	Banten	100,16	98,44	97,77	98,54	98,73	99,90	101,07	100,89	102,09	100,99
17	Bali	99,63	98,85	99,46	99,14	99,27	98,11	100,00	101,37	101,32	100,20
18	Nusa Tenggara Barat	101,17	102,89	106,38	109,12	104,89	109,85	111,09	112,20	115,29	112,11
19	Nusa Tenggara Timur	95,45	94,17	94,17	93,02	94,20	93,26	93,48	92,36	91,09	92,55
20	Kalimantan Barat	100,06	100,84	103,59	104,00	102,12	105,75	105,84	107,21	106,99	106,45
21	Kalimantan Tengah	103,38	102,47	102,12	101,55	102,38	101,68	102,60	102,56	103,06	102,47
22	Kalimantan Selatan	101,34	98,53	100,31	99,15	99,83	97,44	98,17	98,69	101,13	98,86
23	Kalimantan Timur	103,69	103,76	102,47	102,73	103,17	102,63	103,77	103,07	102,56	103,01
24	Kalimantan Utara	104,32	101,84	103,50	101,73	102,85	101,07	103,68	105,83	106,02	104,15
25	Sulawesi Utara	102,41	99,07	100,52	101,33	100,83	104,74	106,23	107,60	107,25	106,45
26	Sulawesi Tengah	98,54	98,22	98,07	97,60	98,11	100,39	104,77	104,70	103,22	103,27
27	Sulawesi Selatan	98,60	97,13	100,81	102,01	99,64	105,02	108,43	108,61	107,65	107,43
28	Sulawesi Tenggara	96,72	95,72	98,68	98,70	97,45	99,41	100,67	103,70	102,75	101,63
29	Gorontalo	98,60	96,32	94,42	91,60	95,24	93,24	97,25	97,25	96,47	96,05
30	Sulawesi Barat	100,50	99,56	98,64	98,23	99,23	103,35	107,29	106,54	107,90	106,27
31	Maluku	104,51	100,82	99,80	99,95	101,27	102,12	107,79	109,76	108,95	107,15
32	Maluku Utara	100,24	96,45	95,42	97,06	97,30	99,28	104,97	106,26	107,47	104,49
33	Papua Barat	95,85	95,72	95,30	95,39	95,57	93,20	94,68	93,31	93,58	93,69
34	Papua	110,64	108,98	110,56	111,91	110,52	115,01	112,75	108,75	109,85	111,59
	Nasional	100,49	98,80	100,37	101,24	100,22	102,92	104,38	105,32	106,13	104,69

Sumber: BPS, diolah (2020)

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/ daya beli pembudidaya ikan. Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama

dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi. Sementara nilai tukar usaha pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan harga dibayar untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

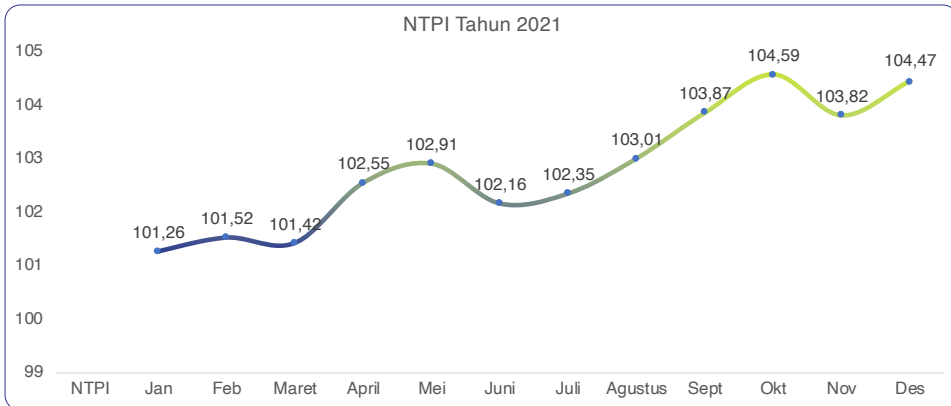
Tabel 8. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2021

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
Indikator Kinerja Pembentuk. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020- 2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
99,66	98,96	99,08	100,8	102,09	100,55	102	102,83	100,81	2,27	102	100,81	105	97,93

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Tahun 2015-2019 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2012

*Tahun 2020-2021 perhitungan berdasarkan tahun dasar 2018



Gambar 16. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Januari s.d Desember 2021

Tabel 9. Capaian NTN Tahun 2021 di 34 Provinsi

No	Provinsi	2020					2021				
		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata
1	Aceh	94,69	94,63	93,87	97,76	95,24	102,39	103	103,08	104,56	103,2
2	Sumatera Utara	96,62	95,48	94,40	94,03	95,13	94,032	96,637	95,738	95,374	95,44
3	Sumatera Barat	94,18	93,01	90,79	89,49	91,87	88,574	90,035	93,276	93,431	91,32
4	Riau	94,93	93,63	94,05	94,85	94,37	94,891	97,565	97,619	96,892	96,74
5	Jambi	98,87	97,59	99,18	98,64	98,57	97,454	99,683	99,863	99,986	99,24
6	Sumatera Selatan	93,43	92,17	94,76	93,94	93,57	94,487	93,652	94,575	94,61	94,33
7	Bengkulu	101,94	99,77	101,25	98,45	100,35	101,49	104,77	100,02	97,347	100,91
8	Lampung	100,79	99,73	100,09	100,89	100,38	100,58	101,68	101,4	101,28	101,23
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,96	95,87	94,05	93,86	95,44	94,904	95,641	95,464	93,411	94,85
10	Kepulauan Riau	103,57	100,79	99,83	98,69	100,72	99,204	98,567	97,543	97,17	98,121
11	DKI Jakarta	103,07	102,19	103,46	101,19	102,48	101,86	100,75	104,77	104,95	103,08
12	Jawa Barat	104,31	103,57	102,87	103,21	103,49	105,3	107,9	108,61	108,71	107,63
13	Jawa Tengah	108,66	105,90	109,17	110,30	108,51	108,5	109,92	111,21	111,19	110,21
14	DI Yogyakarta	94,72	94,48	96,49	97,23	95,73	94,84	93,197	92,861	92,181	93,27
15	Jawa Timur	99,50	96,95	98,66	99,86	98,74	101,22	100	98,474	102,31	100,5
16	Banten	98,87	97,69	96,72	96,90	97,55	99,252	101,15	101,29	102,81	101,12
17	Bali	102,99	100,53	102,36	103,61	102,37	101,97	100,58	99,945	99,944	100,61

No	Provinsi	2020					2021				
		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	Rata-Rata
18	Nusa Tenggara Barat	96,92	99,29	99,58	100,36	99,04	98,991	101,3	101,82	102,47	101,14
19	Nusa Tenggara Timur	96,00	94,07	95,01	91,97	94,27	90,52	90,904	91,013	96,529	92,241
20	Kalimantan Barat	103,33	102,32	102,86	102,25	102,69	99,44	99,106	99,072	98,938	99,139
21	Kalimantan Tengah	100,45	99,70	99,39	100,12	99,91	101,35	99,801	100,72	100,7	100,64
22	Kalimantan Selatan	102,41	99,97	99,00	98,64	100,01	98,409	100,24	101,7	104,79	101,29
23	Kalimantan Timur	101,16	102,03	102,49	102,31	102,00	100,31	100,29	98,294	97,858	99,188
24	Kalimantan Utara	103,05	102,39	102,52	101,54	102,38	101,42	102,61	103,72	104	102,94
25	Sulawesi Utara	100,02	98,16	100,27	98,08	99,13	96,572	95,073	96,275	96,721	96,16
26	Sulawesi Tengah	100,86	99,22	99,64	100,30	100,01	98,496	100,53	100,27	100,46	99,94
27	Sulawesi Selatan	97,01	94,87	96,04	96,31	96,06	97,613	100,37	103,39	106,24	101,9
28	Sulawesi Tenggara	99,63	97,11	99,27	99,42	98,86	101,71	104,4	106,76	110,55	105,85
29	Gorontalo	99,80	99,14	97,79	97,22	98,49	96,86	96,04	95,211	95,365	95,869
30	Sulawesi Barat	100,71	98,73	98,22	98,37	99,01	101,28	104,83	105,07	104,16	103,84
31	Maluku	101,45	97,86	97,40	91,63	97,09	88,181	90,401	94,927	98,67	93,045
32	Maluku Utara	100,63	99,99	99,72	102,39	100,68	100,12	99,337	101,5	104,01	101,24
33	Papua Barat	98,73	98,08	98,90	98,26	98,49	98,379	99,879	99,257	99,417	99,233
34	Papua	101,56	101,69	102,27	102,85	102,09	101,6	101,74	102,33	102,72	102,1
	Nasional	101,15	99,55	100,50	100,99	100,55	101,4	102,54	103,08	104,29	102,83

Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2021 sebesar 102,83. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik. Apabila dibandingkan dengan target 2021, realisasi NTPi tahun 2021 telah mencapai 100,81 persen atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,27 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 100,55. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan berada pada titik terendahnya pada Januari (101,26) dan terus naik sampai bulan Desember (104,47) dengan sedikit fluktuasi. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2021 memiliki kenaikan rata-rata setiap bulannya sebesar 0,29 persen.

Keberhasilan pencapaian NTPi, didorong oleh adanya upaya menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan cenderung naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan merupakan dua komponen berpengaruh dan dapat diintervensi Pemerintah dalam hal ini KKP. Kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi baik benih maupun ikan konsumsi juga perlu diperhatikan ditengah pandemi yang masih melanda. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar pembudidaya ikan antara lain tingkat produktivitas pembudidaya ikan, integrasi hulu - hilir dan pengaruh faktor lain seperti ketersediaan suplai alat-alat budidaya ikan, pakan, benih, pupuk, transportasi, ataupun infrastruktur yang mendukung kegiatan budidaya.

Di tahun 2021, terdapat 18 provinsi yang capaian NTPi berada di atas 100, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan NTPi tertinggi adalah provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 110,21 dan terendah yaitu provinsi Sumatera Barat sebesar 91,32.

Beberapa langkah dan upaya yang telah dilaksanakan untuk peningkatan NTPI diantaranya: (1) mendorong program pembudidayaan ikan dengan produktivitas tinggi yaitu budidaya bioflok, budidaya minapadi; (2) pengembangan pakan mandiri dan pakan alami; (3) Bantuan bibit/benih berkualitas dan pembuatan sistem logistik benih yang memadai; (4) pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, laut; (5) pengembangan kebun bibit rumput laut; (6) pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya; (7) inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan; (8) Bersinergi dengan K/L/instansi/LSM terkait percepatan pembangunan pembudidayaan ikan khususnya terkait penyediaan saluran irigasi, fasilitasi penyediaan akses modal.

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. Target pencapaian NTPHP tahun 2021 adalah sebesar 104. NTPHP dihitung berdasarkan sampling yang dilakukan di 40 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi (Gambar 17). Lokasi yang menjadi sampling dipilih berdasarkan kesepakatan antara KKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) terutama skala mikro dan kecil dan bervariasinya jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 17. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP Tahun 2021

Tabel 12. Perkembangan NTPHP Tahun 2021

Indeks	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata
Nilai IT	132,40	132,72	133,17	134,34	135,66	135,24	135,68	136,35	135,95	136,41	138,06	138,80	135,40
Nilai IB	127,19	127,36	127,84	128,13	129,15	128,81	129,51	129,84	129,88	131,21	131,96	132,78	129,47
NTPHP	104,09	104,21	104,17	104,84	105,04	104,99	104,77	105,02	104,67	103,96	104,62	104,53	104,58

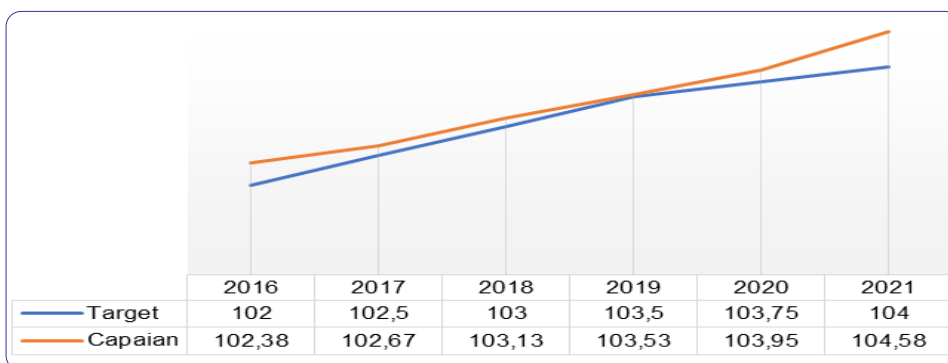
It= Indeks Harga yang diterima;lb=Indeks Harga yang dibayar
Sumber: Ditjen PDS, KKP (diolah)

Tabel 13. Capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
Indikator Kinerja Pembentuk. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	102,38	102,67	103,13	103,53	103,95	104	104,58	100,56	0,61	104	100,56	104,75	99,84

Sumber: Ditjen PDS, KKP (2021)

NTPHP tahun 2021 tercapai sebesar 104,58 atau mencapai 100,56 persen terhadap target tahun 2021 yakni 104 dan telah mencapai 99,84 persen terhadap target akhir Renstra KKP 2020-2024 yakni 104,75. Jika dibandingkan dengan capaian NTPHP tahun 2020 yakni 103,95 maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,61 persen. Selama kurun waktu tahun 2016–2021, NTPHP terus mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,43 persen dan selalu tercapai di atas 100. NTPHP dengan capaian lebih dari 100 menandakan bahwa pendapatan pengolah hasil perikanan lebih besar dari pengeluarannya atau mengalami surplus.



Gambar 18. Target Dan Capaian NTPHP Tahun 2016-2021

Ketercapaian NTPHP ini didukung dengan adanya bantuan pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran yang terus dilakukan oleh KKP sebagai salah satu instrument stimulus diantaranya *cold storage*, kendaraan berpendingin,

sentra kuliner, *chest freezer* serta bantuan lainnya yang berdampak pada efektifitas produksi hulu dan hilir, efisiensi biaya produksi dan membantu mempertahankan kualitas bahan baku dan produk akhir sehingga harga produk akhir tetap tinggi.

Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi. Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan

rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi. Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/breakeven; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu. Teknik menghitung IKU ini mengikuti kaidah penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional. Capaian Nilai Petambak Garam Tahun 2021 disajikan sebagai berikut

Tabel 14. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan													
Indikator Kinerja Pembentuk. Nilai Tukar Petambak Garam													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020- 2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100,42	102,23	115,5	110,14	91,19	80,68	101	101,21	100,21	25,45	103	98,26	103,75	97,55

Pada tahun 2021, NTPG pasca *refocusing* ditargetkan sebesar 101 dari target awal semula 103, dengan realisasi 101,21 atau telah tercapai 100,21%. Realisasi tahun 2021 sebesar 101,21 mengalami pertumbuhan positif sebesar 25,45 persen dari capaian tahun 2020 sebesar 80,68. Hal ini dikarenakan harga garam meningkat dibanding tahun 2020 yang berdampak daya beli petambak garam terhadap barang konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP 2020-2024, realisasi NTPG sebesar 101,21 baru mencapai 97,55 persen dari target akhir Rencana Strategis KKP 2020-2024 yaitu sebesar 103,75.

Perhitungan NTPG tahun 2021 dilakukan berdasarkan survei di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Pelaksanaan survey mengalami kendala yaitu keterlambatan peningkatan kapasitas bagi pengambil data di lapangan dan pengambilan data karena *refocusing* anggaran.

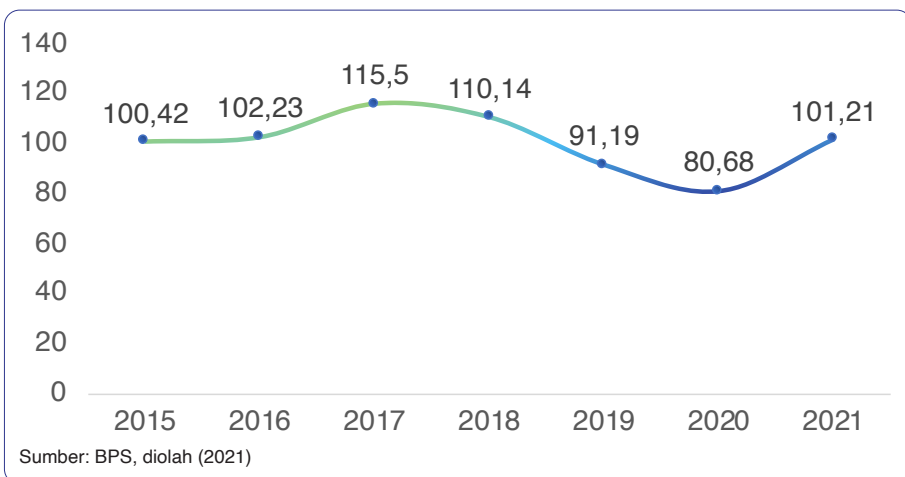
Solusi yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik dan para pencacah di lapangan agar kegiatan survei dan pengolahan data dapat berjalan efektif. Dalam mencapai target kinerja NTPG, KKP telah melakukan kegiatan diantaranya :

- a. Bimbingan Teknis Survei Harga Nilai Tukar Petambak

Garam (NTPG) dilaksanakan secara daring pada tanggal 25 November 2021, diikuti oleh calon validator yaitu perwakilan dari Dinas Perikanan dan calon surveyor yang merupakan Penyuluh Perikanan dari 10 kabupaten, yaitu: (1) Aceh Timur, (2) Aceh Utara, (3) Cirebon, (4) Rembang, (5) Pati, (6) Lamongan, (7) Sampang, (8) Sumenep, (9) Lombok Barat, (10) Bima. Narasumber berasal dari Kedeputusan Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik. Tujuan Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsep/definisi dan tata cara survei harga sebagai dasar penghitungan NTPG. Output yang ingin dicapai adalah para peserta mampu

memahami dan melaksanakan survei dengan baik dan benar. *Outcome* yang diharapkan adalah survei NTPG terlaksana dengan lancar dan selesai tepat waktu dengan hasil yang akurat. Adapun materi yang disampaikan pada saat Bimtek yaitu gambaran umum survei NTPG, pedoman survei harga petambak garam, dan pedoman pengolahan NTPG.

- b. Pelaksanaan survei untuk perhitungan NTPG dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2021 di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima.



Gambar 19. Capaian NTPG Tahun 2015-2021

COSTUMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-2) Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan ditandai dengan meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian Sasaran

Strategis 2, diukur melalui 3 (tiga) IKU yakni IKU 2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, IKU 3 Nilai Ekspor Perikanan dan IKU 4 Konsumsi Ikan

IKU 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan)

sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Tabel 14. Capaian Nilai Tukar Petambak Garam Tahun 2021

SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat													
IKU-2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
7,89	5,19	5,70	5,19	5,73	0,73	8,11	5,45	67,20	649,81	8,11	67,20	8,71	62,57

Sumber: Berita Resmi Badan Pusat Statistik (2022)

Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2021 mengalami fluktuatif, yaitu di triwulan I sebesar 1,31 persen, triwulan II naik drastis sebesar 9,69 persen, triwulan

III mencapai 4,55 persen dan triwulan IV mencapai 8,99 persen. Secara rata-rata pertumbuhan PDB tahun 2021 mencapai 5,45 persen (Tabel 16)

Realisasi Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2021 sebesar 5,45 persen atau hanya mencapai 67,20 persen dari target 2021. Tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar 0,73 terjadi kenaikan. Jika dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan PDB Nasional yang hanya mencapai 3,69 persen, pertumbuhan PDB Perikanan masih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan perekonomian perikanan dan nasional mulai bergairah meskipun masih menghadapi pandemi. Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan tersebut belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sub sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP yaitu sebesar 8,71 realisasi ini baru mencapai 62,57 persen, oleh karena itu masih perlu upaya untuk dapat mencapainya sampai dengan akhir tahun 2024.

Tabel 16. Pertumbuhan PDB Perikanan Triwulanan Tahun 2020-2021

Lapangan Usaha	2020*					2021**				
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,02	2,20	2,17	2,63	1,77	3,44	0,53	1,43	2,28	1,84
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,17	2,80	3,09	3,71	2,13	5,33	-1,27	0,67	0,14	1,08
a. Tanaman Pangan	-10,25	9,24	7,24	10,73	3,61	12,24	-7,97	-5,66	-2,04	-1,56
b. Tanaman Hortikultura	2,61	0,94	5,74	7,85	4,17	3,01	1,85	-5,22	3,80	0,56
c. Tanaman Perkebunan	3,97	0,18	0,68	1,14	1,34	2,17	0,32	8,33	2,28	3,52
d. Peternakan	2,69	-1,90	-0,24	-1,88	-0,35	2,12	6,74	-2,47	-5,24	0,34
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-1,44	2,34	2,45	3,20	1,62	5,41	-0,67	0,99	-0,30	1,32
Kehutanan dan Penebangan Kayu	5,31	2,23	-1,62	-5,42	-0,03	-6,59	-1,46	3,31	4,78	0,06
Perikanan	3,52	-0,63	-1,03	1,06	0,73	-1,31	9,69	4,55	8,99	5,45
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2,97	-5,32	-3,49	-2,17	-2,07	-0,70	7,07	3,51	5,02	3,69

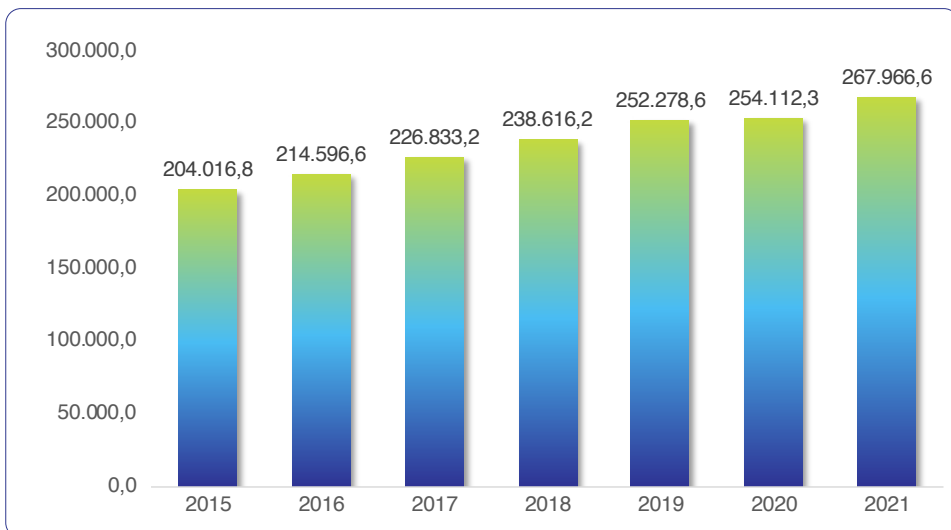
Sumber. Badan Pusat Statistik

Belum tercapainya PDB Perikanan disebabkan karena tidak tercapainya produksi perikanan di tahun 2021 yang hanya mencapai 24,48 juta ton dari target 27,55 juta ton. Kedepan untuk dapat mencapai target pertumbuhan PDB, KKP

terus berupaya meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui:

- pelaksanaan tiga prioritas pembangunan tahun 2021-2024 yaitu peningkatan PNPB,

- pembangunan kampung perikanan budidaya dan kampung nelayan maju, serta penangkapan ikan terukur di setiap WPP NRI.
- meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya dan produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.
 - penguatan rantai pasok hasil perikanan termasuk rantai dingin serta penguatan jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan.
 - pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, pelabuhan perikanan dan fasilitas pemasaran perikanan.
 - penguatan kelembagaan pelaku usaha termasuk pembentukan korporasi nelayan dan pembudidaya, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan dan pendampingan dan penyuluhan.
 - mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan kinerja ekspor produk perikanan indonesia



Gambar 20. Nilai PDB Perikanan berdasarkan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2021 (Rp.miliar)

Nilai PDB Perikanan atas dasar harga konstan (ADHK), terus tumbuh positif yaitu sebesar Rp254.112,3 miliar di tahun 2020 menjadi Rp267.966,6 miliar di tahun 2021 (Gambar. 20).

Tabel 17. Perbandingan Pertumbuhan PDB Perikanan dengan Pertumbuhan PDB Nasional dan Lapangan Usaha Lainnya

LAPANGAN USAHA		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,77	1,84
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,00	3,26	3,62	3,65	3,31	2,13	1,08
	a. Tanaman Pangan	4,32	2,57	2,31	1,42	-1,73	3,61	-1,56
	b. Tanaman Hortikultura	2,26	2,93	3,68	6,99	5,53	4,17	0,56
	c. Tanaman Perkebunan	1,97	3,47	4,50	3,83	4,56	1,34	3,52
	d. Peternakan	3,57	4,45	3,95	4,61	7,78	-0,35	0,34
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3,76	3,18	4,08	3,11	3,17	1,62	1,32
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,76	-1,03	2,13	2,78	0,37	-0,03	0,06
3	Perikanan	7,89	5,19	5,70	5,19	5,73	0,73	5,45
Pertambangan dan Penggalian		-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,00
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,05	2,09	-3,54	-1,40	-2,83	-6,00	-4,42
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-7,31	-4,14	1,52	4,01	10,20	-5,43	6,60
3	Pertambangan Bijih Logam	-10,74	1,82	6,55	9,01	-15,15	20,26	22,84
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,14	6,36	4,68	2,19	6,18	-1,22	1,97
Industri Pengolahan		4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93	3,39
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,11	-6,81	0,57
Industri Pengolahan Non Migas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	3,67
1	Industri Makanan dan Minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58	2,54
2	Industri Pengolahan Tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36	-5,78	-1,32
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35	-8,88	-4,08
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99	-8,76	7,75
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55	-2,16	-3,71
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86	0,22	-2,89
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48	9,39	9,61
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52	-5,61	1,08
9	Industri Barang Galian bukan Logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03	-9,13	0,89
10	Industri Logam Dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83	5,87	11,50
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51	-5,46	-1,62
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13	-10,17	11,43

LAPANGAN USAHA		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	Industri Alat Angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43	-19,86	17,82
14	Industri Furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35	-3,36	8,16
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17	-0,88	-1,64
Pengadaan Listrik dan Gas		0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	5,55
1	Ketenagalistrikan	2,29	6,35	2,41	5,25	4,61	-0,98	5,61
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-6,76	-0,43	-4,03	7,00	0,16	-11,94	5,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	4,97
Konstruksi		6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	2,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,78	4,65
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,32	3,97	4,75	4,85	3,72	-14,11	12,10
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	3,07	4,04	4,39	4,99	4,80	-1,37	3,14
Transportasi dan Pergudangan		6,71	7,45	8,49	7,05	6,38	-15,05	3,24
1	Angkutan Rel	4,45	3,46	19,00	10,74	4,49	-42,34	-3,42
2	Angkutan Darat	6,80	7,05	7,94	7,13	9,96	-5,34	4,55
3	Angkutan Laut	2,38	1,25	4,64	7,22	10,47	-4,52	2,89
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,03	1,46	6,01	5,20	5,58	-13,00	-0,42
5	Angkutan Udara	10,37	13,22	11,93	6,03	-9,76	-53,06	-8,01
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6,38	7,51	8,52	7,93	10,34	-17,61	5,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,26	3,89
1	Penyediaan Akomodasi	5,67	5,71	5,14	4,31	1,38	-24,49	5,81
2	Penyediaan Makan Minum	3,97	5,03	5,48	6,03	6,89	-6,88	3,52
Informasi dan Komunikasi		9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,61	6,81
Jasa Keuangan dan Asuransi		8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	1,56
1	Jasa Perantara Keuangan	9,57	9,82	3,42	2,39	6,14	3,98	2,71
2	Asuransi dan Dana Pensiun	6,60	6,58	9,33	7,48	5,67	4,03	0,72
3	Jasa Keuangan Lainnya	7,98	9,29	9,18	7,12	10,63	-0,58	-2,40
4	Jasa Penunjang Keuangan	4,74	4,76	3,99	2,30	2,08	1,86	5,18
Real Estate		4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	2,78
Jasa Perusahaan		7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		4,63	3,20	2,05	6,97	4,66	-0,03	-0,33
Jasa Pendidikan		7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,61	0,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		6,69	5,16	6,84	7,15	8,66	11,56	10,46
Jasa lainnya		8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	2,12
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR		4,17	4,58	4,77	4,95	4,96	-1,59	3,27
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK		32,55	19,06	13,28	10,82	6,52	-13,13	14,85
PRODUK DOMESTIK BRUTO		4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber. Badan Pusat Statistik

IKU 3 Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode HS (*Harmonized System*) tahun 2017 sebanyak 482 kode HS dalam

8 digit yang dijual ke luar negeri dan dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 18. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021

SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat													
IKU-3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020- 2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
4,17	4,52	4,86	4,94	5,2	6,05	5,72	94,55	10	6,63	86,27	8,00	71,5	

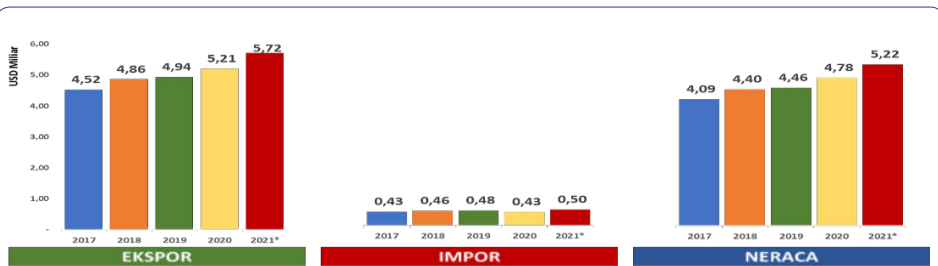
*angka sementara (Sumber Data : BPS)

Untuk IKU 3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan target di Renstra KKP sebesar USD 6,63 miliar dan mengalami penyesuaian di Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja menjadi sebesar USD6,05 miliar. Penyesuaian target ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi karena pandemi Covid 19. Pada periode Januari - April 2020, beberapa negara tujuan ekspor perikanan mengalami penurunan permintaan impor (pertumbuhan negatif) terutama di Amerika Serikat (-0,11), Jepang (-15%),

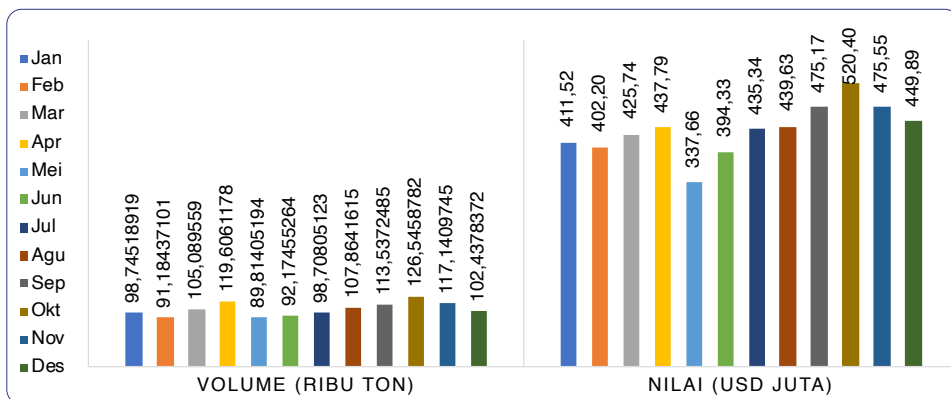
Korea (-11%) dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Sedangkan Uni Eropa triwulan I tahun 2020 juga turun sebesar -23 persen. Berdasarkan data Ekspor Januari-April 2020, ekspor perikanan Indonesia ke tujuan AS, Jepang dan UE hanya mencapai 58,7 persen. Penurunan target tersebut, mempengaruhi target ekspor perikanan yang diperkirakan pada tahun 2021 hanya mencapai USD6,05 miliar. Perhitungan penyesuaian target ekspor beserta asumsi dan perkiraan capaian di tahun 2021 tersebut telah dibahas bersama

antara KKP dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam *trilateral meeting* Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah KKP Tahun 2021 pada 28 Mei 2020.

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2021 mencapai USD 5,72 miliar (angka sementara) atau mencapai 94,55 persen dari target tahun 2021 sebesar USD6,05 miliar. Jika dibandingkan dengan target 2024, capaian tahun 2021 telah mencapai 71,50 persen. Sementara jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar USD5,2 miliar terjadi peningkatan sebesar 10 persen.



Pada Tahun 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 5,72 miliar sedangkan nilai impor produk perikanan sebesar USD 0,5 Miliar, sehingga neraca perdagangan surplus USD 5,22 Miliar atau meningkat 9,2% dibanding tahun sebelumnya



Gambar 21. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Jan s.d Desember 2021

Nilai ekspor produk perikanan pada bulan Desember 2021 mencapai USD 449,89 juta atau turun 5,33 persen apabila dibandingkan dengan nilai ekspor bulan November 2021 sebesar USD 475,55 juta (Gambar 21). Meskipun demikian trend nilai ekspor hasil perikanan dari Januari s.d. Desember 2021 meningkat rata-rata sebesar 4,51 persen per bulan.

Tabel 19. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2021

Komoditas Utama	Volume (Ribu Ton)	Persentase thd Total (%)	Nilai (USD Juta)	Persentase thd Total (%)
Cumi-Sotong-Gurita	168,23	13,78	618,93	10,83
Rajungan-Kepiting	31,70	2,60	611,22	10,69
Rumput Laut	225,61	18,48	345,11	6,04
Tuna-Tongkol-Cakalang	174,59	14,30	733,07	12,82
Udang	250,70	20,54	2.228,90	38,99
Lainnya	369,96	30,31	1.179,12	20,63
Total	1.220,79		5.716,37	

Keterangan : angka sementara s.d Bulan Desember 2021
Sumber Data : BPS

Komoditas utama ekspor dengan nilai ekspor tertinggi yakni USD 2,23 miliar adalah udang. Nilai ini setara dengan 38,99 persen terhadap nilai ekspor total dengan volume ekspor sebesar 250,70 ribu ton udang (Tabel 19).

Tabel 20. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2021

Komoditas Utama	Volume (Ribu Ton)	Persentase thd Total (%)	Nilai (USD Juta)	Persentase thd Total (%)
China	428,06	35,06	890,14	15,57
Japan	95,40	7,81	621,01	10,86
United States	263,25	21,56	2.533,00	44,31
Lainnya	434,09	35,56	1.672,22	29,25
Total	1.220,79		5.716,37	

Keterangan : angka sementara s.d Bulan Desember 2021
Sumber Data : BPS

Negara tujuan ekspor dengan nilai ekspor tertinggi sebesar USD 2,53 miliar atau 44,31 persen dari nilai ekspor total adalah Amerika Serikat (Tabel 20). Berdasarkan asal provinsinya, nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 didominasi oleh Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi mencapai 31,17 persen atau sebesar USD 1,78 miliar, diikuti oleh provinsi DKI Jakarta 19,34 persen (USD 1.105,56 juta) dan Provinsi Sulawesi Selatan 7,54 persen atau mencapai USD 430,83 juta (Tabel 21).

Tabel 19. Capaian Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Asal Provinsi Tahun 2021

Komoditas Utama	Volume (Ribuan Ton)	Persentase thd Total (%)	Nilai (USD Juta)	Persentase thd Total (%)
DKI Jakarta	274,78	22,51	1.105,56	19,34
Jawa Timur	348,00	28,51	1.781,87	31,17
Sulawesi Selatan	165,31	13,54	430,83	7,54
Lainnya	432,71	35,44	2.398,11	41,95
Total	1.220,79		5.716,37	

Keterangan : angka sementara s.d Bulan Desember 2021
Sumber Data : BPS

Tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 disebabkan oleh :

- a. Adanya hambatan ekspor ke China.

Adanya pandemi Covid-19, China mempersyaratkan adanya pengujian bebas covid-19 bagi produk perikanan, kemasan, personil pengolah, dan lingkungan. Hal ini berdampak pada penolakan ekspor produk perikanan Indonesia karena adanya temuan kontaminasi Covid-19 pada kemasan dan produk

perikanan Indonesia yang di ekspor ke China. Disatu sisi, aturan ini juga menimbulkan tambahan biaya yang cukup besar bagi eksportir.

- b. Adanya hambatan distribusi/ logistik hasil perikanan ke negara tujuan ekspor yang disebabkan diantaranya oleh kelangkaan *space reefer* kontainer di *mother vessel*, kelangkaan ketersediaan reefer kontainer, tingginya *freight rate*, lemahnya daya tawar eksportir perikanan terhadap *Main Line Operator*

(MLO), dan tidak adanya informasi resmi jadwal, rute, dan kapasitas muat kepada eksportir.

- c. Hambatan dalam pengusulan penambahan nomor registrasi bagi eksportir baru terutama untuk ekspor ke negara China, Russia, dan Uni Eropa.
- d. Hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif ke pasar tujuan ekspor non-tradisional (Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin). Hal ini terjadi karena Indonesia belum mempunyai kesepakatan kerjasama perdagangan sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

- a. berkoordinasi antar kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri), termasuk atase perdagangan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di China, stakeholder serta asosiasi perikanan. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, *The General Administration*

of Customs of the People's Republic of China (GACC) telah melakukan inspeksi secara virtual pada unit pengolah ikan Indonesia untuk melihat implementasi protokol kesehatan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan di Unit Pengolahan Ikan. Pembahasan *Cooperation Agreement* khususnya format *Health of Certificate (HC)* telah selesai, namun pembahasan protokol inspeksi produk perikanan dan mekanisme penambahan nomor registrasi eksportir belum selesai.

- b. koordinasi lebih lanjut membahas kelangkaan *space reefer* kontainer di *mother vessel*, kelangkaan ketersediaan reefer kontainer dan tingginya *freight rate*. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya: 1). perlunya reposisi pergerakan kontainer. Reposisi pergerakan kontainer via Kalog yang rencananya akan langsung masuk ke kawasan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan dapat memaksimalkan operator pelayaran dalam

- negeri. Reposisi pergerakan kontainer juga diharapkan mampu mengatur pergerakan kontainer dari Tanjung Perak ke Wilayah Timur Indonesia dan reposisi peti kemas kosong dari Terminal Peti Kemas menuju ke Pabrik.
- 2). Perlunya pendataan jumlah kebutuhan perkiraan kontainer dengan merujuk data perkiraan volume ekspor produk perikanan per negara per komoditas ekspor.
 - 3). Kenaikan harga sewa kontainer dapat diminimalisir jika terdapat keseimbangan supply-demand komoditas antar Wilayah Barat dan Timur Indonesia maupun ekspor-impor.
 - 4). Adanya rencana pemberian subsidi bagi UMKM berupa subsidi biaya freight.
- c. melakukan penyelesaian pembahasan protokol inspeksi produk perikanan dan mekanisme penambahan nomor registrasi eksportir baru.
 - d. melakukan upaya diplomasi untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika dan Rusia.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian nilai

ekspor hasil perikanan tahun 2021 antara lain :

- a. Kegiatan promosi skala internasional

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kelautan dan perikanan Indonesia dan branding Indonesia di pasar global, memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial. Promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional dilaksanakan melalui keikutsertaan pada pameran skala internasional, kerjasama promosi internasional, penguatan bahan promosi berbasis elektronik dan pemanfaatan media digital dan website promosi.

Pada tahun 2021, kegiatan promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional ditargetkan menghasilkan nilai potensi transaksi sebesar USD 20.000. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai potensi transaksi hingga akhir tahun berjalan yang dicatat selama pameran berlangsung dan berasal dari laporan transaksi harian yang dicatat oleh setiap peserta selama pameran berlangsung. Untuk mencapai target tersebut

KKP telah merencanakan untuk berpartisipasi pada 5 (lima) pameran internasional yang meliputi produk *Seafood* dan olahan rumput laut yaitu *Seafood Expo North Amerika (SENA)*, *Seafood Expo Global (SEG)*, *Food Ingredient Europe (FIE)*, *Expo 2020 Dubai*, dan Trade Expo Indonesia (TEI).

Dari kelima pameran tersebut, pameran SENA dan SEG ditunda pelaksanaannya menjadi di tahun 2022 karena pandemi Covid-19 global yang masih berlangsung dan berdampak pada pembatasan pertemuan skala besar, pembatasan perjalanan antar negara, dan pembatasan fisik (*physical distancing*) yang terus diperluas. Sedangkan untuk pameran FIE dan TEI tetap dilaksanakan namun dengan menggunakan platform baru melalui *virtual exhibition* (fasilitasi komunikasi, interaksi, negosiasi dan transaksi secara *online*). Dengan adanya penundaan pelaksanaan pameran Internasional dan situasi pandemi Covid-19 di dalam negeri yang terus meningkat, maka anggaran kegiatan promosi produk kelautan

dan perikanan di pameran skala internasional dilakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19, serta dilakukan penyesuaian output dari nilai transaksi dari promosi skala internasional pada tahun 2021. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka promosi produk perikanan di luar negeri pada tahun 2021 antara lain:

- 1) Pengembangan materi promosi luar negeri berbasis digital

Dalam rangka meningkatkan citra positif produk kelautan dan perikanan Indonesia di luar negeri, telah dibuat materi promosi luar negeri berbasis digital yaitu video branding Indonesia *Seafood*, video komoditas unggulan ekspor (Indonesian Tuna, Indonesia *Shrimp*, Indonesian Lobster), dan video *Lighthouse of Indonesian Seas*. Materi promosi digital tersebut akan digunakan sebagai bahan promosi KKP di setiap kesempatan pameran internasional dan di dalam negeri,

serta sebagai materi promosi yang akan di sampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara mitra. Saat ini materi promosi digital tersebut sudah ditayangkan di beberapa media antara lain Website dan media sosial Indonesia *Seafood* dan Video *Lighthouse of Indonesian Seas* di Neptune TV.

2) Keikutsertaan pada pameran *The World Ornamental Aquarium* (WOA) 2021

WOA merupakan event virtual bagi industri dan komunitas ikan hias, yang diselenggarakan oleh *Ornamental Fish International* (OFI) pada tanggal 12 – 14 Mei 2021 untuk konferensi dan tanggal 15 Mei – 5 Juni 2021 untuk pameran. Pada kesempatan tersebut, KKP menjadi platinum sponsor dan memfasilitasi pameran virtual bagi beberapa asosiasi dan pelaku usaha ikan hias yaitu INAFISH, Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), CV Leopard Aquatic

Indonesia, dan *Indopisces Exotica*. Dari pameran ini tercatat transaksi potensial sebesar USD 22.000 dengan produk yang diminati adalah ikan hias air tawar dan tanaman air. Pengunjung booth sebagian besar berasal dari Yunani, Jepang dan Australia.

3) Pengembangan website Indonesia *Seafood*

Pengembangan website Indonesia *Seafood* dilakukan dengan merevitalisasi website indonesiafisheries.id. Laman website Indonesia *Seafood* dapat diakses melalui indonesiaSeafood.id. Website dimaksud diharapkan menjadi platform digital untuk mempromosikan produk dan mengkomunikasikan kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia kepada pelaku pasar luar negeri. Konten utama dalam website terdiri dari : (a) direktori produk kelautan dan perikanan Indonesia; (b) direktori supplier/eksportir produk kelautan dan perikanan Indonesia; (c) data dan

fakta tentang produk kelautan dan perikanan Indonesia; (d) berita/kebijakan terkini, dan (e) event promosi luar negeri.

KKP juga telah meminta asosiasi dan perusahaan produk kelautan dan perikanan Indonesia untuk melakukan pemutakhiran data dan informasi secara mandiri terhadap profil perusahaan serta produk yang dihasilkan di dalam website tersebut

Sampai saat ini tercatat 801 supplier/eksportir dan 82 jenis produk yang terdaftar di dalam website dengan komoditas utama yaitu *Shrimp*, tuna, *cephalopods*, *crab*, *seaweed*, dan lain-lain. Meskipun belum diluncurkan secara resmi, website indonesia *seafood.id* telah dikunjungi oleh 708 visitors yang berasal dari beberapa negara diantaranya Indonesia (497), Amerika Serikat (457), China (182), Jerman (42), Perancis (40), dan lain-lain. KKP telah memperkenalkan website indonesia *Seafood.id* kepada asosiasi dan pelaku usaha sektor kelautan dan

perikanan, serta mitra K/L dan perwakilan tetap pemerintah RI di beberapa negara mitra dagang.

4) Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN)

TSIN merupakan web virtual program SMART-Fish I, yang membangun jejaring kerja pusat/ lembaga penelitian dan pengembangan, dan para peneliti serta pakar rumput laut di Indonesia. TSIN dapat diakses dengan mengunjungi laman www.seaweednetwork.id. Saat ini tercatat 205 experts dengan 7 keahlian dan 29 R & D center yang telah bergabung di web virtual. KKP bekerjasama dengan Minapoli selaku media partner melakukan optimalisasi website TSIN melalui pemanfaatan *Search Engine Optimization* (SEO) dan *Search Engine Marketing* (SEM), pemutakhiran database dan pengelolaan konten TSIN, serta pemeliharaan domain dan server. Dalam rangka pengembangan industri rumput laut nasional, juga

melakukan optimalisasi peran Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) melalui pelaksanaan kegiatan FGD, workshop, bimbingan teknis, webinar, dan lain-lain.

5) Pengembangan Branding Udang

Dalam rangka penguatan citra komoditas udang Indonesia di pasar internasional sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor, KKP bekerjasama dengan SMART-Fish Indonesia, SIPPO dan AP5I/FUI telah

melakukan penguatan branding udang. Upaya penguatan branding udang Indonesia diharapkan dapat meningkatkan citra udang dan memperluas pangsa pasar baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Proses pengembangan branding udang memakan waktu selama 3 bulan dengan output terciptanya logo dan tagline dari *brand* udang Indonesia serta tersedianya draft *communication and promotion strategy*.



Gambar 22. Logo dan Tagline *Brand* Udang Indonesia

Selanjutnya *brand* udang Indonesia diserahkan kepada AP5I bersamaan dengan pengembangan website udang Indonesia untuk selanjutnya dapat diperkenalkan kepada pasar oleh KKP dan SIPPO program.

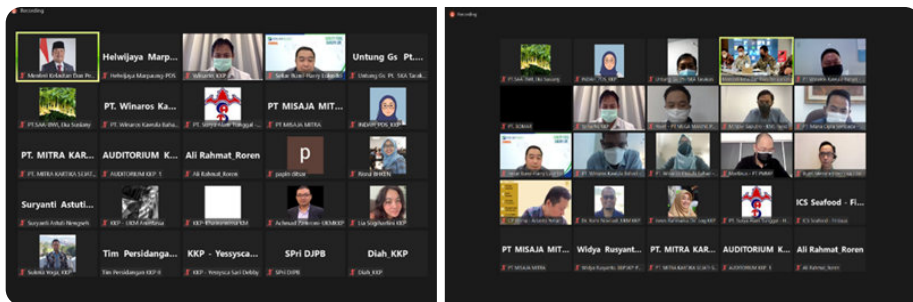
Setelah *brand* diperkenalkan, pemeliharaan dan aktivasi *brand* tersebut akan menjadi tanggung jawab AP5I selaku owner dari *brand* udang Indonesia. Laman website Indonesian *Shrimp* bisa diakses pada: <https://www.>

indonesian *Shrimp.org*.

6) Audiensi Asosiasi/
Eksportir Komoditas
Udang dengan Menteri
Kelautan dan Perikanan

Audiensi dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 26 Agustus 2021 dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) dan dihadiri

asosiasi dan stakeholder udang yaitu AP5I, SCI, HPPI, dan pelaku usaha perikanan serta pejabat eselon 1 terkait lingkup KKP. Audiensi bertujuan untuk menjangkau data dan informasi hulu hilir dari seluruh stakeholder udang guna mencapai target peningkatan ekspor udang.



Gambar 23. Audiensi Asosiasi/Eksportir Komoditas Udang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

7) Keikutsertaan pada World
Expo 2020 Dubai

Dalam rangka meningkatkan citra produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan (MEASA), KKP berpartisipasi pada World Expo 2020 Dubai. KKP berpartisipasi pada rolling exhibition di Paviliun Indonesia pada tanggal 19-25 November 2021,

dengan kegiatan promosi yang dilakukan antara lain:

- a) Display produk premium *Seafood*, produk berbasis hasil laut, produk UMKM unggulan binaan program #pasarlautindonesia, handycraft kekerangan.
- b) Pemutaran video promosi *brand* Indonesia *Seafood* – Naturally Diverse: Safe

and Sustainable, dan *co-brand* Indonesian Tuna, Indonesian *Shrimp*, Indonesian Lobster serta video promosi lainnya, pada media tayang di business lounge, theatre dan mini stage/ indoor stage di area rolling exhibition.

8) Pertemuan dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai

KKP telah melakukan pertemuan dengan ITPC untuk menggali peluang akses pasar produk perikanan Indonesia ke PEA. Pada kesempatan pertemuan disampaikan materi promosi *brand* Indonesia *Seafood* dan komoditas utama perikanan lainnya berupa video dan website Indonesia *Seafood* untuk dijadikan materi promosi ITPC. Selain itu disampaikan juga sampel/ dummy produk kelautan dan perikanan untuk dapat didisplay di ruang pameran ITPC Dubai.

b. Penyusunan Strategi Akses

Pasar Negara Tujuan Ekspor
Sepanjang tahun 2021 KKP telah berkoordinasi untuk menyusun strategi akses pasar negara tujuan ekspor yang mencakup posisi Rule of Origin (ROO) dalam Skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pembahasan Transposisi Komitmen Jadwal Tarif Perjanjian RCEP dari kode HS 2012 ke HS 2017, Penyusunan To Do List Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Pembahasan Usulan Pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan Afghanistan, Persiapan Expert Meeting on the HS 2017 dalam rangka Implementasi Persetujuan IE-CEPA, Persiapan Pertemuan Intersesi Perundingan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA), Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Virtual Trade Policy Dialogue on Understanding Non Tariff Measures on Agriculture, Forestry, and Fisheries Sectors to Enhance Trade to Improve Rural Development and Poverty Alleviation in The Asia Pacific Region, Pertemuan FAO on COFI, Persiapan dan Perundingan Negotiating

Group on Rules Session Fisheries Subsidies – WTO Cluster Februari, Pertemuan MKP dengan Duta Besar RRT, Pembahasan Counterdraft PoA Implementasi MoU Kerja Sama KKP RI - Persatuan Emirat Arab (PEA), Pembahasan Stocktaking Isu Perdagangan Bilateral RI – RRT, Pembahasan Kolaborasi Ekspor UKM, Pembahasan Evaluasi Perpanjangan MoU KKP RI – Mozambik, Persiapan Pertemuan Interim RCEP SWGROO, Persiapan Perundingan Intersesi Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA), Pembahasan Peningkatan Ekspor Indonesia ke RRT, Koordinasi Posisi Rule of Origin (ROO) dalam Skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA); Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dalam Fisheries Subsidies pada Forum WTO; Percepatan Penanganan Kasus Penolakan oleh General Administration of Custom China (GACC); Koordinasi Penyusunan Daftar Request-Offer

dalam kerangka Kerjasama Indonesia-Uni Emirate Arab (UEA) CEPA; Pembahasan Penguatan Kerjasama (PKTA) Indonesia-Rusia; Pertemuan ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM) dan SEOM-Dialogue Partners Consultations; Pembahasan Market Access Persiapan 2nd Round Negotiations PTA-Mauritius; Pembahasan Usulan Kerjasama Bisnis Indonesia-Korea; Rapat Koordinasi Evaluasi Importasi Produk Perikanan; Koordinasi Data Ekspor Nori-Rumput Laut Indonesia dan Dunia; Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan; Pembahasan Konsultasi Publik Generalised Scheme of Preferences (GSP) Pemerintah Inggris; Persiapan Joint Committee Meeting (JCM-16) Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); Sidang Sub Committee Trade in Goods pada Rangkaian The 16th Joint Committee Meeting IJEPA; Persiapan Business Matching Indonesia – Singapura; Virtual Business Matching

dalam kerangka Indonesia – Singapore Agribusiness Working Group (IS AWG); Permasalahan Transposisi HS 2012-2017 dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA); Persiapan Negotiating Group on Rules Fisheries Subsidies WTO. Pembahasan Kerjasama Indonesia-Kuwait; Perkembangan kerjasama Marine Stewardship Council (MSC), Penyusunan Harvest

Control Rule (HCR) Rajungan, Pembahasan Trade in Goods (TIG) dan Request/Offer List dalam rangka Perundingan Indonesia – UAE CEPA (IUAE-CEPA), Penanganan Hambatan Ekspor ke Amerika Serikat terkait Submisi kepada NOAA terkait Marine Mammals Protection Act (MMPA), Pembahasan Ekspor Wild Caught *Shrimp* Ke Amerika Serikat, serta Pembahasan Transposisi 2022 untuk Komitmen Indonesia di IJEPA.

IKU 4 / Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi

domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Target konsumsi ikan tahun 2021 adalah sebesar 58,08 kg/kapita.

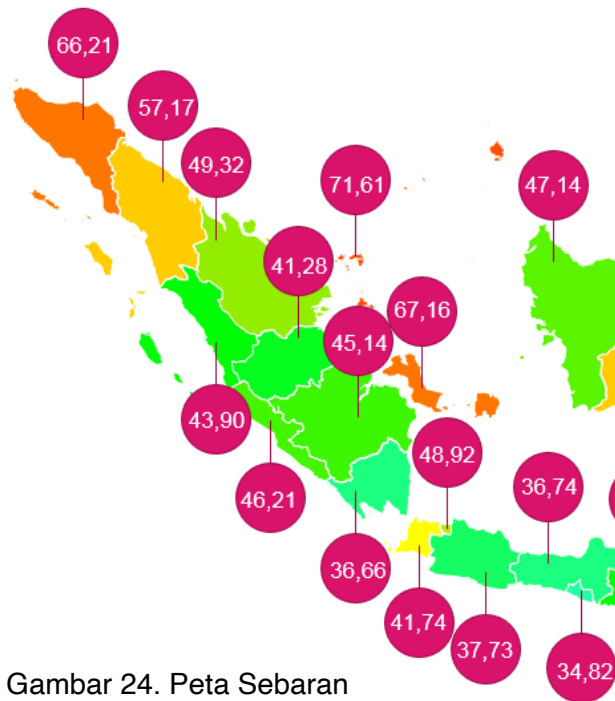
Tabel 18. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2021

SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat												
IKU-4 Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)												
Realisasi						2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
43,94	47,34	50,69	52,65	54,56	58,08	55,37	95,33	1,48	58,08	95,33	62,05	89,23

*Angka sementara

Target konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2021 adalah sebesar 58,08 kg/kapita/tahun dan diperkirakan tercapai 55,37 kg/kapita atau setara dengan 95,33 persen. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni 62,05 kg/kapita/tahun maka capaian ini setara dengan 89,23 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pada periode tahun 2020-2021 merupakan puncak pandemi Covid-19 di Indonesia. Selama periode tersebut, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia secara umum menurun akibat adanya kebijakan Pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi aktivitas kerja dan aktivitas bepergian. Akibatnya kegiatan produksi menurun dan kegiatan pemasaran/distribusi barang/jasa terhambat, menyebabkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap barang/jasa termasuk produk perikanan. Jika dibandingkan capaian tahun 2020, yakni 54,56 kg/kapita maka capaian tahun ini diperkirakan meningkat sebesar 1,48 persen. Selama periode tahun 2016-2021, angka konsumsi ikan nasional diperkirakan terus meningkat rata-rata sebesar 4,79 persen per tahun.

Berdasarkan wilayah provinsi, capaian sementara angka konsumsi ikan nasional tahun 2021 tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 77,49 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar, dilanjutkan oleh Provinsi Maluku Utara sebesar 75,75 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar dan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73,94 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar. Adapun capaian sementara AKI Nasional Tahun 2021 terendah terdapat di Provinsi DI. Yogyakarta sebesar 34,82 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar, dilanjutkan oleh Provinsi Lampung sebesar 36,66 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 36,74 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar.



Gambar 24. Peta Sebaran Konsumsi Ikan Tahun 2021

Guna mendukung peningkatan konsumsi ikan, KKP telah menginisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga), yaitu :

1) Menjamin ketersediaan produk hasil perikanan dengan kualitas baik (supply), dengan cara :

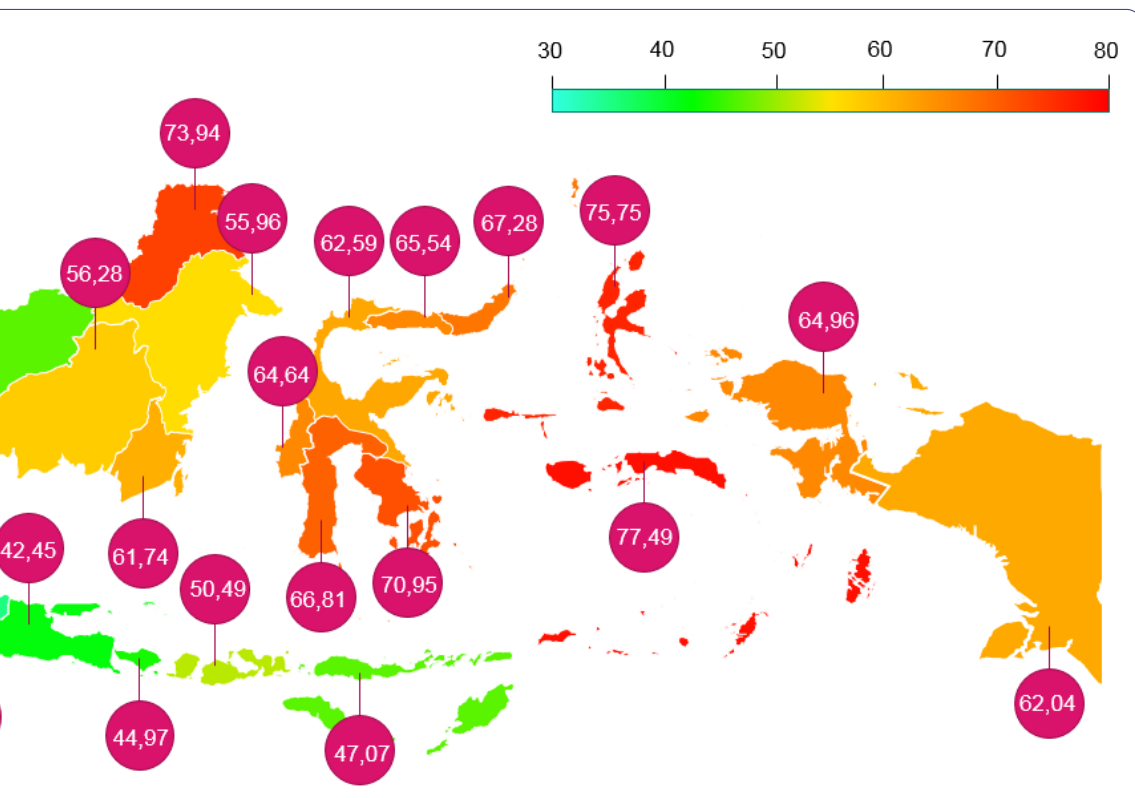
- Pembangunan gudang beku portabel, pengadaan sarana sistem rantai dingin (Chest Freezer), serta sarana pascapanen

portabel;

- Kegiatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/ industri dengan mutu baik dan harga stabil.

2) Mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau hasil perikanan (accessibility), dengan cara :

- Pembangunan/revitalisasi



- pasar ikan di daerah potensial;
- Pengadaan kendaraan berpendingin roda 4 dan roda 6 serta non-berpendingin roda 4.
- 3) Mendorong peningkatan konsumsi produk hasil perikanan (consumption), dengan cara :
- m e l a k s a n a k a n promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di 120 titik (53.500 paket gemarikan kepada kelompok target penanganan *stunting*, yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif dan masyarakat rawan gizi lainnya) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Paket gemarikan tersebut berisi beberapa jenis produk olahan ikan, yang merupakan salah satu sumber asupan pangan kaya protein dan Omega 3 untuk mendukung program prioritas penanganan *stunting*;
 - Pengadaan peralatan sarana pengolahan, sarana pemasaran, perlengkapan pedagang serta pembangunan sentra kuliner;
 - Pembinaan diversifikasi produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
 - Menyediakan produk olahan perikanan yang dijamin mutu dan keamanannya dengan Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) sebanyak 4.085 produk selama tahun 2021.
 - Menyediakan produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Data produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan di UPT Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), yaitu: (1) sertifikasi produk kelautan dan perikanan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan BBP3KP dan (2) pengujian nutrisi dan mutu di Laboratorium BBP3KP untuk membuktikan pemenuhan standar mutu SNI/BPOM/ Dinas Kesehatan yang berlaku dengan tujuan

pengantuman nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada kemasan produk. Produk dimaksud berjumlah 48 produk dari target 35 produk. Layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan dilaksanakan bagi 61 produk dari target 70 produk, akibat beberapa produk yang ditargetkan

mengalami kendala produksi dan pemasaran akibat pandemi covid-19 sehingga tidak melanjutkan sertifikasinya; sedangkan pengujian produk kelautan dan perikanan menghasilkan sejumlah 1900 data dari target 1000 data, sepanjang tahun 2021.



Gambar 25. Realisasi Kegiatan Prioritas KKP dalam Mendukung Peningkatan Konsumsi Ikan Konsumsi Ikan Tahun 2021



Gambar 26. Penyaluran Kendaraan Pemasaran Roda Dua dan Roda Tiga Tahun 2021

Untuk meningkatkan konsumsi ikan, kedepan akan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya :

1. **m e n g k a m p a n y e k a n** pentingnya kandungan ikan bagi kesehatan kepada masyarakat secara massif. Di tahun 2022, KKP telah merencanakan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) sebanyak 130 promosi termasuk kepada kelompok target percepatan penurunan *stunting*, yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif dan masyarakat rawan gizi

lainnya.

2. pengadaan peralatan sarana pengolahan, sarana pemasaran, perlengkapan pedagang serta pembangunan sentra kuliner.
3. pembinaan diversifikasi produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen.
4. menyediakan produk olahan perikanan yang dijamin mutu dan keamanannya melalui Sertifikat Kelayakan Produk (SKP).
5. menyediakan produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS-3) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Sumber daya kelautan dan perikananberkelanjutandilakukan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk memenuhi kepentingan

generasi masa depan. Sasaran Strategis 3 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 5 Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman dan IKU 6 yaitu Luas Kawasan Konservasi Perairan

IKU 5 Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis Yang Aman

Pengelolaan perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi

pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang

perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan penghitungan alokasi sumber daya ikan. Adapun perhitungan IKU ini adalah dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017). Sebagai data pembanding, perhitungan indikator "Proporsi

Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman" didukung oleh 2 kegiatan utama yaitu, Log Book Penangkapan Ikan (LBPI) dan Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer). Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikangambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Observer selama di kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data Log Book Penangkapan Ikan (LBPI) juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumberdayaikan,yangmerupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan

yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah

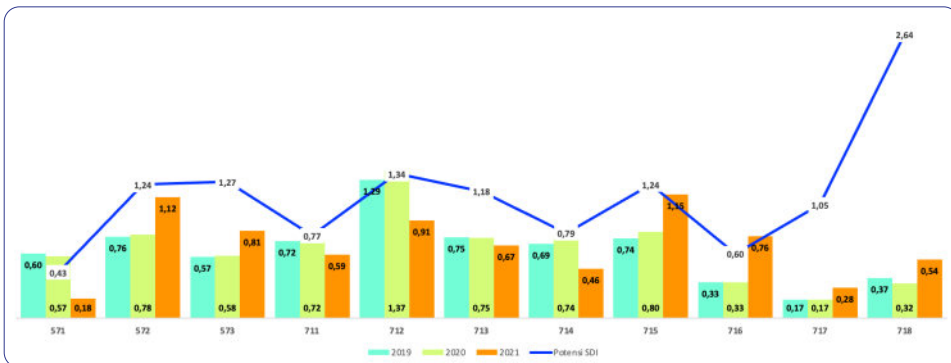
Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiaserta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 23. Capaian Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2021

Sasaran Strategis 3 : Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan												
IKU-5 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman												
Realisasi						2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	56,91	≤67	59,69	120,00	4,88	≤67	120,00	≤80	65,97

*Angka sementara

Realisasi Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis Yang Aman tahun 2021 sebesar 59,69 atau telah tercapai 120 dari target ≤67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tangkapan berada dalam batas biologis yang aman, dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan tangkap. Selanjutnya potensi sumber daya ikan harus terus dikelola secara optimal dan berkelanjutan sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan dapat sama-sama dijaga secara seimbang.



Gambar 27. Grafik Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Tahun 2019-2021 Terhadap Potensi Sumber Daya Ikan Per WPP

Pada gambar di atas tahun 2021, menunjukkan bahwa secara total produksi terdapat 1 (satu) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melampaui potensi yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data potensi yang diterbitkan hanya mencakup 9 (sembilan) kelompok jenis ikan, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi. Sedangkan data volume produksi yang digunakan adalah total semua kelompok jenis ikan termasuk spesies tuna, cakalang, ubur-ubur, penyu, binatang berkulit keras, kekerangan, sotong, gurita, teripang dan rumput laut.

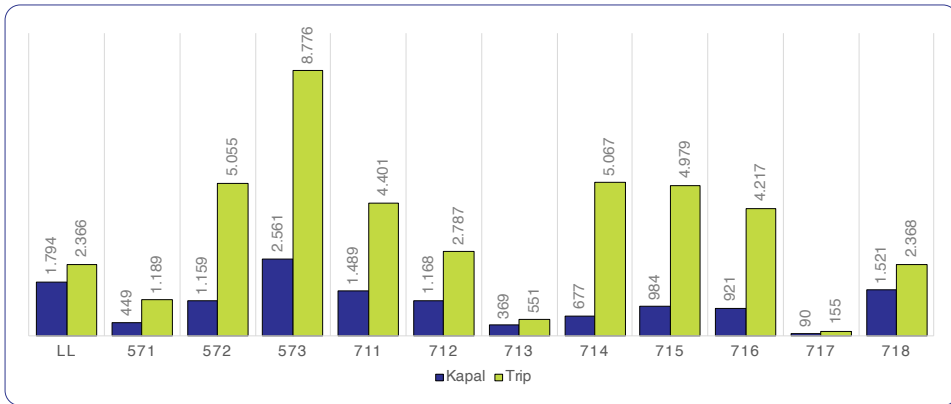
Indikator ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals Tujuan ke-14 Ekonomi Kelautan yaitu “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman”. Target angka dasar tahun 2019 sebesar 56,11 dan tahun 2024 sebesar 73,23. Bila dibandingkan capaian tahun 2021 telah melampaui angka tahun 2020 namun masih di bawah target 2024. Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan masih di bawah batasan

biologis yang aman.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, tentunya diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang makin optimal, serta harga ikan yang diharapkan lebih stabil. Terkait dengan pendataan, KKP telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan, antara lain penambahan kegiatan pendataan yang bukan lagi berbasis pada data hasil tangkapan melainkan pada data yang berbasis daerah penangkapan. Selain untuk penguatan pendataan, kegiatan ini juga bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelaporan log book penangkapan ikan (LBPI) yang akurat untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut.

Pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait

data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.



Gambar 28. Grafik Sebaran Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan Per WPP NRI dan Laut Lepas Tahun 2021

Pengumpulan Data dan Verifikasi data Logbook Penangkapan Ikan dengan menggunakan Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31 Desember 2021, Data kapal perikanan yang telah melaporkan Log Book Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 7.710 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 36.830 trip. Log Book Penangkapan ikan juga telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.

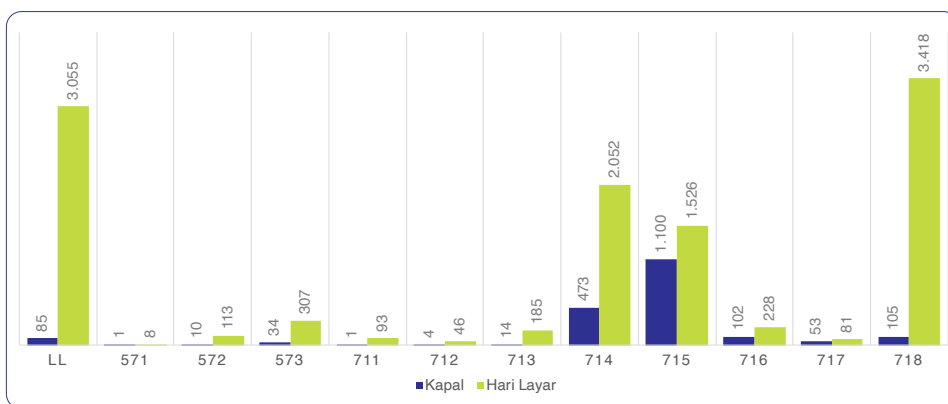
Adapun pelaksanaan dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa catatan penting dalam meningkatkan perbaikan kualitas data Log Book Penangkapan ikan, antara lain :

- Terdapat beberapa kapal perikanan yang masih melakukan penurunan ukuran GT kapal. Fasilitas pelabuhan perikanan masih kurang memadai sehingga banyak kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan umum sehingga pencatatan datanya tidak

- tercover dengan baik.
- Kurangnya kesadaran pemilik kapal, nakhoda dan nelayan untuk melaporkan kegiatan penangkapannya.
- Kendala update/pembaruan aplikasi karena keterbatasan pada perangkat elektronik pengguna, sehingga masih menerapkan pendataan secara manual.
- Sosialisasi tentang e-logbook

penangkapan ikan masih kurang baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah daerah.

- Perlunya dukungan resmi dalam penginputan data dalam menggunakan elektronik logbook sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan kebutuhan dalam melaksanakan pendataan melalui digital.



Gambar 29. Grafik Sebaran Penempatan Observer Per WPP NRI dan Laut Lepas Tahun 2021

Penempatan Observer dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2021 dengan penempatan dilaksanakan di 14 UPT Perikanan Tangkap dan 17 UPTD sesuai dengan KEPMEN-KP Nomor 11 Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan utama observer diatas Kapal perikanan dilaksanakan mulai Januari s.d 31 Desember 2021 yang dilaksanakan pada 11 WPPNRI

dan Laut Lepas (WPP 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 dan Laut Lepas) dengan 1.982 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 11.111 hari layar dengan keterangan sebagai berikut:

- melalui Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 187 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.992 hari layar di wilayah

pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas.

- melalui Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 1.788 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar sebesar 5.649 Hari Layar.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian IKU tersebut tahun 2021, antara lain:

- Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
 - Bimtek Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan.
 - Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2021.
 - Sosialisasi Penerapan e-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Perikanan Tangkap Tahun 2021.
 - Workshop Teknis “Optimasi Aplikasi e-Logbook dalam Menunjang Pencapaian Pengelolaan Perikanan Terukur”.
- Sosialisasi aplikasi Observer On Board (OBOR) kepada Petugas Observer, Konsultan IT, dan Mitra KKP.
 - Evaluasi Pelaksanaan Observer on Board.
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Observer diatas Kapal Perikanan dan Kapal Pengangkut Ikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan dan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Tahun 2021 terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020, disebabkan karena :

- a. memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Petugas Observer Indonesia di 11 WPPNR; memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Petugas Observer di atas Kapal Perikanan dan Meningkatkan Kapasitas Petugas Entry dan Verifikator Logbook Penangkapan Ikan lingkup

Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;

- b. Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Log Book Penangkapan Ikan dan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Observer di atas Kapal Penangkapan Ikan; Memberikan Sosialisasi kepada stakeholder terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari KKP secara berkala; Menginventarisasi isu dan permasalahan pendataan perikanan tangkap serta melakukan upaya dan tindaklanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik dengan menambahkan modul-

modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut, sepanjang tahun 2021 KKP mengalami permasalahan di triwulan II dan III dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dimaksud diantaranya :

- Peningkatan Kasus COVID-19 di seluruh Indonesia mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi Logbook Penangkapan Ikan menjadi terlambat dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penangkapan Ikan oleh Kapal- Kapal Penangkapan Ikan menjadi jauh lebih sedikit dikarenakan banyak Anak Buah Kapal (ABK) yang terjangkit COVID-19 sehingga kegiatan Penangkapan Ikan menjadi terganggu;
- Pelaporan melalui e-log book penangkapan ikan masih tergolong rendah, antara lain disebabkan (i) belum semua pelaporan kapal menerapkan e-log book penangkapan ikan sehingga perlu meningkatkan penggunaan e-log book penangkapan ikan di

Pelabuhan Perikanan; dan (ii) Kepatuhan pelaku usaha, nakhoda dan nelayan untuk menggunakan e-log book penangkapan ikan masih rendah terlihat dari kepatuhan pengiriman data log book penangkapan ikan Pelaku usaha, nakhoda dan nelayan masih tergolong rendah.

- Infrastruktur Jaringan sebagai pendukung pelaksanaan e-log book penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan masih belum memadai, ini dapat terlihat dari minimnya Jaringan Internet di Pelabuhan Perikanan, sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data log book penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan belum berjalan maksimal;
- Sarana dan Prasarana pendukung pengumpulan dan verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan masih belum optimal;
- Kebijakan No Log Book No Surat Perintah Berlayar belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Pelabuhan Perikanan;
- Penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan masih belum optimal, masih terdapat ketidaksinkronan antara data dan tampilan dalam aplikasi;
- Kapasitas SDM Pemantau (Observer) masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- Masih rendahnya kualitas data yang disampaikan oleh Observer sehingga tingkat akurasi analisis data masih rendah dan belum dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya, dimana ini juga disebabkan sistem Pendataan kegiatan Operasional Penangkapan Ikan diatas Kapal masih menggunakan pencatatan melalui manual;
- Masih belum efektifnya penempatan observer di Pelabuhan Perikanan dikarenakan pelaksanaan penempatan Observer dengan sistem swakelola belum berjalan dengan optimal.
- Kepatuhan Pelaku Usaha/ Pemilik Kapal dalam penempatan Observer masih rendah, dimana belum semua Pelaku Usaha bersedia ditempatkan Observer;
- Pembiayaan menjadi salah satu isu utama dalam pembiayaan Observer diatas Kapal Perikanan, ini dapat dilihat dari keterbasan alokasi anggaran melalui APBN untuk membiayai hari layar observer

- dengan trip panjang; dan
- Sarana dan prasarana baik teknis (peralatan timbangan, alat ukur, dll) maupun non teknis (pakaian, dll) yang belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan di atas kapal ataupun port sampling dipelabuhan perikanan masih belum memadai.

Namun demikian permasalahan yang timbul selama triwulan II dan III tersebut, segera ditindaklanjuti diantaranya melalui :

- Pelaksanaan Implementasi Log Book Penangkapan Ikan di pelabuhan perikanan tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi New Normal yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat;
- Meningkatkan penerapan LBPI di pelabuhan, melalui kontinuitas penyampaian penilaian pelabuhan;
- Penerapan sanksi kepada kapal yang tidak menerapkan e-log book penangkapan ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha, nakhoda dan nelayan secara berkala dan kontinu serta memberikan pengertian manfaat Log Book penangkapan ikan di masa mendatang, khususnya untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana dengan mengusulkan alokasi anggaran untuk hal tersebut pada alokasi anggaran tambahan pada pagu anggaran TA. 2022.
- Kebijakan No Log Book No SPB di Pelabuhan Perikanan terus dilaksanakan dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditujukan kepada semua stakeholder di Pelabuhan Perikanan;
- Melaksanakan kegiatan briefing dan debriefing observer (setiap sebelum dan sesudah naik kapal) oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- Melakukan perbaikan kualitas data dan analisis data observer dengan cara melakukan koordinasi bulanan pengolahan dan analisis data observer;
- Keterbatasan pembiayaan observer terkait Hari Layar diatasi dengan koordinasi dan membangun kerjasama

dengan pelaku usaha melalui Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN. Dimana dukungan mitra diharapkan dapat memaksimalkan penempatan observer di atas kapal perikanan;

- Koordinasi dan melakukan kerjasama secara kontinyu

dan berkala dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan.

IKU 6 Luas Kawasan Konservasi Perairan

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/

PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2020, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 24,11 juta hektare yang terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 12,21 juta hektar, baik kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- b. Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,56 juta hektar.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 7,34 juta hektar.

Target luas kawasan konservasi tercantum dalam Perjanjian Kinerja awal sebesar 24,6 juta hektar dan dengan adanya *refocusing* anggaran menyebabkan kegiatan identifikasi kawasan baru tidak dapat dilaksanakan. Anggaran tahun 2021 yang tersedia dimanfaatkan untuk meningkatkan status Kawasan Konservasi dari pencadangan menjadi penetapan sehingga dilakukan penyesuaian menjadi 24,11 juta ton.

Pada triwulan III tahun 2021, dilakukan perubahan perhitungan atau pengukuran

luas kawasan konservasi dan cara perhitungan luas kawasan konservasi. Pengukuran luas kawasan konservasi semula dilakukan secara semesteran menjadi triwulanan. Sedangkan teknis perhitungan luas kawasan konservasi adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi nasional dan daerah yang telah ditetapkan melalui SK Menteri, dicadangkan melalui SK Kepala Daerah, dan/atau yang dicadangkan melalui Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 24. Capaian Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) Tahun 2021

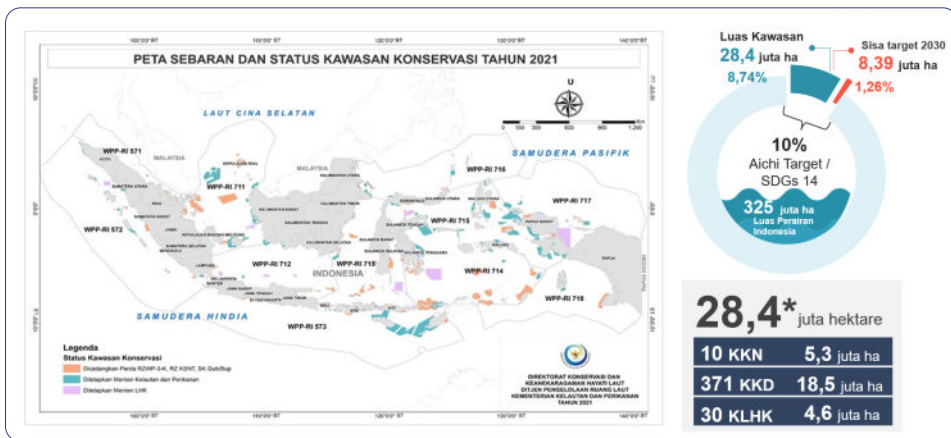
Sasaran Strategis 3. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan													
IKU-6. Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
17,3	17,9	19,1	20,87	23,14	24,11	24,1	28,4	117,84	17,79	24,2	117,36	26,9	105,58

Realisasi luas kawasan konservasi sebesar 28,4 juta ha, atau mencapai 117,84 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 24,1 juta hektar. Dari 28,4 juta ha, kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Nasional oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 5,34 juta ha, Kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seluas 4,6 juta ha, Kawasan konservasi daerah seluas 8,54 juta ha dan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah seluas 9,9 juta ha.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 yaitu sebesar 24,11 juta hektar, capaian tahun 2021 mengalami penambahan seluas 4,29 ha atau sebesar 17,79% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu seluas 26,9 juta hektar, maka luasan ini telah tercapai 105,58%.

Tabel 25. Rincian Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) Tahun 2021

No	Kewenangan	Luas	Jumlah	Unit Pengelola	WPP
A	Penetapan Menteri	18.449.185,30	109		
1.	Kawasan Konservasi Nasional	5.342.023,02	10	UPT Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)	8 WPP: 572, 573, 711, 713, 714, 715, 717, 718
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	4.557.443,30	10	KLHK	10 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717
3.	Kawasan Konservasi Daerah	4.722.898,04	30	UPTD	7 WPP: 571, 572, 573, 714, 715, 716, 717
		1.323.012,51	27	Cabang Dinas	5 WPP: 573, 712, 713, 714, 715
		2.503.808,43	21	Dinas	9 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716
B	Pencadangan	9.967.068,75	21		
	Kawasan Konservasi Daerah	9.967.068,75	302	Belum Dikelola	11 WPP: 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718
Total		28.416.254,05	411		



Gambar 30. Sebaran Luas Kawasan Konservasi Tahun 2021

Keberhasilan capaian kinerja luas kawasan didukung beberapa hal, diantaranya:

a. adanya perubahan aturan dalam pencadangan atau penetapan kawasan konservasi yaitu sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, luas kawasan konservasi dihitung berdasarkan pencadangan oleh Kepala Daerah (Surat Keputusan) dan/atau penetapan oleh Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) namun setelah diterbitkannya peraturan

tersebut, kawasan konservasi yang telah dituangkan dalam Perda RZWP3-K, namun belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dihitung juga sebagai luas kawasan konservasi.

- b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah RZWP3-K.
- c. Komitmen Pemerintah Pusat yang secara terus-menerus melakukan pendampingan dalam mendorong penetapan Kawasan Konservasi.

Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui, yaitu:

- a. Adanya pandemi Covid-19 membatasi pelaksanaan pertemuan untuk koordinasi percepatan penetapan kawasan konservasi
- b. Usulan penetapan kawasan konservasi masih menggunakan aturan lama sehingga Pemerintah Daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan zonasi kawasan konservasi berdasarkan Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Terbatasnya SDM GIS/ Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKP) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga terkait, dan mitra/

LSM di masing-masing wilayah kerjanya.

- b. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, dan Maluku).

KKP terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain melalui identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder. Kegiatan pendukung lainnya untuk mencapai kinerja luas kawasan konservasi yang dilakukan di tahun 2021, meliputi pelaksanaan evaluasi penetapan kawasan konservasi dan telah ditetapkan 18 kawasan konservasi

yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat.



INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-4) Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkat

Sasaran Strategis 4 memiliki 1 (satu) IKU yakni IKU 7 Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan

yang terserap Dunia Usaha dan dunia industri/DUDI

IKU 7 Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia usaha dan dunia industri/DUDI

IKU Persentase Lulusan Pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia usaha dan dunia industri/DUDI menggambarkan persentase lulusan pendidikan yang terserap dunia usaha dan dunia industri/DUDI dan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI. Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri pada tahun 2021

ditargetkan sebanyak 62 persen, berdasarkan Jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang Kelautan dan perikanan dan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri, sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi)

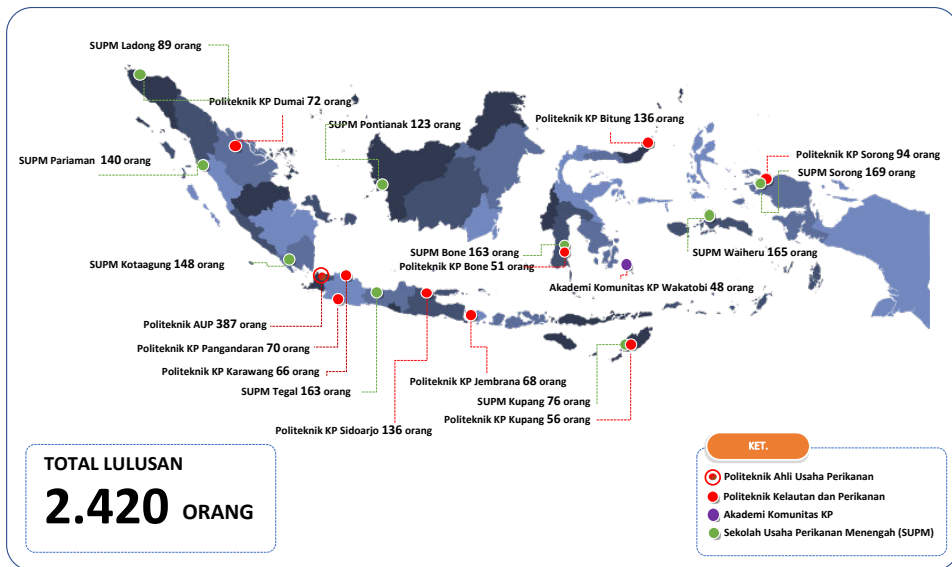
Sasaran Strategis 4 : Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Meningkat													
IKU-7 Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri / DUDI (Persen)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	54,82	62	62,58	100,94	14,16	62	100,94	75	83,44	

Capaian Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah sebesar 62,58 persen atau sebanyak 10.924 lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di DUDI atau telah tercapai sebesar 100,94 persen dari target 2021 sebesar 62 persen. Capaian ini terdiri atas 1.839 orang atau 75,99 persen dari 2.420 lulusan pendidikan yang terserap dunia kerja KP dan 9.085 orang atau 60,43 persen dari 15.035 lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI.

Tabel 25. Sebaran Serapan Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) (%)

No	Satuan Kerja	Jumlah Lulusan (orang)	Jumlah Serapan Dudi (orang)	Persentase Serapan DUDI
1	Politeknik AUP Jakarta	387	298	77,00
2	Politeknik KP Sidoarjo	136	102	75,00
3	Politeknik KP Bitung	136	102	75,00
4	Politeknik KP Sorong	94	74	78,72
5	Politeknik KP Karawang	66	50	75,76
6	Politeknik KP Bone	51	42	82,35
7	Politeknik KP Kupang	56	42	75,00
8	Politeknik KP Dumai	72	54	75,00
9	Politeknik KP Pangandaran	70	53	75,71
10	Politeknik KP Jemberana	68	52	76,47
11	AK Wakatobi	48	37	77,08
12	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong	89	67	75,28
13	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman	140	105	75,00
14	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung	148	111	75,00
15	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal	163	124	76,07
16	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	123	95	77,24

No	Satuan Kerja	Jumlah Lulusan (orang)	Jumlah Serapan Dudi (orang)	Persentase Serapan DUDI
17	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone	163	122	74,85
18	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru	165	126	76,36
19	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong	169	127	75,15
20	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kupang	76	56	73,68
Jumlah		2.420	1.839	75,99



Gambar 31. Sebaran Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Capaian jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/ usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di DUDI dihasilkan oleh 5 (lima)

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), dengan rincian target dan realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Sebaran Jumlah Lulusan Pelatihan Pelaku Utama/Usaha yang Menerapkan Hasil Pelatihan dan atau Bekerja di DuDi Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Lulusan Pelatihan Masyarakat KP	Terserap Dudi	Persentase
1	BPPP Medan	2.265	1.359	60,00
2	BPPP Tegal	4.247	2.548	60,00
3	BPPP Banyuwangi	5.580	3.348	60,00
4	BPPP Bitung	1.550	970	62,58
5	BPPP Ambon	1.393	860	61,74
Total		15.035	9.085	60,43

Capaian IKU 7. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,16 persen. Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : (1) Sistem pendataan alumni yang update di satuan pendidikan kelautan dan perikanan; (2) Kerja sama dan komunikasi yang baik antara Pusat Pendidikan, Satuan Pendidikan kelautan dan perikanan, dan Pelaku Dunia Industri; (3) Reviu kurikulum yang rutin dilakukan oleh Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini; (4) Kompetensi yang sesuai antara lulusan satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan kebutuhan di

dunia industri dan (5) Ilmu yang didapat pada Pelatihan Kelautan dan Perikanan bermanfaat dalam membuka wirausaha atau bekerja di perusahaan. Secara umum, keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain oleh :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP.
2. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk lulusan pelatihan penangkapan ikan (BST, Ankapin, Atkapin,dll) dan perusahaan olahan hasil perikanan.
3. Pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di

- Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi.
4. Sistem pendataan alumni yang mulai berjalan dan terorganisir di satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan.
 5. Kerja sama yang baik yang dilakukan antara Pusat Pendidikan, Satuan Pendidikan KP, dan Pelaku Dunia Usaha/Dunia Industri.
 6. Kompetensi yang sesuai antara lulusan SUPM dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri.



Gambar 32. Contoh Tema Pelatihan Bagi Pelaku Utama/Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Selama tahun 2021, kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adalah antara lain :

1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai berkontribusi dalam menghasilkan capaian pelaku utama/usaha yang kompeten. Pemetaan ini memberikan kontribusi atas penyelenggaraan pelatihan yang tepat sasaran dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku utama/usaha untuk meningkatkan kompetensi sehingga menerapkan hasil pelatihannya.
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai dengan menggunakan trendline analysis sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan dan penyuluhan KP.
3. Ketersediaan instrumen pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang telah disosialisasikan ke seluruh Balai di awal tahun 2021 membantu kemudahan dalam

- penyampaian laporan capaian kinerja.
4. Gelar kompetensi kewirausahaan, yang melibatkan peserta didik di satuan pendidikan KP, pengusaha, dan sektor industri kelautan dan perikanan. Hal ini membuka peluang bagi sektor dunia usaha / dunia industri untuk menyerap lulusan di Satuan Pendidikan KP.
 5. Kerjasama antara satuan pendidikan kelautan dan perikanan dengan perusahaan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka penerimaan peserta didik untuk melakukan magang di perusahaan dan memprioritaskan lulusan satuan pendidikan KP untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan

Sasaran Strategis (SS-5) Hasil Riset dan Inovasi Termanfaatkan

Sasaran Strategis 5 memiliki 1 (satu) IKU yakni IKU 8 Hasil Riset

Kelautan dan Perikanan yang diadopsi/diterapkan

IKU 8 Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang diadopsi/diterapkan

Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan mencakup diseminasi teknologi dan atau kebijakan inovatif hasil riset kepada stakeholderterkaitbaikPemerintah daerah maupun industri; data hasil riset, termasuk informasi perikanan antara lain peta fishing ground, distrbusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya, yang dimanfaatkan stakeholder terkait (Pemda, pihak swasta), serta rekomendasi kebijakan perikanan antara lain kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan,

kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah produk, yang digunakan internal KKP dan/ atau stakeholder lainnya. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan pada tahun 2021 telah ditetapkan dengan target 8 paket desa mitra/ kawasan mitra yang menerapkan lptek KP, dan telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/SJ Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Desa Inovasi/Desa Mitra

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Desa inovasi/desa mitra yang menerapkan iptek kelautan dan perikanan adalah desa komunitas kelautan dan perikanan yang memanfaatkan teknologi, inovasi dan

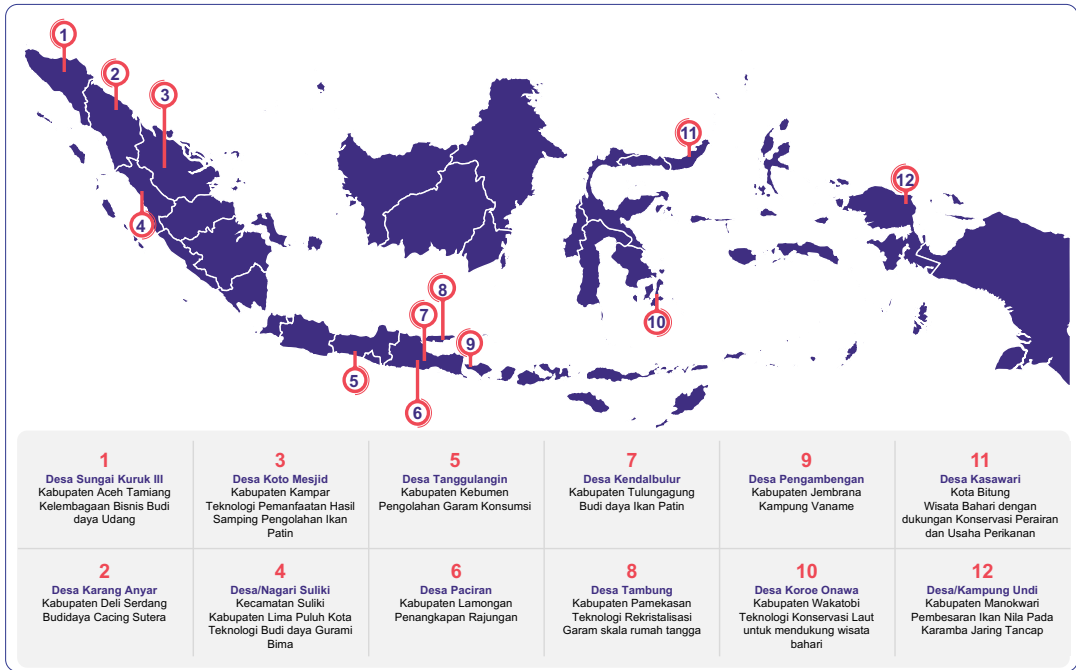
percontohan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Capaian Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi/ Diterapkan

Sasaran Strategis 5: Hasil Riset dan Inovasi Termanfaatkan													
IKU-8 Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (Hasil Riset)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	11	8	12	150,00 atau 120 % dalam aplikasi kinerjaku	9,09	8	150% atau 120 % dalam aplikasi kinerjaku	15	80,00	

Tahun 2020, BRSDM telah melaksanakan kegiatan terkait desa inovasi/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP di 11 lokasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan dikarenakan perubahan komponen perhitungan, semula hanya menghitung rekomendasi Kebijakan, desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (paket), hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri (paket) dan data, informasi

dan peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket), untuk tahun ini menghitung capaian dari desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (paket) telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/SJ Tahun 2021. Sebaran desa inovasi/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP sesuai dengan kegiatannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 33. Desa Mitra/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek KP

Program Desa Inovasi Kelautan dan Perikanan bertujuan:

1. Mendayagunakan iptek untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa);

2. Membangun hubungan interaksi antara dunia iptek (research and development) dengan dunia usaha di masyarakat (desa);

3. Mendorong masyarakat (desa) untuk mengikuti perkembangan iptek agar usaha masyarakat desa berkembang dan berkelanjutan;

4. Menciptakan produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas; dan

5. Meningkatkan daya saing usaha masyarakat (desa) melalui pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan.

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan desa inovasi/desa mitra ini meliputi koordinasi dan survei, identifikasi dan penetapan teknologi, perakitan, introduksi teknologi, alih teknologi, pendampingan proses alih teknologi, serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 34. Contoh Desa Inovasi Perikanan di Tulungagung

Dalam pelaksanaan kegiatan, Desa mitra/kawasan mitra yang ditetapkan diberikan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Pemanfaatan tersebut dapat terlihat dari terdiseminasikannya teknologi

dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset Perikanan kepada stakeholder di desa. Selain itu, dapat pula memberikan masukan penetapan kebijakan riset dari umpan balik *Stakeholders* sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna

Sasaran Strategis (SS-6) Tata Kelola SDKP Bertanggungjawab

Sasaran Strategis 6 memiliki 3 (tiga) IKU yakni IKU 9. WPP yang menjadi Model Percontohan penguatan tata kelola, IKU 10 Penyelesaian penataan ruang

laut dan zonasi pesisir dan IKU11 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan

IKU 9 WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata Kelola

Wilayah

Pengelolaan

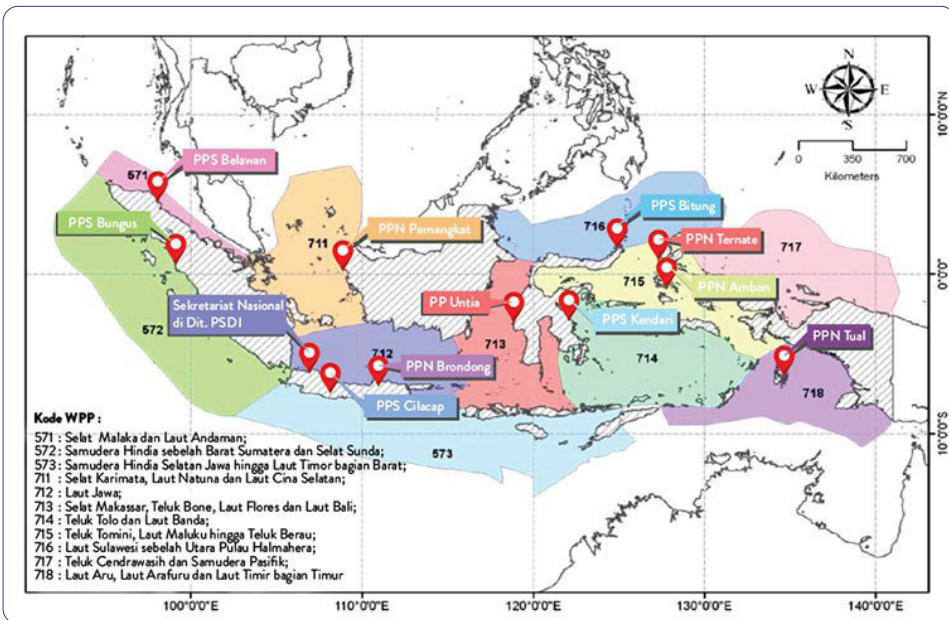
Perikanan

Negara

Republik

Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Salah satu strategi arah kebijakan dari peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, transformasi kelembagaan dan

fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan secara tahunan pada akhir tahun 2021. Indikator WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola tahun 2021 adalah sebanyak 5 (tiga) WPP dan metode pengukuran indikator ini dihitung dari jumlah WPP yang melaksanakan upaya penguatan tata Kelola dengan persyaratan : (1) menerapkan RPP, (2) sudah dibentuk kelembagaan dan (3) telah melakukan operasionalisasi kelembagaan.



Gambar 35. Peta Wilayah Pengelolaan Wilayah Perikanan Negara WPP-NRI

Tabel 30. IKU WPP yang Menjadi Model Percontohan Penguatan Tata Kelola

Sasaran Strategis 6 : Tata Kelola SD Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab													
IKU-9 WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola													
Realisasi					2021				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)				
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	3	5	5	100,00	66,67	5	100,00	11	45,45	

Sumber. Laporan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap, KKP

WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata Kelola tercapai 5 WPP dari target sebesar 5 WPP, atau telah mencapai 100 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan 2 WPP atau meningkat sebesar 66,67%. Seluruh WPPNRI telah melakukan pengelolaan sumber daya ikannya sesuai dengan RPP yang telah ditetapkan. Kelima WPP tersebut mencakup : WPP 573, WPP 711, WPP 712, WPP 715, dan WPP 718.

Sejak ditetapkan, RPP telah menjadi acuan dalam pengelolaan WPPNRI dengan prinsip utama bahwa pengelolaan SDI berbasis WPPNRI adalah pengelolaan hulu-hilir secara terintegrasi dan berbasis kewilayahan (spasial) yang melibatkan multi *Stakeholders* dan multisektor untuk mewujudkan keseluruhan aspek dari pembangunan perikanan dengan akelerasi yang lebih cepat. Lima WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, yaitu:

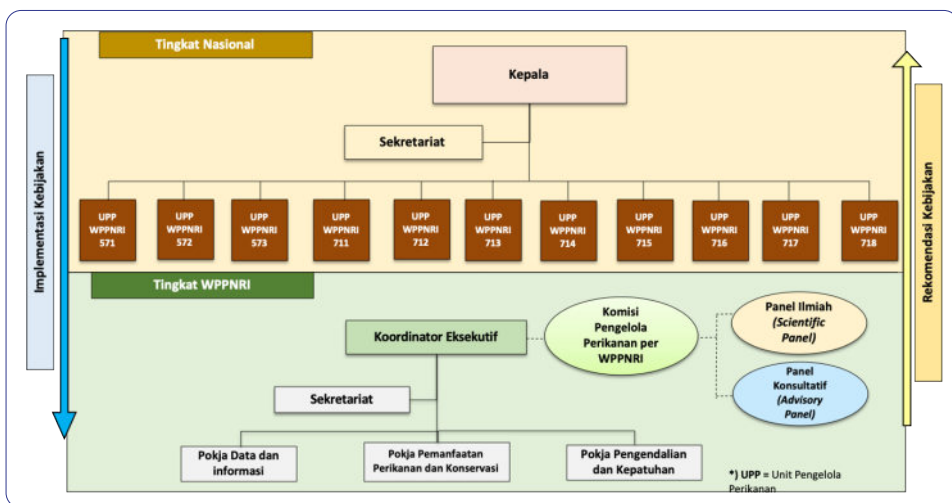
1. WPP 573, mencakup Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah

Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 77/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 573.

2. WPP 711, mencakup Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, dengan ditetapkannya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) melalui KepmenKP Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 711.
3. WPP 712, mencakup perairan Laut Jawa dengan ditetapkannya RPP melalui

- KepmenKP Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 712.
4. WPP 715, mencakup Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715.
 5. WPP 718, mencakup Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Tomini Bagian Timur, dengan ditetapkannya RPP melalui KepmenKP Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718.

Bentuk penguatan LPP WPPNRI melalui penerbitan Permen KP No. 33/2019 tentang LPP yang merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Kepala LPP WPPNRI. Penguatan LPP WPPNRI dimulai dengan menguatkan tata kelola dan struktur organisasi yang ada di dalamnya, yaitu unsur LPP WPPNRI di tingkat nasional/pusat, Unit Pengelola Perikanan (UPP) di tingkat WPPNRI, serta Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif.



Gambar 36. Struktur Organisasi LPP Di WPP NRI

Selama ini, mekanisme koordinasi yang telah disusun di level WPPNRI belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menjadi salah satu titik fokus yang harus diperbaiki untuk optimalisasi operasionalisasi LPP WPPNRI di masa yang akan datang. Mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan baik secara luring (bertemu langsung) maupun daring (video conference).

Terdapat beberapa pertemuan berkala yang dilaksanakan oleh LPP WPPNRI, yaitu:

- Rapat Komisi Pengelola Perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun,
- Rapat Koordinasi Komisi Pengelola perikanan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, dan
- Rapat Koordinasi Pokja yang dilaksanakan empat kali dalam satu tahun sebelum pelaksanaan Rapat Komisi dan Rapat Koordinasi Komisi. Optimalisasi kelompok kerja (Pokja) LPP WPPNRI memegang peranan penting sebagai wakil instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah mendukung indikator

ini di WPP 573, 711, 712, 715 dan 718 adalah sebagai berikut:

- Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI.
- WPPNRI 573. Komoditas yang akan dikelola adalah lobster melalui dana ISLME.
- WPPNRI 711. Komoditas yang akan dikelola adalah cumi-cumi yang akan dilakukan oleh MSC bekerja sama dengan IPB.
- WPPNRI 712. Komoditas yang akan dikelola adalah rajungan, kakap dan kerapu melalui dana ISLME.
- WPPNRI 715. Komoditas yang akan dikelola kakap dan kerapu melalui dana GEF 6 – CFI.
- WPPNRI 718. Komoditas yang akan dikelola kerapu, udang, kepiting melalui dana GEF 6 – CFI.
- Koordinasi Data dan informasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI pada Forum Koordinasi Nasional (Konas).
- Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan Nasional.
- Penyusunan/implementasi/evaluasi/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan.
- Reviu RPP WPPNRI 573, 711, 712, 715, 718, yang

membahas tentang :

- Pelaksanaan EAFM skala nasional dan regional, antara lain:
 - TWG EAFM CFI CFF.
 - Sosialisasi pendataan perikanan di GEF 6-CFI.
 - Laporan perkembangan pelaksanaan EAFM.
 - Pelaksanaan SOM CTI CFF ke 16.
- Rapat pengelolaan andon penangkapan ikan secara *online* melalui SIMKADA dan Pembahasan SOP andon penangkapan ikan Penataan andon penangkapan ikan di WPPNRI.

Dalam pencapaian target Indikator tersebut tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:

- Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.
- Belum di tetapkannya Petunjuk Teknis Operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
- Terdapat perbedaan persepsi mengenai operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan

WPPNRI.

- Kurang optimalnya sumber daya manusia Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
- Adanya pandemi COVID 19, mengakibatkan pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI ini mengalami penundaan dan pelaksanaan belum terlihat efektif meskipun dilaksanakan melalui Daring.

Adapun upaya tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu :

- Berkoordinasi terkait tindak lanjut harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait tentang Pedoman Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Di WPPNRI (Juknis operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI).
- Berkoordinasi dengan instansi terkait sumber daya

manusia lembaga pengelola perikanan WPPNRI; dan Menyusun jadwal/roadmap maupun rencana aksi untuk

pelaksanaan Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan

IKU 10 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11/2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 yaitu

dokumen Perencanaan Ruang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis

Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antarwilayah (KAW). Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut.

Dokumen rencana zonasi yang dimaksud dalam IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)” adalah dokumen final. Tahapan penyusunan dokumen final masing-masing rencana zonasi dalam IKU 4 ini sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) sebagai berikut: (1). Pengumpulan dan pengolahan data, (2). Penyusunan dokumen awal, (3). Konsultasi publik dokumen awal, (4). Penyusunan dokumen antara, (5). Konsultasi publik dokumen antara, dan (6). Penyusunan dokumen final.
2. Dokumen Rencana Zonasi KSN (RZ KSN) merupakan dokumen final materi teknis perairan KSN yang akan diintegrasikan dengan RTR KSN. Materi teknis disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.
3. Dokumen rencana zonasi KSNT merupakan dokumen final materi teknis perairan KSNT yang berupa PPKT yang diintegrasikan dengan RTR KSN dari kepentingan pertahanan keamanan Kawasan perbatasan negara. Materi teknis RZ KSNT yang berupa PPKT disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara,

konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZKAW). RZKAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang

diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; untuk RZKSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Sebagai turunan dari PP 21/2021, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut disajikan sebagai berikut :

Tabel 31. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
Perencanaan Ruang Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP3K dan RZ KSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, RTR dan KSN 2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non PPKT 	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pemanfaatan Ruang Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) 2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPRL 	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Penilaian (Perwujudan RTR/RZ) Pemberian Insentif dan disinsentif 3. Pengenaan Sanksi Penyelesaian Sengketa 4. Penataan Ruang Laut 	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pengawasan Ruang Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR 2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang KP

Teknik menghitung capaian IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)” adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.

2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN.

3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.

Pada tahun 2021, KKP menginisiasi penyelesaian penataan ruang laut dan zona pesisir dengan target 12 kawasan. Target ini mengalami penurunan dari 22 kawasan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Awal yang disahkan 22 Januari 2021, dan selanjutnya karena terdapat *refocusing* anggaran pada triwulan III Tahun 2021 (Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-366/MEN-KP/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian) target menjadi 12 kawasan. Perubahan target dan lokasi disajikan sebagaimana berikut :

Tabel 32. Target Lokasi Awal dan Pasca Refocusing

Indikator Kinerja	Target Lokasi Awal	Target Setelah Refocusing
1 Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar Wilayah (Kawasan)	<ul style="list-style-type: none"> • Laut Barat Sumatera • Laut Selatan Jawa • Laut Seram • Laut Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Laut Selatan Jawa • Laut Bali
2 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	<ul style="list-style-type: none"> • KSN Seram • Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) • Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang • KSN Pare-Pare • KSN Laut Banda 	<ul style="list-style-type: none"> • KSN Laut Banda • Kawasan Banjarbakula
3 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 klaster (Jawa Timur, Simeulue, Natuna, Wetar dan Jawa Timur) untuk 13 pulau KSNT PPKT <ul style="list-style-type: none"> • Klaster Jawa Timur Pulau Nusabarong Pulau Panikan • Klaster Simuelue Pulau Simeulue Cut Pulau Salaut Besar • Klaster Natuna Pulau Semiun Pulau Sebetul Pulau Sekatung • Klaster Jawa Barat Pulau Batukolotok Pulau Nusamanuk • Klaster Wetar Pulau Marsela Pulau Metimarang Pulau Wetar Pulau Liran 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 klaster untuk 8 pulau KSNT PPKT <ul style="list-style-type: none"> • Jawa Timur: Pulau Nusabarong Pulau Panikan Pulau Ngekel • Aceh: Pulau Simeulu Cut Pulau Salaut Besar • Natuna Pulau Semiun Pulau Sebetul Pulau Sekatung

Pada tahun 2021, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 22 kawasan mengalami pengurangan karena *refocusing* anggaran yang mencakup : RZ KAW semula 4 menjadi 2 kawasan; RZ KSN semula 5 menjadi 2 kawasan; RZ KSNT semula 13 menjadi 8 kawasan) dengan capaiannya adalah 13. Capaian pada tahun 2021, yaitu:

- a. RZ KAW dilaksanakan pada 2 kawasan yaitu Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara dan Laut Bali.
- b. RZ KSN dilaksanakan 2 kawasan yaitu KSN Banjarkakula dan Kawasan Laut Banda.
- c. RZ KSNT telah dilaksanakan

pada 9 kawasan berupa PPKT yang dikelompokkan dalam 3 kluster, yaitu Kluster Simeulue (Pulau Simelucut dan Pulau Salaut Besar), Kluster Natuna (Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semion, dan Pulau Tokongboro), dan Kluster Jawa Timur (Pulau Ngekel, Pulau Panikan, dan Pulau Nusa Barong). Dalam rangka penyusunan materi teknis ruang perairan RZ KSNT semua proses dan tahapan telah dilaksanakan.

Rincian capaian IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)” tahun 2021 sebagaimana disajikan sebagai berikut :

Tabel 33. Capaian Iku Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2021

Sasaran Strategis 6 : Tata Kelola SD Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab													
IKU-10 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Rencana Zonasi)													
Realisasi							2021		Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)				
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	14	12	13	108,33	-7,14	24	54,17	102 (kumulatif)	26,47 (kumulatif)	

Sumber. Laporan Kinerja Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP

Capaian kinerja IKU 10. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Rencana Zonasi) tahun 2021 sebanyak 13 rencana zonasi atau cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebanyak 14 rencana zonasi atau terjadi penurunan capaian sebesar 1 rencana zonasi atau 7,14% yang disebabkan adanya *refocusing* anggaran, sehingga terdapat penyesuaian target kinerja karena adanya keterbatasan ruang fiskal. Selain itu terdapat perubahan perhitungan capaian yang berubah apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu di tahun 2021 tidak lagi memperhitungkan capaian RZWP3K, yang pada tahun 2020 termasuk dalam perhitungan capaian IKU 10. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Rencana Zonasi).

Komponen penghitungan IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)” pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2021 mencakup dokumen RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW

dan tidak menyertakan dokumen RZWP-3-K karena dokumen tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi mulai tahun 2021 sebagaimana amanat UU Cipta Karya.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 pada Renstra KKP 2020-2024 yaitu sebesar 24 Rencana Zonasi, capaian di tahun 2021 baru mencapai 54,17 persen dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu sebanyak 102 rencana zonasi (kumulatif), realisasi sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 27 rencana zonasi baru mencapai 26,47 persen. Kendala yang dihadapi diantaranya, KKP masih perlu menindaklanjuti penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) tahun sebelumnya dan integrasi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional. Tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menindaklanjuti penyusunan RZ KAW tahun sebelumnya dan integrasi RZ KSN dengan RTR KSN.

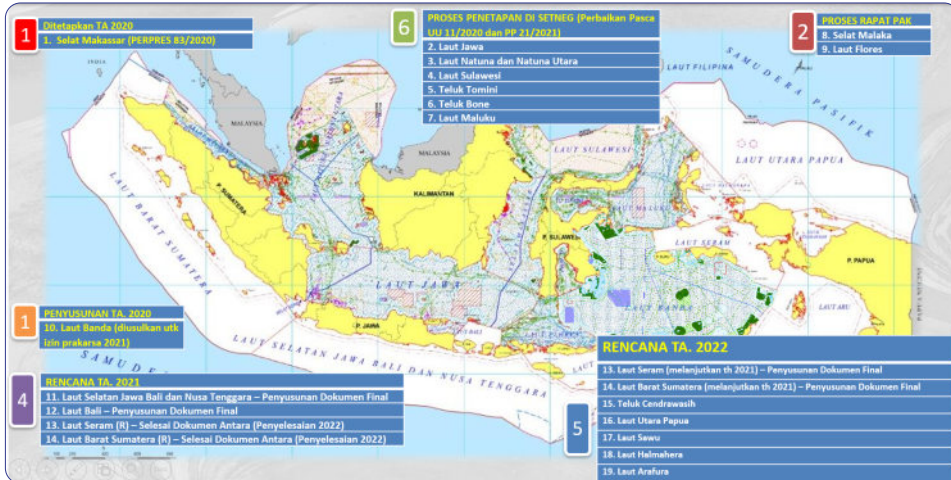
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama pandemic Covid-19.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. rangkaian pertemuan pembahasan dokumen rencana zonasi sehingga tersusunnya Dokumen Final:
 - Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (KAW) dua kawasan, yaitu Kawasan Laut Selatan Jawa dan Laut Bali.
 - Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dua kawasan, yaitu KSN Laut Banda dan Kawasan Banjarbakula.
 - Rencana Zonasi Kawasan

Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk 8 pulau yang terbagi dalam 3 kluster kawasan, yaitu 3 klaster: Klaster Jawa Timur (Pulau Nusabarong, Pulau Panikan, dan Pulau Ngekel), Klaster Aceh (Pulau Simeulu Cut dan Salaut Besar), dan Klaster Natuna (Pulau Semiu, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung).

- b. Pembahasan tindak lanjut RZ KAW di Laut Jawa, Teluk Tomini, Teluk Bone, Laut Natuna-Natuna Utara, Laut Sulawesi; dan Laut Maluku untuk menjadi Perpres.
- c. Integrasi Materi Teknis RZ KSN BBK, Kedungsepur, Gerbangkertosusilo, Raja Ampat, bimindo/Bitung - Manado dan banjar bakula (6 KSN) dengan RTR KSN.
- d. Sampai dengan tahun 2021, perkembangan penyusunan Rencana Zonasi disajikan sebagai berikut :



Gambar 37. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Tahun 2021



Gambar 38. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Tahun 2021



Gambar 39. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Tahun 2021

IKU 11 Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan [compliance] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan

perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 95,72% dari target tahun 2021 sebesar 95%. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2021 serta target akhir renstra 2024, sebagaimana berikut :

Tabel 34. Capaian IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis 6 : Tata Kelola SD Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab												
IKU-11 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP (%)												
Realisasi						2021				Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)		
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
79,7	93,57	96,38	93,57	94,76	95	95,72	100,76	1,01	95	100,76	98	97,67

Realisasi IKU 11. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha KP Tahun 2021 adalah sebesar 95,72 persen atau mencapai 100,76 persen terhadap target tahun 2021 sebesar 95 persen. Realisasi ini baru mencapai 97,67 persen apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu sebesar 98 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, terdapat pertumbuhan positif sebesar 1,01 persen yaitu 94,76 persen di tahun 2020.

Realisasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan tahun 2021 tercapai dan jika dibandingkan Realisasi tahun 2021 meningkat tipis sebesar 0,95% dari realisasi Tahun 2020, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Konsistensi KKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha;

b. Peningkatan kapabilitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan.

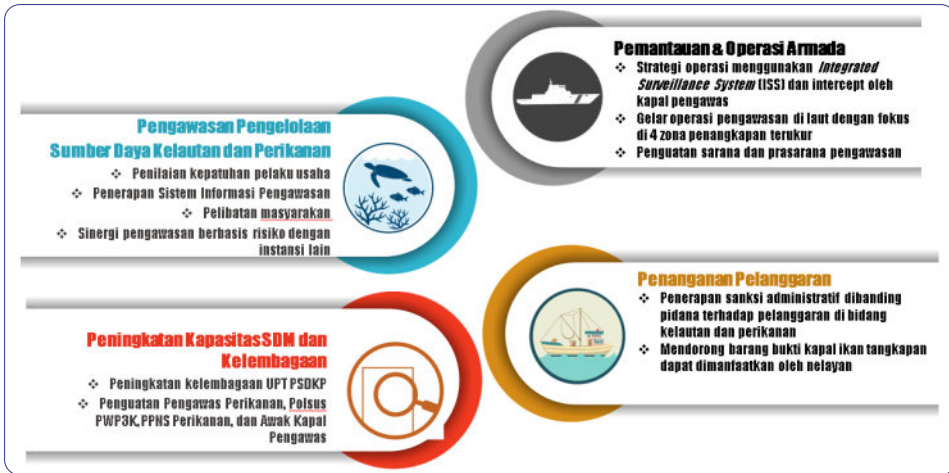
c. Kegiatan penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada masyarakat melalui program mengajar dalam bentuk Kampanye maupun sosialisasi khususnya di wilayah yang rawan terjadi praktik illegal dan

destructive fishing.

d. Kerjasama yang terjalin dengan instansi penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah daerah;

e. Inovasi pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Surat Laik Operasi (SLO), sehingga mempermudah dan mempercepat proses penerbitan dokumen.

Target akhir tahun 2024 dalam Renstra KKP sebesar 98 persen optimis dapat tercapai, dengan komitmen dan upaya terus konsisten melaksanakan pengawasan SDKP sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan perikanan khususnya untuk mengawal penangkapan ikan terukur. Mengingat tantangan pengawasan SDKP tersebut, maka perlu diupayakan strategi dan inovasi pengawasan SDKP, sebagai berikut:



Khusus untuk kegiatan pengawasan penangkapan ikan dirumuskan strategi sebagai berikut:

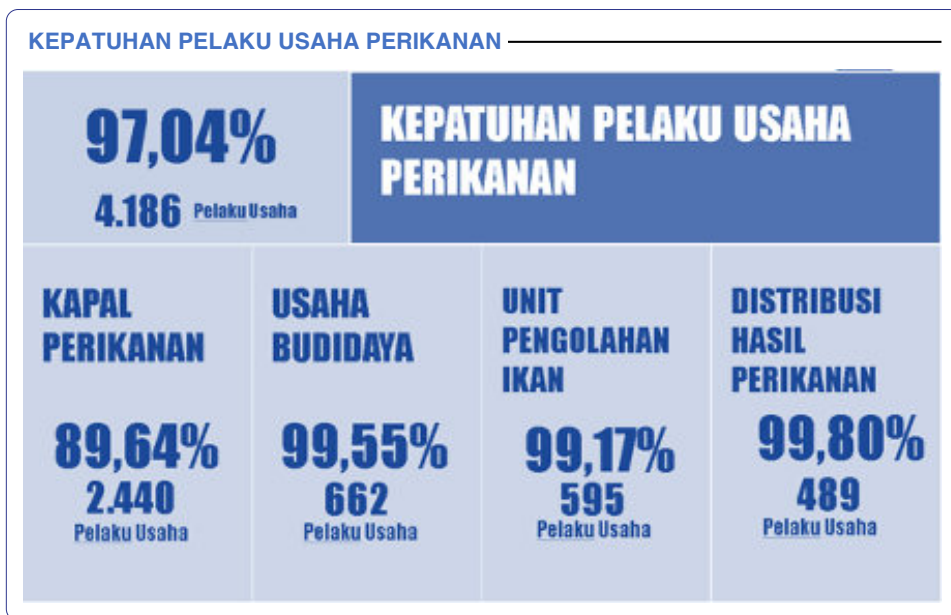
a. Pengawasan sebelum pelaksanaan penangkapan (Before Fishing) melalui: pemeriksaan kelayakan teknis dan adminstrasi (dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, awak akpal, akitvasi VMS), yang dibuktikan dengan diterbitkannya SLO.

b. Pengawasan aktivitas penangkapan ikan (While Fishing) dilaut oleh Kapal Pengawas

Perikanan serta didukung informasi dari Pusat pengendalian (VMS, AIS, Radar) dan pesawat patroli;

c. Pengawasan kapal saat mendaratkan hasil tangkapan (during landing) melalui pemeriksaan Memeriksa jenis, jumlah & ukuran hasil tangkapan, kesesuaian alat penangkap, kesesuaian pelabuhan pangkalan.

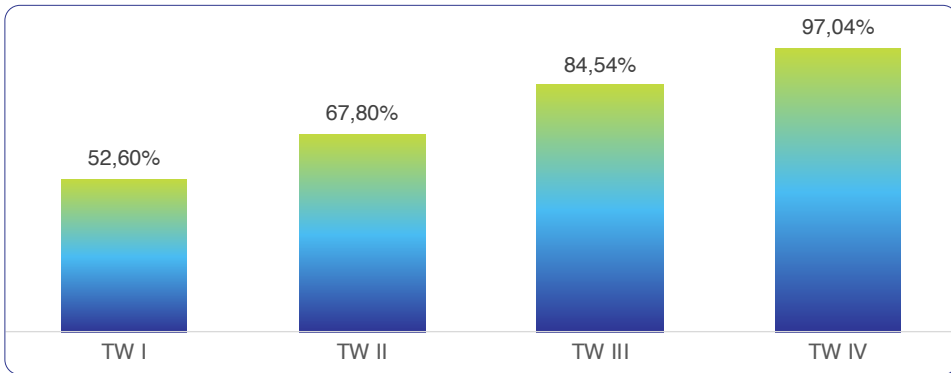
d. Pengawasan setelah dilakukan pembongkaran (Post Landing) melalui pengawasan distribusi dan pengolahan hasil perikanan.



Gambar 40. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2021

Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pencapaian kinerja tahun

2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 95%, walaupun terdapat satu komponen pelaku usaha kapal perikanan tidak mencapai target hanya sebesar 89,64%. Apabila melihat tren dari tahun 2020 kepatuhan pelaku usaha perikanan meningkat sebesar 0,17%, begitu juga realisasi setiap triwulan selalu meningkat.



Gambar 41. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Triwulan Tahun 2021

Rendahnya kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan disebabkan karena banyaknya yang diberikan peringatan hasil pemantauan kapal perikanan melalui sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) yaitu sejumlah 197 pelaku usaha atau 69,86% dari 282 pelaku usaha. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan maka perlu dilakukan pengawasan dan sosialisasi mengenai ketentuan yang berlaku serta penindakan tegas apabila terbukti masih tidak patuh. Strategi dan inovasi pengawasan perlu dilakukan terlebih pada tahun 2022 harus mengawal program prioritas unggulan yaitu penangkapan ikan terukur.

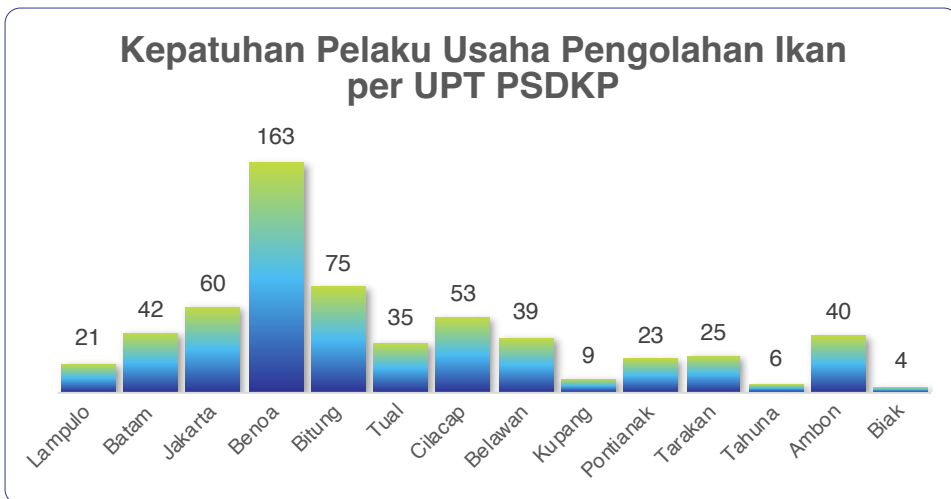
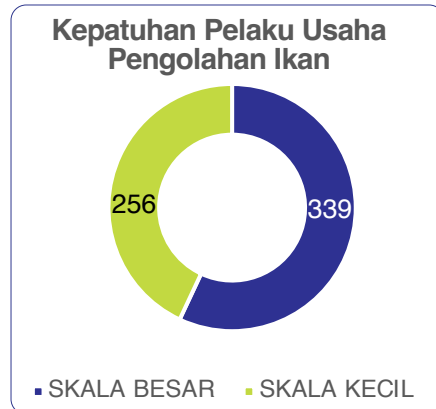
Dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan didukung oleh kegiatan

utama pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kapal Perikanan. Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Pengawasan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk

melengkapi dokumen yang ditetapkan.

2. Pengawasan Pengolahan Hasil Perikanan. Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa

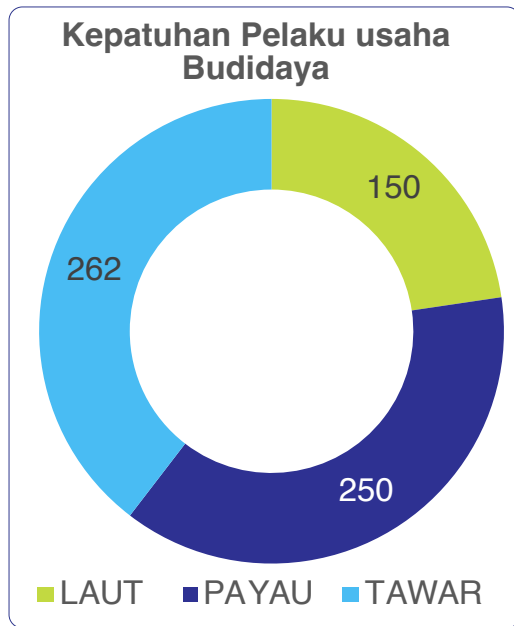


dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kesehatan/Health Certificate(HC) bagi usaha

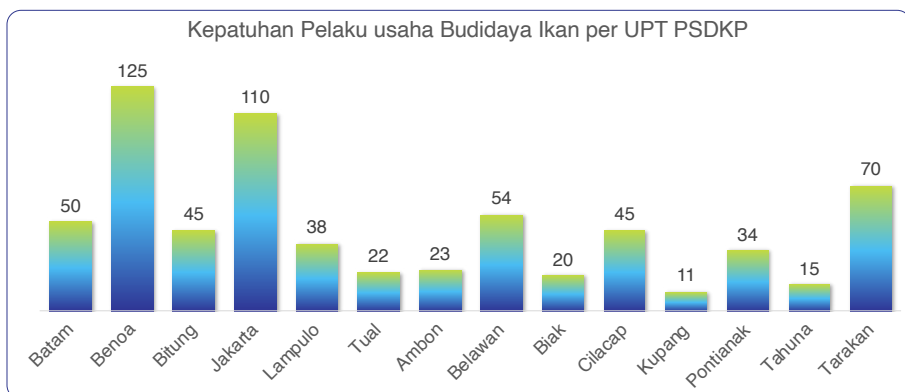
pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/ TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui

adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Sepanjang tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 595 pelaku usaha, dari 600 pelaku usaha.

3. Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan usaha, sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan,



jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut, kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan oleh pengawas perikanan sampai tahun 2021 diperoleh sebanyak 662 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 665 pelaku usaha. Usaha budidaya ikan yang dilakukan pengawasan terdiri dari budiaya air laut, payau dan tawar.

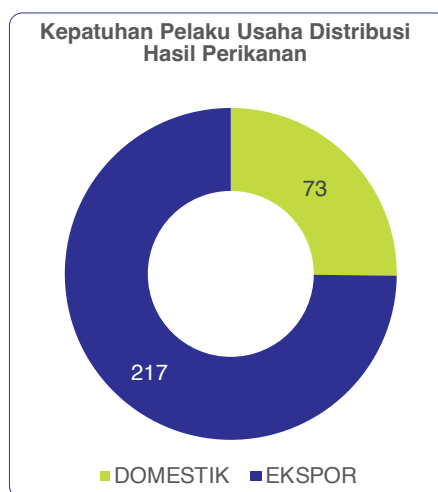


Gambar 42. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Budidaya Ikan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

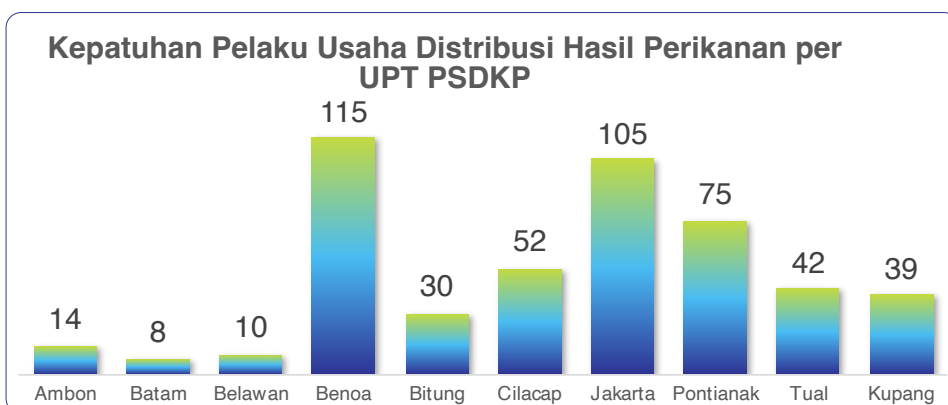
4. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan

yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

Sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 489 pelaku usaha yang patuh, dari 490 pelaku



usaha. Hanya satu pelaku usaha yang tidak patuh dan sudah diberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi peruntukkan domestik dan ekspor serta di Pasar, supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan.



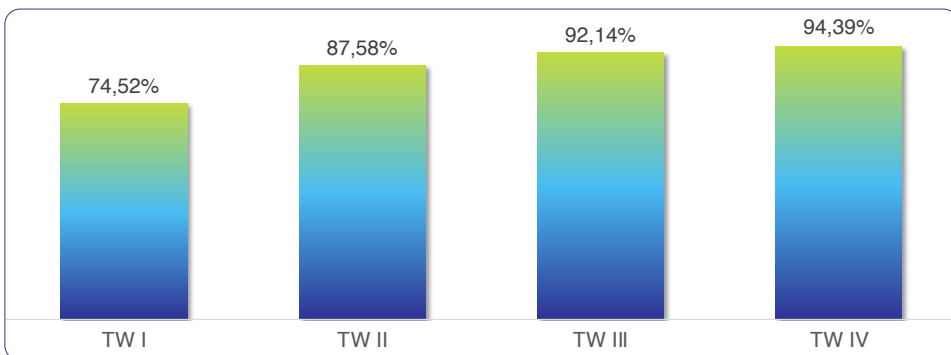
Gambar 43. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021



Gambar 44. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Tahun 2021

Kepatuhan pelaku usaha kelautan tercapai sebesar 94,39% tidak tercapai sesuai target 95%. Tahun 2021 pelaku usaha kelautan yang patuh sejumlah 1.532 pelaku usaha dari hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan sebanyak 1.623 pelaku usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah pelaku

usaha yang diawasi sejumlah 702 pelaku usaha meningkat di tahun 2021, begitupula dengan kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 sebesar 92,65%. Apabila dilihat tren realisasi kinerja triwulanan tahun 2021, setiap periodenya mengalami kenaikan sebagaimana berikut:



Gambar 45. Capaian Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Tahun Triwulanan 2021

Ketidakpatuhan pelaku usaha kelautan dinominasi oleh persyaratan perizinan yang belum dipenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi dari tujuh objek pengawasan sebanyak lima objek yang tidak tercapai kepatuhannya yaitu: 1) Kawasan Konservasi; 2) Produk dan jasa kelautan; 3) Pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) Ruang laut; dan 5) pengelolaan Limbah. Ketidaktercapaian

13 Pelaku	Kawasan Konservasi Perairan
15 Pelaku	Produk & Jasa Kelautan
7 Pelaku	Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3 Pelaku	Ruang Laut
11 Pelaku	Pengelolaan Limbah

kepatuhan ini juga disebabkan oleh frekuensi pengawasan meningkat dilokasi yang sama kemudian pelaku usaha yang diawasi sebagai besar adalah baru, namun tetap dimasukkan sebagai capaian kinerja.

Sebagai salah satu upaya perbaikan kedepan, khusus pelaku usaha tidak patuh pada tahun 2021 perlu menjadi target utama pengawasan tahun 2022, sehingga pelaku usaha patuh terhadap peraturan-perundang-undangan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja di tahun 2021 perlu tetap dilakukan dan dioptimalkan khususnya bagi pelaku usaha baru. Namun

dengan adanya ketentuan baru yaitu terbitnya undang-undang cipta kerja dan turunannya, maka perlu dirumuskan strategi pengawasasn serta penetapan pelaku usaha yang akan diawasi, antara lain:

1. Penyusunan daftar pelaku usaha kelautan yang akan diawasi selama satu tahun;
2. Menyusun agenda pengawasan pelaku usaha kelautan selama satu tahun;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan pelaku

usaha kelautan oleh UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

a) Pengawasan pemanfaatan Kawasan konservasi. Pada tahun 2021, pengawasan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi a) TWP Pulau Pieh; b. TWP Kapoposang; c)TNP Laut Sawu; d)SAP Waigeo; e) TWP Gili Matra; f)TWP Laut Banda; g)SAP Raja Ampat; h)TWP Anambas; i) TWP Padaido; j)SAP Aru Tenggara. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 204 pelaku usaha patuh dari 217 pelaku usaha yang diverifikasi. Pelaku usaha yang diawasi terdiri dari kapal perikanan, penambang pasir, pengakutan material yang melakukan aktivitas di Kawasan konservasi.

b) Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi
Tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 153 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan

oleh pengawas perikanan di 14 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 149 pelaku usaha patuh dan hanya 4 yang tidak patuh. Jenis ikan yang berhasil diawasi tahun 2021 antara lain : penyu dan turunannya, pari manta, hiu paus, kima, bambu laut, ikan napoleon, ikan hiu paus, dan karang hias.

c) Pengawasan pemanfaatan produk kelautan dan jasa kelautan. Pada tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 100 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 41 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 85 pelaku usaha patuh dan 15 tidak patuh. Pelaku usaha yang diawasi adalah penambang pasir dan usaha wisata tirta. Kepada pelaku usaha direkomendasikan untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan.

d) Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil
1) Pengawasan pemanfaatan pesisir. Pengawasan pemanfaatan pesisir berfokus kepada

pengawasan kepatuhan pelaku usaha alih fungsi lahan dan reklamasi terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021, pengawasan pesisir dilaksanakan terhadap 17 Pelaku usaha, hasil verifikasi menunjukkan 15 pelaku usaha patuh, 2 pelaku usaha tidak patuh karena kegiatan reklamasi sudah dilaksanakan namun izin kegiatan belum ada.

- 2) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil (pariwisata/wisata bahari/budidaya laut) terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 53 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 22 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 48 pelaku usaha patuh dan 5 tidak patuh karena belum memiliki izin sesuai dengan

ketentuan. Sebagian besar pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah pelaku usaha pariwisata penginapan/resort/villa yang dimiliki oleh pemodal asing.

- e) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut. Pengawasan jasa kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha bahari (pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/budidaya laut/KJA) terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 37 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 8 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh sebanyak 34 pelaku usaha patuh dan 3 tidak patuh.
- f) Pengawasan perikanan dan nonperikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Pengawasan dilaksanakan melalui kepatuhan dokumen perizinan lingkungan, keberadaan Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) dan kesesuaian IPAL yang terpasang. Sampai dengan tahun 2021, dilakukan

verifikasi terhadap 132 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di 43 lokasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 121 pelaku usaha patuh dan 11 yang tidak patuh karena belum memiliki IPAL sesuai dengan yang ditetapkan. Pelaku usaha yang tidak patuh direkomendasikan untuk segera membuat IPAL dan mengoperasikannya sesuai dengan dokumen perizinan lingkungannya.

- g) Pengawasan kegiatan perikanan yang patuh peraturan pelarangan *destructive fishing*. Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaku usaha kegiatan penangkapan ikan di

bawah 10 GT. Adapun kriteria kepatuhan adalah keberadaan alat yang diduga dapat menyebabkan *destructive fishing* antara lain bom, setrum, dan racun. Sampai dengan tahun 2021, dilakukan verifikasi terhadap 914 pelaku usaha yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh 876 pelaku usaha patuh dan 38 yang tidak patuh. Ketidakepatuhan pelaku usaha terjadi karena ditemukan alat/bahan penyetrum, bus dan peledak. Terhadap para pelaku yang tidak patuh dilakukan penangkapan sebanyak 24 kasus bom, 4 kasus ikan, 4 kasus strum

Secara umum, capaian kinerja tahun 2021 tercapai melebihi target yang ditetapkan, kedepan KKP akan terus berupaya meningkatkan upaya preventif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan melalui kegiatan kampanye, dan sosialisasi. Hal ini mempertimbangkan bahwa masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan di bidang kelautan.

Sasaran Strategis (SS-7) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Sasaran Strategis 7 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 12 Produksi

Perikanan dan IKU 13 Produksi Garam

IKU 12/ Produksi Perikanan

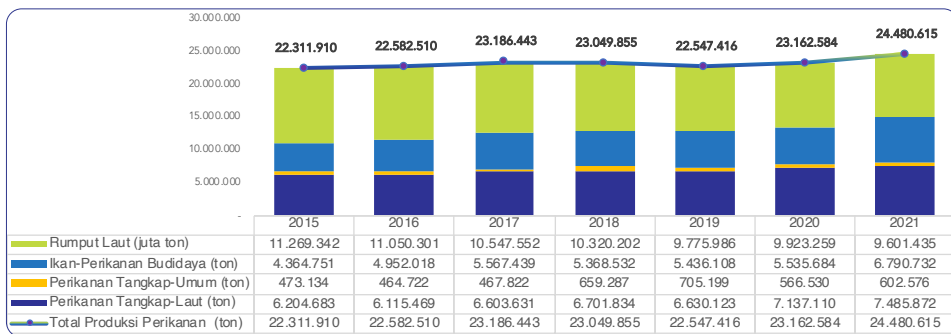
Produksi perikanan merupakan jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan. Target produksi perikanan mengalami penyesuaian dari 27,88 juta menjadi 27,55 juta ton yaitu penyesuaian target produksi ikan perikanan tangkap dari semula 8,42 juta ton menjadi 8,08 juta ton. Sehingga rincian target produksi perikanan tahun 2021 sebesar 27,55 juta ton terdiri dari ikan hasil tangkapan dari 8,08

juta ton, ikan hasil budidaya 7,92 juta ton dan rumput laut 11,55 juta. Penyesuaian ini dilakukan dengan asumsi pandemi Covid-19 diperkirakan membawa dampak pada produksi perikanan, sehingga dilakukan penyesuaian. Penyesuaian target produksi perikanan tangkap ini telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Capaian produksi perikanan tahun 2021 adalah sebesar 24,48 juta ton (angka sangat sementara) yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 8,08 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,39 juta ton. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian produksi perikanan 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,69 persen (Tabel 33).

Tabel 34. Capaian IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis 7 : Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing													
IKU-12. Produksi Perikanan (juta ton)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
22,31	22,58	23,19	23,05	22,55	23,16	27,55	24,481	88,86	5,69	27,89	87,78	32,75	74,75

sumber. satudatakkp (*angka sangat sementara)



Gambar 46. Produksi Perikanan Tahun 2015-2021

Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi tangkap tahun 2021 sebesar 8,09 juta ton terdiri dari produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 7,48 juta ton (92,55 persen) dan perairan umum daratan sebesar

0,60 juta ton (7,45 persen). Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 382.774 ton atau 5 persen dari tahun 2020 (Tabel 34). Rincian produksi perikanan tangkap per komoditas tersaji pada Tabel 35.

Tabel 34. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021

Sasaran Strategis 7 : Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing													
IKU-12. Produksi Perikanan (juta ton)													
Indikator Kinerja Pembentuk :Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
6,68	6,58	7,07	7,36	7,34	7,70	8,08	8,09	100,10	5,00	8,42	96,06	10,10	80,08

Tabel 35. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2021

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
Perikanan Tangkap	6.677.817	6.580.191	7.071.453	7.361.121	7.335.322	7.703.640	8.088.448
Perikanan Tangkap-Laut	6.204.683	6.115.469	6.603.631	6.701.834	6.630.123	7.137.110	7.485.872
Udang	274.522	292.299	400.073	233.713	199.440	467.543	409.730
Tuna	255.452	273.336	293.233	409.016	349.530	291.326	307.235
Cakalang	415.061	440.812	467.548	510.686	527.175	461.231	531.118
Tongkol	524.383	476.233	474.970	630.062	545.072	485.096	608.274
Lainnya	4.735.265	4.632.789	4.967.806	4.918.357	5.008.907	5.431.915	5.629.516
Perikanan Tangkap-Umum	473.134	464.722	467.822	659.287	705.199	566.530	602.576
Udang	24.650	25.535	51.062	39.954	46.920	31.339	33.109
Ikan	306.009	335.103	330.862	494.371	658.279	525.465	556.339
Lainnya	142.475	104.084	85.898	124.962		9.726	13.128

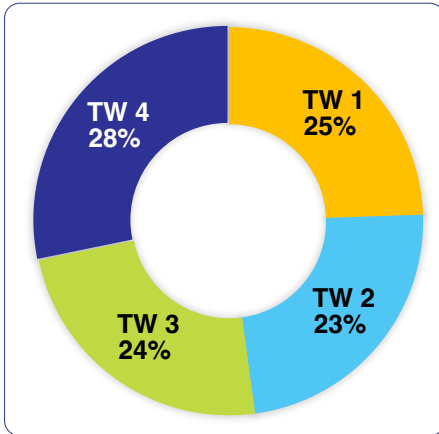
Keterangan:
*) Angka Sementara
Sumber satu.datakkp.

Meningkatnya produksi perikanan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan.
2. penguatan pendataan sehingga kelimpahan ikan di beberapa lokasi dapat terdata dengan baik.
3. kondisi cuaca yang baik sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan
4. meningkatnya jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan.

Beberapa upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam

rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain (1) mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dari luar daerah yang masuk ke pelabuhan perikanan, (2) peningkatan sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat, (3) optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, (4) penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, (5) fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan, dan (6) Pengawasan terhadap pendataan produksi pasca produksi sebagaimana diamatkan PP 85/2021.



Gambar 47. Volume Produksi Perikanan Tahun 2021 per Triwulan

Jika dilihat pada Gambar 47, terjadi penurunan terhadap volume produksi perikanan tangkap baik dari perairan laut maupun perairan darat pada triwulan II dan naik kembali pada triwulan III dan IV. Faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi perikanan tangkap pada triwulan II adalah Pandemi COVID-19. Pada Mei-Juni 2021 terjadi peningkatan kasus penderita COVID-19 sehingga pemerintah melakukan pembatasan sosial secara massif yang mengakibatkan kegiatan operasional penangkapan ikan maupun daya serap pasar serta ekspor mengalami penurunan.

Peningkatan terhadap pemanfaatan perikanan menjadi

faktor penentu keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pengelolaan perikanan tangkap harus berbasis pada potensi sumber daya ikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan peran serta masyarakat serta keberlanjutan sumberdaya. Konsep pengelolaan perikanan berbasis WPP harus didukung dengan berbagai perlengkapannya baik dari aspek fisik maupun kelembagaannya. Adapun bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

1. Kapal perikanan yang terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan. Sedangkan output dari pendaftaran kapal perikanan berupa Buku Kapal Perikanan (BKP) adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal

perikanan. Paralel dengan kegiatan pendaftaran dilakukan pula pemberian tanda pengenal kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang didaftarkan.

Tanda pengenal kapal perikanan merupakan kegiatan memberikan tanda atau notasi kapal perikanan. Penatakelolaan kegiatan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, baik pusat maupun daerah, dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA). Adapun realisasi output pendaftaran kapal perikanan sebanyak 2.305 layanan (184,4%) dari target sebanyak 1.250 layanan. Kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan pendaftaran kapal perikanan :

- 1) Aplikasi yang telah disusun masih terdapat beberapa celah kekurangan
- 2) Penerapan BKP daerah belum optimal (hanya 12 Provinsi yang aktif) karena keterbatasan SDM, anggaran dan tata laksana di Provinsi.
- 3) Anggaran monitoring

penandaan kapal perikanan secara elektronik terkena refocussing sehingga belum dapat dilaksanakan

Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah:

- 1) Melaksanakan perbaikan/ penyempurnaan Aplikasi SIPALKA *Online*
- 2) Menyusun aplikasi SIPALKA *Online* bagi Daerah sehingga pelayanan dapat lebih efisien
- 3) Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring secara periodik kepada seluruh Provinsi.
- 4) Melaksanakan Sosialisasi penerapan Pendaftaran Kapal Perikanan untuk Provinsi yang belum menerapkan pelaksanaan monitoring penandaan kapal perikanan secara elektronik akan diupayakan untuk dilaksanakan pada anggaran berikutnya.

Persetujuan pengadaan kapal perikanan merupakan surat yang diberikan kepada pemilik kapal yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk

membangun dan memodifikasi kapal perikanan. Mekanisme pelayanan dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi Sistem Informasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (SIKAPI). Adapun realisasi output pendaftaran kapal perikanan sebanyak 1.444 layanan (962,66%) dari target sebanyak 150 layanan.

Kendala yang masih dihadapi dalam pelayanan persetujuan pengadaan kapal perikanan yaitu persetujuan pengadaan kapal perikanan Daerah (provinsi) belum dimonitor dan dilaksanakan pembinaan. Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah menyusun aplikasi SIKAPI bagi Daerah sehingga pelayanan dapat lebih efisien dan koordinasi serta monitoring secara periodik kepada seluruh Provinsi. Pelayanan pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagai syarat

untuk penerbitan/perubahan Buku Kapal Perikanan (BKP) ataupun perpanjangan SIPI/SIKPI. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan, dalam rangka pendaftaran dan perizinan kapal perikanan. Fungsi pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan adalah untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan secara illegal dengan memastikan kapal dan alat penangkapan ikan yang digunakan telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara daring (*online*) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan (SICEFI) dan secara manual (*offline*). Adapun realisasi Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan tahun 2021 sebanyak 2.023 layanan atau 101,1% dari target sebesar 2.000 layanan yang diperoleh melalui :



- Aplikasi SICEFI *online* sebanyak 1.555 layanan.
- Permohonan manual offline sebanyak 468 layanan. Layanan ini dilakukan khusus untuk kapal perikanan yang menggunakan alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.502/DJPT/PI.220/VIII/2021 tentang Peralihan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Menjadi Alat Penangkapan Ikan yang Diperbolehkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan :

- Masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi;
- Terdapat petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang tidak siap ditugaskan ketika mendapatkan surat tugas;
- Keterlambatan dalam pelaporan atau perbaikan

laporan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

- Keterbatasan jumlah petugas verifikator dalam proses verifikasi laporan hasil pemeriksaan fisik;

Kedepan solusi yang diharapkan antara lain adalah:

- P e r b a i k a n / penyempurnaan SICEFI;
- Rapat Koordinasi seluruh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan untuk melakukan upgrading dan evaluasi;
- Peningkatan kompetensi dan jumlah petugas verifikator dalam melakukan verifikasi laporan hasil pemeriksaan fisik.

Selain itu untuk mendukung target produksi, KKP pada tahun 2021 juga menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan yang berupa kapal penangkap ikan dengan tujuan untuk mendukung usaha nelayan yang ditujukan kepada koperasi nelayan. Bantuan kapal perikanan tahun anggaran 2021 pada

awalnya sebanyak 97 unit terdiri dari pengadaan Tugas Pembantuan 95 unit (kapal 5 GT: 85 unit dan kapal 10 GT : 10 unit) dan pengadaan Pusat 2 unit kapal 30 GT. Kemudian sehubungan dengan pemotongan anggaran/*refocusing* tahap IV pada tahun 2021 maka pengadaan bantuan kapal perikanan melalui pusat dan Tugas Pembantuan (TP) berkurang untuk penanggulangan Covid-19. Untuk bantuan kapal yang masih dilaksanakan adalah dari pengadaan TP Dinas Maluku Utara karena sudah kontrak dan berjalan proses pembangunannya dengan realisasi mencapai 100% di mana telah dilaksanakan serah terima kapal sesuai dengan berita acara serah terima bantuan kapal penangkap ikan yang meliputi sebanyak 4 unit kapal 10 GT dan sebanyak 10 unit kapal 5 GT.

2. Bantuan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan

Pada tahun 2021 KKP menganggarkan bantuan API



sebanyak 12.000 unit dan API telah disalurkan kepada nelayan di seluruh Kab/kota yang mengusulkan dan memenuhi syarat sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Proses pengadaan API dilakukan dengan sistem lelang umum. Adapun spesifikasi teknis API disesuaikan dengan kebutuhan penerima.

Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil. Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu: a) koperasi; dan b) kelompok usaha bersama. Indikator keberhasilan bantuan alat penangkapan ikan yaitu tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan dengan tepat waktu. Adapun capaian kegiatan bantuan alat penangkapan ikan yang tersalurkan di tahun 2021 sebesar 12.525 unit (104,4%) dari target sebesar 12.000 unit. Kelebihan capaian pengadaan bantuan API sebanyak 525 unit diperoleh dari optimalisasi

pemanfaatan sisa kontrak (addendum). Disamping kegiatan pengadaan bantuan API sebanyak 12.525 unit, **Dit. KAPI** juga memberikan bantuan API dan bimbingan teknis serta memperkenalkan jenis alat tangkap baru yang ramah lingkungan melalui kegiatan familiarisasi alat penangkapan ikan.

3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI)

Bantuan sarana penangkapan ikan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan atau mesin kapal perikanan. Setelah Bantuan Sarana Penangkapan Ikan diserahkan kepada penerima bantuan, perlu dilakukan pemantauan operasional paket BSPI yang

dibagikan kepada penerima. Diharapkan setiap bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat termanfaatkan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan penerima bantuan. Dari target Output/Indikator keberhasilan terpantaunya pemanfaatan kapal bantuan pada 2.513 unit kapal, tercapai sebanyak 2.513 unit (100%).

Berdasarkan hasil pemantauan Kapal Bantuan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, dari 2.513 kapal bantuan yang terbangun Tahun 2015 – 2019 didapatkan hasil bahwa 1.991 unit kapal bantuan saat ini masih beroperasi dengan baik, namun sebanyak 522 unit kapal bantuan sedang/ sudah tidak operasional. Dari 2.513 kapal bantuan terbangun jika diurutkan berdasarkan tahun

pembangunannya maka persentase pemanfaatan kapal bantuan tertinggi adalah pada tahun 2018 (96 % termanfaatkan) dan 2019 (93 % termanfaatkan). Terhadap kapal bantuan TA. 2015 p e m a n f a a t a n



sebesar 57 %, TA. 2016 sebesar 68 % dan TA. 2017 sebesar 77 %. Dan total kapal bantuan 2015 – 2019, maka pemanfaatannya sebesar 79%. Dari 2.513 kapal bantuan terbangun jika diurutkan berdasarkan kategori ukuran kapal maka persentase pemanfaatan kapal bantuan tertinggi adalah kapal dengan ukuran dibawah < 5 GT. Berdasarkan hasil pelaporan, didapatkan informasi bahwa pemanfaatan kapal bantuan berukuran dibawah < 5 GT mencapai 91 % yaitu 1.320 unit dari 1.443 kapal bantuan dengan ukuran tersebut dimanfaatkan dengan maksimal.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pengendalian COVID-19 di beberapa wilayah sehingga tidak seluruh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi hadir di kegiatan pertemuan evaluasi kapal bantuan. Solusi, bagi wilayah yang belum hadir pada saat pertemuan evaluasi kapal bantuan akan dilakukan kunjungan lapangan oleh tim DJPT.

4. Awak Kapal Perikanan yang Disertifikasi

Sertifikat Keahlian Awak

Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai awak kapal perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian awak Kapal Perikanan, untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan. Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan yang telah mendapatkan pengesahan.



Selama periode Januari s.d. Desember 2021, telah diterbitkan sertifikat awak kapal perikanan sebanyak 1.953, terdiri atas : a) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) untuk laik simpan sebanyak 1.864 sertifikat dan b) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI) untuk laik tangkap sebanyak 89 sertifikat. Pelaksanaan Bimtek selama tahun 2021 dilaksanakan di 30 lokasi, yaitu: a) 22 UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; b) 7 lokasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; dan c) 1 lokasi SMK Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian secara kumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 capaian sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 18.442 orang.

5. Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Maju

Keadaan perumahan dan lingkungan permukiman masyarakat nelayan dengan sarana prasarana publik yang ada seperti: jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah, limbah dan lainnya secara umum di wilayah Indonesia kondisinya cenderung kumuh dan masih kurang memadai. Kesadaran

masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kampung nelayan juga dirasakan masih minim. Keadaan ini tentunya perlu penataan agar tercipta kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Kawasan permukiman nelayan diharapkan dapat dipenuhi melalui perbaikan atau penyediaan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan para nelayan dan keluarganya.

Mengacu pada Arah Kebijakan Perikanan Tangkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya Pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan “Pengembangan Pemukiman Nelayan Maju”. Diantara program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah melalui pemenuhan kebutuhan perbaikan atau penataan sarana/prasarana dan infrastruktur dasar kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju dan mandiri.



Target lokasi penataan kawasan kampung nelayan maju adalah 1 lokasi, dengan realisasi yang dilaksanakan adalah 5 lokasi diantaranya yaitu :

- Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- Gampong Kuala Peudawa Putong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
- Desa Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan,

Provinsi Maluku Utara

6. Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan

Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset. KKP melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian lain yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dalam bentuk pemberdayaan hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut, Subdirektorat Usaha Nelayan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada TA 2021 perlu melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai agunan dalam memperoleh kredit dari perbankan/lembaga keuangan lainnya serta dalam rangka mendukung program pemerintah menuju Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2025.

Target pelaksanaan identifikasi sertifikasi hak atas tanah nelayan tahun 2021 ditetapkan sebanyak 7.500 bidang / calon peserta/ calon lokasi. Namun adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan refofusing anggaran untuk dialihkan pada fokus penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19. Adanya kebijakan satgas nasional penanggulangan covid-19 yang mengintruksikan untuk pembatasan aktifitas dan kegiatan masyarakat mempengaruhi kegiatan pelaksanaan identifikasi di

lapangan antara petugas dengan masyarakat. Pada akhir Bulan Desember 2021 dilaporkan capaian hasil identifikasi yang dilaksanakan mencapai 12.896 bidang/calon peserta/calon lokasi atau 171,95% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.

7. Fasilitasi Kredit Perikanan Tangkap

Kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan antara nelayan dengan lembaga keuangan serta kegiatan pendampingan akses permodalan melalui petugas pendamping permodalan di tingkat provinsi dan pelabuhan perikanan. Peran pendampingan dalam mengakses permodalan sangat diperlukan, baik oleh penyuluh pemerintah, swasta, maupun pendamping khusus permodalan. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi usaha penangkapan ikan dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perikanan terhadap prosedur pengajuan kredit pada lembaga keuangan, peran pendamping sangat penting sebagai mediator dengan lembaga keuangan. KKP pada tahun 2021 menggandeng Konsultan Keuangan Mitra

Bank (KKMB) serta menginisiasi Petugas Koordinator Pojok Pendanaan Nelayan di Pelabuhan Perikanan untuk melaksanakan intermediasi antara para pelaku usaha sektor penangkapan ikan dengan lembaga keuangan bank dan non bank. Fasilitasi Kredit yang dilakukan melalui : Kegiatan Temu Teknis Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan, Kegiatan Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan, Pendampingan akses permodalan. Di tahun 2021 telah memfasilitasi kredit perikanan tangkap kepada 1.755 nelayan dengan nilai kredit sebesar Rp101.335.500.000.

8. Harmonisasi Perizinan Pusat dan Daerah

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah menetapkan kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, jenis perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku dari masing-masing jenis perizinan berusaha serta kewenangan penerbitan perizinan dimaksud. Disamping itu juga telah ditetapkan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan berdasarkan hasil analisis risiko

kegiatan usahanya. Ketentuan pada PP Nomor 5 tahun 2021 juga mengatur bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Sistem OSS dimaksud wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan pelaku usaha. OSS merupakan suatu Lembaga yang ada pada Lembaga BKPM. Dengan telah terintegrasinya aplikasi OSS dengan SILAT dan SIMKADA secara SSO sangat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan perikanan tangkap.

9. Pengembangan pelabuhan perikanan

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Umum Perhitungan Penggunaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang

sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum

tersedia). Sampai dengan saat ini kegiatan identifikasi dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Lokasi Kegiatan Identifikasi/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
1	PPS Nizam Zachman	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
2	PPS Bungus	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
3	PPN Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
4	PPN Brondong	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
5	PPN Prigi	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
6	PPN Sibolga	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
7	PPN Palabuhanratu	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.446/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
8	PPN Ambon	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
9	PPN Tual	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
10	PPN Pemangkat	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
11	PPN Ternate	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
12	PPN Tanjung Pandan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
13	PPN Sungailiat	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
14	PPN Karangantu	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
15	PPN Kwandang	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
16	PPP Teluk Batang	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kegiatan rapat Koordinasi Teknis Kepelabuhanan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
17	PP Likupang	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan kajian pekerjaan Site selection/Pra Feasibility Study (pra-FS) Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.612/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut

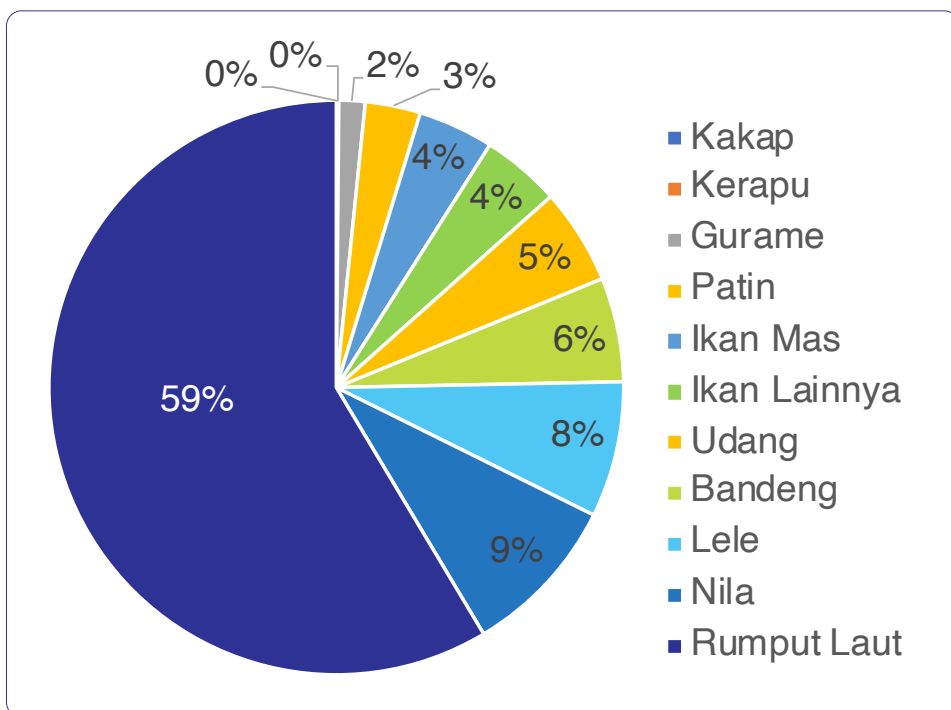
No	Lokasi	Jenis Kegiatan
18	PP Bagansiapiapi	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan kajian pekerjaan Site selection/Pra Feasibility Study (pra-FS) Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP
19	PPS Belawan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kajian additional study kegiatan EcoFishing Ports Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.526/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut
20	PPS Kendari	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kajian additional study kegiatan EcoFishing Ports Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.398/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut
21	PPS Bitung	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kajian additional study kegiatan EcoFishing Ports Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.380/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut
22	PPS Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui kajian additional study kegiatan EcoFishing Ports Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.587/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut
23	PPN Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui Pekerjaan Jasa Konsultansi Reviu Rencana Induk (Masterplan) Dan Desain Rinci (Detail Engineering Design) Pengembangan Prioritas Pelabuhan Perikanan Di Indonesia Tahun Anggaran 2021
24	PPN Kejawan	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui Pekerjaan Jasa Konsultansi Reviu Rencana Induk (Masterplan) Dan Desain Rinci (Detail Engineering Design) Pengembangan Prioritas Pelabuhan Perikanan Di Indonesia Tahun Anggaran 2021. Penyusunan rencana penataan ruang untuk WKOPP dengan terbitnya Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.525/MEN-KP/X/2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut

No	Lokasi	Jenis Kegiatan
25	PPP Tegalsari	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan melalui Pekerjaan Jasa Konsultansi Reviu Rencana Induk (Masterplan) Dan Desain Rinci (Detail Engineering Design) Pengembangan Prioritas Pelabuhan Perikanan Di Indonesia Tahun Anggaran 2021
26	PP Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Paket Pengadaan Pembangunan Ducting di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke Tahun Anggaran 2021.
27	PP Teluk Awang	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Paket Pengerjaan Konstruksi Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Tahun Anggaran 2021 Paket Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Tahun Anggaran 2021. Paket pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung untuk Pagar BRC Tahun Anggaran 2021. Paket pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung untuk Lampu Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2021. Paket pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung untuk Genset Tahun Anggaran 2021. Paket pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung untuk Pintu Gerbang Tahun Anggaran 2021. Paket pengadaan barang dengan metode pembelian langsung untuk CCTV Tahun Anggaran 2021.
28	PP Tanjung Adikarto	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan

Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 sebesar 16,39 juta ton terdiri dari ikan sebesar 6,79 juta ton dan rumput laut sebesar 9,6 juta ton (Tabel 37). Berdasarkan komposisi, produksi perikanan

budidaya didominasi oleh produksi rumput laut (58,57 persen), nila (9,10 persen), lele, (7,64 persen), bandeng (5,86 persen), udang (5,40 persen) dan komoditi lainnya seperti ikan mas, patin, gurami, kakap dan kerapu (Gambar 48).



Gambar 48. Komposisi Volume Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2021

Pada tahun 2021 produksi udang mulai membaik kembali dan diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun 2022 , seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh KKP. Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional

produksi rumput laut memberikan share sebesar 58,57% terhadap produksi perikanan budidaya. Namun demikian produksi rumput laut mengalami perlambatan sebesar -3,24 persen apabila dibandingkan dengan produksi rumput laut tahun 2020 yaitu sebesar 9,92 juta ton. Penurunan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai

jenuh yang disebabkan kualitas bibit yang semakin menurun sehingga kurang tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, sementara itu produksi bibit rumput laut kultur jaringan belum bisa menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

KKP telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang antara lain melalui (i) Asuransi pembudidaya yang melindungi pembudidaya dalam berusaha; (ii) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (iii) Bantuan sarana

budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iv) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan *Stakeholders* lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (v) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (vi) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vii) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (viii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.

Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis 7 : Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing													
IKU-12. Produksi Perikanan (juta ton)													
Indikator Kinerja Pembentuk : Produksi Perikanan Budidaya (juta ton)													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
15,63	16,00	16,11	15,69	15,21	15,46	19,47	16,39	84,19	6,04	19,47	84,19	22,65	72,37

Tabel 38. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021

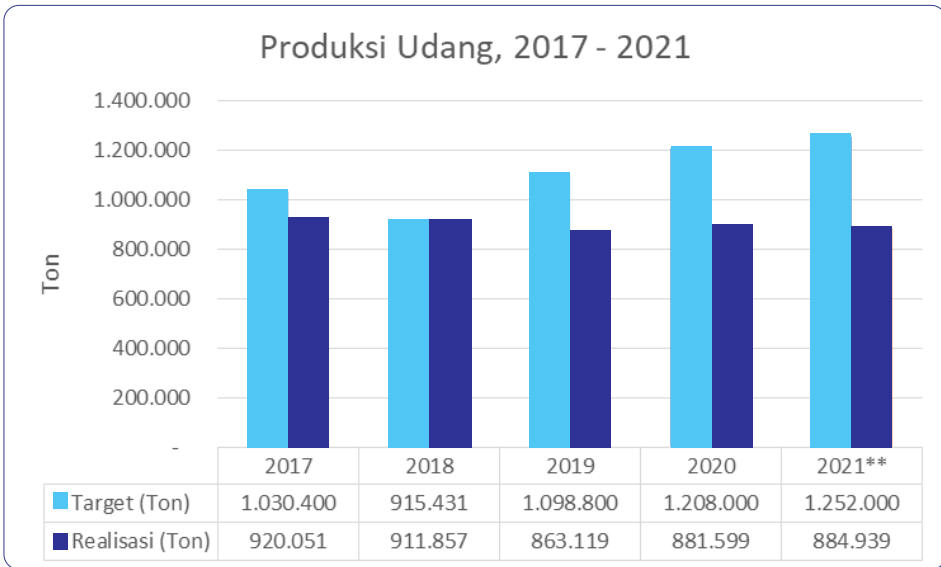
Produksi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perikanan Budidaya	15.634.093	16.002.319	16.114.991	15.688.734	15.212.094	15.458.944	16.392.167
Bandeng	672.196	747.445	701.427	875.592	824.239	695.801	960.733
Gurame	113.407	132.334	234.084	173.345	189.145	212.139	242.147
Ikan Lainnya	344.128	591.197	590.945	358.249	343.368	498.872	727.742

Produksi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kakap	6.558	7.890	8.432	9.583	7.228	7.250	9.034
Kerapu	16.795	11.504	70.294	16.414	12.401	16.461	14.069
Lele	719.619	764.797	1.125.526	944.779	1.012.189	1.017.313	1.253.114
Ikan Mas	461.546	497.208	316.649	534.215	532.289	514.643	698.371
Nila	1.084.281	1.114.156	1.280.126	1.171.236	1.272.345	1.235.514	1.491.553
Patin	339.069	392.918	319.967	373.262	379.786	426.475	509.030
Rumput Laut	11.269.342	11.050.301	10.547.552	10.320.202	9.775.986	9.923.259	9.601.435
Udang	607.152	692.568	919.988	911.857	863.119	911.216	884.939
Jumlah	22.311.910	22.582.510	23.186.443	23.049.855	22.547.416	23.162.584	24.480.615

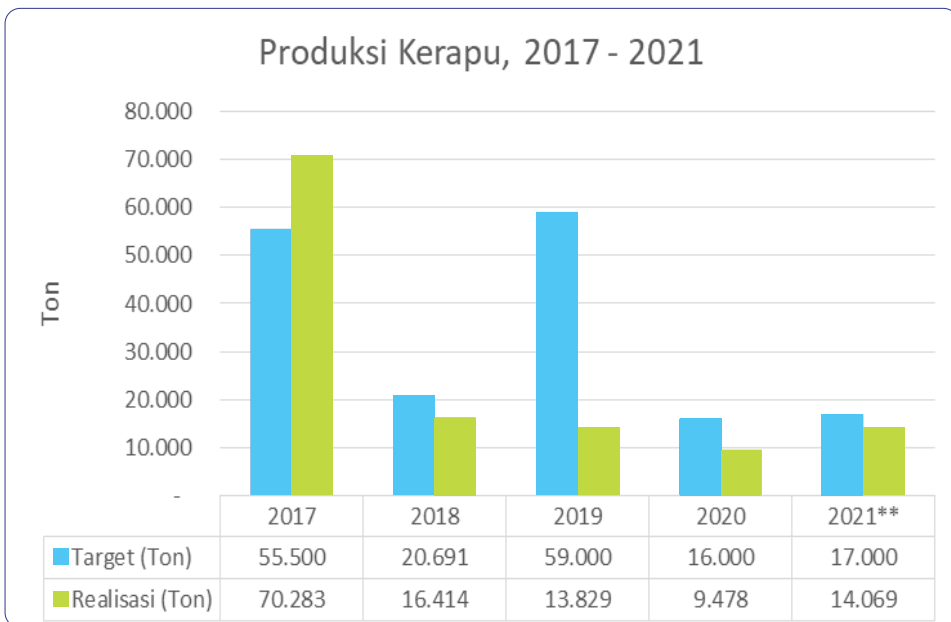
Perkembangan produksi udang nasional tahun 2017 - 2021 mengalami penurunan dengan penurunan rata-rata sebesar 0,93% per tahunnya. Namun pada tahun 2018 target produksi udang mencapai target sebesar 101,74 Persen. sementara tahun 2021 mencapai target sebesar 70,68% (Gambar 49). Tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena terhambatnya distribusi sarana budidaya udang terutama benih dan pakan, yang disebabkan karena antara lain pandemic covid-19 yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan saat ini, akan tetapi keterbatasan produksi ini tidak berpengaruh terhadap pasar ekspor udang Indonesia. Pada tahun 2021 produksi udang mulai membaik kembali dan diharapkan dapat lebih baik lagi ditahun 2022 , seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang. Upaya peningkatan volume dan nilai

produksi udang antara lain (i) Asuransi pembudidaya yang melindungi pembudidaya dalam berusaha; (ii) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (iii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iv) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan *Stakeholders* lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (v) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (vi) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vii) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (viii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massif terhadap pelaku usaha

budidaya udang.



Gambar 49. Grafik Perkembangan Produksi Udang 2017-2021

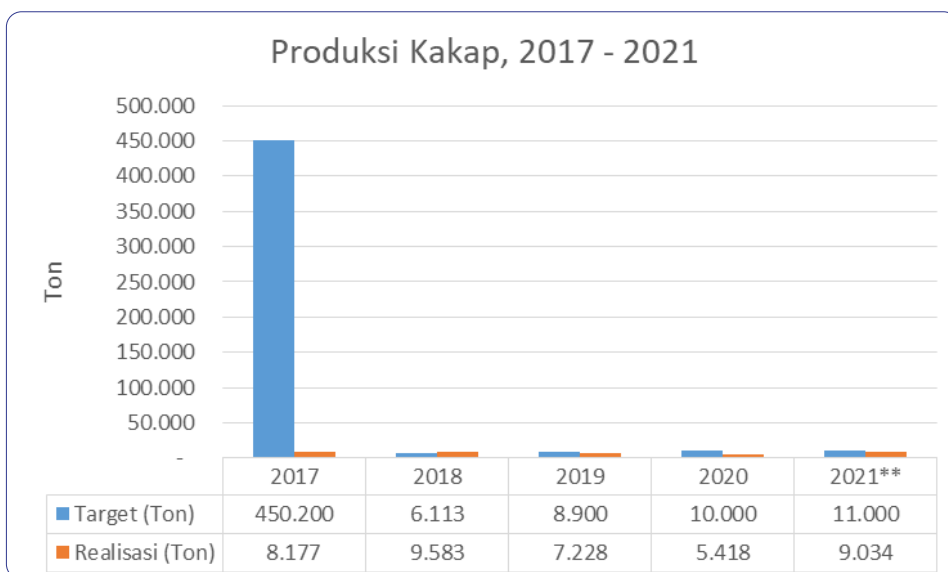


Gambar 50. Grafik Perkembangan Produksi Kerapu 2017-2021

Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2017 - 2021 menunjukkan kinerja yang kurang positif. Hal ini ditandai dengan terus menurunnya produksi kerapu setiap tahunnya sampai dengan tahun 2020. Produksi ikan kerapu pada tahun 2021 meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian. Produksi kerapu mencapai 14.069 ton atau mencapai 82,76 % dari target sebesar 15.567 ton (Gambar 50). Tidak tercapainya target karena adanya pandemi covid-19 yang melanda negara-negara pengimpor kerapu hidup seperti Hongkong dan China sehingga permintaan kerapu menurun. Untuk memacu peningkatan produksi kerapu upaya yang dilakukan antara

lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit pembenihan/Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT); dan (ii) bantuan keramba jaring apung budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

Produksi ikan kakap dari tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,30% per tahun. Capaian produksi ikan kakap pada tahun 2021 mencapai 9.034 ton atau mencapai 82,13 persen dari produksi yang ditargetkan.



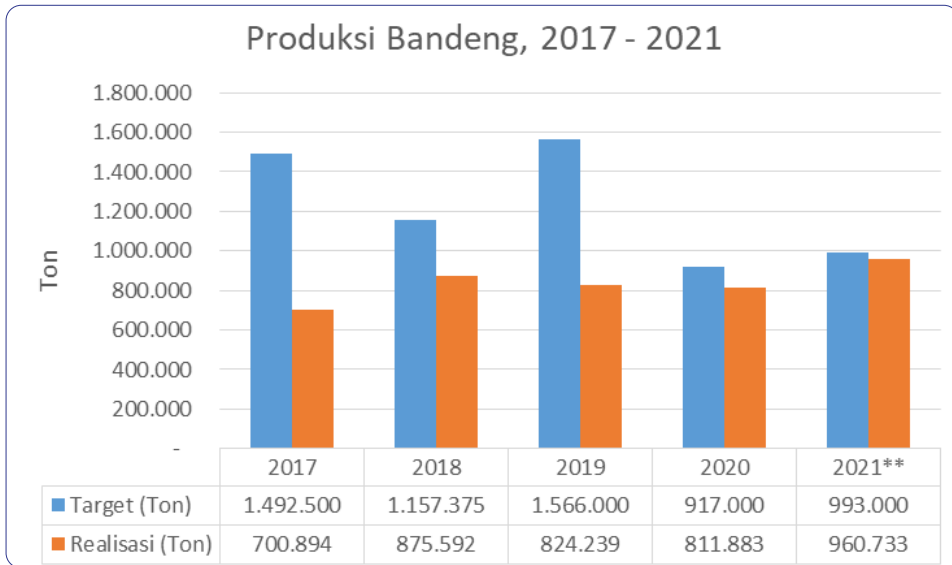
Gambar 51. Grafik Perkembangan Produksi Kakap 2017-2021

Ketidaktercapaian target produksi ini disebabkan keramba jaring apung yang terlambat pengisian benihnya. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap, KKP telah mengalokasikan bantuan berupa keramba jaring apung dan pengembangan benih kakap di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung budidaya kakap.

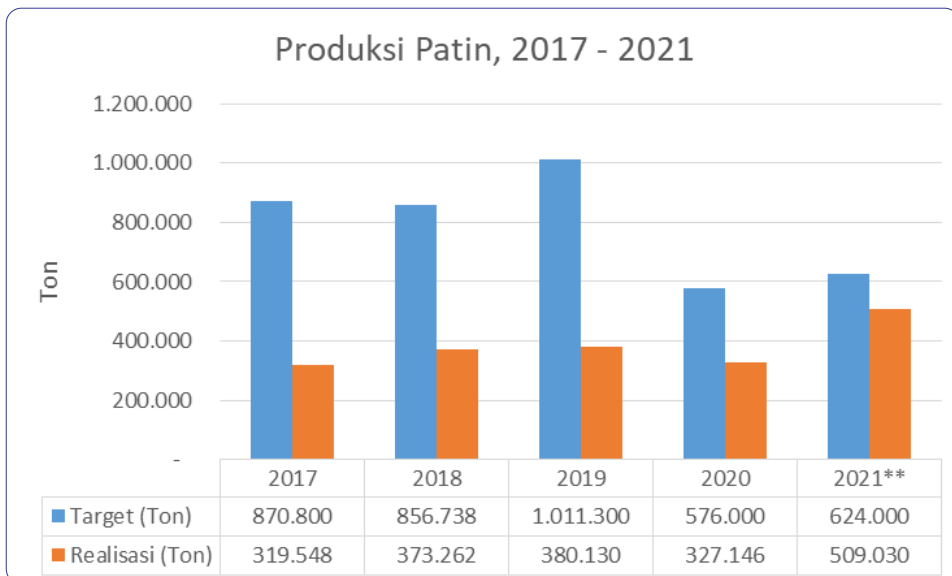
Produksi bandeng dari tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,95 persen (Gambar 52), penurunan produksi pada tahun 2020 terjadi karena adanya pandemi namun, meningkat kembali di tahun 2021. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat tinggi terhadap produk bandeng. Adanya ekspor nener juga menyebabkan

ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 dapat tercapai.



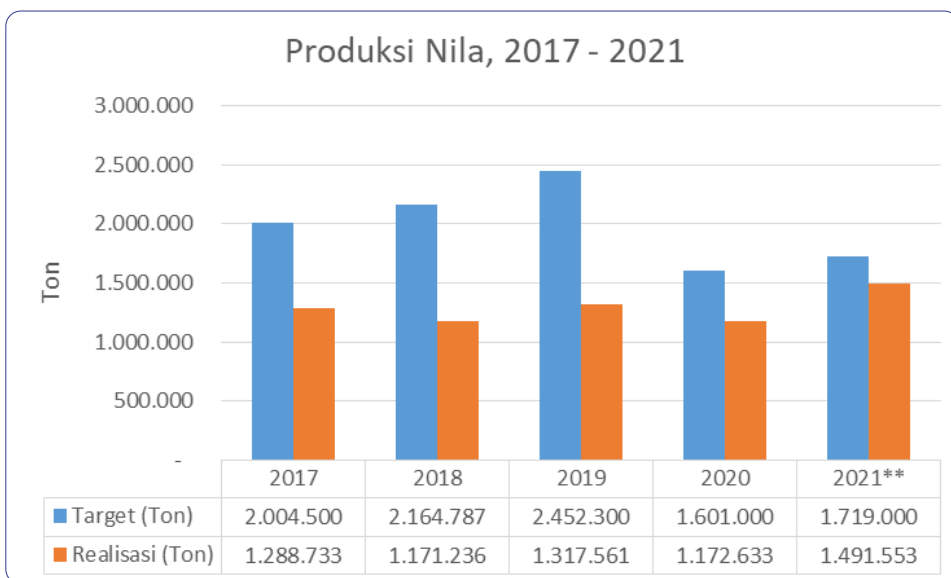
Gambar 52. Grafik Perkembangan Produksi Bandeng 2017-2021



Gambar 53. Grafik Perkembangan Produksi Patin 2017-2021

Produksi ikan patin dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan sebesar 15,04%. Produksi tahun 2021 belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan atau baru mencapai 81,56% (Gambar 53). Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2021 antara lain disebabkan karena sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan yang masih belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia. Selain itu tingginya biaya produksi karena harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga jual ikan yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi masih cukup rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui Kerjasama/sinergi lintas sectoral/ swasta/*Stakeholders* lain,

untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka : (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti Arab Saudi dan daerah Timur Tengah lainnya; (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien; (iii) Pengembangan kawasan budidaya ikan patin secara terintegrasi, serta (iv) Peningkatan nilai tambah produk melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.



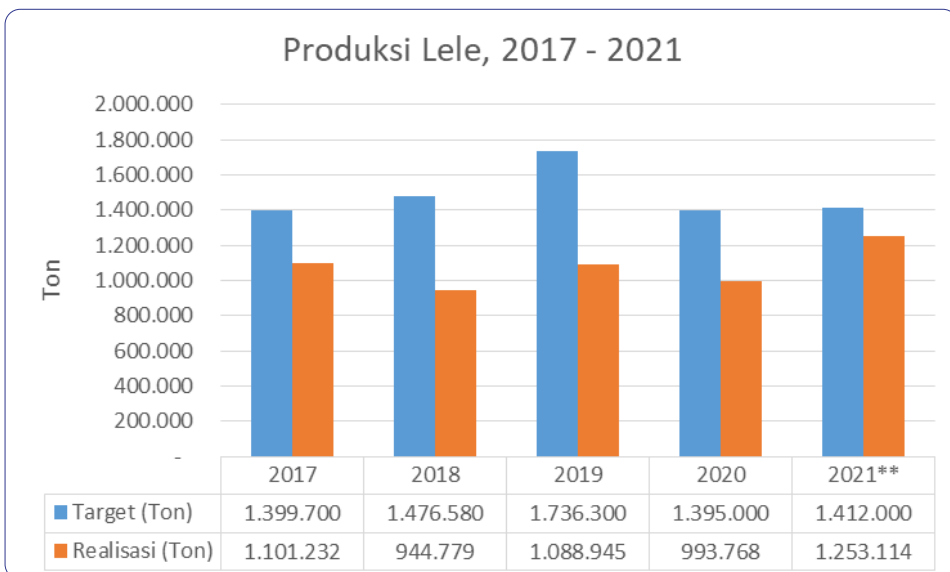
Gambar 54. Grafik Perkembangan Produksi Nila 2017-2021

Produksi ikan nila dari tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan sebesar kenaikan 5,05%. Dilihat dari trend capaian produksi terhadap target tahunan menunjukkan bahwa angka produksi nila sampai dengan tahun 2021 belum dapat dicapai.

Namun, capaian pada tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 86,77% dari target (Gambar 54). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah. Ada beberapa hal

yang menjadi penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, juga adanya kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau juga turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila. Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara

lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan Running Water; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv) Ekstensifikasi pada kawasan potensial; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.



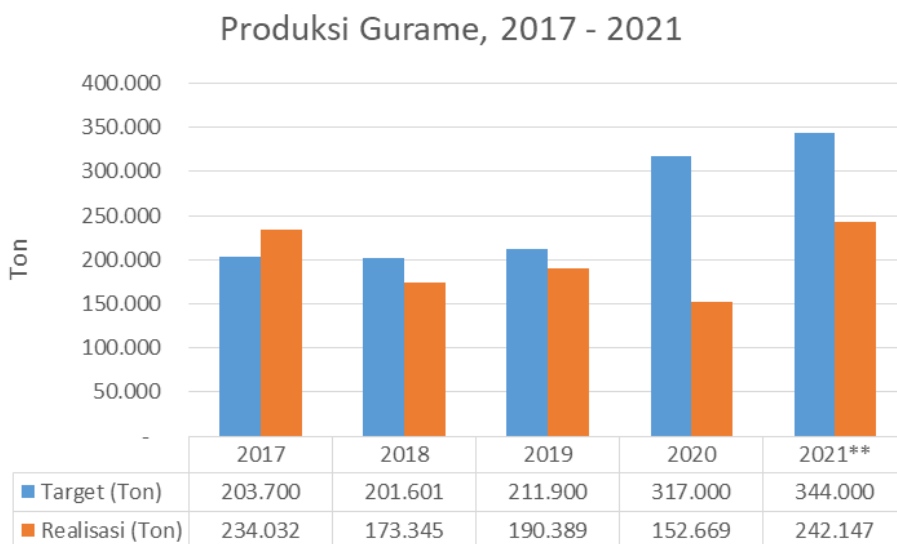
Gambar 55. Grafik Perkembangan Produksi Lele 2017-2021

Selama kurun waktu tahun 2017- 2021 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 4,13% (Gambar 55). Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021

diperkirakan produksinya naik karena efek pandemic mulai berkurang dan untuk lele yang bisa dibudidayakan dengan mudah ini memiliki satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi lebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir

maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan

teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.



Gambar 56. Grafik Perkembangan Produksi Gurame 2017-2021

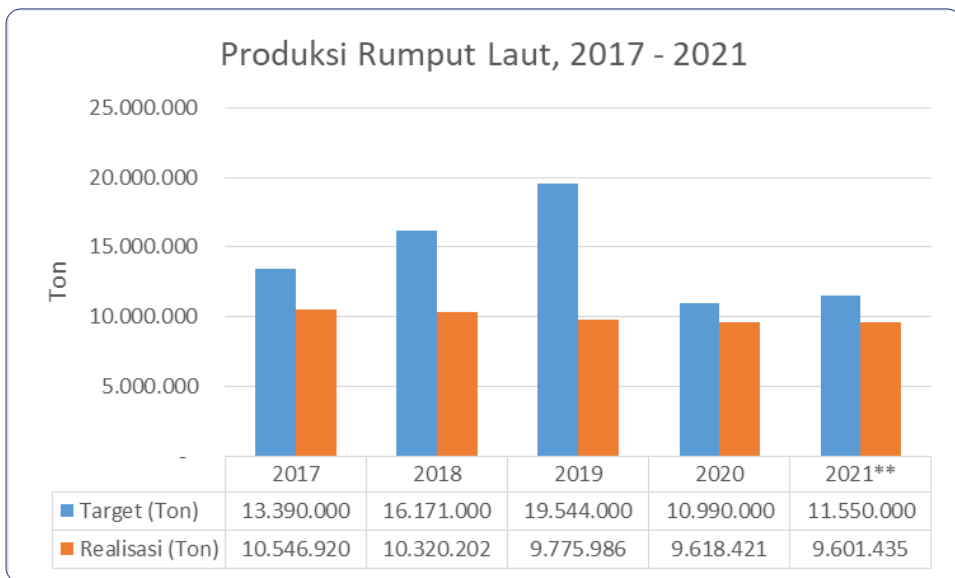
Produksi gurame tahun 2017 - 2021 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 5,43%. Angka capaian produksi tahun 2021 belum target produksi dengan capaian sebesar 242.147 ton atau 70,39% (Gambar 56). Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2021 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup

tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena

banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat

karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.



Gambar 57. Grafik Perkembangan Produksi Rumput Laut 2017-2021

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan share sebesar 60% terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2017 - 2021

menunjukkan trend yang negatif dengan rata-rata penurunan sebesar 2,30% (Gambar 57). Penurunan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai jenuh yang disebabkan kualitas bibit yang semakin menurun sehingga kurang tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang

penyakit, sementara itu produksi bibit rumput laut kultur jaringan belum bisa menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia.

Meskipun mengalami penurunan produksi pada selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budidaya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerjanya relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, karagenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah

pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria* spp dan *Euchema cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Euchema spinosum* dan *Caulerpa* sp.

Upaya untuk mencapai volume produksi perikanan budidaya kedepan antara lain :

- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan broodstock center : i) Pelepasan jenis dan/ atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya; ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul; iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul;

serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.

- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv)

Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kampung perikanan budidaya; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet

- Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
- Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, Pengembangan National Residu Monitoring Plan (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
- Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Perikanan Budidaya.

IKU 13/ Produksi Garam

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk

yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC).

Capaian produksi garam tahun 2021 sebesar 1,09 terhadap target tahun 2021 sebesar 100 persen. Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1.365.711 ton (1,37 juta ton) atau 68,5% dari target 2 juta ton. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253 ton dan PT Garam 219.458 ton. Pada Tahun 2021 terdapat penurunan target produksi garam menjadi 1,09 juta ton. Disamping karena *refocusing* anggaran, besaran ini merupakan hasil kajian tim dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP.

Capaian produksi garam tahun 2021 mencapai 1,09 juta ton terhadap target 2021 sebesar 1,09 juta ton yang terdiri dari 0,91 juta ton produksi garam rakyat dan 0,18 juta ton produksi dari PT .Garam. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 realisasi tersebut, masih mencapai 32,12 persen, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja produksi garam.

Capaian IKU Produksi Garam pada Tahun 2021 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis 7 : Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing											
IKU 13.Produksi Garam Nasional (Juta Ton)											
Realisasi							2021		Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)		
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
2,91	0,144	1,1	2,7	2,85	1,37	1,09	1,09	100	3,4	32,12	

Tabel 42. Rincian Produksi Garam Nasional (Juta Ton) Tahun 2021

No.	Provinsi	Kabupaten	Total Produksi Garam non Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam Lahan Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam(Kg)
1	Aceh	Aceh Selatan	42.933,00	0,00	42.933,00
		Aceh Timur	197.864,00	0,00	197.864,00
		Aceh Besar	1.016.318,00	0,00	1.016.318,00
		Pidie	4.181.265,00	0,00	4.181.265,00
		Bireuen	778.565,00	0,00	778.565,00
		Aceh Utara	1.366.512,00	146.790,00	1.513.302,00
		Aceh Barat Daya	108.390,00	0,00	108.390,00
		Pidie Jaya	1.028.275,00	0,00	1.028.275,00
2	Jawa Barat	Cirebon	3.592.181,00	1.419.300,00	5.011.481,00
		Indramayu	60.903.979,00	9.743.530,00	70.647.509,00
		Karawang	380.512,00	1.259.310,00	1.639.822,00
		Pangandaran	49.844,00	0,00	49.844,00
3	Jawa Tengah	Cilacap	10.029,00	0,00	10.029,00
		Kebumen	1.399.409,00	0,00	1.399.409,00
		Purworejo	18.900,00	0,00	18.900,00
		Rembang	76.622.878,00	22.455.000,00	99.077.878,00
		Pati	124.127.863,00	10.694.900,00	134.822.763,00
		Jepara	21.851.252,00	1.018.390,00	22.869.642,00
		Demak	15.584.701,00	13.782.900,00	29.367.601,00
		Brebes	1.080.803,00	2.909.400,00	3.990.203,00
4	DI Yogyakarta	Bantul	0,00	0,00	0,00
		Gunung Kidul	27.932,00	0,00	27.932,00
5	Jawa Timur	Probolinggo	8.338.655,00	0,00	8.338.655,00
		Pasuruan	17.418.309,00	0,00	17.418.309,00
		Sidoarjo	0,00	0,00	0,00
		Tuban	15.138.652,00	5.994.290,00	21.132.942,00
		Lamongan	9.771.691,00	6.298.740,00	16.070.431,00
		Gresik	681.356,00	269.850,00	951.206,00
		Bangkalan	6.760.987,00	0,00	6.760.987,00
		Sampang	115.280.409,00	2.872.000,00	118.152.409,00

No.	Provinsi	Kabupaten	Total Poduksi Garam non Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam Lahan Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam(Kg)
		Pamekasan	42.763.859,00	4.614.400,00	47.378.259,00
		Sumenep	110.822.747,00	2.757.200,00	113.579.947,00
		Kota Pasuruan	3.709.541,00	0,00	3.709.541,00
		Surabaya	17.253.352,00	0,00	17.253.352,00
6	Banten	Serang	74.000,00	11.000,00	85.000,00
7	Bali	Klungkung	29.136,00	0,00	29.136,00
		Karangasem	364.821,00	0,00	364.821,00
		Buleleng	3.327.309,00	0,00	3.327.309,00
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	261.795,00	1.188.000,00	1.449.795,00
		Lombok Tengah	994.503,00	0,00	994.503,00
		Lombok Timur	29.392.697,00	687.000,00	30.079.697,00
		Sumbawa	4.493.140,00	3.822.330,00	8.315.470,00
		Kab. Bima	62.984.620,00	29.696.060,00	92.680.680,00
		Kota Bima	35.855,00	0,00	35.855,00
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	882.918,00	0,00	882.918,00
		Kupang	1.639.057,00	2.118.700,00	3.757.757,00
		Timor Tengah Selatan	14.284,00	0,00	14.284,00
		Timor Tengah Utara	0,00	0,00	0,00
		Belu	0,00	0,00	0,00
		Alor	518.793,00	552.810,00	1.071.603,00
		Lembata	99.675,00	0,00	99.675,00
		Flores Timur	136.849,00	0,00	136.849,00
		Ende	220.105,00	0,00	220.105,00
		Manggarai	315.104,00	0,00	315.104,00
		Rote Ndao	256.639,00	0,00	256.639,00
		Nagekeo	3.879.449,00	0,00	3.879.449,00
		Sabu Raijua	3.125,00	0,00	3.125,00

No.	Provinsi	Kabupaten	Total Poduksi Garam non Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam Lahan Integrasi (Kg)	Total Produksi Garam(Kg)
10	Sulawesi Tengah	Palu	394.712,00	0,00	394.712,00
11	Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	292,00	0,00	292,00
		Jeneponto	3.642.331,00	4.184.960,00	7.827.291,00
		Takalar	852.647,00	807.120,00	1.659.767,00
		Maros	9,00	0,00	9,00
		Pangkajene Dan Kepulauan	346.750,00	5.036.580,00	5.383.330,00
12	Gorontalo	Pohuwato	281.851,00	0,00	281.851,00
Total			777.752.429,00	134.340.560,00	912.092.989,00
Produksi PT. Garam					180.011.000,00
Total Produksi Garam Tahun 2021					1.092.103.989,00

Tercapainya produksi garam sebesar 1.092.103,985 ton dengan rincian garam rakyat 912.092, 985 ton dan PT Garam 180.011 ton didukung adanya pelaksanaan integrasi pegaraman tahun 2021 seluas 317,61 Ha serta revitalisasi Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 30 unit dengan capaian fisik 100%. Beberapa kendala yang ditemui pada produksi garam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Produksi garam masih bergantung pada cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak awal tahun telah memprediksi bahwa di tahun 2021 musim hujan masih akan terjadi hingga akhir Juni.
- b. Keterlambatan produksi garam di beberapa wilayah karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering dan tidak ada pengaruh air hujan. Musim kemarau tahun ini terjadi cukup singkat sehingga produksi garam belum optimal.
- c. Banjir rob air laut terjadi di beberapa wilayah sentra garam seperti Bangkalan, Brebes, Indramayu, dan Lombok Timur sehingga menghambat proses penataan lahan yang berdampak pada waktu produksi menjadi berkurang

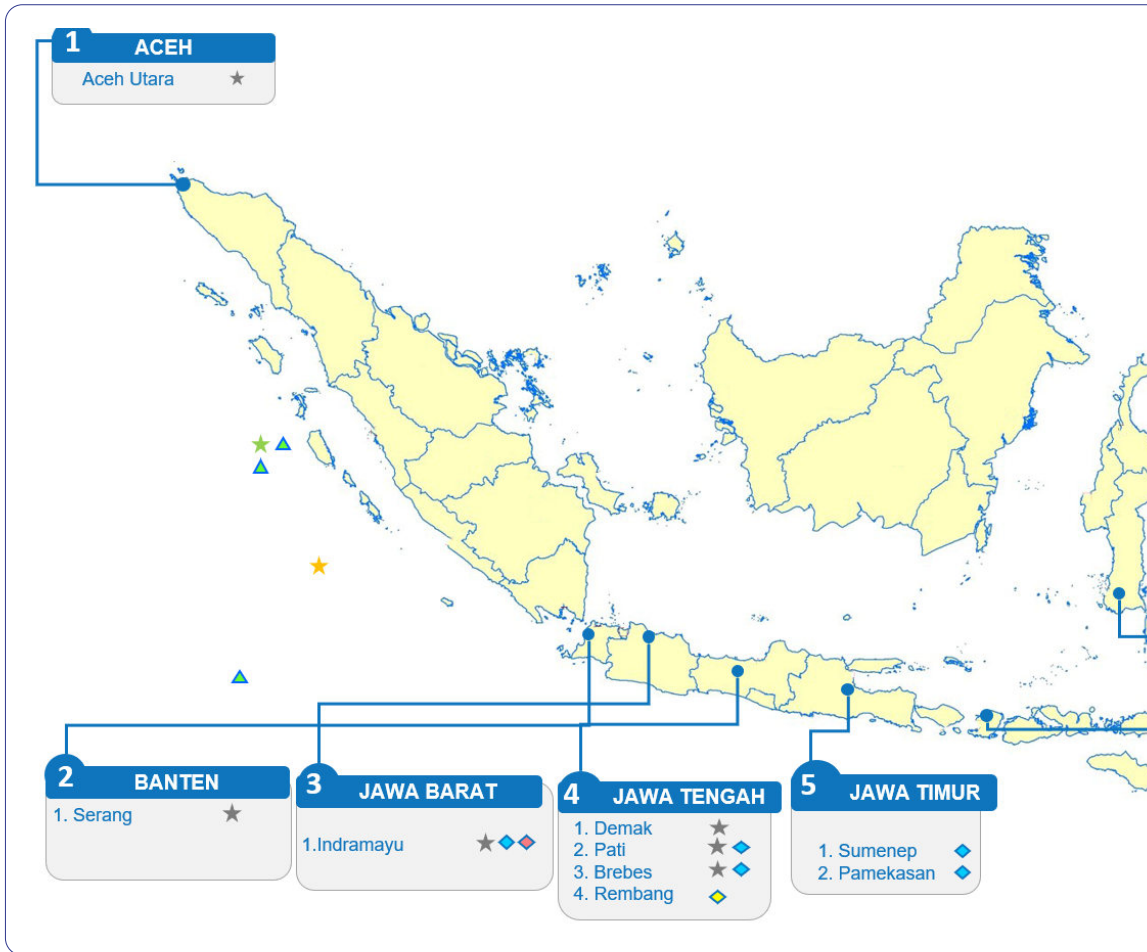
- d. Permasalahan sosial di lapangan dimana sebagian petambak garam masih sulit menerima program integrasi pergaraman.
- e. Penghitungan produksi garam dilakukan di 64 kab/kota, sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung produksi garam melalui integrasi garama rakyat dan pembangunan Gudang garam rakyat di tahun 2021 hanya dapat menyentuh 18 kab/kota.

Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

- a. Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru sebagai dasar untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk mulai menata lahan dan memproduksi garam.
- b. Percepatan penyusunan dokumen perencanaan, lelang fisik penataan/rekonsiliasi lahan integrasi pergaraman.
- c. Perlunya penanaman vegetasi pantai atau pembuatan tanggul agar air laut tidak sampai ke daratan.

- d. Pendekatan intensif untuk memberikan penyadaran kepada para petambak akan pentingnya integrasi pergaraman.
- e. Inisiasi Penyusunan RanPerpres tentang Percepatan Pembangunan Pegaraman Nasional yang memuat antara lain rencana aksi K/L yang terkait dibidang pegaraman.

Dalam mencapai target produksi garam, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 antara lain melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang meliputi Lahan Garam yang difasilitasi, berupa integrasi pergaraman dan perbaikan/pembangunan jalan produksi/saluran tambak dan Sarana Niaga Garam yang Dibangun berupa revitaliasi Gudang Garam Rakyat, Learning Business Center (LBC), dan Washing Plant kapasitas 7.500 ton. Kegiatan pendukung ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebaran lokasi kegiatan disajikan pada sebagai berikut :

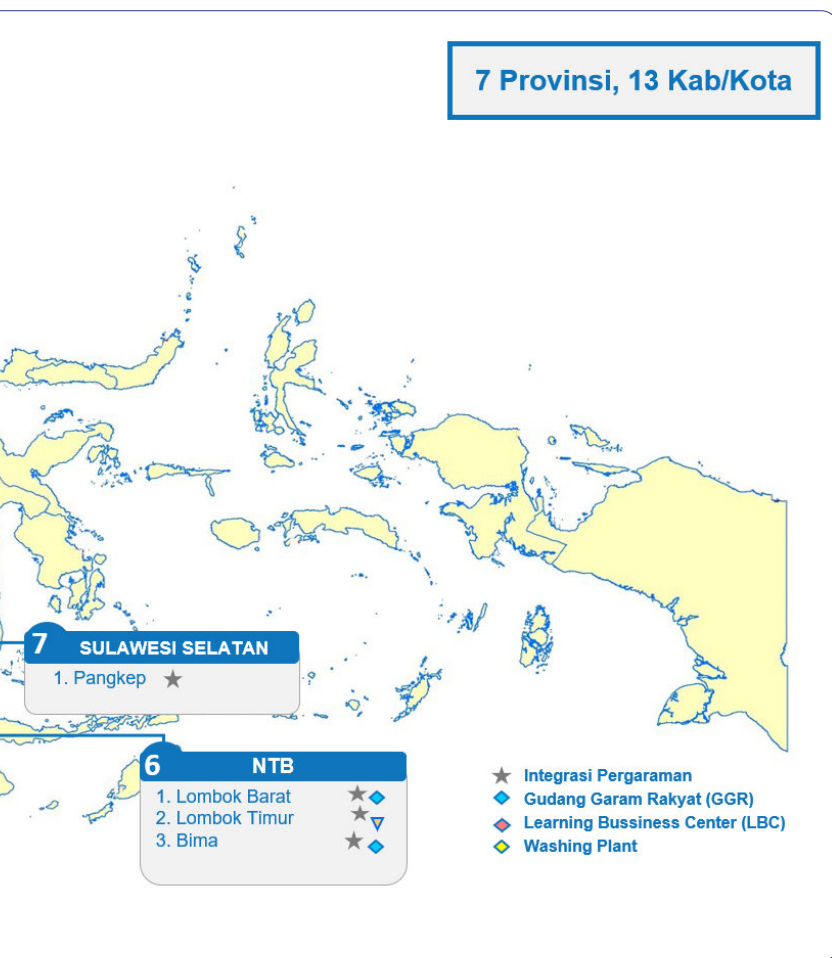


Gambar 58. Sebaran Lokasi Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)

a. Lahan Garam yang Difasilitasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya yang juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kegiatan integrasi pergaraman di tahun 2021 dilaksanakan di 10 kabupaten (Serang, Indramayu,

Brebes, Demak, Pati, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Pangkep, Pohuwato), tunnel garam di 1 kabupaten (Aceh Utara), dan 19 paket pembangunan/rehab jalan/saluran produksi garam di kabupaten (Bima-5 paket, Pangkep-3 paket, Pati-



1 paket, Brebes-2 paket, Pamekasan-2 paket, Lombok Barat-2 paket, dan Lombok Timur-2 paket). Sampai tahun 2021, telah selesai dilaksanakan integrasi pegaraman di 10 kabupaten dengan target 285 Ha dan capaian 317,61 Ha dan 1 paket pembuatan tunnel. Kegiatan integrasi lahan garam ini telah menyerap 322 orang dengan Hari Orang Kerja (HOK) sebesar 9.771, serta upah yang dibayarkan

mencapai Rp 1.049.465.216.

Pantauan Progres Padat Karya Integrasi Pergaraman 2021				
Target Luasan (Ha)	Target Jumlah Tenaga Kerja	Target Hari Orang Kerja (HOK)	Target Upah Padat Karya	Pagu Anggaran
285 Ha	300 Orang	9,000	Rp 900,000,000	Rp 23,757,151,000
Realisasi Luasan Integrasi (Ha)	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja	Realisasi Hari Orang Kerja (HOK)	Realisasi Upah Padat Karya	Realisasi Anggaran
317.61 Ha	322 Orang	9,771	Rp 1,049,465,216	Rp 23,269,945,555
Persentase Luasan	Persentase Jumlah Tenaga Kerja	Persentase HOK	Persentase Upah Padat Karya	Persentase Realisasi Anggaran
111.44 %	107.33 %	108.57 %	116.61 %	97.95 %

Gambar 59. Capaian Padat Karya Integrasi Pergaraman Tahun 2021

b. Sarana Niaga Garam yang Dibangun

Dalam rangka memberikan nilai tambah komoditas garam dan memperkuat usaha pegaraman, KKP menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana niaga garam berupa Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 30 unit yang tersebar di 6 kabupaten (Indramayu-9 unit, Brebes-1 unit, Pati-5 unit, Pamekasan-3 unit, Sumenep-6 unit, dan Bima-5 unit), Learning Business Center (LBC) sebanyak 1 unit di Indramayu dan Washing Plant kapasitas 7.500 ton sebanyak 1 unit di Rembang.

c. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2021

Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2021 dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 27 – 29 Juli 2021 secara daring, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para calon Petugas Cacah Sensus (PCS) kegiatan pendataan usaha garam tentang metode survei dan pengolahan data. Peserta merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDMKP untuk

membantu proses pendataan usaha garam tahun 2021.

d. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan PEN tahun 2020 dan 2021

Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PUGaR dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Brebes dari tanggal 26 – 28 Agustus 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, SAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Khusus Menteri KP, Direktur Jasa Kelautan, Subkoordinator Hubungan Masyarakat Setditjen PRL, dan Pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program PEN PUGaR dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah washing plant atau tempat pencucian garam, Gudang Garam Nasional, dan tambak garam integrasi di Kabupaten Indramayu. Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Brebes untuk melihat proses pembuatan garam rebus dan pabrik pengolahan garam.



e. Validasi dan Pengolahan Data Produksi Garam

Validasi dan Pengolahan Data Produksi Garam dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 dengan agenda pembahasab melakukan validasi dan pengolahan data hasil survei yang dilakukan oleh para Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu di kabupaten/kota sentra garam.



Gambar 60. Peresmian Washing Plant Di Rembang

Gambar 61. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Niaga Garam di Indramayu

Sasaran Strategis (SS-8) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif

SS 8 memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu : IKU 14. Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal*

fishing dan IKU 15. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

IKU 14/ Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*

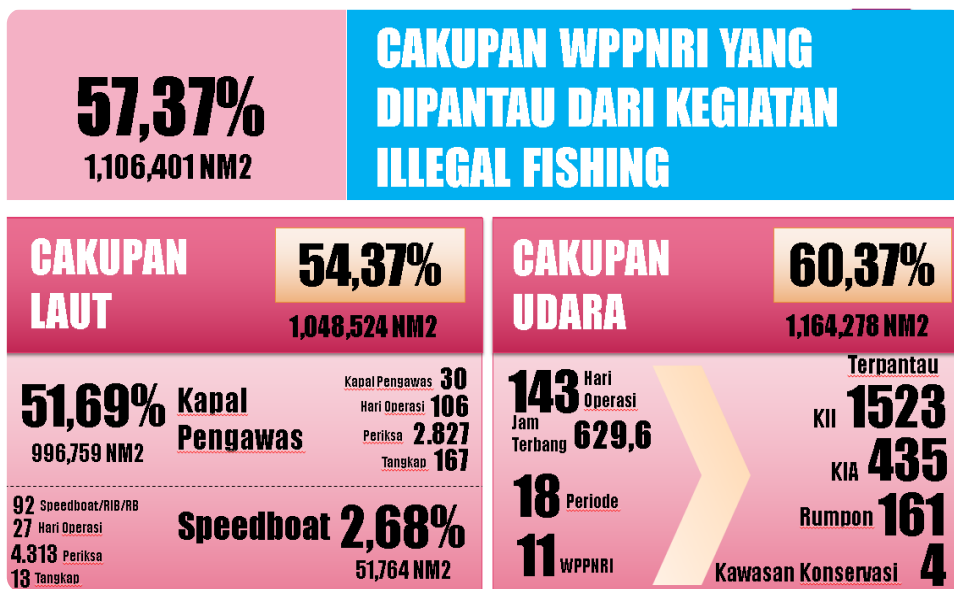
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU fishing*. Illegal, Unreported and Unregulated

Fishing [*IUU fishing* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP NRI).

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*” sebesar 57,37% dari target tahun 2021 sebesar 54,50 %. Cakupan WPPNRI yang mampu diawasi diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua) cakupan yakni:

1. Cakupan pengawasan di laut dengan menggunakan 30 Kapal Pengawas dan 92 Speedboat pengawas (termasuk RIB, Rubber Boat, Sea rider) sebesar 54,37% atau seluas 1,048,524 nm²; dan
2. Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 60,37% atau seluas 1.164.278 nm².

Capaian kinerja Tahun 2021 mengalami penurunan 9,81% dari capaian Tahun 2020 yang disebabkan salah satu kapal pengawas perikanan yaitu Orca 001 tidak dapat beroperasi maksimal karena kerusakan mesin utama, sehingga cakupan laut yang diawasi belum optimal. Selain itu jumlah speedboat yang beroperasi di tahun 2021 berkurang dari tahun 2020 sejumlah 120 unit menjadi hanya 92 speedboat pengawas di tahun 2021

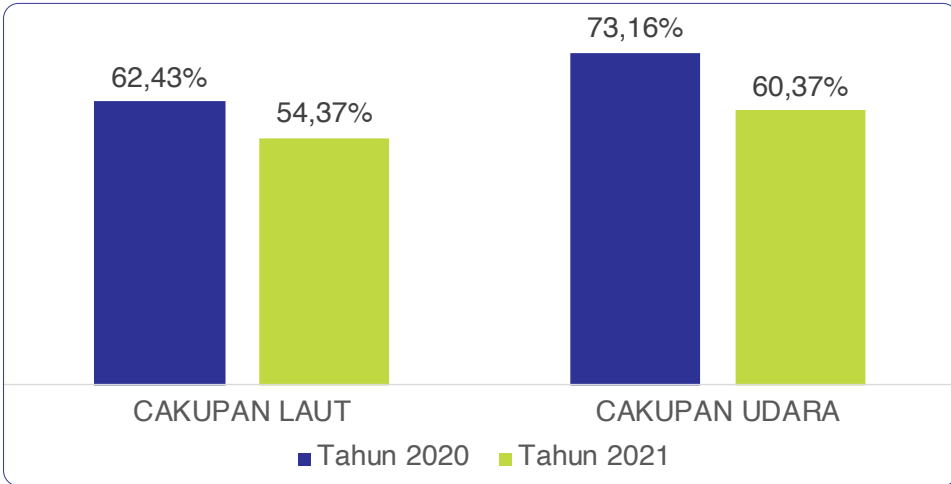


Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis 8 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif												
IKU-14 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>												
Realisasi							2021		Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
28,5	71,05	67,63	52,15	67,18	54,5	57,37	105,27	-14,60	60	95,62	75	76,49

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU fishing*. Illegal, Unreported and Unregulated

Fishing [*IUU fishing*] yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] dan Kapal Ikan Asing [KIA] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI].



Gambar 62. Capaian Persentase Cakupan WPP NRI yang Dipantau dari Kegiatan Illegal Fishing (Cakupan Laut dan Udara)

Capaian kinerja setiap periode triwulanan ditahun 2021 selalu meningkat seiring dengan hari operasi kapal pengawas, speedboat dan pesawat patrol.

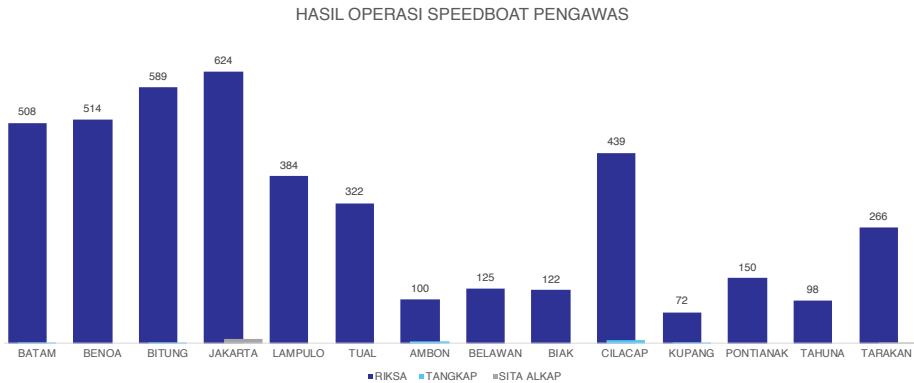
Kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja adalah Operasi Kapal pengawas Perikanan, Speedboat pengawas

dan pesawat patroli. Pada tahun 2021, rata-rata hari operasi 30 kapal pengawas sebanyak 106 hari dan rata-rata hari operasi 92 speedboat pengawasan sebanyak 27 hari. Berdasarkan hasil operasi di laut sepanjang tahun 2021 berhasil dilakukan pemeriksaan oleh kapal pengawas sebanyak 2.827 Kapal (2.760 KII, 67 KIA), dan sebanyak 167 kapal (114 KII, 53 KIA) ditangkap dan di proses hukum.



Gambar 63. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2021

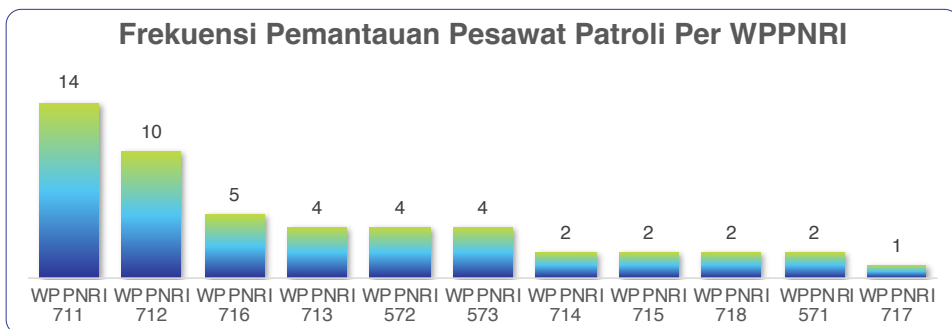
Sementara itu, melalui operasi speedboat pengawas telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 4.313 kapal (4.312 KII, 1 KIA), 13 Kapal ditangkap dan 11 alat tangkap disita.



Gambar 64. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2021

Pengawasan melalui udara dilakukan sebanyak 18 periode dengan menggunakan pesawat di 13 pangkalan operasi selama 143 hari operasi dengan cakupan pemantauan meliputi 11 WPPNRI. Hasil pengawasan pesawat udara diantaranya: a) Validasi kepatuhan

Kapal perikanan terhadap SPKP sebanyak 1.523 KII; b) Pemantauan Kapal Ikan Asing sebanyak 435 kapal asal Vietnam, Filipina dan China. Pengawasan melalui udara dilakukan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas.



Gambar 65. Frekuensi Pemantauan Pesawat Patroli per WPP

Walaupun capaian kinerja telah tercapai melebihi target, sebagai upaya peningkatan kualitas capaian kinerja KKP terus berkomitmen meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas secara rutin terkait dengan sinkronisasi data dengan unit pelaksana teknis pengawasan SDKP. Hal yang sama perlu dilakukan juga pada pengawasan SDKP melalui udara disertai konsistensi penyajian data hasil pengawasan setiap periode operasi.

IKU 15/ Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan serta Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan sejak diterbitkannya Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) hingga berkas penyidikan dinyatakan lengkap (Tahap P-21) dan dilanjutkan penyerahan Tahap II, atau

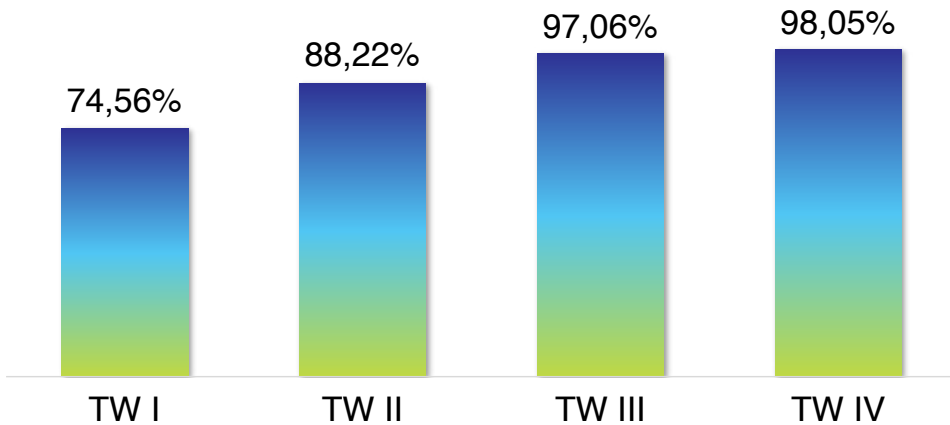
kasus yang dihentikan melalui diterbitkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena tersangka meninggal dunia atau tersangka dibawah umur). Sedangkan Penanganan Barang Bukti dinyatakan selesai jika barang bukti sudah diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Penanganan awak kapal dinyatakan selesai jika awak kapal non yustisia sudah dipulangkan ke negara/daerah asal, atau yang sudah diserahkan ke pihak/ instansi terkait



Tabel 37. Capaian Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2021

Sasaran Strategis 8 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Integratif													
IKU-15. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
24,31	28,5	71,05	67,63	52,15	86,78	93	98,05	105,43	88,02	93	105,43	93	105,43

Realisasi penanganan pelanggaran tahun 2021 meningkat tajam dari tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan kinerja positif sekaligus sebagai upaya tindaklanjut dari rekomendasi yang disampaikan pada periode sebelumnya. Tingginya capaian kinerja tahun 2021 juga dipengaruhi oleh semakin tertibnya penanganan barang bukti dan awak kapal sehingga terdokumentasikan dengan baik.



Gambar 66. Capaian Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)

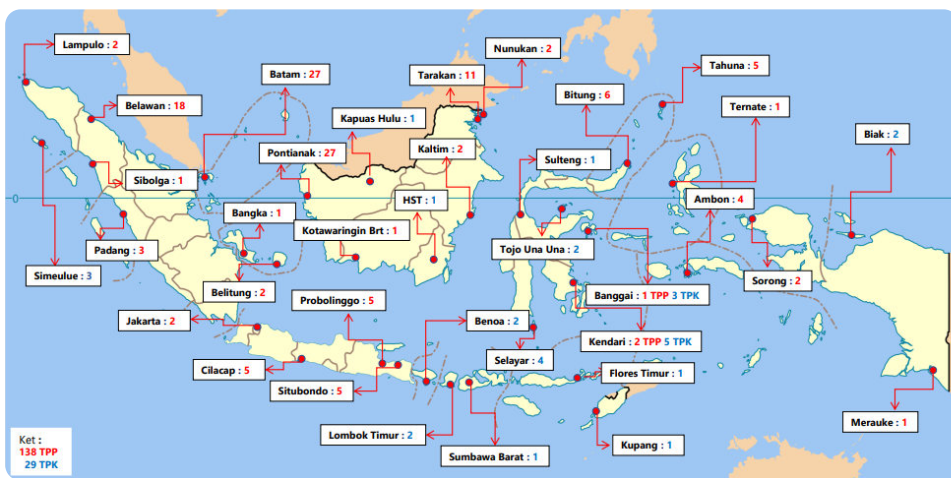
Salah satu kontribusi besar tingginya capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP). Persentase penyelesaian penyidikan TPKP merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setiap tahapan proses penyidikan diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang diproses hukum sebanyak 167 kasus, dengan jumlah kasus yang sudah mencapai Tahap 2 dan inkrah (100%) sebanyak 151 kasus. Kasus yang ditangani didominasi oleh pelanggaran perikanan



sebesar 82,63% (138 kasus) yang merupakan kapal pelaku *illegal fishing* yang ditangkap oleh Kapal pengawas, sisanya pelanggaran dibidang kelautan (29 kasus). Berdasarkan lokasi penyidikan kasus paling banyak ditangani di wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 31 kasus dan

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam sebanyak 30 kasus. Hal tersebut dipengaruhi banyak hasil tangkapan kapal pengawas di perairan Natuna yang merupakan Kapal Ikan Asing asal Vietnam dan Malaysia.



Gambar 67. Sebaran Kasus Tindak Pidana Perikanan dan Tindak Pidana Kelautan Tahun 2021

Banyaknya kasus yang ditangani didominasi oleh pelanggaran perikanan. Selesaiannya proses penyidikan tidak terlepas dari peningkatan profesionalitas PPNS yang menangani dan adanya supervisi yang dilakukan secara rutin oleh Pusat. Kegiatan supervisi penyidikan yang selama kurun waktu tahun 2021 dilakukan terhadap 149 kasus, yang ada di

UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari 121 kasus tindak pidana perikanan dan 28 kasus tindak pidana kelautan. Supervisi tersebut tidak dilakukan terhadap semua kasus yang disidik oleh PPNS namun hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang dianggap sulit atau ada permasalahan di lapangan dan ada permintaan supervisi dari PPNS Perikanan/Kepala UPT.

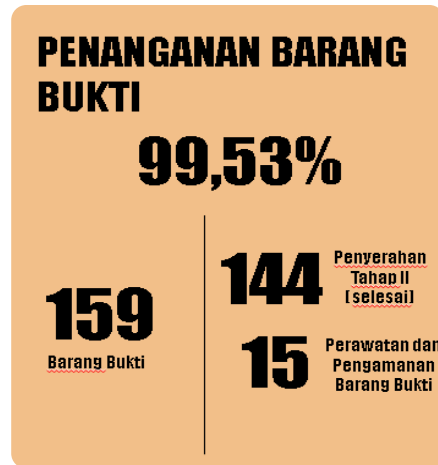
Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu 2021 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 159 unit, termasuk peningkatan barang bukti yang selesai ditangani sebanyak 144 unit. Kondisi ini juga yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja tahun 2021.

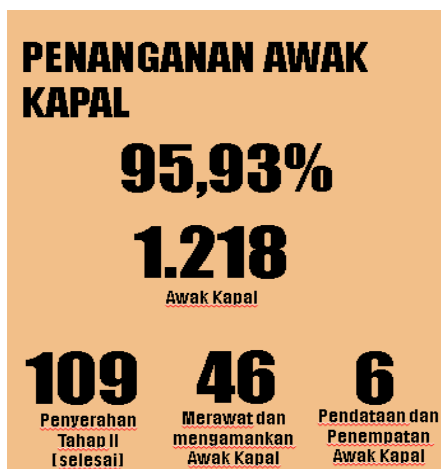
Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal



Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada tahun 2021, penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai sebesar 95,53% merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT. Sampai dengan tahun 2021, awak kapal yang



ditangani sejumlah 1.277 orang atau mengalami penambahan 118 orang dari triwulan II terdiri dari tersangka, saksi dan non justisia.

Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya. Untuk itu langkah

strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi satker pusat selaku koordinator kegiatan dengan para PPNS perikanan yang melakukan penyidikan TPKP dilapangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan jajarannya agar penanganan barang bukti dan awak kapal berjalan sesuai dengan ketentuan;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait lain apabila diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan



LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-9) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran Strategis 9 memiliki 2 (dua) IKU yakni IKU 16 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)

KKP dan IKU 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

IKU 16/ Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

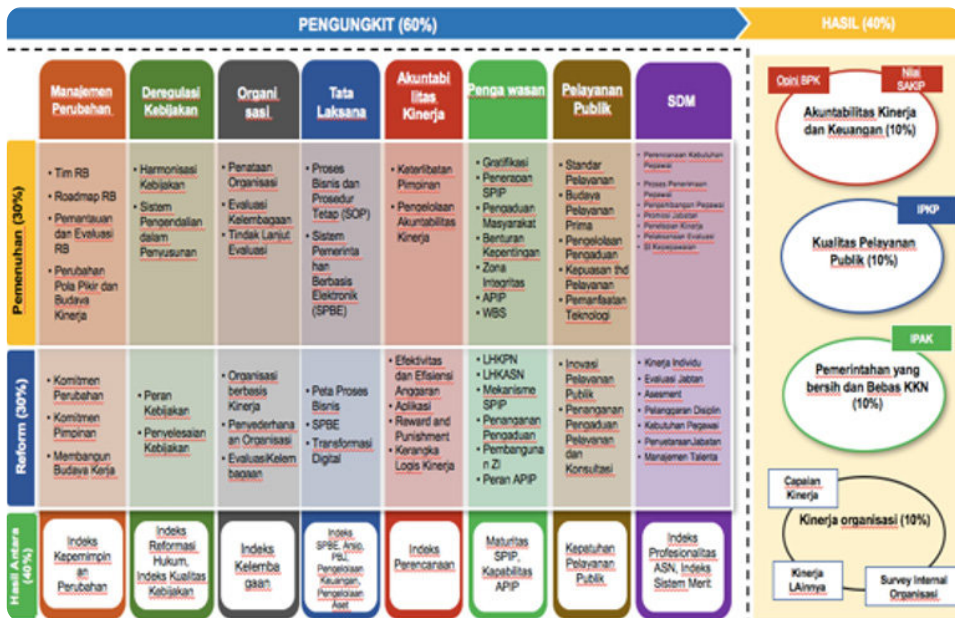
Reformasibirokrasimerupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan atau organisasi; ketatalaksanaan atau business process; dan sumber daya manusia aparatur, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Evaluasi RB pada setiap K/L dilaksanakan tahunan oleh Kementerian PAN dan RB.

Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah. Evaluasi

difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan KKP. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 68. Model Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Permen PAN 25/2020)

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (self assessment) Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh KKP sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB. IKU ini bertujuan untuk memonitor ketercapaian indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB yang terdiri dari komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform dengan total bobot komponen pengungkit sebesar 60 persen. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi

birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Sedangkan komponen hasil dengan bobot 40 persen, merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Berdasarkan model Pengungkit-Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu: 1) Opini Badan

- Pemeriksa Keuangan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- c. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- d. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu: 1) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2) Capaian Kinerja Lainnya; 3) Survei Internal Organisasi.

Selanjutnya, nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut

Tabel 46. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2021

No	Kategori	Angka Nilai	Predikat	Interprestasi
1	AA	>90-100	istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80-90	sangat baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70-80	baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

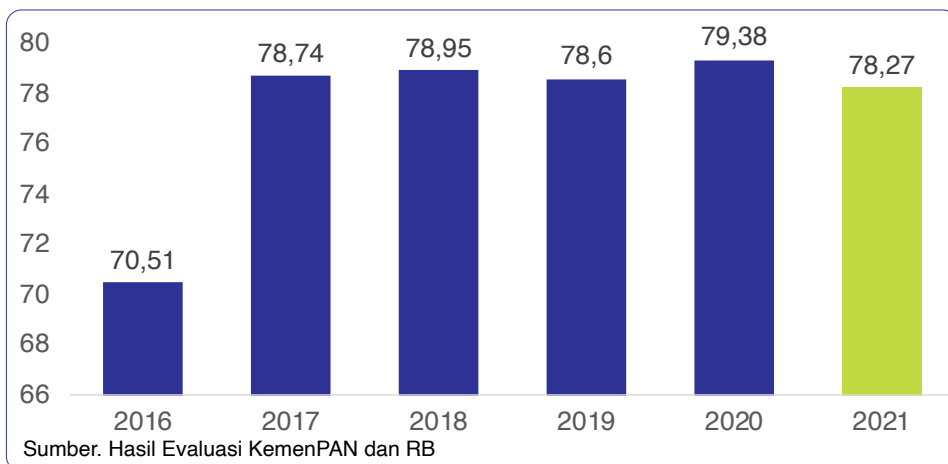
No	Kategori	Angka Nilai	Predikat	Interprestasi
4	B	>60-70	cukup baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5	CC	>50-70	cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30-50	buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0-30	sangat buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Sumber. Permenpan RB Nomor 26/2020

Tabel 46. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2021

SS-9 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
IKU-16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP												
Realisasi						2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020-2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
70,51	78,74	78,95	78,6	79,38	72	78,27	108,71%	n.a	71	110,24%	75	104,36%
BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			BB		BB	

Ket. Realisasi merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB pada t-1



Gambar 69. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2016-2020

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP atas Pelaksanaan RB Tahun 2020 sebesar 78,27 (predikat BB) sesuai dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/44/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2020-2024 yaitu 75 realisasi di tahun 2021, telah mencapai 104,36 persen.

Nilai kinerja RB KKP tersebut merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam rangka menilai kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan KKP dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta senantiasa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran KKP untuk menjadi Reformasi Birokrasi ini merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta semakin menguatnya

integritas seluruh jajaran pegawai. Selain itu KKP juga semakin menguatkan pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan semakin meluasnya, penyederhanaan kelembagaan dan, terobosan dan inovasi dalam pelayanan publik upaya penguatan integritas aparatur sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB dengan nilai untuk KKP sebesar 78,27 terdiri dari Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 48. Capaian Penilaian Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2020 oleh Kemenpan dan RB dan Menjadi Capaian Di Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A. Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20	14,93
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10	7,33
III.	Reform	30	21,15
Total Komponen Pengungkit		60	43,41

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
B. Komponen Hasil			
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,74
	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,83
	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,18
	Kinerja Organisasi	10	8,11
	Total Komponen Hasil	40	34,86
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100	78,27 (BB)

Sumber. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/44/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020.

Berikut hasil antara dari masing-masing instansi leading sector yang telah diterima oleh Kementerian PANRB:

Tabel 49. Capaian Hasil Antara Komponen Pengungkit Tahun 2020

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	95,39 (Memuaskan)	ANRI
2	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	40 (kurang)	LKPP
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	0-100	94,21	Kementerian Keuangan
4	Sistem Merit	0-400	361,5 (Sangat Baik)	Komisi ASN
5	ASN Profesional	0-5	64 (Rendah)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
6	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
7	Kapabilitas APIP	0-5	3 (Integrated)	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Sumber. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/44/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, berbagai rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh KKP, meskipun belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga masih memerlukan perbaikan yang signifikan dalam implementasi reformasi birokrasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi adalah:

- a. Kualitas implementasi reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum merata pada seluruh unit kerja. Hal ini terlihat dari rencana kerja reformasi birokrasi pada unit kerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil perbaikan nyata pada area perubahan yang diinginkan;
- b. Perumusan kebijakan belum didasarkan pada analisis Regulatory Impact
- c. Assessment yang memadai, khususnya pada analisis dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan;
- d. Evaluasi kelembagaan sebagai langkah lanjutan dari penyederhanaan organisasi belum dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki peta proses bisnis yang menggambarkan peta keterkaitan antar unit kerja, namun peta proses bisnis tersebut belum selaras dengan kinerja utama masing-masing unit kerja;
- f. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat ukuran kinerja individu yang tidak sesuai dengan levelnya dan belum sepenuhnya menunjang kinerja individu di atasnya;
- g. Sistem pengendalian internal dalam rangka menjaga integritas, peningkatan kinerja dan menekan penyalahgunaan kewenangan belum optimal. Hal ini terlihat dari pemetaan resiko yang belum sepenuhnya mengawal pencapaian tujuan/sasaran;
- h. Pembangunan zona integritas belum intensif ke seluruh unit kerja pelayanan, khususnya pada unit pelayanan teknis yang ada pada kawasan strategis

Sedangkan penjelasan terkait komponen hasil antara lain sebagai berikut:

- a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai SAKIP 82,04/Predikat A tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2019.
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan trend yang positif baik pada hasil survei kualitas pelayanan, maupun untuk hasil survey persepsi anti korupsi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 50. Perbandingan Hasil Survey Eksternal Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survey Eksternal Kualitas Pelayanan	3,52	3,53
2.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,63	3,67

Hasil survey integritas jabatan terhadap 100 responden pegawai KKP menunjukkan Indeks 3,00 dari skala 5. Secara keseluruhan hanya 24 persen responden yang memahami kinerja ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 76 persen responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya ukuran kinerja atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Dengan kata lain budaya kerja yang berorientasi hasil belum secara intensif dan masif diinternalisasikan kepada seluruh pegawai di KKP. Hal ini merupakan tantangan bagi

seluruh jajaran KKP untuk terus melakukan internalisasi kinerja organisasi secara masif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan KKP, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan perlu diperbaiki sebagai upaya perbaikan kedepan antara lain :

- 1. Meningkatkan kualitas implementasi program reformasi birokrasi khususnya pada rencana kerja reformasi birokrasi pada unit kerja agar

fokus pada upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel serta pelayanan publik yang prima.

2. Melakukan analisis *Regulatory Impact Asesment* dalam proses penyusunan kebijakan dengan melakukan analisis dampak (cost and benefit) sehingga dapat mendorong terbentuknya kebijakan yang efektif dan efisien.
3. Melakukan evaluasi kelembagaan sebagai langkah lanjutan dari penerhanaan organisasi agar struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Melakukan reviu terhadap peta proses bisnis yang dimiliki dengan didasarkan kinerja utama masing-masing unit kerja.
5. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dengan memperbaiki ukuran kinerja sesuai dengan levelnya dan menunjang kinerja individu di atasnya.
6. Mendorong peran Inspektorat

Jenderal sebagai leading sector penguatan sistem pengendalian internal pada seluruh unit kerja KKP dengan mempertajam pemetaan resiko yang dimiliki sehingga tujuan/sasaran strategis dapat tercapai. Hal ini sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

7. Meningkatkan upaya pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KKP.

Sepanjang tahun 2021, KKP terus berbenah diri dan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterjemahkan dalam rencana tahunan berupa rencana aksi tahun 2021 pada 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan RB KKP, dengan capaian sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 51. Capaian Rencana Aksi Pelaksanaan Roadmap RB KKP Tahun 2021

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. • terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah. • menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 • Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021 tanggal 5 Maret 2021 • Telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 32/KEPMEN-KP/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 tanggal 27 April 2021 • Telah dilakukan internalisasi core value ASN melalui pembuatan video tiktok tentang BerAKHLAK dan launching BerAKHLAK di lingkungan KKP pada peringatan HAKORDIA tgl 7-9 Desember 2021 • Telah disusun Rencana Aksi Agen Perubahan • Telah dilakukan penilaian atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 dengan nilai sebesar 2,75 (kategori baik)

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
Penataan perundangan	<ul style="list-style-type: none"> • adanya penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, dengan peraturan perundang-undangan yang lain. • Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi,berpihak kepada publik, harmonis, tidak tumpangtindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. • Meningkatnya keterlibatan publik dalam prosesperumusan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah diselesaikan dan ditetapkan sebanyak 59 peraturan menteri KP • Telah diselesaikan dan ditetapkan sebanyak 123 keputusan Menteri KP • Telah diselesaikan dan ditetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merupakan turunan dari Undang – Undang Cipta Kerja sebanyak 18 peraturan Menteri KP • Telah diselenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Februari 2021
Penataan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan KKP. • Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja di KKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disampaikan surat Menteri KKP kepada Presiden berdasarkan surat, Nomor R.204/MEN-KP/IV/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penataan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengajukan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi, serta perubahan kedudukan; • telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; • Kementerian PANRB telah menyetujui penetapan perubahan Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan menjadi Balai Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, berdasarkan surat Nomor B/398/M.KT.01/2021, tanggal 11 Mei 2021, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none">• Telah ditetapkan Permen KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya• Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/295/M. SM.02.03/2021, tgl 22 Juli 2021, hal Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/ Lembaga ke BRIN, maka KKP telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Unit Kerja yang terdampak pembentukan BRIN;• Usulan Penataan Organisasi Balai Riset dan Observasi Laut telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB, melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.536/MEN-KP/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021, hal Usulan Penataan Organisasi UPT Balai Riset dan Observasi Laut.• Telah dilaksanakan forum tanggal 22 Juni 2021 yang membahas mengenai kebijakan sistem kelembagaan dan tata laksana dalam rangka implementasi tata kerja baru pasca penyederhanaan struktur organisasi; dan• Usulan Penataan Organisasi LPMUKP telah diusulkan kepada Menteri PAN dan RB melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor B.612/MEN-KP/XI/2021, tanggal 7 Desember 2021, hal Usulan Penataan Organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan maka telah disusun Naskah Akademik Peraturan Menteri KP tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
<p>Penataan tata laksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik. • Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government. • Adanya proses bisnis di KKP yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan KEPMEN KP Nomor 43/SJ Tahun 2021 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi KKP pada tanggal 17 Juni 2021. • KKP telah melakukan integrasi aplikasi pelayanan publik dengan OSS Kementerian Investasi • Pengembangan aplikasi kinerjaku: perubahan pada tampilan • penambahan modul baru (perhitungan target dan capaian, leveling unit, skala persentase nilai, matriks rincian target dan capaian IKU) • Unit kearsipan KKP telah mengidentifikasi sekitar 16.000 berkas dan 500 arsip vital. • Telah ditetapkan Kepmen KP Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan • Telah dilakukan penyusunan draft Penetapan SOP PBJ lingkup KKP berdasarkan Memo Karo Umum dan PBJ ke Plt Karo SDMAO nomor 1571/SJ.6/TU.210/XI/2021 tanggal 2 November 2021 dan nomor 1764/SJ.6/TU.210/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021 • Telah dikeluarkan Surat rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) terkait kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa dan saat ini KKP telah memiliki 48 Jabfung PBJ dari 81 Jabfung yang direkomendasikan. • Telah disusun Rancangan Keputusan Menteri KP tentang Proses Bisnis di lingkungan KKP • Telah dilakukan Identifikasi SOP PBJ Keputusan Menteri KP Nomor 91/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup KKP

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan Penyusunan Keputusan Menteri KP untuk merubah Kepmen KP Nomor 91/KEPMEN-KP/SJ/2019. • Telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 15 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di lingkungan KKP ditetapkan tanggal 5 Mei 2021. • Telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 36 tahun 2021 tentang Logo KKP dan Penggunaannya ditetapkan tanggal 6 September 2021.
<p>Manajemen SDM Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan formasi berdasarkan peta jabatan dan bezeting yang diselenggarakan secara online. • Tersedianya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan SOTK KKP. • Tersedianya Nama Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang sesuai dengan tugas dan beban kerja pegawai, dan dokumen Evaluasi Jabatan untuk seluruh jabatan di KKP. • Tersedianya dokumen evaluasi jabatan untuk penentuan kelas jabatan berdasarkan pangkat jabatan dan kelas jabatan yang baru. • Kesiapan KKP dalam melaksanakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS sesuai dengan arah kebijakan Nasional. • Tersedianya soal dan aplikasi TKB berdasarkan rumpun jabatan dan Jabatan Fungsional Tertentu binaan KKP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya diklat berbasis kompetensi bagi seluruh pegawai KKP secara berjenjang. • Telah dilakukan sosialisasi PP 30 Tahun 2019 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Permen PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 30 Tahun 2019. • Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai yang terintegrasi dan mendukung kinerja atasan langsung berdasarkan Balance score card/Cascading. • Penetapan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau pelimpahan PNS dari instansi lain. • Penetapan Kepmen KP No 10/MEN-SJ/KP.431/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri. • Penetapan Kepmen KP No. 20/MEN-SJ/KP.431/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup Itjen.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya Pejabat Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Hasil Seleksi terbuka. • Standar Kompetensi Sosial Kultural seluruh Jabatan di KKP, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Penilaian Kompetensi. • Adanya peningkatan kualifikasi dan Kompetensi Jabatan Fungsional Asesor SDM KKP secara berkesinambungan. • Tersedianya Sasaran/ penilaian Kinerja Pegawai. • Adanya landasan hukum dan terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Pejabat Fungsional Teladan di Bidang Kelautan dan Perikanan. • Terselenggaranya pemberian penghargaan Tanda Kehormatan/ Tanda Jasa. • Terseleksinya Peserta Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan KKP. • Terlaksananya pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja yang adil, kompetitif, dan terbuka. • Adanya Sistem Penegakan Disiplin Pegawai. • Tersusunnya Manajemen Talenta KKP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kepmen KP No 9/ MEN-SJ/KP.431/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penempatan Jabatan PNS lingkup Biro Umum dan PBJ. • Penetapan Kepmen KP No.16/ MEN-SJ/KP.431/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. • Penetapan Kepmen KP No.8/ MEN-SJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penetapan PNS lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. • Penetapan Kepmen KP No. 19/ MEN-SJ/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup PSDKP. • Penetapan Kepmen KP No.17/ KEP-SJ/KP.431/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup Biro Keuangan. • Penetapan Kepmen KP No.11/ MEN-SJ/KP.431/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberian Tugas dan Penempatan PNS lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi. • Telah dilakukan pelantikan pengambilan sumpah/janji Pejabat JPT Madya sebanyak 1 orang oleh Menteri KP pada tanggal 21 Juni 2021. • Telah dilakukan Pelantikan JPT Pratama sebanyak 10 orang oleh Menteri KP pada tanggal 21 Juni tahun 2021 sebanyak 3 Orang. • Telah dilaksanakan Monev Flexible Working Space (FWS) dan Kegiatan FGD Perencanaan, Pengembangan dan Disiplin Pegawai di lingkungan KKP pada tanggal 3-5 Juni 2021. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Telah disampaikan Surat MenPAN RB Nomor 15//M. SM.03.00/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan KKP.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya landasan hukum dan pedoman dalam pengukuran kesenjangan kompetensi dan analisisnya, serta penetapan indeks kompetensi dan integritas pegawai KKP. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan kamus kompetensi teknis urusan kelautan dan perikanan. Telah disampaikan Surat MenPAN RB Nomor B/109/M. SM.03.00/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan KKP (JPT 8, Administrastor 7, Pengawas 1). Surat MenPAN RB Nomor 149/M. SM.03.00/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Persetujuan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T), Analisis Pasar Hasil Perikanan (APHP), Asisten Pembina Mutu Hasil KP, Pengawas Perikanan.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur. Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Meningkatnya kapasitas APIP. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah disusun SK Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Kementerian dan Satgas Eselon I. Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPI) KKP telah menyusun Manajemen Risiko Tahun 2021. Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko Tahun 2021. Evaluasi Manajemen Risiko telah terealisasi tahun 2021 di Ditjen Perikanan Tangkap, BKIPM, Ditjen PDSPKP, Itjen, BRSDM, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Setjen, Ditjen Perikanan Budidaya, dan Ditjen PSDKP. Telah dilaksanakan Bimtek Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diikuti oleh seluruh unit kerja eselon I.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none">• Telah dilaksanakan evaluasi/ pemantauan pengadaan barang/ jasa yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2021 di lingkup unit kerja eselon I KKP (BRSDM, Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, BKIPM, Ditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal, Ditjen PSDKP, Ditejn Perikanan Budidaya, dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut).• Telah dilaksanakan FGD Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP pada tanggal 14 September 2021 dengan narasumber dari Inspektorat VII Kementerian Keuangan.• Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan seluruh Eselon I secara virtual pada triwulan I dan II.• Telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 7 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan KKP.• Telah diterbitkannya Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP.• Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi secara Tatap Muka dan virtual pada bulan Mei 2021.• Unit Kerja Eselon I telah mengusulkan dan menetapkan satker yang akan dibangun Zona Integritas yang dilaporkan secara semesteran.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
<p>Akuntabilitas Kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi. • Adanya perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja. • Adanya penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja. • Adanya penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan rapat lanjutan dalam rangka reviu Renstra KKP 2020-2024, tanggal 7 Desember 2021, salah satu hasilnya yaitu terkait dengan pemutakhiran kerangka pendanaan • Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 5-6 April 2021 • Sebanyak 34 Provinsi telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Pimpinan Level 1 KKP memiliki Dana Dekon/TP • pelaksanaan bimtek dan FMK 2021 secara <i>online</i> tanggal 9 November 2021 • Telah dilakukan Sharing session Pengelolaan Kinerja KKP dengan Setjen Dewan Ketahanan Nasional pada tanggal 24 Mei 2021. • telah dilakukan sharing session pengelolaan kinerja dengan Biro Perencanaan Kemenkomarves pada bulan November • Telah ditetapkan SK Tim Tata Kelola Organisasi KKP maupun unit eselon I • Telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka percepatan penggunaan edalwas pada tanggal 6 Oktober 2021, dibahas juga penyelesaian program prioritas melalui tagging, update realisasi fisik da keuangan • Aplikasi kinerjaku telah dilakukan updating, dengan beberapa perubahan pada tampilan atau penambahan modul baru, seperti: leveling unit, skala persentase nilai, perhitungan target dan capaian, matriks rincian target dan capaian IKU, dsb • Telah disusun Pohon Kinerja KKP dan Unit Kerja Eselon I lainnya dengan mengacu pada Bisnis proses dan Perjanjian Kinerja yang berlaku.

Area Perubahan	Target	Capaian Rencana Aksi
Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. • Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Permen KP tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. • Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik telah dilaksanakan tanggal 25 November 2021 dengan nomor berita acara B.846/SJ/XII/2021. • Go Live OSS telah dilakukan pada bulan November secara bertahap pada masing-masing perizinan, dan sudah terdapat perizinan yang terbit di OSS RBA. • Pengumuman Kementerian PANRB nomor B/112/PP.00.05/2021 tentang Pengumuman Finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik KIPP tahun 2021. Terdapat 1 inovasi kelompok umum yang lolos dalam TOP 99 KIPP 2021 yaitu PATIN KITO JAMBI dari SKIPM Jambi dan 1 inovasi kelompok replikasi yang lolos TOP 15 KIPP 2021 yaitu SI CHUPANG dari BKIPM Mataram. • Sosialisasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilaksanakan pada kegiatan pelayanan publik dan hasilnya dipublikasikan baik di ruang pelayanan, media sosial dan website • Pelaksanaan coaching clinic telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2021 secara <i>online</i> dan diikuti peserta dari seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik KKP secara offline dilaksanakan di Makassar • Tingkat Kepatuhan Organisasi Pelayanan Publik KKP oleh Ombudsman telah dilaksanakan. Tim Ombudsman melakukan peninjauan ke KKP pada tanggal 14 September 2021

Sumber. Laporan Rencana Aksi Pelaksanaan Road Map RB KKP Tahun 2021

IKU 17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

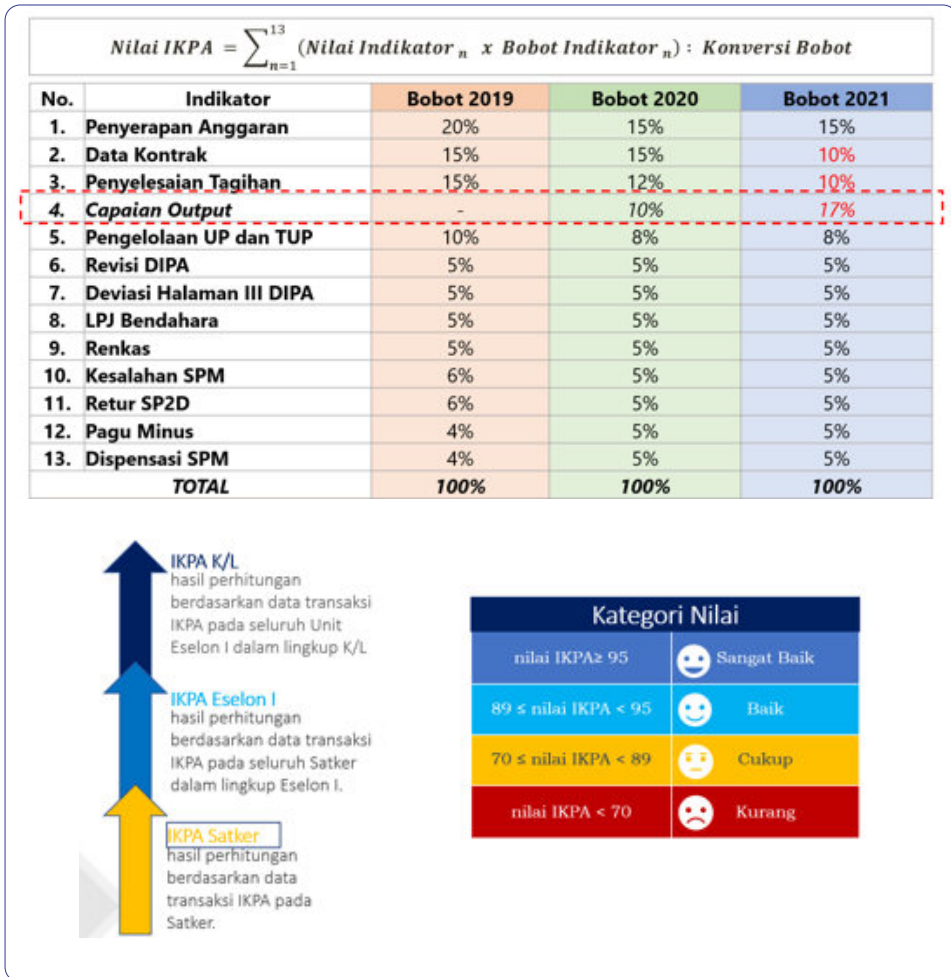
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (output delivery) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

IKPA terdiri dari 13 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu revisi anggaran, deviasi halaman IV DIPA (rencana penarikan dana), pagu minus, pengelolaan UP, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian/kesalahan SPM dan konfirmasi capaian output.

IKPA menjadi IKU dilingkup KKP, selanjutnya diturunkan ke seluruh satker yang mempunyai

DIPA. Satker tersebut mempunyai kewajiban meningkatkan performa atau capaian pelaksanaan anggaran di lingkup satker tersebut. IKPA dapat dipantau secara real time melalui aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran OM-SPAN Kementerian Keuangan pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran (Monev PA) dengan harapan agar 1). Pengelolaan APBN menjadi semakin baik dan berkualitas, 2). Adanya upaya pencapaian terbaik dari setiap Satker, 3). Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang pruden dan berkualitas.

Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penggaran (RSPP) berdampak pada beberapa kebijakan IKPA, sehingga ditahun 2021 terdapat Reformulasi IKPA dan dengan diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terlampir reformulasi penilaian IKPA di tahun 2021.



Gambar 70. Pembobotan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021

Untuk meningkatkan capaian IKU IKPA Tahun 2021, KKP telah melaksanakan Sosialisasi Reformulasi IKPA Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan mengundang seluruh satker lingkup KKP dan mengundang Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk

dapat memberikan penjelasan terkait dengan Reformulasi IKPA Tahun 2021. Selain itu KKP juga telah melaksanakan Bimtek Konfirmasi Capaian Ouput pada tanggal 23 Maret 2021 dengan mengundang seluruh Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi lingkup KKP dengan Narasumber dari KPPN

Jakarta VI, hal ini sangat berkaitan dengan Reformulasi IKPA Tahun 2021 pada Indikator Konfirmasi Capaian Output.

Nilai IKPA ini digunakan sebagai salah satu perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup KKP, pada tahun sebelumnya pengukuran IKPA dilakukan per triwulan, sedangkan ditahun 2021 dengan adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka berdampak pada penilaian IKPA (Reformulasi IKPA 2021) sehingga membutuhkan penyesuaian pada aplikasi OM

SPAN dalam penilaian IKPA. Berkenaan dengan hal tersebut, pengukuran IKPA di tahun 2021 dilaksanakan per semester. Selanjutnya nilai target semester I tahun 2021 ditetapkan sebesar 80,00 dan semester II sebesar 89,00. Target ini berlaku sama dilingkup KKP, seluruh satker lingkup KKP yang mempunyai DIPA sebagaimana Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 tanggal 13 April 2021 terkait dengan penyampaian perubahan periode pengukuran dan target IKU IKPA dan NKA lingkup KKP tahun 2021.

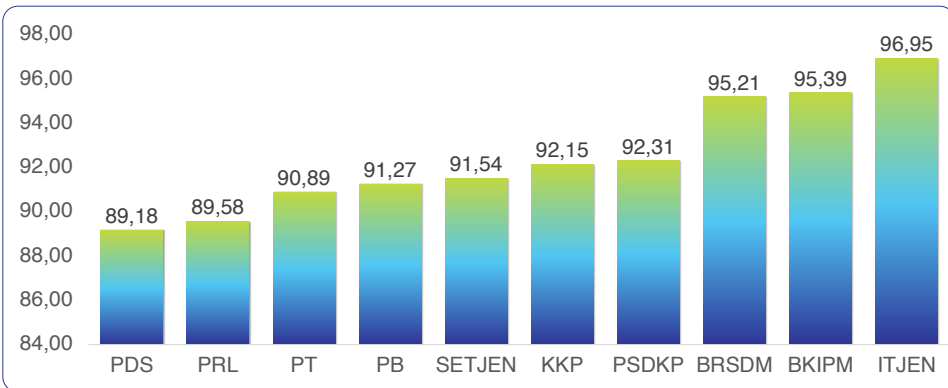
Tabel 52. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP Tahun 2021

Sasaran Strategis 9 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
IKU 17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP													
Realisasi							2021			Renstra KKP 2020-2024 (Permen KP 57/2020)			
2015	2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2020- 2021	Target 2021	% Capaian thd Target 2021	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	94,62	93,95	89	92,15	103,54	-	89,00	103,54	90	102,39

Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 14 Januari 2022

Realisasi IKU IKPA KKP sebesar 92,15 (kategori baik) dengan capaian sebesar 103,54%, dimana realisasi IKU IKPA KKP telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 89,00. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 realisasi di tahun 2021 telah mencapai 102,39 persen.

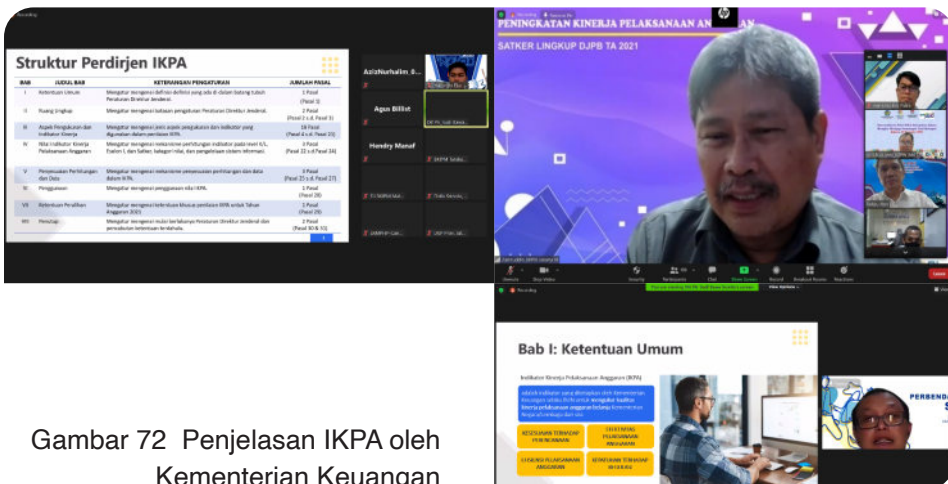
Capaian realisasi di tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, disebabkan di tahun 2021 terdapat reformulasi perhitungan capaian IKPA dimana terdapat pemutakhiran bobot perhitungan di 3 indikator yaitu capaian output, data kontrak dan penyelesaian tagihan. Sedangkan apabila dilihat nilai per unit kerja eselon I, nilai IKPA tertinggi yaitu Inspektorat Jenderal (96,95) dan terendah yaitu Ditjen PDS (89,18).



Gambar 71. Nilai IKPA KKP dan Unit Kerja Eselon I Tahun 2021

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU. 17, diantaranya Monev IKPA Lingkup KKP yang dilaksanakan

per triwulan via daring dengan mengundang tim monev seluruh eselon II lingkup Setjen dan Sekretariat Unit Kerja Eselon I.



Gambar 72 Penjelasan IKPA oleh Kementerian Keuangan

Selanjutnya, secara umum indikator yang perlu dilakukan peningkatan untuk periode tahun selanjutnya diantaranya:

1. Deviasi Hal III DIPA

Capaian deviasi hal III DIPA dapat ditingkatkan dengan melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) di halaman III DIPA yang telah ditetapkan. Hal III DIPA dapat disesuaikan dengan rencana penarikan atau penyerapan anggaran yang akan dilaksanakan pada triwulan berkenaan dengan melakukan revisi DIPA kewenangan kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

2. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Capaian pengelolaan UP dan TUP dapat ditingkatkan dengan seluruh satuan kerja disiplin melakukan revolving dan pertanggungjawaban atas UP/ TUP yang telah diajukan sebelum jatuh tempo (30 hari sejak UP/ TUP diajukan).

3. Penyerapan anggaran

Pada tahun 2021, penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal mencapai 98,42% dari pagu. Namun hal ini tidak selaras dengan capaian indikator penyerapan anggaran karena indikator penyerapan anggaran dihitung per triwulan dengan target 15% di triwulan I, 40% di triwulan II, 60% di triwulan III, dan 90% di triwulan IV. Upaya peningkatan yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan pekerjaan dengan Pra-DIPA dan pelaksanaan pekerjaan fisik serta kegiatan strategis lainnya yang dimulai sejak triwulan I dan II dengan tetap memperhatikan analisis manajemen resiko, penerapan SPIP serta peraturan yang berlaku dan kaidah yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tidak menumpuk di triwulan III dan IV.

4. Capaian Output

Indikator capaian output merupakan indikator baru setelah reformulasi IKPA di tahun 2021. Indikator ini mewajibkan satuan kerja melaporkan capaian output di setiap RO per bulan di Aplikasi SAS yang selanjutnya diunggah

di aplikasi OMSPAN. Pada tahun 2021, satuan kerja dekonsentrasi membutuhkan penyesuaian dan adaptasi atas perubahan tersebut untuk pengukuran dan penginputan. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan capaian indikator capaian output adalah dengan tertib dan tepat melakukan pengukuran dan pengunggahan atas capaian output di masing-masing satuan kerja.

Untuk meningkatkan capaian nilai IKPA secara keseluruhan, setiap unit kerja memiliki

kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Untuk tahun selanjutnya, diharapkan nilai capaian IKPA KKP tahun 2022 dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

3.2 KINERJA ANGGARAN

Dinamika Pergerakan Anggaran KKP

Postur APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000 yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA KKP dengan rincian per Unit Eselon I pada tabel berikut :

Tabel 53. Alokasi Anggran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	77.035.957.000	375.673.056.000	44.937.127.000	497.646.140.000
2.	Itjen	36.635.920.000	47.492.024.000	2.640.011.000	86.767.955.000
3.	Ditjen PT	192.256.354.000	467.632.690.000	103.688.443.000	763.577.487.000
4.	Ditjen PB	211.353.370.000	760.936.826.000	240.450.208.000	1.212.740.404.000
5.	Ditjen PSDKP	165.369.332.000	635.295.019.000	277.388.571.000	1.078.052.922.000
6.	Ditjen PDSPKP	56.035.681.000	369.338.647.000	6.329.700.000	431.704.028.000
7.	Ditjen PRL	91.424.090.000	345.264.385.000	18.668.700.000	455.357.175.000
8.	BPSDMKP	817.478.620.000	541.592.584.000	163.502.422.000	1.522.573.626.000
9.	BKIPMKHP	273.806.391.000	246.214.419.000	83.698.846.000	603.719.656.000
	Jumlah	1.921.395.715.000	3.789.439.650.000	941.304.028.000	6.652.139.393.000

Refocusing Anggaran KKP

Dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021, penghematan alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap I sebesar Rp157.665.596.000 dimana *refocusing* anggaran diperuntukan mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional,

penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan social kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam melakukan penghematan alokasi anggaran yang dapat *direfocusing* antara lain: a) Sumber belanja berasal dari Rupiah Murni (RM); b) Belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal; dan c) Belanja barang dan modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional. Besaran

refocusing tahap I per Unit Eselon I dan besaran perubahan pagu anggaran KKP pasca *refocusing* pada tanggal 22 Februari 2021

setelah adanya penghematan menjadi Rp6.494.473.797.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. *Refocusing* Tahap I KKP Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Awal (Rp.000)	<i>Refocusing</i> Tahap I (Rp.000)	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap I (Rp.000)
1.	Setjen	497.646.140	8.995.003	488.651.137
2.	Itjen	86.767.955	-	86.767.955
3.	Ditjen PT	763.577.487	29.724.637	733.852.850
4.	Ditjen PB	1.212.740.404	22.459.538	1.190.280.866
5.	Ditjen PSDKP	1.078.052.922	28.837.266	1.049.215.656
6.	Ditjen PDSPKP	431.704.028	14.640.082	417.063.946
7.	Ditjen PRL	455.357.175	21.514.749	433.842.426
8.	BRSDMKP	1.522.573.626	23.348.654	1.499.224.972
9.	BKIPMKHP	603.719.656	8.145.667	595.573.989
JUMLAH		6.652.139.393	157.665.596	6.494.473.797

Tabel 55. Alokasi Anggran Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasca *Refocusing* Anggaran Tahap I Per Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai (Rp)	Pagu Belanja Barang (Rp)	Pagu Belanja Modal (Rp)	Total Pagu (Rp)
1.	Setjen	77.035.957.000	366.678.053.000	44.937.127.000	488.651.137.000
2.	Itjen	36.635.920.000	47.492.024.000	2.640.011.000	86.767.955.000
3.	Ditjen PT	192.256.354.000	438.608.053.000	102.988.443.000	733.852.850.000
4.	Ditjen PB	211.353.370.000	758.963.256.000	219.964.240.000	1.190.280.866.000
5.	Ditjen PSDKP	165.369.332.000	623.334.986.000	260.511.338.000	1.049.215.656.000
6.	Ditjen PDSPKP	56.035.681.000	351.253.146.000	9.775.119.000	417.063.946.000
7.	Ditjen PRL	91.424.090.000	324.210.077.000	18.208.259.000	433.842.426.000
8.	BRSDMKP	817.478.620.000	522.550.802.000	159.195.550.000	1.499.224.972.000
9.	BKIPMKHP	273.806.391.000	239.192.008.000	82.575.590.000	595.573.989.000
JUMLAH		1.921.395.715.000	3.672.282.405.000	900.795.677.000	6.494.473.797.000

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2/2021 Tanggal 16 Maret 2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA KKP (BA 032) untuk Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove, alokasi anggaran KKP bertambah sebesar Rp43.337.900.000 pada Unit Eselon I Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dengan

rincian Satker BPSPL Denpasar sebesar Rp12.087.379.000, Satker LPSDPL Serang sebesar Rp19.961.996.000 dan Sekretariat Jenderal PRL sebesar Rp11.288.525.000 dan menjadi besaran alokasi anggaran pada triwulan I, perubahan alokasi anggaran dengan adanya penambahan untuk kegiatan rehabilitasi Kawasan mangrove sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 56. Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 per Belanja Pasca Penambahan Anggaran Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2/2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	77.035.957	366.163.053	45.452.127	488.651.137
2.	Itjen	36.635.920	47.492.024	2.640.011	86.767.955
3.	Ditjen PT	192.256.354	438.252.453	103.344.043	733.852.850
4.	Ditjen PB	211.353.370	758.963.256	219.964.240	1.190.280.866
5.	Ditjen PSDKP	165.369.332	623.334.986	260.511.338	1.049.215.656
6.	Ditjen PDSPKP	56.035.681	351.253.146	9.775.119	417.063.946
7.	Ditjen PRL	91.424.090	367.547.977	18.208.259	477.180.326
8.	BRSDMKP	817.478.620	522.550.802	159.195.550	1.499.224.972
9.	BKIPMKHP	273.806.391	239.192.008	82.575.590	595.573.989
JUMLAH		1.921.395.715	3.714.749.705	901.666.277	6.537.811.697

Selanjutnya dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 Tanggal 18 Mei 2021 Perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021, penghematan

alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap II sebesar Rp131.138.236.000 dimana *refocusing* anggaran diperuntukan mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin

dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan social kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam melakukan penghematan alokasi anggaran yang dapat *refocusing* yang bersumber dari belanja Rupiah Murni (RM) dan non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya

diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan Gaji 13. Perubahan pagu anggaran KKP pada tanggal 14 bulan Juni 2021 setelah adanya penghematan menjadi Rp6.431.050.970.000, berikut kami sampaikan besaran *refocusing* tahap II per Unit Eselon I dan besaran pagu anggaran pasca *refocusing* pada table 7 dan 8 sebagai berikut:

Tabel 57. *Refocusing* Anggaran Tahap II Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Pasca Penambahan Anggaran	<i>Refocusing</i> Tahap II	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap II
1.	Setjen	510.991.638	6.512.550	504.479.088
2.	Itjen	86.767.955	3.100.000	83.667.955
3.	Ditjen PT	733.852.850	18.536.668	715.316.182
4.	Ditjen PB	1.190.280.866	19.865.487	1.170.415.379
5.	Ditjen PSDKP	1.049.215.656	10.222.927	1.038.992.729
6.	Ditjen PDSPKP	417.063.946	2.138.819	414.925.127
7.	Ditjen PRL	477.180.326	2.000.000	475.180.326
8.	BRSDMKP	1.501.261.980	43.315.361	1.457.946.619
9.	BKIPMKHP	595.573.989	25.446.424	570.127.565
JUMLAH		6.562.189.206	131.138.236	6.431.050.970

Masih ditanggal yang sama 06 Juli 2021 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 Perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021, penghematan alokasi anggaran Kementerian Kelautan

dan Perikanan Tahap III sebesar Rp1.406.171.328.000 dimana *refocusing* anggaran dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam melakukan penghematan alokasi anggaran yang dapat *refocusing* antara lain: a) Sumber

belanja berasal dari Rupiah Murni (RM); b) Belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal; dan c) Belanja barang dan modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional, d) kriteria *refocusing* KL berasal berasal dari 1) Sisa anggaran per 30 Juni 2021 yang belum terserap, 2) Sisa anggaran belanja tersebut berasal dari, honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada

masyarakat/pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan Gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan dan mesin, sisa dana lelang dan/ atau swakelola, anggaran yang belum di kontrakan, atau kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan. Besaran *refocusing* tahap III pasca *refocusing* pada tanggal 06 Juli 2021 setelah adanya penghematan menjadi Rp5.025.621.307.000 disajikan sebagai berikut:

Tabel 58. *Refocusing* Anggaran Tahap III Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Pasca Penambahan Anggaran TW. II	<i>Refocusing</i> Tahap III	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap III
1.	Setjen	504.479.088	77.821.476	426.657.612
2.	Itjen	83.667.955	4.100.000	79.567.955
3.	Ditjen PT	715.452.682	172.823.694	542.628.988
4.	Ditjen PB	1.170.415.379	423.350.022	747.065.357
5.	Ditjen PSDKP	1.038.992.729	201.519.057	837.473.672
6.	Ditjen PDSPKP	414.925.127	180.516.387	234.408.740
7.	Ditjen PRL	475.180.326	179.602.052	295.578.274
8.	BRSDMKP	1.458.551.784	110.723.747	1.347.828.037
9.	BKIPMKHP	570.127.565	55.714.893	514.412.672
JUMLAH		6.431.792.635	1.406.171.328	5.025.621.307

Dalam proses revisi anggaran dengan adanya kebijakan *refocusing* tahap III, pada tanggal 20 Juli 2021 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 Perihal

Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021, penghematan alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahap IV sebesar Rp278.159.137.000, proses revisi

tahap III dan IV dijadikan satu proses. *Refocusing* anggaran tahap IV dalam rangka penaganan Kesehatan dan perlindungan social kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, yang antara lain dipenuhi dari *refocusing* dan realokasi kembali belanja K/L TA. 2021.

Dalam melakukan penghematan alokasi anggaran yang dapat *direfocusing* antara lain: a) Sumber belanja berasal dari Rupiah Murni (RM); b) Belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja pegawai, barang dan belanja modal; dan c) Belanja barang dan modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional, d) kriteria *refocusing* KL berasal berasal dari 1) Sisa anggaran per 19 Juli

2021 yang belum terserap diluar kegiatan PEN, 2) Sisa anggaran belanja tersebut berasal dari kegiatan single year 2021 yang belum dilaksanakan/belum selesai dapat direalisasikan menjd MYC, 3) sisa anggaran yang berasal dari honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan Gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan dan mesin, sisa dana lelang dan/ atau swakelola, anggaran yang belum di kontrakan, atau kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan. Besaran alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikana pasca *refocusing* tahap III dan IV sebesar Rp4.747.462.170.000 sebagai berikut:

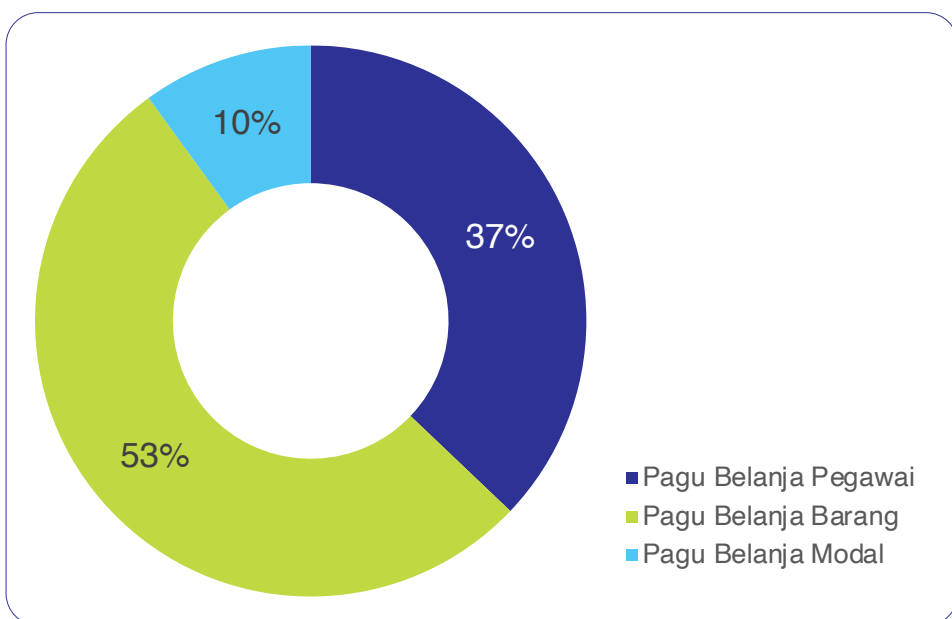
Tabel 59. *Refocusing* Anggaran Tahap IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021

No.	Unit Eselon I	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap III	<i>Refocusing</i> Tahap IV	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap IV
1.	Setjen	426.657.612	56.668.193	369.989.419
2.	Itjen	79.567.955	12.900.000	66.667.955
3.	Ditjen PT	542.628.988	8.000.000	534.628.988
4.	Ditjen PB	747.065.357	-35.000.000	782.065.357
5.	Ditjen PSDKP	837.473.672	98.000.000	739.473.672

No.	Unit Eselon I	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap III	<i>Refocusing</i> Tahap IV	Pagu Pasca <i>Refocusing</i> Tahap IV
6.	Ditjen PDSPKP	234.408.740	44.790.945	189.617.795
7.	Ditjen PRL	295.578.274	4.000.000	291.578.274
8	BRSDMKP	1.347.828.037	58.000.000	1.289.828.037
9	BKIPMKHP	514.412.672	30.799.999	483.612.673
JUMLAH		5.025.621.307	278.159.137	4.747.462.170

Selanjutnya sampai dengan akhir tahun 2021, komposisi anggaran KKP Tahun 2021 berdasarkan belanja antara lain sebagai berikut pagu belanja pegawai (51) sebesar

Rp 1 . 7 6 1 . 2 2 6 . 9 4 6 . 0 0 0 ,
belanja barang (52) sebesar
Rp2.540.204.072.000, dan
belanja modal (53) sebesar
Rp471.887.809.000.

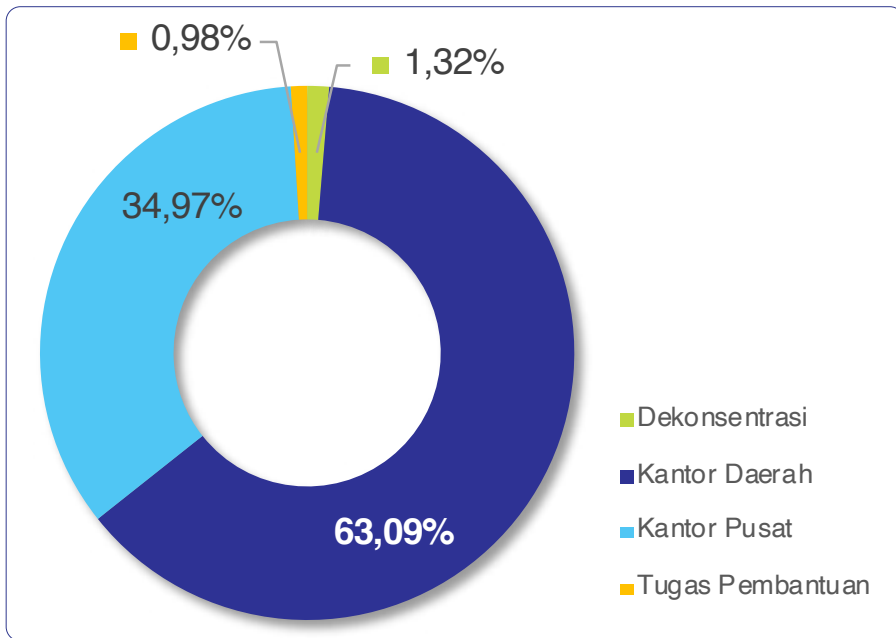


Gambar 73 Komposisi Anggaran KKP Menurut Belanja

Selanjutnya menurut kewenangan, komposisi anggaran KKP sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 dibagi dalam Kantor Pusat (KP)

sebesar Rp1.661.865.032.000, Kantor Daerah (KD) sebesar Rp 3 . 0 0 2 . 2 4 2 . 1 7 6 . 0 0 0 , Dekonsentrasi (DK) sebesar Rp62.696.231.000, dan Tugas

Pembantuan (TP) sebesar Rp46.515.388.000. Alokasi terbesar tahun 2021 ini berada pada kewenangan Kantor Daerah, sebagai berikut.



Gambar 74 Komposisi Anggaran KKP Menurut Kewenangan

Jumlah Satker lingkup KKP Tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2021, sebanyak 392 Satker yang terdiri dari 11 Satker pada

Kantor Pusat, 150 Satker pada Kantor Daerah, 203 Satker pada Dekonsentrasi dan 34 Satker pada Tugas Pembantuan.

Tabel 60. Jumlah Satker KKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

No.	Unit Eselon I	KP	KD	DK	TP	Total Satker
1.	SETJEN	2	0	34	0	36
2.	ITJEN	1	0	0	0	1
3.	DJPT	1	23	34	16	74
4.	DJPB	1	15	34	0	50
5.	DJPSDKP	1	14	34	0	49
6.	DJPDSPKP	1	1	34	0	36
7.	DJPRL	1	8	33	18	60
8.	BRSDMKP	2	42	0	0	44
9.	BKIPMKHP	1	47	0	0	48
TOTAL		11	150	203	34	398

Pada triwulan III tahun 2021 dengan adanya *refocusing* tahap III terdapat pengurangan jumlah satker pada satker Tugas Pembantuan (TP) pada unit eselon I DJPT antara lain: Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat, Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa

Tengah, Dinas Perikanan Dan Kelautan Prov. Nusa Tenggara Timur, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Utara. Sehingga terdapat penyesuaian jumlah satker sebagai berikut :

Tabel 60. Jumlah Satker KKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	Unit Eselon I	KP	KD	DK	TP	Total Satker
1.	SETJEN	2	0	34	0	36
2.	ITJEN	1	0	0	0	1
3.	DJPT	1	23	34	10	68
4.	DJPB	1	15	34	0	50
5.	DJPSPDKP	1	14	34	0	49
6.	DJPSPKPK	1	1	34	0	36
7.	DJPRL	1	8	33	18	60
8	BRSDMKP	2	42	0	0	44
9	BKIPMKHP	1	47	0	0	48
TOTAL		11	150	203	28	392

Alokasi anggaran KKP per 31 Agustus 2021 sebesar Rp 4 . 7 4 7 . 4 6 2 . 1 7 0 . 0 0 0 dan menjadi sebesar Rp4.773.318.827.000 sampai dengan 31 Desember 2021. Selisih alokasi anggaran sebesar Rp25.856.657.000 karena adanya dinamika pergerakan alokasi anggaran berupa penambahan dan pengurangan anggaran diantaranya : penambahan hibah luar negeri pada Satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp0,35 miliar, penambahan

PNBP pada PPS Nizam Zachman sebesar Rp7,42 miliar, PPN Pengambengan Rp162 juta, PPN Brondong sebesar Rp295 juta, PPN Sibolga sebesar Rp440 juta, PPN Kwandang sebesar Rp172 juta, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan sebesar Rp129 juta, penambahan hibah langsung pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp20,03 miliar, pengurangan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Dirjen

Perikanan Tangkap sebesar Rp12,32 miliar yang bersumber hibah langsung (drop loan) sebagaimana tersaji pada Tabel 59. berikut :

Tabel 60. Penambahan dan Pengurangan Alokasi Anggaran Pasca *Refocusing IV*

Tanggal	Uraian Penambahan/Pengurangan Alokasi APBN KKP 2021	Jumlah (Rp)
25 Agustus 2021	Penambahan anggaran pada Satker Balai Riset Pemuliaan Ikan yang berasal dari Hibah Luar Negeri sebesar	354.181.000
30 Agustus 2021	Penambahan anggaran pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman yang berasal dari PNBPN sebesar	7.422.625.000
10 September 2021	Penambahan anggaran pada Satker Pusat Riset Perikanan yang berasal dari Hibah sebesar	3.148.812.000
16 September 2021	Penambahan anggaran pada Satker Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang berasal dari Hibah sebesar	417.784.000
06 Oktober 2021	Pengurangan pagu anggaran pada Satker Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap sebesar yang bersumber hibah langsung di drop load	(12.323.695.000)
26 Oktober 2021	terdapat penambahan anggaran bersumber Hibah Langsung pada Satker Biro Umum dan PBJ terkait dengan Hibah JICA sebesar	20.030.000.000
2 November 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebesar	162.850.000
10 November 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	295.000.000
17 November 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	440.400.000
18 November 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	172.000.000

Tanggal	Uraian Penambahan/Pengurangan Alokasi APBN KKP 2021	Jumlah (Rp)
29 November 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan	129.488.000
29 November 2021	Penambahan anggaran bersumber dari Hibah Luar Negeri Langsung pada Satker Pusat Riset Perikanan	673.715.000
1 Desember 2021	Pengurangan anggaran bersumber Hibah pada Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar hal ini disebabkan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dan kegiatan akan dilanjutkan pada tahun 2022 sebagaimana MoU register dan ringkasan naskah hibah;	(131.235.000)
9 Desember 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	49.600.000
10 Desember 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Nizam Zachman	2.891.526.000
15 Desember 2021	Penambahan anggaran bersumber dari Hibah Luar Negeri Langsung di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1.639.390.000
28 Desember 2021	Penambahan anggaran bersumber PNBPN pada Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebesar	484.206.000
19 Januari 2022	Penambahan anggaran bersumber Hibah Langsung pada Satker Biro Umum dan PBJ hal ini disebabkan penambahan register baru fase kedua Hibah JICA untuk pengesahan pendapatan.	10.000
JUMLAH		25.856.657.000

Tabel 63. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I

NO	Eselon 1	Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	03201 SEKRETARIAT JENDERAL	390.019.429.000	383.839.736.923	98,42%

NO	Eselon 1	Total		
		Pagu	Realisasi	%
2	03202 INSPEKTORAT JENDERAL	66.667.955.000	66.603.283.558	99,90%
3	03203 DITJEN PERIKANAN TANGKAP	535.862.890.000	530.205.280.891	98,94%
4	03204 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	782.065.357.000	770.757.750.701	98,55%
5	03205 DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	739.473.672.000	732.354.950.588	99,04%
6	03206 DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	189.617.795.000	188.272.958.214	99,29%
7	03207 DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	291.578.274.000	288.619.401.230	98,99%
8	03212 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.294.291.294.000	1.284.215.841.143	99,22%
9	03213 BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	483.742.161.000	475.613.179.712	98,32%
JUMLAH		4.773.318.827.000	4.720.482.382.960	98,89%

Tabel 64. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I dan Per Jenis Belanja

NO	Eselon 1	Pegawai			Barang			Modal		
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL	69.187.407.000	68.839.306.502	99,50%	285.775.409.000	280.091.086.669	98,01%	35.056.613.000	34.909.343.752	99,58%
2	INSPEKTORAT JENDERAL	33.535.920.000	33.510.796.321	99,93%	31.708.035.000	31.668.487.237	99,88%	1.424.000.000	1.424.000.000	100,00%
3	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	168.751.887.000	167.459.866.905	99,23%	299.878.632.000	296.224.194.501	98,78%	67.232.371.000	66.521.219.485	98,94%
4	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	187.168.401.000	183.126.257.770	97,84%	494.142.410.000	487.407.592.666	98,64%	100.754.546.000	100.223.900.265	99,47%
5	DITJEN PSDKP	152.598.999.000	151.031.083.412	98,97%	488.496.132.000	483.539.827.215	98,99%	98.378.541.000	97.784.039.961	99,40%
6	DITJEN PDS	52.964.693.000	52.713.726.986	99,53%	133.411.216.000	132.321.098.782	99,18%	3.241.886.000	3.238.132.446	99,88%
7	DITJEN PRL	89.420.082.000	87.997.635.773	98,41%	188.493.135.000	186.990.443.353	99,20%	13.665.057.000	13.631.322.104	99,75%
8	BRSDMKP	761.794.186.000	757.029.375.603	99,37%	430.126.203.000	425.560.080.513	98,94%	102.370.905.000	101.626.385.027	99,27%
9	BKIPM	245.805.371.000	243.028.361.423	98,87%	188.172.900.000	184.081.501.343	97,83%	49.763.890.000	48.503.316.946	97,47%

NO	Eselon 1	Pegawai			Barang			Modal		
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
JUMLAH		1.761.226.946.000	1.744.736.410.695	99,06%	2.540.204.072.000	2.507.884.312.279	98,73%	471.887.809.000	467.861.659.986	99,15%
TOTAL PAGU KKP								4.773.318.827.000		
TOTAL REALISASI KKP								4.720.482.382.960		
PERSENTASE TOTAL REALISASI KKP								98,89%		

Sumber. OMSPAN, Kementerian Keuangan (31 Januari 2022)

Realisasi anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp.4,72 triliun terhadap pagu anggaran sebesar Rp.4,77 triliun atau mencapai 98,89 persen yang terdiri dari Belanja Pegawai pagu sebesar Rp. 1,76 triliun realisasi sebesar 1,74 triliun atau mencapai 99,06 persen, Belanja Barang realisasi sebesar Rp.2,5 triliun dari pagu sebesar Rp.2,54 triliun atau mencapai 98,73 persen, dan Belanja Modal realisasi sebesar Rp.0,46 triliun dari pagu sebesar Rp.0,47 triliun atau mencapai 99,15 persen.

Apabila dilihat per unit kerja, Realisasi tertinggi dengan persentase realisasi sebesar 99,90 persen dengan realisasi sebesar Rp.66,66 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp.66,60 miliar dan realisasi terendah berada pada Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan persentase realisasi mencapai 98,32 persen dengan pagu anggaran sebesar Rp.483,74 miliar dan realisasi anggaran sebesar Rp. 475,61 miliar.

Tabel 64. Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2021 Per Unit Eselon I dan Per Jenis Belanja

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2322 Legislasi Litigasi dan Kerjasama	5.628.057.000	5.593.691.720	99,4%
2	2323 Pengelolaan Organisasi dan SDM	5.974.127.000	5.876.385.096	98,4%
3	2325 Pengelolaan Perencanaan Keuangan dan BMN	39.476.612.000	39.205.126.939	99,3%
4	2328 Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik dan Umum	249.645.336.000	248.657.175.337	99,6%

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	2329 Pengelolaan Data dan Informasi	34.954.796.000	34.778.194.065	99,5%
6	2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	22.909.761.000	22.888.755.732	99,9%
7	2336 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	43.758.194.000	43.714.527.826	99,9%
8	2337 Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	25.986.761.000	25.600.999.392	98,5%
9	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	95.758.162.000	93.568.952.237	97,7%
10	2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	28.834.666.000	28.769.697.970	99,8%
11	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.026.898.000	13.961.662.227	99,5%
12	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	371.256.403.000	368.303.969.065	99,2%
13	2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	114.178.412.000	112.858.615.711	98,8%
14	2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	246.980.622.000	245.034.302.145	99,2%
15	2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	86.110.006.000	84.736.660.100	98,4%

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
16	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	299.473.481.000	293.091.014.273	97,9%
17	2350 Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	437.919.419.000	434.768.280.034	99,3%
18	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	19.203.935.000	18.218.006.054	94,9%
19	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	13.649.330.000	13.532.799.573	99,1%
20	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	16.408.947.000	16.187.873.884	98,7%
21	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	252.292.041.000	249.647.991.043	99,0%
22	2356 Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	13.884.533.000	13.848.132.231	99,7%
23	2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	67.715.587.000	66.776.979.603	98,6%
24	2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	10.666.535.000	10.643.191.608	99,8%

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
25	2360 I Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	5.498.700.000	5.471.289.045	99,5%
26	2361 I Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	89.154.760.000	88.835.987.986	99,6%
27	2362 I Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	31.832.219.000	31.708.070.074	99,6%
28	2363 I Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	60.993.122.000	59.979.289.263	98,3%
29	2365 I Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.799.706.000	5.792.874.466	99,9%
30	2366 I Perencanaan Ruang Laut	9.978.220.000	9.962.513.856	99,8%
31	2367 I Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	146.606.639.000	144.907.865.440	98,8%
32	2375 I Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	113.864.369.000	113.415.635.247	99,6%
33	2376 I Pendidikan Kelautan dan Perikanan	140.414.970.000	138.355.660.906	98,5%

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
34	2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	970.831.756.000	963.817.842.850	99,3%
35	2425 Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	7.052.962.000	7.045.401.286	99,9%
36	2426 Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	3.207.782.000	3.180.132.935	99,1%
37	2427 Riset Perikanan	31.057.213.000	30.693.881.751	98,8%
38	2428 Riset Kelautan	18.185.162.000	18.132.472.263	99,7%
39	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	393.682.004.000	388.159.025.322	98,6%
40	3988 Karantina Ikan	33.247.149.000	32.500.657.440	97,8%
41	3989 Pengendalian Mutu	32.064.950.000	30.957.985.951	96,5%
42	3990 Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	24.748.058.000	23.995.510.999	97,0%
43	4345 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	9.677.080.000	9.574.813.905	98,9%
44	4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.368.368.000	36.280.647.871	99,8%

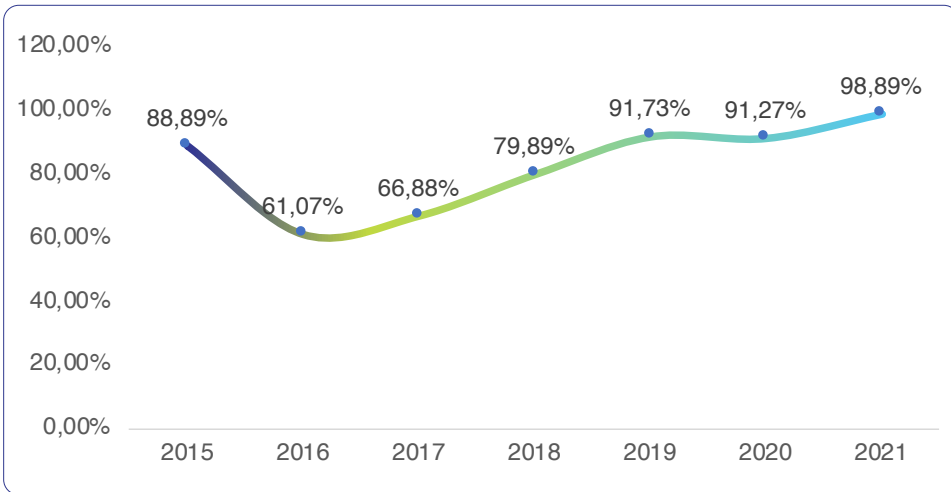
No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
45	5279 Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	2.697.680.000	2.697.377.741	100,0%
46	5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	35.322.836.000	35.037.158.472	99,2%
47	6453 Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	54.340.501.000	49.729.163.766	91,5%
JUMLAH		4.773.318.827.000	4.720.494.242.700	98,89%

Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan (31 Januari 2022)

Tabel 66. Pagu dan Realisasi APBN KKP 2015-2021

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2015	10.448.018.663.002	9.287.010.991.808	88,89%
2016	10.614.735.547.000	6.482.382.769.935	61,07%
2017	9.138.167.255.000	6.111.444.828.030	66,88%
2018	7.632.526.314.000	6.097.370.854.297	79,89%
2019	5.510.787.032.000	5.055.148.917.815	91,73%
2020	5.269.869.632.000	4.809.863.593.815	91,27%
2021	4.773.318.827.000	4.720.482.382.960	98,89%

Sepanjang tahun 2015-2021, persentase realisasi APBN KKP di tahun 2021 merupakan persentase realisasi anggaran yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 75 Tren Persentase Realisasi APBN KKP 2015-2021

Peringkat Realisasi Anggaran Belanja KL Tahun 2021

Tabel 67. Peringkat Realisasi Anggaran Belanja KL Tahun 2021

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
1	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	8.463.875.872.000	8.470.385.145.862	100,08%
2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	16.137.239.201.000	16.097.432.770.439	99,75%
3	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.280.996.158.000	9.255.195.413.420	99,72%
4	KEMENTERIAN AGAMA	68.921.312.321.000	68.582.691.335.855	99,51%
5	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	151.559.459.000	150.812.094.994	99,51%
6	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	385.267.038.000	383.144.127.505	99,45%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	232.160.650.000	230.449.430.205	99,26%
8	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.426.089.199.000	1.414.561.205.662	99,19%
9	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	264.977.466.000	262.836.541.935	99,19%
10	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.804.761.685.000	1.789.457.983.069	99,15%
11	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.934.557.569.000	2.909.033.451.195	99,13%
12	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	216.410.987.000	214.364.296.082	99,05%
13	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	565.285.069.000	559.357.607.643	98,95%
14	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	193.047.600.000	190.942.482.059	98,91%
15	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.773.318.827.000	4.720.482.382.960	98,89%
16	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	7.224.673.394.000	7.143.157.200.129	98,87%
17	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.711.236.045.000	3.667.714.850.037	98,83%
18	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	193.185.710.000	190.902.111.435	98,82%
19	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	206.450.970.000	203.881.483.365	98,76%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
20	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	107.571.649.000	106.156.733.408	98,68%
21	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	316.986.895.000	312.785.856.669	98,67%
22	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	313.481.301.000	308.707.894.958	98,48%
23	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	156.770.102.000	154.275.407.787	98,41%
24	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	143.563.798.000	141.107.433.069	98,29%
25	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	181.783.991.000	178.583.512.284	98,24%
26	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.439.346.780.000	1.413.656.632.728	98,22%
27	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	47.429.582.000	46.485.176.307	98,01%
28	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	247.466.368.000	242.488.526.279	97,99%
29	MAHKAMAH AGUNG	10.727.890.625.000	10.509.270.482.260	97,96%
30	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	308.446.909.000	301.787.243.066	97,84%
31	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	395.696.324.000	386.793.046.903	97,75%
32	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.179.339.108.000	3.107.372.438.744	97,74%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
33	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.946.860.305.000	4.834.185.008.987	97,72%
34	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.826.278.814.000	2.754.041.693.811	97,44%
35	KEMENTERIAN SOSIAL	108.093.553.130.000	105.305.627.076.017	97,42%
36	KEMENTERIAN PERTANIAN	16.314.906.396.000	15.871.684.849.255	97,28%
37	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.166.767.417.000	3.080.224.028.954	97,27%
38	BADAN KEAMANAN LAUT	456.767.693.000	444.097.263.826	97,23%
39	KEMENTERIAN KEUANGAN	89.957.060.749.000	87.450.020.129.631	97,21%
40	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34.658.796.104.000	33.690.693.495.149	97,21%
41	KEMENTERIAN KESEHATAN	214.443.818.867.000	208.356.805.782.283	97,16%
42	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	834.778.720.000	811.022.078.984	97,15%
43	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.139.342.400.000	23.413.639.497.949	96,99%
44	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.314.874.225.000	2.243.155.114.960	96,90%
45	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.036.971.876.000	1.004.813.494.785	96,90%
46	KOMISI YUDISIAL RI	107.149.528.000	103.759.954.685	96,84%
47	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.178.408.621.000	1.140.697.791.326	96,80%
48	BADAN PUSAT STATISTIK	3.854.139.324.000	3.729.755.336.557	96,77%
49	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	141.290.622.000	136.467.729.454	96,59%
50	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	105.910.393.269.000	102.257.789.156.800	96,55%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
51	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1.869.314.237.000	1.802.953.495.375	96,45%
52	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	159.797.209.000	153.937.198.843	96,33%
53	SEKRETARIAT KABINET	297.668.676.000	286.644.904.219	96,30%
54	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	198.162.445.000	190.773.339.668	96,27%
55	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.745.903.509.000	7.438.844.067.354	96,04%
56	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	100.606.095.000	96.608.615.593	96,03%
57	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	14.874.412.483.000	14.252.578.468.460	95,82%
58	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.457.891.837.000	3.311.414.013.229	95,76%
59	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.048.171.819.000	1.002.305.307.096	95,62%
60	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	245.618.004.000	234.726.067.648	95,57%
61	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.654.009.743.000	1.580.318.266.119	95,54%
62	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3.089.194.851.000	2.947.492.262.005	95,41%
63	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	88.710.141.655.000	84.578.289.011.680	95,34%
64	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131.283.618.272.000	124.956.963.164.700	95,18%
65	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.669.304.730.000	2.538.611.470.465	95,10%
66	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.137.478.648.000	2.981.791.996.632	95,04%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
67	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	161.312.757.487.000	152.692.815.803.557	94,66%
68	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.244.697.794.000	1.165.945.934.535	93,67%
69	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	155.843.250.000	145.923.739.094	93,63%
70	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	752.415.051.000	704.182.935.395	93,59%
71	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.792.179.383.000	5.416.163.047.130	93,51%
72	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.868.372.414.000	1.732.706.036.107	92,74%
73	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	777.272.751.000	714.215.311.825	91,89%
74	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	76.533.775.000	69.720.093.213	91,10%
75	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8.517.134.455.000	7.729.950.297.727	90,76%
76	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.493.549.736.000	1.341.029.786.960	89,79%
77	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	13.589.342.353.000	12.184.971.139.359	89,67%
78	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.924.182.216.000	1.686.983.804.224	87,67%
79	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8.572.916.538.000	7.416.249.754.826	86,51%

NO	NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	%
80	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.903.225.163.000	2.462.938.153.037	84,83%
81	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	480.687.745.000	404.896.964.534	84,23%
82	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.400.776.485.000	1.178.922.072.866	84,16%
83	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2.450.075.127.000	2.029.179.073.621	82,82%
84	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	763.048.242.000	574.959.225.642	75,35%
85	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.241.513.123.000	899.191.785.869	72,43%
86	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	776.039.418.000	553.874.286.649	71,37%
87	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	54.698.588.000	15.921.672.156	29,11%
NASIONAL		1.235.722.892.019.000	1.189.749.744.349.140	96,28%

Sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan (31 Januari 2022)

Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi APBN secara nasional yaitu sebesar 96,28 persen, realisasi KKP masih berada diatas rata-rata realisasi Nasional, sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase realisasi Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, KKP berada di urutan ke-15 dari 87 KL.

Kedepan untuk meningkatkan kinerja anggaran, beberapa upaya perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Mempercepat persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga pada semua kegiatan sudah

- dapat dilaksanakan, tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun.
- b. Identifikasi dan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan percepatan pelaksanaannya dan mudah dilaksanakan berdasarkan analisa manajemen resiko antara lain pengadaan alat pengolah data, renovasi/partisi ruangan, pengadaan kendaraan, rapat-rapat, kegiatan koordinasi, perjalanan dinas dan lain-lain dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas anggaran serta memenuhi kaidah peraturan penggunaan anggaran yang akuntabel, efisien dan efektif yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.
- c. membuat *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sehingga pelaksanaannya terjadwal dengan baik dan jika terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan jadwal agar dilakukan percepatan pelaksanaannya serta upaya percepatan;
- d. Meningkatkan peran SPIP, dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang berisiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya;
- e. Melakukan monev setiap bulannya secara berjenjang dari level satker, Unit Eselon I dan level Kementerian terkait dengan pelaksanaan anggaran baik realisasi anggaran per satker, per belanja, pengadaan barang dan jasa, kontrak, kegiatan prioritas, Bantuan Pemerintah serta kegiatan lainnya

3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- | | |
|--|--|
| <p>a. Data capaian kinerja Sasaran Strategis KKP</p> <p>b. Data capaian atas pelaksanaan Kelompok Rincian Output (KRO)</p> <p>c. Data alokasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO)</p> <p>d. Data realisasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO)</p> | <p>seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kinerja 7 Sasaran Strategis dibandingkan dengan realisasi anggaran KRO yang mendukung pencapaian sasaran strategis :</p> |
|--|--|

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran

seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kinerja 7 Sasaran Strategis dibandingkan dengan realisasi anggaran KRO yang mendukung pencapaian sasaran strategis :

Tabel 68. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran KKP

Sasaran Strategis	Kinerja Sasaran Strategis*	Pagu (Rp)**	Realisasi (Rp)***	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
a	b	c	d	e	f=b-c
SS 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	97,94	535.043.336.000	529.837.957.919	99,03	-1,1
SS 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	85,70	200.986.345.000	197.295.715.066	98,16	-12,46

Sasaran Strategis	Kinerja Sasaran Strategis*	Pagu (Rp)**	Realisasi (Rp)**	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)	
SS 3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	118,92	77.871.910.000	77.679.861.754	99,75	19,2
SS 4	Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	100,94	254.279.339.000	251.927.765.052	99,08	1,9
SS 5	Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	120,00	59.503.119.000	59.137.809.838	99,39	20,6
SS 6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	103,03	48.230.292.000	47.848.638.855	99,21	3,8
SS 7	Industrialisasi KP berdaya saing	94,43	153.882.394.000	151.023.061.974	98,14	-3,7
SS 8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	105,36	453.860.544.000	449.838.716.090	99,11	6,2
SS 9	Tatakelola pemerintahan yang baik	105,97	2.989.661.548.000	2.955.892.856.412	98,87	7,1
Jumlah		102,75	4.773.318.827.000	4.720.482.382.960	98,89	3,86%

Sumber :

*Aplikasi Kinerjaaku,

**Aplikasi Krisna Bappenas dan

***Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja KKP tahun 2021 adalah sebesar 102,75 persen, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 98,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar

3,86 persen yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Selain itu sepanjang tahun 2021, dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya

Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kualitas anggaran melalui *refocusing* anggaran

KKP telah melakukan *refocusing*/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya. Di tahun 2021 KKP telah melakukan *refocusing* anggaran sebanyak empat kali dalam rangka memenuhi dampak penanggulangan covid nasional. KKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

2. Sinergi/kolaborasi/sinkronisasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait

Sebagaimana arahan Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan harus terintegrasi antar KL sehingga dampaknya semakin besar bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2021, KKP terus melakukan integrasi/kerjasama dengan pihak terkait terkait kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya

Sinergi/kolaborasi/sinkronisasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait dituangkan dalam bentuk Perjajian Kerjasama/*Memorandum of Understanding* (MoU) sebagaimana tertuang dalam PKS atau Mou dimaksud, sehingga melalui penandatanganan PKS dan Mou tersebut pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tidak berfokus pada sumber pendanaan APBN KKP saja namun juga

telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi lainnya. Hal ini juga sesuai dengan semangat pengelolaan APBN ditengah keterbatasan resources envelope/ruang fiskal keuangan negara dengan adanya kebutuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic sementara cakupan wilayah pembangunan yang begitu luas. Sehingga penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi

pendanaan mutlak diperlukan.

Hal tersebut juga selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimana pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilaksanakan lintas KL sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunna yang semakin terbatas ditengah tantangan global yang semakin banyak. Melalui sinergi dan kolaborasi tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak hanya terbatas pada APBN KKP namun kolaboratif dengan KL lainnya.

Tabel 69. Kerjasama/Kesepakatan Bersama dengan KL/LSM Dan Lembaga Terkait Lainnya dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas KKP

NO	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA	PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN BERSAMA	PERIHAL KESEPAKATAN BERSAMA
1	07/MEN-KP/KB/VI/2021 9 TAHUN 2021	KKP-KEJAKSAAN	Sinergi Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
2	01/SJ-KKP/KB/III/2021 096/LTR/YKAN/JKT/ED/III/2021	KKP-YKAN	Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
3	PKS.1/MENLHK/SETJEN/ KSA.2/3/2021 02/MEN-KP/KB/III/2021	KKP-KLHK	Pengaturan Koordinasi Otoritas Pengelola (Management Authority) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) di Indonesia

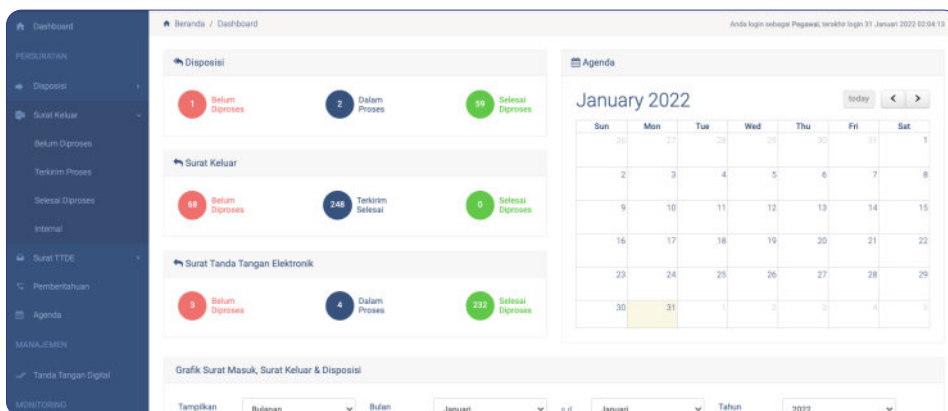
NO	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA	PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN BERSAMA	PERIHAL KESEPAKATAN BERSAMA
4	01/MEN-KP/KB/I/2021 02/Men/ KL.01/01/2021	KKP-KPPPA	Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan
5	05/MEN-KP/KB/VI/2021 1390/UN1.P/DIT- KAUI/HK/2021	KKP-UGM	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi
6	02/SJ-KKP/KB/IV/2021 0026.MoU/ HKM.02.02/ C01000000/2021	KKP-PLN	Sinergi Program Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Penyediaan Tenaga Listrik
7	09/MEN-KP/KB/VII/2021 06/MoU/ HK.220/M/07/2021	KKP-KEMANTAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi
8	04/MEN-KP/KB/V/2021 9 TAHUN 2021	KKP-PEM PROV DKI JAKARTA	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta
9	03/MEN-KP/KB/V/2021	KKP-KEMHAN -KEMENKOPOLHUKAM- KEMDAGRI-KEMENPAN RB-KEMDIKBUD RISTEK-KEMENAG- KEMENPORA-KEMHUB- KOMINFO-POLRI- LEMHANAS-BNPT-BNN	Pembinaan Kesadaran Bela Negara
10	06/MEN-KP/KB/VI/2021 75/IT3/HK.07.00- 1/P/B/2021	KKP-IPB	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi
11	17/KB/M.KUKM/VIII/2021 10/MEN-KP/KB/VIII/2021	KKP-KKUKM	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor KP

NO	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA	PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN BERSAMA	PERIHAL KESEPAKATAN BERSAMA
12	03/SJ-KKP/KB/VIII/2021	KKP-KEMENKOMARINVES-KLHK-PELINDO I-PELINDO II-PELINDO III-PELINDO IV-GAPKI-APHI-APROBI	Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Sebagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / CSR
13	11/MEN-KP/KB/XI/2021 484/PKS/XI.2021	KKP-Perpusnas	Peningkatan Akses Masyarakat KP terhadap Informasi dan Pengetahuan melalui Pengembangan Perpustakaan dan Kepustakawanan
14	PJ 98 Tahun 2021 08/MEN-KP/KB/VI/2021	Kemhub-KKP	PJKP Bersama dalam Proyek KPBU Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru
15	12/MEN-KP/KB/XI/2021 MoU/016/KB/DN/XI/2021	KKP-BMKG	Program Pembangunan Sektor KP melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
16	06/SJ-KKP/KB/XII/2021 MOU/20/122021	KKP-BP Jamsostek	Perubahan atas KB antara KKP dan BP Jamsostek tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jamsostek kepada Masyarakat KP
14	PJ 98 Tahun 2021 08/MEN-KP/KB/VI/2021	Kemhub-KKP	PJKP Bersama dalam Proyek KPBU Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru
15	12/MEN-KP/KB/XI/2021 MoU/016/KB/DN/XI/2021	KKP-BMKG	Program Pembangunan Sektor KP melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
16	06/SJ-KKP/KB/XII/2021 MOU/20/122021	KKP-BP Jamsostek	Perubahan atas KB antara KKP dan BP Jamsostek tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jamsostek kepada Masyarakat KP

3. Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-office

Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamanatkan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari yang bersifat manual menjadi layanan perkantoran

berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk memangkas waktu bekerja serta arsip terdokumentasi dengan baik dan dapat dicari dengan mudah. Aplikasi yang telah dilakukan untuk kemudahan tersebut diantaranya aplikasi persuratan dan disposisi e-layar, serta aplikasi ooffice lainnya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 76 Pemanfaatan Teknolgi dalam Aplikasi Persuratan dan Disposisi (E-Layar)

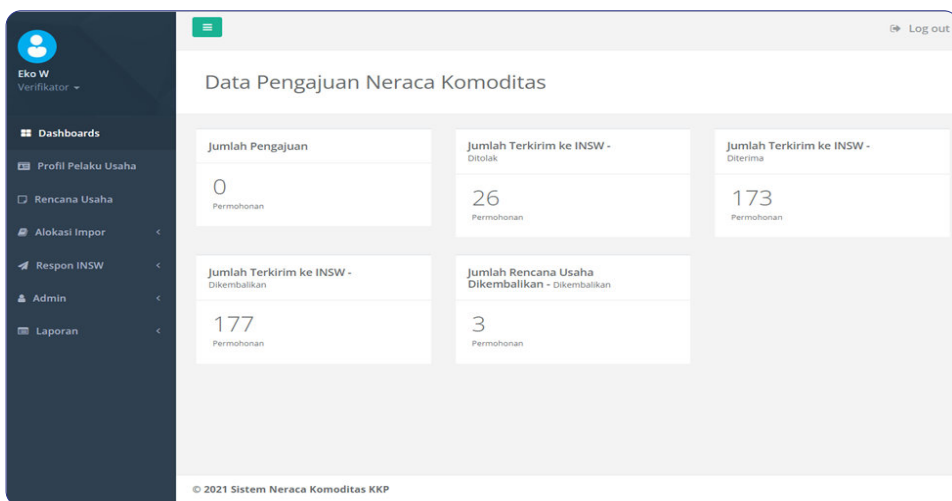
Selain itu beberapa aplikasi lainnya yang telah dibangun dan dikembangkan oleh KKP sampai

dengan tahun 2021 dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas antara lain :

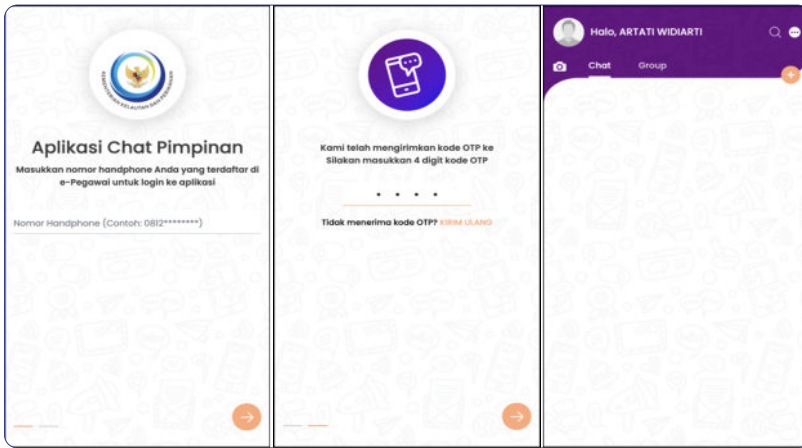
Tabel 70. Aplikasi yang Telah Dibangun dan Dikembangkan oleh KKP dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KKP

No.	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Aplikasi <i>Online</i> Single Submission	Pengembangan aplikasi perizinan berusaha berbasis resiko dilingkup KKP guna memfasilitasi sebagai Hub (integrasi) perizinan-perizinan yang ada di lingkup KKP secara <i>online</i> yang kembangkan merujuk Aplikasi OSS milik Kementerian Investasi.
2.	Website KKP	Pengembangan aplikasi portal diseminasi informasi kepada masyarakat terkait institusi KKP
3.	Satu Data KKP	Pengembangan aplikasi portal pengolahan dan diseminasi terkait data kelautan dan perikanan yang satu standar data, satu metadata yang baku sehingga menghasilkan data yang terstandar dan berkualitas
7.	Aplikasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan <i>Online</i> (SKP <i>Online</i>)	Pengembangan aplikasi sertifikasi unit pengolahan ikan yang baik dan memenuhi Prosedur Operasi Standar yang layak dan baik
8.	Aplikasi HACCP <i>Online</i>	Pengembangan Aplikasi yang bersifat sebagai kontrol penerapan program manajemen jaminan mutu dan keamanan pengolahan ikan
9.	Aplikasi SAJI <i>Online</i>	Pengembangan Aplikasi penerbitan Rekomendasi Surat Angkut Jenis Ikan yang dilakukan secara <i>online</i>
10.	Aplikasi SIMPAK	Pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional di lingkup KKP
11.	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Pengembangan aplikasi yang bersifat portal informasi resmi yang dikelola oleh pejabat PPID, disampaikan langsung melalui komunikasi dua arah untuk mewujudkan kemudahan dan ketepatan dalam mendapatkan informasi
12.	Aplikasi eDalwas	Pengembangan Aplikasi yang bersifat pengendalian dan pengawasan internal (dapat diakses dan diawasi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan)

No.	Nama Aplikasi	Keterangan
13.	Sisterkaroline	Pengembangan aplikasi desktop terkait pelayanan permohonan pemeriksaan karantina ikan yang digunakan oleh Petugas KIPM dalam melakukan pelayanan kepada pelaku usaha
14.	Pelayanan Pemeriksaan Karantina Ikan <i>Online</i>	Pengembangan Aplikasi terkait pelayanan permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa Kelautan dan Perikanan
15.	Statistik KKP	Pengembangan Aplikasi untuk diseminasi data-data statistik yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan
16.	Aplikasi Neraca Komoditas Perikanan	Pembangunan Aplikasi pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan ekspor dan impor komoditi kelautan dan perikanan
17.	Aplikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Pembangunan Aplikasi Sertifikasi dan Pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi dasar dan meningkatkan kompetensi nelayan (awak kapal perikanan)
18.	Aplikasi Chat Pimpinan Tinggi	Pembangunan Aplikasi saluran komunikasi yang bersifat private dan aman antar pimpinan tinggi



Gambar 77 Tampilan Dashboard Aplikasi Neraca Komoditas



Gambar 78 Tampilan Aplikasi Chat Pimpinan



Gambar 79 Tampilan Dashboard Aplikasi OSS

4. Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Zoom Meeting

Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Lingkup KKP mencakup satker pusat dan UPT, pertemuan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala melalui zoom meeting. Selanjutnya, pemantauan perkembangan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh dilakukan melalui supervisi/pendampingan/pembinaan secara daring, termasuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

5. Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan bagi ASN KKP secara daring melalui e-milea (Electronic Milenial Learning).

KKP juga telah melakukan pelatihan aparatur di lingkup KKP dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui e-milea (Electronic Milenial Learning). Selama tahun 2021 sebanyak

2.786 orang ASN KKP telah memanfaatkan pelatihan *online* melalui e-milea, dari total aparatur Kelautan dan Perikanan yang telah dilatih di tahun 2021 sebanyak 4.986 orang dengan substansi pelatihan mencakup pelatihan teknis pengawasa perikanan, elatihan Pengelolaan Arsip dan Persuratan Tingkat Dasar, pelatihan kepemimpinan serta pelatihan teknis lainnya. E-Milea menawarkan model pelatihan mandiri bagi peserta, terbuka, tidak berbayar serta materi yang dapat diunduh secara langsung serta adanya interaksi melalui chat di website dengan pengajar. Model pelatihan e-learning mandiri memungkinkan peserta untuk belajar tentang suatu subjek berdasarkan kebutuhan dan minat peserta, serta formatnya fleksibel tanpa pembatasan waktu. Aktifitas pembelajaran berupa pembelajaran mandiri melalui video rekaman pembelajaran dari pemateri, modul, bahan ajar, bahan tayang serta pengerjaan kuis. Pelatihan e-learning mandiri ini bertujuan untuk memberikan akses yang luas dalam rangka pengembangan kompetensi serta pencapaian indeks profesionalitas ASN.



Gambar 80 . Website Pelatihan *Online* Bagi Aparatur Di Kementerian Kelautan dan Perikanan ([Http://Elearning.kkp.go.id/Course/Index.php](http://Elearning.kkp.go.id/Course/Index.php))

6. Optimalisasi Pelaksanaan Pelatihan bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan secara daring

Meskipun di masa pandemic, tidak menyurutkan semangat jajaran KKP untuk terus melakukan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan di masa pandemi ini sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat

terutama dalam rangka memberikan ketrampilan sehingga masyarakat kelautan dan perikanan dapat bertahan ditengah perekonomian yang belum menentu di masa pandemi ini. Selama tahun 2021, KKP telah melakukan pelatihan kepada 15.035 orang yang tersebar di 5 Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan baik

melalui metode classroom, daring maupun blended. Sejak adanya pandemic KKP telah menyesuaikan metode pelatihan dengan menggunakan metode

daring agar masyarakat tetap mendapatkan pelatihan meski di masa pandemi. Beberapa ragam pelatihan yang telah diberikan secara daring antara lain :



Gambar 81 . Ragam Pelatihan Bagi Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Dilakukan Secara Daring

Untuk Tahun 2022, KKP berupaya untuk tetap melanjutkan pola kerja baru yang telah dilaksanakan selama pandemi di tahun 2020 dan 2021 sehingga dapat lebih memperkuat prinsip

penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.4 PENGHARGAAN DAN KINERJA LAINNYA

Sepanjang tahun 2021, melalui semangat #KKP rebound 2021#, seluruh jajaran di lingkup KKP terus berkomitmen meningkatkan kinerja dan berhasil meraih prestasi diantaranya :

1. Predikat A atas AKIP KKP

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/47/M. AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020, KKP memperoleh nilai 81,97 atau Predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di KKP sudah menunjukkan hasil yang memuaskan.

2. Anugerah Metokrasi dengan Predikat Sangat Baik.

KASN menggelar Anugerah Meritokrasi sejak 2019 hingga 2021, KASN telah menilai endid meritokrasi pada 347 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 instansi telah mendapatkan kategori baik dan 46 instansi lainnya mendapatkan kategori sangat baik. Pada 2021, KASN menargetkan 100

persen seluruh kementerian/ endid, 85 persen pemerintah daerah provinsi, dan 30 persen pemerintah daerah kabupaten/ kota mendapatkan kategori minimal baik'. Penilaian mempertimbangkan delapan aspek manajemen ASN, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pengembangan karier; (4) promosi dan endid; (5) manajemen kinerja; (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin; (7) perlindungan dan pelayanan; serta (8) endid informasi. KKP telah dua kali mendapatkan anugerah metokrasi dengan predikat sangat baik. Pertama pada tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan KKP mendapatkan nilai 361, dan Indeks 0,8 melalui Keputusan KASN Nomor 04 tahun 2019. Dan pada tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan KASN Nomor 99 Tahun 2021. Peningkatan rerata nilai endid merit menunjukkan komitmen KKP secara keberlanjutan

menerapkan system merit dalam manajemen ASN.

3. P e n g h a r g a a n Penyelenggaran Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi pelayanan endid tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2021, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, KKP mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik” dengan hasil nilai indeks 4,33. Penilaian dilakukan dengan Prinsip/ Indikator : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan dan Inovasi.



Gambar 82 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dengan Predikat Nilai Sangat Baik (Nilai Indeks 4,33)

4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang (Si Chupang) memperoleh penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Inovasi dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram ini terpilih sebagai pelayanan publik terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 Kategori Replikasi Inovasi Pelayanan Publik. Setelah bersaing dengan puluhan inovasi lain, Si Chupang terpilih masuk jajaran 5 besar.

Melalui pemanfaatan Si Chupang, kondisi geografis Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terbentang dari Pulau Lombok dan Sumbawa serta pulau-pulau kecil lainnya, kini bukan jadi penghalang bagi pelaku usaha yang ingin memperluas akses pasar produknya. Karena pengguna jasa tak perlu ke Kantor BKIPM Mataram untuk mendapatkan pelayanan. Aplikasi Si Chupang bisa diunduh di Playstore.

Dikenalkan sejak 2019, aplikasi ini berhasil memangkas waktu layanan dari 1 – 4 hari menjadi 30 menit. Dampak penggunaan aplikasi ini di antaranya peningkatan ekspor, dari yang semula 148 frekuensi pengiriman menjadi 271 atau naik sebesar 83,11%. Nilai ekspor



Gambar 83 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

yang dihasilkan pun meningkat, semula Rp20,6 miliar menjadi Rp66,8 miliar, atau naik sebesar 223,97%.

Kemudian pengiriman domestik juga turut meningkat, semula 19.067 menjadi 22.869 frekuensi pengiriman, atau naik sebesar 19,94%. Nilainya naik dari Rp1,30 triliun menjadi Rp1,39 triliun atau naik sebesar 7,13%. Dari sisi penerbitan sertifikat CKIB juga meningkat 72,73% dan sertifikat HACCP naik 21,05% sejak penggunaan aplikasi ini. Sementara sertifikat CPIB dari 8 menjadi 29 sertifikat, naik sebesar 262,5%. Dampaknya pun terjadi peningkatan PNBP dari Rp545 juta menjadi Rp660 juta, atau naik sebesar 21,01%, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKIPM Mataram dari yang semula 86,25 menjadi 96,13.

Inovasi pelayanan ini merupakan hasil penyempurnaan layanan Si Chupang, seperti sertifikasi lalu lintas komoditas perikanan, pengujian penyakit Ikan karantina, sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan pembayaran *online* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Si Chupang sangat mudah diakses dengan fitur yang user friendly serta dilengkapi dengan adanya aplikasi PPK *Online*, CKIB *Online*, HACCP *Online*, Simponi PNBP, Satu Data KKP (Kusuka) dan Customer Service Pelayanan (Web KKP, Web BKIPM, Aplikasi Laporan dan Survei Kepuasan Masyarakat). Tak hanya itu, aplikasi Si Chupang juga memuat profil pengguna jasa dengan user name dan password masing-masing, sehingga memudahkan pengguna jasa dalam pelayanan sertifikasi. Kemudian notifikasi di layar handphone juga dikirim, secara real time, serta terdapat layanan 24 jam dengan chat yang terhubung langsung melalui aplikasi whatsapp. Dampak sosial aplikasi ini ialah meningkatnya kemampuan masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan dan peningkatan pemahaman terhadap prosedur perizinan.

5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik yang Informatif

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh KI Pusat setiap tahunnya

kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI Pusat. Kategori badan publik yang mendapat anugerah ini meliputi Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkomitmen untuk menjadi lembaga

pemerintah yang informatif dengan memberikan pelayanan informasi publik yang akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga menjadi lebih cepat, akurat dan terpercaya. KKP mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat sebagai lembaga pemerintah yang terus berkomitmen dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan kategori informatif dengan nilai 96 diterima KKP pada ajang Anugerah Badan Publik 2021 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.



Gambar 84 Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2021 Dengan Predikat Nilai A

6. Penghargaan di Bidang Media Digital 2021 “Top Digital Implementation 2021”

KKP melalui Tim Humas berhasil memperoleh penghargaan berupa TOP Digital Implementation 2021

yang diterbitkan oleh Majalah ITWORK, dan berhasil memperoleh 3 prestasi yaitu :

- TOP Leader on Digital Implementation 2021
- TOP Digital on Solution on Public
- Information Services 2021



Gambar 85 Penghargaan dalam Ajang Top Digital Award 2021

Kegiatan TOP DIGITAL Awards yang diselenggarakan oleh majalah ItWorks ini sangat selaras dengan arah kebijakan Presiden yaitu percepatan transformasi digital. Penghargaan TOP DIGITAL Award 2021 diberikan kepada kepada KL/Lembaga/Instansi/Perusahaan dengan kriteria telah mengimplementasikan tata kelola TI (kebijakan, organisasi, implementasi sistem, dan prosedur) secara baik dan telah diterapkan secara konsisten, dengan perbaikan

terus-menerus,” terangnya. Selain itu, lembaga yang dinilai berhasil perlu menerapkan implementasi teknologi digital dan pemanfaatannya terintegrasi di seluruh divisi atau unit kerja dan berdampak pada kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat.

7. Kategori Mentor pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Berdasarkan Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan



Gambar 86. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Gender dalam Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/ Lembaga harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Implementasi PUG di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, capaian implementasi PUG KKP pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE) mendapatkan

Kategori Pratama, kemudian pada tahun 2014, 2016, dan 2018 meningkat menjadi Kategori Madya, Utama, dan Mentor. APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pelaksanaan strategi PUG. Salah satu endidi untuk meningkatkan capaian dan kualitas implementasi PUG KKP tahun 2021-2024 adalah dengan melakukan penguatan pada 7 (tujuh) prasyarat PUG, yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya (SDM dan Anggaran), data terpilah, alat analisis, dan partisipasi

masyarakat.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Menteri KP nomor 14 tahun 2021 tentang Kelompok Kerja PUG di Lingkungan KKP Tahun 2021 dan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 5 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja PUG di Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2021. Sekretariat Jenderal sebagai endidikan PUG KKP telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan implementasi PUG sehingga KKP berhasil mempertahankan Kategori Mentor pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya berdasarkan Keputusan Menteri PPPA nomor 66 tahun 2021.

8. Penghargaan dari ANRI

Sekretariat Jenderal berhasil meraih predikat “Sangat Memuaskan” pada hasil pengawasan kearsipan 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori endidi setingkat kementerian. Penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi serta mendorong setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan. Dari 34 kementerian, KKP berhasil mendapatkan peringkat 9 dengan nilai sebesar 95,39. Nilai tersebut naik 2,64 poin jika dibandingkan hasil pengawasan tahun 2019 sebesar 92,75.



Gambar 87 Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan

9. Penghargaan atas kinerja pemberantasan *Illegal fishing*

Gatra Award 2021 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada institusi negara dan swasta serta individu atau kelompok yang menginspirasi masyarakat dengan kontribusi positif berupa ide, gagasan serta program-program untuk memajukan Indonesia di tengah tantangan mendapatkan penghargaan atas kinerja pemberantasan *illegal fishing* melalui Gatra Award. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas upaya KKP yang selama pandemi covid terus berupaya dengan pandemi Covid-19. KKP di tahun 2021 untuk mengamankan kedaulatan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah-wilayah rawan *illegal fishing*. KKP terus menunjukkan komitmennya untuk Zero Tolerance terhadap *illegal fishing* dan terus menjaga laut Indonesia dari pencurian ikan maupun praktik-praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara ekonomi dan ekologi, terutama dalam mewujudkan roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bertepatan dengan HUT KKP ke-22 pada 26 Oktober 2021.

10. Penghargaan atas Kinerja




Gambar 88 Penghargaan Gatra Award Atas Kinerja Pemberantasan Illegal Fisihing

Anggaran KKP

Pada tahun 2021, tepatnya 22 Maret 2021 KKP mendapatkan Penghargaan atas Kinerja Anggaran KL Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118.KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja KL TA 2020 dengan Kategori Kementerian /Lembaga

dengan Kategori Pagu Sedang dengan Nilai Kinerja KKP berada pada urutan ke-9 dengan nilai 92,33. Pemberian penghargaan ini diberikan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Taata Cara Pemberian Penghargaan dan atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran KL TA 2020.

11. Penilaian atas Sistem

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN		 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																																																																					
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/KMK.02/2021 TENTANG PENETAPAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2020		- 2 - B. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN KATEGORI PAGU SEDANG																																																																					
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020; Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2020. PERTAMA : Menetapkan kementerian negara/lembaga yang diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan untuk tahun 2021 atas kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Para Menteri/Pimpinan Lembaga pada kementerian negara/lembaga penerima penghargaan yang bersangkutan; 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>BA/ KODE K/L</th> <th>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</th> <th>Nilai Kinerja Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>002</td><td>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</td><td>95,27</td></tr> <tr><td>2.</td><td>004</td><td>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</td><td>95,88</td></tr> <tr><td>3.</td><td>005</td><td>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</td><td>91,67</td></tr> <tr><td>4.</td><td>006</td><td>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</td><td>95,74</td></tr> <tr><td>5.</td><td>010</td><td>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</td><td>97,22</td></tr> <tr><td>6.</td><td>011</td><td>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</td><td>93,65</td></tr> <tr><td>7.</td><td>020</td><td>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</td><td>95,42</td></tr> <tr><td>8.</td><td>029</td><td>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</td><td>94,65</td></tr> <tr><td>9.</td><td>032</td><td>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</td><td>92,33</td></tr> <tr><td>10.</td><td>050</td><td>BADAN INTELEJEN NEGARA</td><td>93,88</td></tr> <tr><td>11.</td><td>054</td><td>BADAN PUSAT STATISTIK</td><td>95,29</td></tr> <tr><td>12.</td><td>059</td><td>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</td><td>95,22</td></tr> <tr><td>13.</td><td>067</td><td>KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</td><td>92,88</td></tr> <tr><td>14.</td><td>068</td><td>BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL</td><td>91,72</td></tr> <tr><td>15.</td><td>090</td><td>KEMENTERIAN PERDAGANGAN</td><td>94,05</td></tr> <tr><td>16.</td><td>115</td><td>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</td><td>90,37</td></tr> </tbody> </table>		NO.	BA/ KODE K/L	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai Kinerja Anggaran	1.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	95,27	2.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	95,88	3.	005	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	91,67	4.	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	95,74	5.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	97,22	6.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	93,65	7.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	95,42	8.	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	94,65	9.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	92,33	10.	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	93,88	11.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	95,29	12.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95,22	13.	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	92,88	14.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	91,72	15.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	94,05	16.	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	90,37
NO.	BA/ KODE K/L	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai Kinerja Anggaran																																																																				
1.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	95,27																																																																				
2.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	95,88																																																																				
3.	005	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	91,67																																																																				
4.	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	95,74																																																																				
5.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	97,22																																																																				
6.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	93,65																																																																				
7.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	95,42																																																																				
8.	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	94,65																																																																				
9.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	92,33																																																																				
10.	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	93,88																																																																				
11.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	95,29																																																																				
12.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95,22																																																																				
13.	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	92,88																																																																				
14.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	91,72																																																																				
15.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	94,05																																																																				
16.	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	90,37																																																																				

Gambar 89 Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga TA 2020

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

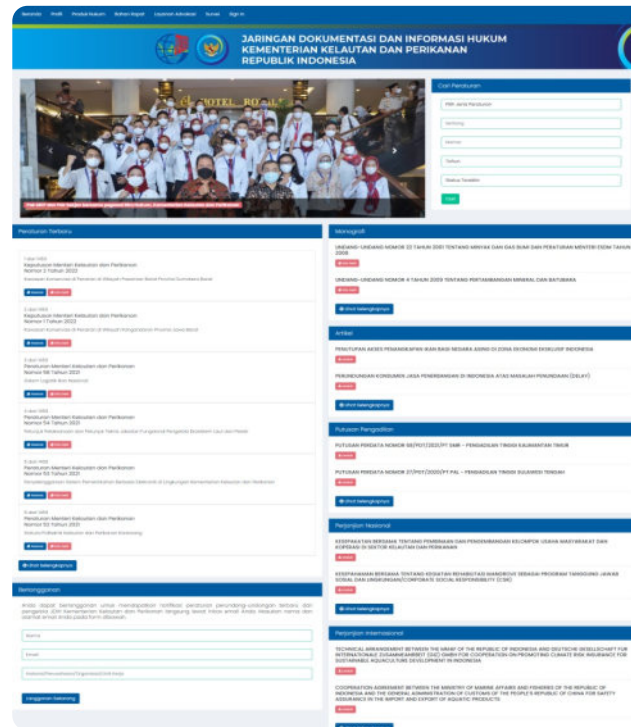
Penilaian atas SPBE Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh KemenPAN dan RB dan hasilnya dapat diakses melalui situs <https://spbe.go.id/moneval>. Penilaian SPBE dihitung berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap kuisioner yang terbagi menjadi domain (Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan), Aspek dan indikator. Untuk tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah 2,75 atau termasuk dalam kategori Baik.

12. Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mendapatkan peringkat 11 untuk jenis kategori Kementerian dari total keseluruhan 33 Kementerian Negara dengan pencapaian nilai 80 yaitu kategori Eka Acalapati (Nilai 76 s.d. 100). Penilaian tersebut berdasar kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah memiliki laman (website) Jaringan Dokumentasi Hukum pada Tahun 2020.

13. Penilaian Nilai Kesesuaian



Gambar 90 Tampilan Dashboard JDIH KKP

Praktik Pengawasan Intern (APIPI Penelaah)

Berdasarkan hasil Telaah Sejawat Ektern Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2021, nilai keseuaian praktik pengawasan intern (APIPI Penelaah) terhadap standar adalah 91,45persen dengan kategori penilaian “Sangat Baik” dengan nilai standar atribut sebesar 90 persen dan standar pelaksanaan sebesar. Beberapa hal yang perlu peningkatan dan atau perbaikan dalam rangka mendorong keseuaian praktik pengawasan intern dengan Standar APIPI antara lain : penerapan kode etik auditor intern di lingkungan KKP serta efisiensi dan efektifitas kegiatan pengawasan intern melalui pengukuran kepuasan pelanggan/*Stakeholders* Inspektorat Jenderal KKP secara berkala untuk perbaikan kinerja organisasi.

14. Herudi Technical Committee Award (HTCA)

Untuk kedua kalinya, Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan endidi meraih HTCA di tahun 2021. Komite Teknis 65-08 meraih peringkat ke-2 setelah peringkat pertama

diraih oleh Komite Teknis 27-08 Energi Surya. HTCA yang diraih merupakan bentuk konsistensi kinerja terbaik yang dilakukan oleh Komite Teknis. KKP mengelola 2 (dua) Komite Teknis yaitu Komtek 65-05 dan Komtek 65-08. Bertugas dalam perumusan dan penyusunan SNI baik produk pangan maupun nonpangan yang berasal dari komoditas kelautan dan perikanan. Sejarah Komtek 65-08 bermula endid dibentuk Subpanitia Teknis 65-05-S3 pada tahun 2011 dibawah Panitia Teknis 65-05 Produk Perikanan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan standar produk perikanan nonpangan yang sejalan dengan perkembangan produk, pasar dan ilmu pengetahuan, maka anggota, kesekretariatan, dan instansi teknis mengusulkan kepada BSN untuk dibentuk panitia teknis tersendiri yang menangani produk perikanan nonpangan. Pada tahun 2014 Panitia Teknis 65-08 Produk Perikanan dibentuk yang kemudian dinamakan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan pada tahun 2018. Selama 2 tahun masa kerja, Komtek 65-08 selalu menjadi Nominee 10 besar dalam ajang HTCA. Baru pada tahun 2020 dan 2021 Komtek 65-08 meraih HTCA untuk pertama kalinya sebagai juara dan runner

up yang mengungguli 156 Komtek yang lain di Indonesia. Competitive advantage Komtek 65-08 salah satunya adalah telah menghasilkan SNI Produk Perikanan Nonpangan sejumlah 60 SNI yang terdiri dari 14 SNI ikan hias, 2 SNI Mutiara, 9 SNI Tanaman hias air, 7 SNI Rumput laut, 3 SNI Krustasea & molusca, 9 SNI Produk bioteknologi dan 16 SNI Pegemasan dan metode uji sampai dengan 2021. Semua standar yang disusun merupakan implementasi dari Renstra KKP. Adanya dukungan dalam kebijakan KKP merupakan suatu bentuk komitmen pimpinan instansi teknis untuk terus

mengembangkan SNI. Selain itu, Komtek 65-08 didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai dan mumpuni. Hampir 85 % diisi oleh sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang endidikan rumpun hayati. Hal ini dinilai memiliki kesesuaian substantif dalam perumusan dan penyusunan SNI. Kinerja Komtek 65-08 dalam PNPS dua tahun terakhir sesuai dengan time line yang ditetapkan oleh BSN. Komtek 65-08 berkomitmen melaksanakan perumusan dan penyusunan SNI sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra yaitu 5 RSNI di tahun 2021.



Gambar 91. Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non-Pangan Menerima Nominee HTCA Tahun 2021



Halaman Kosong



“

Kementerian Kelautan dan
Perikanan menetapkan 3 (tiga)
prioritas pembangunan tahun
2022

”



BAB IV
**RENCANA
TAHUN 2022**

Rencana Tahun 2022

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 tetap melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2021 sebanyak 6 (enam) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan money follow program priority, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antarkementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan real work atau konkret.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan tahun 2022 sebagai terobosan, yaitu:

1. Penangkapan ikan terukur untuk peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan.
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Dalam hal ini dilakukan

revitalisasi tambak-tambak rakyat. Pemerintah hadir membangun infrastruktur pertambakan sehingga produktivitasnya meningkat. Di samping itu akan dibangun kawasan budidaya tambak udang skala besar sebagai percontohan/modelling, yang merupakan kegiatan budidaya terintegrasi, mulai dari pembenihan, pabrik pakan, pembesaran, instalasi pengolahan air limbah, hingga manajemen kawasan terpadu yang ramah lingkungan.

3. Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan

masyarakat, serta menjaga komoditas bernilai ekonomis penting yang terancam punah.

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.



“

Kementerian Kelautan dan
Perikanan menetapkan 3 (tiga)
prioritas pembangunan tahun
2022

”



BAB V

PENUTUP



Penutup

Kesimpulan

Laporan Kinerja KKP Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian IKU. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabaaatas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan tahun kedua atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri KP Nomor 57 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, KKP mempunyai 9 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 sebesar 102,75 atau mengalami penambahan sebesar 0,61 poin apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 yaitu sebesar 102,14. Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya *refocusing* anggaran sebanyak tiga kali diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja utama pada empat indikator kinerja utama yaitu : IKU6. Luas kawasan

konservasi perairan semula 24,6 juta ton menjadi 24,1 juta ton, IKU 10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir target semula 22 menjadi 12 rencana zonasi, IKU 13. Produksi garam, target semula 3,1 juta ton menjadi 1,09 juta ton, IKU 14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* target semula target 60 persen menjadi 54,5 persen

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi Perubahan dalam strategi

yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat beberapa indikator masih belum optimal capaiannya, namun beberapa indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi capaian 17 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut : sebanyak 12 IKU bernetifikasi hijau (dengan capaian $\geq 100\%$), 4 IKU bernetifikasi kuning (dengan capaian $70 < 100\%$) dan 1 IKU bernetifikasi merah (capaian < 70 persen).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, KKP mengelola anggaran sebesar Rp4.773.318.827.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp4.720.494.242.700 atau mencapai 98,89 persen. Realisasi anggaran KKP tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,34 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.809.863.593.815 terhadap pagu anggaran sebesar Rp5.269.869.632.000 atau mencapai 91,27 persen. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 6 (enam) program pembangunan kelautan dan perikanan di 9 Unit Kerja Eselon I, 47 kegiatan dan tersebar di 392 satuan kerja (203 Satker Dekonsentrasi, 150 satker Kantor Daerah/Unit Pelaksana Teknis, 11 satker Kantor Pusat, dan 34 satker Tugas Pembantuan).

Evaluasi Atas Capaian Kinerja dan Upaya Perbaikan Kedepan

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 Akuntabilitas Kinerja terdapat 5 IKU yang belum optimal capaiannya di tahun 2021. Adapun langkah-langkah strategis yang akan dilakukan kedepan untuk dapat mencapai IKU dimaksud antara lain :

IKU 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP antara lain melalui :

- Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama untuk pengolahan-pemasaran perikanan dan masyarakat pengawas serta pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah;
- Menumbuhkan lapangan usaha alternatif guna meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan
- Melakukan upaya peningkatan dan stabilitas harga garam guna meningkatkan kesejahteraan petambak garam;
- Meningkatkan angka konsumsi ikan guna mendorong permintaan produk perikanan dalam

- negeri;
- Mendorong pengendalian impor perikanan guna memenuhi kebutuhan industri perikanan, khususnya pengolahan, serta memperketat impor ikan konsumsi;
- Meningkatkan kinerja ekspor perikanan.
- penguatan kelembagaan pelaku usaha termasuk pembentukan korporasi nelayan dan pembudidaya, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan dan pendampingan dan penyuluhan.
- mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia

IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan

- meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya dan produktifitas sektor kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan.
- penguatan rantai pasok hasil perikanan termasuk rantai dingin serta penguatan jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan.
- pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, pelabuhan perikanan dan fasilitas pemasaran perikanan.

IKU 3. Nilai ekspor hasil perikanan antara lain melalui :

- koordinasi antar kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri), termasuk atase perdagangan dan KBRI di negara tujuan ekspor dan stakeholder serta asosiasi perikanan dalam rangka peningkatan kinerja ekspor produk perikanan.
- monitoring dan inspeksi pada unit pengolahan ikan Indonesia untuk memastikan implementasi protokol kesehatan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan di Unit Pengolahan Ikan telah sesuai guna menghindari

adanya penolakan ekspor produk perikanan.

- pengaturan pergerakan kontainer untuk *m e n g a n t i s i p a s i* permasalahan logistik dan kelangkaan container untuk ekspor produk perikanan.
- penyelesaian pembahasan protokol inspeksi produk perikanan dan mekanisme penambahan nomor registrasi untuk eksportir baru.
- melakukan upaya diplomasi untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika dan Rusia.
- pembinaan produksi pengolahan hasil perikanan dan melakukan promosi ke luar negeri untuk merebut pangsa pasar, melalui :
1) fasilitasi pembinaan mutu unit pengolahan ikan skala UMKM dan skala menengah besar, 2) diversifikasi produk bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk hasil KP skala mikro kecil, 3) pembangunan sentra pengolahan ikan, 4) bantuan sarana pasca panen, 5) bantuan peralatan pengolahan,

6) bantuan chest freezer, 7) pelaksanaan promosi luar negeri, dan 8) Rekomendasi Kebijakan strategi akses pasar negara tujuan ekspor

IKU 4. Konsumsi ikan antara lain melalui :

- *m e n g k a m p a n y e k a n* pentingnya kandungan ikan bagi kesehatan kepada masyarakat secara massif. Di tahun 2022, KKP telah merencanakan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) sebanyak 130 promosi termasuk kepada kelompok target penanganan *stunting*, yaitu ibu hamil atau menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif dan masyarakat rawan gizi lainnya.
- pengadaan peralatan sarana pengolahan, sarana pemasaran, perlengkapan pedagang serta pembangunan sentra kuliner;
- pembinaan diversifikasi produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen;
- menyediakan produk

olahan perikanan yang dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikat kelayakan produk (skp).

- menyediakan produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

IKU 12. Produksi perikanan antara lain melalui

- mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan dari luar daerah yang masuk ke pelabuhan perikanan,
- peningkatan sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat,
- optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan
- fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan, dan pembudidaya ikan
- Pengembangan sistem produksi budidaya melalui Pengembangan input teknologi sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan;

- Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
- Pengawasan terhadap pendataan produksi pasca produksi sebagaimana diamatkan PP 85/2021.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, KKP akan terus melakukan langkah perbaikan di tahun 2022 dan periode selanjutnya dengan melakukan perbaikan diantaranya :

- a. Proses penyusunan anggaran memperhatikan urutan prioritas kebutuhan anggaran operasional yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

- b. Alokasi anggaran juga difokuskan untuk tiga prioritas arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yaitu : Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan, Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut dan Pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi

Selain itu diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor, pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau - pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan perusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,

serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan, penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha KP.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Beberapa upaya perbaikan kedepan, untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai salah satu bentuk akselerasi antara lain :

1. Mempercepat persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun lelang, sehingga pada semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan, tidak menumpuk pelaksanaannya pada akhir tahun.
2. Identifikasi dan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan percepatan pelaksanaannya dan mudah dilaksanakan berdasarkan analisa manajemen resiko antara lain pengadaan alat pengolah data, renovasi/partisi ruangan, pengadaan kendaraan, rapat-rapat, kegiatan koordinasi,

perjalanan dinas dan lain-lain dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas anggaran serta memenuhi kaidah peraturan penggunaan anggaran yang akuntabel, efisien dan efektif yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.

3. membuat *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sehingga pelaksanaannya terjadwal dengan baik dan jika terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan jadwal agar dilakukan percepatan pelaksanaannya serta upaya percepatan;
4. Meningkatkan peran SPIP, dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang berisiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya;
5. Melakukan monev setiap bulannya secara berjenjang dari level satker, Unit Eselon I dan level Kementerian terkait dengan pelaksanaan anggaran baik realisasi anggaran per satker, per belanja, pengadaan barang

dan jasa, kontrak, kegiatan prioritas, Bantuan Pemerintah serta kegiatan lainnya.

Keterbatasan ruang fiskal alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tentu saja mempengaruhi cakupan target masyarakat kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia yang menjadi stakeholder KKP. Untuk itu diperlukan integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/LSM serta stakeholder lainnya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja di tahun 2021 akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh KKP serta dukungan dari stakeholder terkait.



Halaman Kosong



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PENGESAHAN 22 JANUARI 2021)



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 22 Januari 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	60,31
COSTUMER PERSPECTIVE		
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	8,11
	3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,05
	4. Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	58,08
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≥67
	6. Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)	24,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	62
5. Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	8
6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	5
	10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi)	22
	11. Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
7. Industrialisasi KP berdaya saing	12. Produksi perikanan (Juta ton)	27,55
	13. Produksi garam (Juta ton)	3,1
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	60
	15. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
9. Tatakelola pemerintahan yang baik	16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	72
	17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89

No.	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp. 2.423.630.664.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 84.104.450.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 244.126.475.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 365.438.717.000
5.	Riset dan Inovasi IPTEK	Rp. 90.944.375.000
6.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.443.894.712.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021		Rp. 6.652.139.393.000

Jakarta, 22 Januari 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PENGESAHAN 20 APRIL 2021)



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 April 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	60,31
COSTUMER PERSPECTIVE		
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	8,11
	3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,05
	4. Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	58,08
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤67
	6. Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)	24,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	62
5. Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	8
6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	5
	10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi)	22
	11. Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
7. Industrialisasi KP berdaya saing	12. Produksi perikanan (Juta ton)	27,55
	13. Produksi garam (Juta ton)	3,1
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	60
	15. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
9. Tatakelola pemerintahan yang baik	16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	72
	17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89

No.	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp. 2.333.823.263.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 119.360.386.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	Rp. 239.907.711.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 353.606.523.000
5.	Riset dan Inovasi IPTEK	Rp. 85.674.375.000
6.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.405.439.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021		Rp. 6.537.811.697.000

Jakarta, 20 April 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (PENGESAHAN 31 AGUSTUS 2021)



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Agustus 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	60,31
COSTUMER PERSPECTIVE		
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%)	8,11
	3. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,05
	4. Konsumsi ikan (Kg/kap/thn)	58,08
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	5. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤67
	6. Luas kawasan konservasi perairan (Juta Ha)	24,1
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	7. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI (%)	62
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	8. Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	8
6. Tatakelola SDKP bertanggung jawab	9. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP)	5
	10. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (rencana zonasi)	12
	11. Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
7. Industrialisasi KP berdaya saing	12. Produksi perikanan (Juta ton)	27,55
	13. Produksi garam (Juta ton)	1,09
8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	14. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54,5
	15. Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
9. Tatakelola pemerintahan yang baik	16. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP (nilai)	72
	17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (nilai)	89

No.	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp. 1.291.632.111.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	Rp. 68.200.588.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	Rp. 113.108.012.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 253.833.186.000
5.	Riset dan Inovasi IPTEK	Rp. 55.457.646.000
6.	Dukungan Manajemen	Rp. 2.965.230.627.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021		Rp. 4.747.462.170.000

Jakarta, 31 Agustus 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan


Sakti Wahyu Trenggono

MATRIK TARGET KINERJA 2020-2024 BERDASARKAN RENSTRA KKP 2020-2024

MATRIK TARGET KINERJA 2020-2024

SASARAN PROGRAM (<i>Outcome</i>)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
SS 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat					
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) (nilai)	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
SS 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat					
a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	7,9	8,11	8,31	8,51	8,71
b. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8
c. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
SS 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan					
a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤ 64	≤ 67	≤ 72	≤ 76	≤ 80
b. Luas kawasan konservasi perairan (juta hektar)	23,4	24,2	25,1	26	26,9
SS 4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat					
Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan					
Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6 Tatakelola SD kelautan dan perikanan bertanggung jawab					
a. WPPNRI yang menjadi model percontohan pengutan tata kelola	3	5	7	9	11
b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi/RZ)	14	24	26	26	12
					(102 Kumulatif)
c. Persentase Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	94	95	96	97	98

SASARAN PROGRAM (<i>Outcome</i>)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
SS 7 Industrialisasi KP berdaya saing					
a. Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,88	29,42	31,01	32,75
b. Produksi garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8 Pengawasan SD kelautan dan perikanan integratif					
a. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
b. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93	93	93	93	93
SS 9 Tatakelola pemerintahan yang baik					
a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	88	89	89	90	90

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KKP TAHUN 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6/SJ TAHUN 2021

Pengarah	:	Menteri Kelautan dan Perikanan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Jenderal
Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan
Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal2. Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal3. Koordinator Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal4. Koordinator Kerja Sama Antarlembaga, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal5. Koordinator Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal6. Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut7. Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap8. Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya9. Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan10. Koordinator Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

11. Koordinator Program, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
12. Koordinator Program, Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
13. Koordinator Program, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
14. Subkoordinator Harmonisasi Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
15. Subkoordinator Monitoring Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
16. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
17. Subkoordinator Penyerasian Rencana Kerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Subkoordinator Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
18. Subkoordinator Penyajian Data dan Statistik, Pusat Data, Statistik, dan Informasi
19. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
20. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
21. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

22. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
23. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
24. Subkoordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
25. Subkoordinator Pelaporan, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
26. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
27. Helena Yusufik, S.TP., M.E., Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
28. Yusmansyah, S.Pi., M.P., M.Sc., Perencana Ahli Pertama, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
29. Sigit Rachmad Admojarso, S.T., Analis Perencanaan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
30. Ikhsan Zuhry, A.Md., Analis Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Anggota
31. Paramitha Prima Kusumawati, S.Pi., Analis Kinerja, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Ratna Ayu Rahardini, S.Pi., Analis Perencanaan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
32. Achmat Marsito, A.Md., Pengadministrasi Persuratan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

33. Mohamad Armansyah, S.T., M.A.P., Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal
34. Ida Widaningsih, S.H., Analis Kebijakan Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Anggota
35. Mushlihatun Nur, S.E., M.Si., Analis Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
36. Samsu Muarip, S.Pi., Perencana Pertama, Sekretariat Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
37. Fransiska Maharani Suryaningrum, S.St. Pi., M.Si., Perencana Muda, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
38. Ahmad Nasrullah, S.St.Pi., Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



Halaman Kosong



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan